Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah

2025 - 2029

Pemerintah Daerah Kab. Buol

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol ini dapat diselesaikan. Penyusunan KLHS ini merupakan wujud komitmen kita bersama untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, selaras dengan tujuan nasional dan global. Sejak Indonesia meratifikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2015, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, termasuk dalam penyusunan RPJMD, yang didalamnya harus di kawal dengan dokumen KLHS RPJMD.

KLHS RPJMD ini disusun dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, dokumen ini menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan strategis yang berwawasan lingkungan dan memastikan pembangunan daerah Kabupaten Buol yang tetap berpihak pada kelestarian sumber daya alam, sesuai dengan amanat SDGs yang ingin kita capai.

Dalam proses penyusunan KLHS ini, kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi, filantropi, pemerhati lingkungan untuk bersama-sama memberikan masukan yang konstruktif. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini sangat penting karena keberhasilan pembangunan berkelanjutan memerlukan kerja sama lintas sektor. Dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi, kami berharap KLHS RPJMD dapat berfungsi sebagai panduan praktis bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kami berharap KLHS RPJMD ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih berdaya saing, ramah lingkungan, dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat. Semoga dokumen ini menjadi langkah maju dalam memperkuat komitmen kita untuk mencapai tujuan SDGs, serta memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan KLHS ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah yang harmonis, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dan kiranya semua sumbangan pemikiran dari berbagai pihak akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT..Aamiin.

Buol, 12 September 2024
Kepala Bappeda-Litbang
Kabupaten Buol,

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BAPPEDA-LITBANG

WAHYU SETYABUDHI, SH, MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii
DAFTAR ISI.....iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR viiviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan KLHS 7
1.4 Ruang Lingkup 7
1.5 Sistematika Pembuatan KLHS-RPJMD..... 8
BAB II DASAR TEORI 12
2.1 Pembentukan Kabupaten Buol 12
2.2 Teori Perkembangan Aktivitas dan Fungsi Daerah..... 22
2.3 Sejarah Arah Kebijakan Daerah 40
2.4 Kuadran keberlanjutan Pembangunan Kabupaten Buol. 47
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH 51
3.1 Aspek Geografis dan Demografis 51
3.2 Ekoregion..... 59
3.3 Baseline Enam Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 72
3.4 Gambaran Keuangan Daerah Dalam Indikator Pencapaian TPB Kabupaten Buol 111
3.5 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB di Kabupaten Buol 136
BAB IV ANALISIS PENCAPAIAN TPB DI KABUPATEN BUOL.....141
4.1 Analisis Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 141
4.2 Indikator Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional.....144

4.3 Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional 154
4.4. Indikator Yang Tidak Sesuai Dengan Karakteristik Daerah 166
4.5 Indikator Yang Tidak Memiliki Data 169
4.6 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Buol 175
BAB V ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUOL 184
5.1 Analisis Capaian Indikator pada OPD Berdasarkan Proporsi Anggaran 184
5.2 Analisis Proyeksi Capaian Indikator TPB 228
5.3 Analisis Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung 232
BAB VI ALTERNATIF PROYEKSI DAN REKOMENDASI KLHS RPJMD 239
6.1 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung Daya Tampung Daerah 239
6.2 Alternatif Skenario dan Rekomendasi dengan Upaya Tambahan Indikator yang belum mencapai Target Nasional 242
BAB VII PENUTUP 282
7.1 Isu strategis 282
7.2 Analisis Capaian Indikator TPB 283
7.3 Rekomendasi dengan atau tanpa Upaya tambahan. 283
DAFTAR PUSTAKA 289

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sistematika Pembuatan Laporan KLHS-RPJMD 8

Tabel 2.1 Proprsi PDRB Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku 2019-2023 14

Tabel 2.2 Pertumbuhan sectoral PDRB Kabupaten Buol Tahun 2019-2023 16

Tabel 2.3 Jumlah angkatan kerja dan penagguran di Kabupaten Buol Tahun 2023 18

Tabel 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Tengah. 19

Tabel 2.5 Capaian IPM per kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2023 21

Tabel 2.6 Komponen IPM se Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 48

Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Kesejahteraan Sosial 48

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Lingkungan 48

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol, Tahun 2024 51

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan 56

Tabel 3.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan 58

Tabel 3.4 Klasifikasi dan Luas Bentang Alam Kabupaten Buol 62

Tabel 3.5 Definisi Operasional Bentanglahan Kabupaten Buol 63

Tabel 3.6 Definisi Operasional Vegetasi Alami Kabupaten Buol 68

Tabel 3.7 Debit Air (Q80) Sungai di Kabupaten Buol 76

Tabel 3.8 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol 82

Tabel 3.9 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol 85

Tabel 3.10 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol 90

Tabel 3.11 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol 93

Tabel 3.12 Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol 97

Tabel 3.13 Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol 100

Tabel 3.14 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Serat Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol 103

Tabel 3.15 Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragamanhayati berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol 109

Tabel 3.16 Peran OPD Kabupaten Buol dalam Pencapaian Target TPB, Tahun 2024.....137

Tabel 4.1 Pencapaian TPB di Kabupaten Buol 142

Tabel 4.2 Rincian Indikator Yang Telah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional 145

Tabel 4.3 Rincian Indikator Yang Telah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional 155

Tabel 4.4 Rincian Indikator Yang Tidak Sesuai Dengan Karakteristik Daerah 167

Tabel 4.5 Rincian Indikator Yang Tidak Mmeiliki Data 171

Tabel 4.6 Daftar isu Lingkungan Hidup KLHS RPJMD 177

Tabel 4.7 Strategis TPB Berbasis Indikator-Indikator Yang Belum Mencapai Target Nasional 178

Tabel 4.8 Isu Berbasis Kerangka Kebijakan 181

Tabel 5.1 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol 185

Tabel 5.2 Detail Capaian TPB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 188

Tabel 5.3 Detail Capaian TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah 189

Tabel 5.4 Detail Capaian TPB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.....191

Tabel 5.5 Detail Capaian TPB Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-LITBANG.....193

Tabel 5.6 Detail Capaian TPB Badan Pusat Statistik 194

Tabel 5.7 Detail Capaian TPB Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 196

Tabel 5.8 Detail Capaian TPB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..198

Tabel 5.9 Detail Capaian TPB Dinas Kesehatan.....199

Tabel 5.10 Detail Capaian TPB Dinas Ketahanan Pangan.....202

Tabel 5.11 Detail Capaian TPB Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.....204

Tabel 5.12 Detail Capaian TPB Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.....206

Tabel 5.13 Detail Capaian TPB Dinas Lingkungan Hidup.....207
Tabel 5.14 Detail Capaian TPB Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....210
Tabel 5.15 Detail Capaian TPB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 212
Tabel 5.16 Detail Capaian TPB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 213
Tabel 5.17 Detail Capaian TPB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....216
Tabel 5.18 Detail Capaian TPB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....217
Tabel 5.19 Detail Capaian TPB Dinas Perhubungan.....219
Tabel 5.20 Detail Capaian TPB Dinas Sosial.....220
Tabel 5.21 Detail Capaian TPB Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 223
Tabel 5.22 Detail Capaian TPB Polres.....226
Tabel 5.23 Detail Capaian TPB Sekretaris Daerah 227

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Hierarki Kota Losch 25
Gambar 2.2 Kurva *Production Possibility Frontier*..... 35
Gambar 2.3 Kurva Teori Pembangunan Rostow..... 37
Gambar 3. 1 Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Buol..... 52
Gambar 3.2 Peta Administrasi 53
Gambar 3.3 Peta Topografi 54
Gambar 3.4 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk 57
Gambar 3.5 Sex Ratio Jumlah Penduduk Kabupaten Buol..... 58
Gambar 3.6 Peta Ekoregion Kabupaten Buol 60
Gambar 3.7 Peta Bentang Alam Kabupaten Buol 62
Gambar 3.8 Bentang Alam Kabupaten Buol 63
Gambar 3.9 Peta Tipe Vegetasi Alami Kabupaten Buol 67
Gambar 3.10 Klasifikasi Tipe Vegetasi Alami Kabupaten Buol 67
Gambar 3.11 Peta Penutupan Lahan Kabupaten Buol 71
Gambar 3.12 Klasifikasi Penutupan Lahan Kabupaten Buol..... 71
Gambar 3.13 Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Buol 73
Gambar 3.14 Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Buol 74
Gambar 3.15 Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol..... 74
Gambar 3.16 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Buol 75
Gambar 3.17 Peta Ketersediaan Air Kabupaten Buol 76
Gambar 3.18 Peta Kebutuhan Air Kabupaten Buol 77
Gambar 3.19 Peta Status Air Kabupaten Buol 78
Gambar 3.20 Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Kabupaten Buol..... 79
Gambar 3.21 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Buol..... 80
Gambar 3.22 Jasa Lingkungan Udara berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol..... 80
Gambar 3.23 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Kabupaten Buol..... 81
Gambar 3.24 Indeks Kulaitas Air Kabupaten Buol 83

Gambar 3.25 Jasa Lingkungan Pengaturan Permurnian Air berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol 84

Gambar 3.26 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Buol. 85

Gambar 3.27 Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Berdasarkan Tutupan Lahan di Kabupaten Buol 86

Gambar 3.28 Sampah yang Tertangani dan Sampah yang tidak Tertangani 88

Gambar 3.29 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Buol..... 89

Gambar 3.30 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol..... 90

Gambar 3.31 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Buol .. 92

Gambar 3.32 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol..... 93

Gambar 3.33 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Buol..... 96

Gambar 3.34 Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Buol ... 97

Gambar 3.35 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Kabupaten Buol 100

Gambar 3.36 Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Kabupaten Buol 101

Gambar 3.37 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Serat Kabupaten Buol.....102

Gambar 3.38 Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Serat Kabupaten Buol .104

Gambar 3.39 Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Buol 105

Gambar 3.40 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Buol.....107

Gambar 3.41 Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragamana Hayati.....108

Gambar 3.42 Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat & Kehati Kabupaten Buol.....109

Gambar 3.43 Trend perkembangan pendapatan Kabupaten Buol 5 tahun terakhir.....116

Gambar 3.44 Sumber PAD Kabupaten Buol, 2024.....117

Gambar 3.45 Realisasi Belanja Operasional Kab Buol 123

Gambar 3.46 Realisasi Belanja Modal Kab Buol.....124

Gambar 3.47 Realisasi Belanja Modal Kab Buol.....124

Gambar 3.48 Realisasi Belanja Transfer Kab Buol 125

Gambar 3.49 OPD dengan Persentase Anggaran Terbesar di Kabupaten Buol Tahun 2023 127

Gambar 3.50 Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Tahun 2023 127

Gambar 3.51 Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023..131

Gambar 3.52 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2023.....132

Gambar 3.53 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 133

Gambar 3.54 Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2019-2023 133

Gambar 3.55 Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran, 2019-2023.....134

Gambar 3.56 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023 135

Gambar 3.57 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buol, 2019-2023.....136

Gambar 4.1 Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Buol.....142

Gambar 4.2 Persentase Capaian Pilar TPB di Kabupaten Buol 143

Gambar 4.3 Indikator Yang Telah Mencapai Target Nasional 144

Gambar 4.4 Indikator Yang Belum Mencapai Target Nasional 154

Gambar 4.5 Indikator Yang Tidak Sesuai Dengan Karakteristik Daerah 166

Gambar 4.6 Indikator Yang Tidak Tidak Memiliki Data 170

Gambar 4.7 Pendekatan CDF Dalam Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis 176

Gambar 5.1 Persentase Capaian TPB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 187

Gambar 5.2 Persentase Capaian TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah 189

Gambar 5.3 Persentase Capaian TPB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.....191

Gambar 5.4 Persentase Capaian TPB Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-LITBANG 193

Gambar 5.5 Persentase Capaian TPB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 197
Gambar 5.6 Persentase Capaian TPB Dinas Kesehatan 199
Gambar 5.7 Persentase Capaian TPB Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 204
Gambar 5.8 Persentase Capaian TPB Dinas Lingkungan Hidup 207
Gambar 5.9 Persentase Capaian TPB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 209
Gambar 5.10 Persentase Capaian TPB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 212
Gambar 5.11 Persentase Capaian TPB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 213
Gambar 5.12 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 217
Gambar 5.13 Persentase Capaian TPB Dinas Sosial 220
Gambar 5.14 Persentase Capaian TPB Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 223
Gambar 5.15 Persentase Capaian TPB Polres 225
Gambar 5.16 Persentase Capaian TPB Sekretaris Daerah 227
Gambar 5.17 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan 232
Gambar 5.18 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air 233
Gambar 5.19 Tren Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Buol ... 234
Gambar 5.20 Tren Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Buol 235
Gambar 5.21 Tren Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 237
Gambar 5.22 Tren Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 238

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa Pemerintah baik pusat dan Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 dam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 telah mengatur pedoman penyelenggaraan KLHS secara umum, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 memberikan Pedoman Pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota; serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Penyelenggaraan KLHS RPJMD dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 merupakan pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang juga dikenal dengan istilah *Sustainable Developmen Goals* (SDGs). Pada tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), KLHS menjadi "pemandu" RPJMD, bersamaan dengan Rancangan Teknokratik. Dalam urutan penyelenggaraannya, sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2018, KLHS RPJMD harus dibuat sebelum atau bersamaan dengan penyusunan Rancangan Teknokratik. Pada level ini, KLHS mendampingi RPJMD untuk menemukan isu strategis dan isu prioritas dengan pendekatan analisis kesenjangan (*gap*) antara kondisi capaian TPB di Kabupaten Buol dan target yang ingin dicapai sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB. Pada tingkatan selanjutnya, KLHS RPJMD memberikan informasi mendasar tentang: (i) kondisi terkini suatu daerah melalui profil wilayah, (ii) menganalisis parameter lingkungan, seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, jasa ekosistem, dan aspek kebencanaan, (iii) menganalisis capaian TPB daerah, (iv) menganalisis capaian TPB yang belum dan telah diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah, (v) menyusun alternatif skenario dan menetapkan rekomendasi, serta memberi arahan upaya tambahan yang perlu dilakukan bila rencana pembangunan telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada suatu lokasi rencana pembangunan.

Pasca pemilihan Kepada Daerah serentak di Indonesia, Kabupaten Buol adalah salah satu daerah yang berkewajiban memperbaharui RPJMD sebagai rencana dasar dalam penyelenggaraan pembangunan melalui visi-misi yang diusung oleh kepala daerah terpilih, yakni ***"BUOL DAERAH AGROPOLITAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"*** Dalam perspektif ini, RPJMD wajib mengintegrasikan indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum mencapai target nasional. Selain itu. Pemerintah Kabupaten Buol

melalui KLHS RPJMD dapat menginisiasi perubahan kebijakan jangka menengahnya.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang mengamanahkan pengintegrasian KLHS dalam penyusunan RPJMD telah diatur melalui hierarki peraturan perundangan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil yang diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
12. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2019 Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Tentang : Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
27. Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/ 11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11.2/8754/Bangda 7 Agustus 2023 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

1.3 Maksud dan Tujuan KLHS

1.3.1. Maksud

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029 adalah upaya untuk memastikan pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD Kabupaten Buol.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan KLHS ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif berdasarkan capain TPB dan Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Buol sesuai dengan kondisi dan data terkini. Pelaksanaan KLHS ini untuk menyusun rekomendasi dalam bentuk arahan kebijakan dan program yang mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rekomendasi selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2025-2029.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup KLHS RPJMD merupakan cakupan analisis yang dilakukan dalam pembuatan laporan KLHS-RPJMD yaitu:

1. Kondisi Umum daerah, memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah.

2. Capaian Indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian TPB di Kabupaten Buol ketika KLHS diselenggarakan.
3. Arahan skenario pembangunan yang mengacu pada upaya pencapaian TPB dan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Buol.

1.5 Sistematika Pembuatan KLHS-RPJMD

Sistematika pembuatan laporan KLHS-RPJMD merupakan tata urutan/ mekanisme dalam pembuatan KLHS-RPJMD terdiri atas:

Tabel 1.1 Sistematika Pembuatan Laporan KLHS-RPJMD

BAB 1	Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai : 1. Latar Belakang : Memuat mengapa perlunya RPJMD disusun Sebagaimnana arahan berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 2. Surat Edaran menteri Dagri Tahun 2022 dan Tahun 2023 tentang Pembuatan Pembuatan Pelaksanaan KLHS RPJPD dan RPJMD, serta Surat Edaran Menteri LHK No. 54 Tahun 2024 tentang Percepatan Pelaksanaan KLHS RPJPD dan RPJMD 3. Gambaran umum pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 4. Penjelasan perlunya disusun KLHS RPJPD/RPJMD Dasar Hukum : 1. Undang-Undang KLHS: UU No. 32 Tahun 2009 RPJPD/RPJMD: UU No. 32 Tahun 2014 : Pemd 2. Peraturan Pemerintah KLHS: PP No. 46 Tahun 2016 3. Peraturan Presiden Perpres No. 59 Tahun 2017 4. Peraturan Menteri -KLHS: Permen LHK No. P. 69 Tahun 2017 -RPJPD/RPJMD: Permen Dagri No. 7 Tahun 2018 5. Keputusan Menteri Data-Data 6 Muatan KLHS: -Kepmen LHK No. SK. 1272 Tahun 2019; -Kepmen LHK No. 46 Tahun 2023; 6. Surat Edaran -KLHS: Surat Menteri LHK S.54/MENLHK/PKTL/PLA.1.1/B/3/2024 -RPJPD/RPJMD: Surat Mendagri Tahun 2022 dan Tahun 2023 tentang 660/5112/Bangda dan 660/5113/Bangda 7. Dll

	Maksud dan Tujuan : Maksud dan tujuan disusun berdasarkan Juknis Permendagri 7/2018 Maksud : Melakukan analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program Tujuan **:** 1. Tersusunnya arah kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan (RPJPD) 2. Tersusunnya visi dan misi daerah sesuai dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan (RPJPD) 3. Tersusunnya sasaran pokok (RPJPD) dan sasaran strategis (RPJMD) 4. Tersusunya program Pembangunan berdasarkan indicator TPB (RPJMD) Ruang Lingkup : Kondisi Umum Daerah : Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah Capaian Indikator TPB : Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Pembagian Peran : Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.
BAB 2	Pada bab ini dijelaskan mengenai teori yang digunakan pada laporan KLHS-RPJMD. Dasar Teori memuat : 1. Sejarah terbentuknya Provinsi / Kabupaten / Kota 2. Teori Perkembangan Aktivitas dan Fungsi Daerah 3. Sejarah Arah Terkait Daerah 4. Penjelasan terkait Kuadran Keberlanjutan dengan menggunakan Data dan informasi IKLH dan Sosial Ekonomi (IPM, dll)
BAB 3	Menjelaskan kondisi geografis; daya dukung dan daya tampung (berdasarkan 6 Kajian Muatan KLHS); kondisi keuangan daerah; dan peran pemangku kepentingan dalam mencapai TPB. Kondisi Umum Daerah : 1. Kondisi Geografis 2. Kondisi DDDT 3. Kondisi Umum Keuangan Daerah 4. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB

	Kondisi Umum Berdasarkan 6 Muatan KLHS 1. D3TLH 2. Jasa Ekosistem 3. Resiko Dampak 4. Efisiensi Pemnafaatan SDA 5. Perubahan Iklim 6. Biodiversity
BAB 4	Menjelaskan penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB di daerah yang dikategorikan dalam 4 (empat) kategori dan isu strategis PB A. Analisis Capaian TPB : 1. Indikator TPB Yang Sudah Tercapai (SS) 2. Analisis Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Tercapai (SB) 3. Indikator TPB yang Tidak Ada Data (NA) 4. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Tercapai (BB) B. Metode Pelaksanaan Analisis Capaian TPB : Semua indikator dalam PerPres No 59/2017 dan Indikator yang berkaitan dengan RPJMD sesuai Permendagri No 86/2017, dilakukan Analisis Capaian TPB, yang melalui Kesepakatan dilakukan KLHS C. Keterkaitan Isu (5+1) Focal Area, TPB, dan 6 Muatan KLHS D. Penentuan Isu Strategis PB
BAB 5	Analisis Capaian TPB pada OPD A. Melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu dengan cara : 1. Analisis Capaian Indikator pada OPD berdasarkan proporsi anggaran 2. Analisis Proyeksi Capaian Indikator TPB 3. Analisis Capaian Indikator keterlibatan peran para pihak (filantropi) dalam mencapai target TPB
BAB 6	Pada bab ini dijelaskan mengenai alternatif skenario dan rekomendasi daerah dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari daya dukung dan daya tampung serta ketercapaian terhadap TPB. Pada bab ini terdiri dari: 1. Alternatif skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung daerah; 2. Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yaitu untuk indikator yang belum mencapai target serta indikator yang belum memiliki data; 3. Alternatif skenario tanpa upaya tambahan yaitu untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

BAB 7	Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari laporan KLHS-RPJMD dengan mengidentifikasi pada hasil analisis daya dukung dan daya tampung daerah, analisis capaian daerah terhadap indikator TPB, analisis capaian OPD terhadap indikator TPB serta simpulan rekomendasi bagi daerah.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pembentukan Kabupaten Buol

Kabupaten Buol merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran. Pemekaran daerah merupakan upaya pembentukan wilayah administratif baru dengan memisahkan atau menggabungkan wilayah-wilayah tertentu. Secara konsep, terdapat beberapa alasn pemekaran antara lain :

- Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan: Pemekaran dianggap bisa memperbaiki efektivitas dan efisiensi administrasi serta pemerintahan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Fokus untuk memperbaiki kualitas dan akses pelayanan kepada masyarakat, yang mungkin tidak optimal dalam wilayah yang lebih luas dan padat.
- Pemerataan Pembangunan dan Ekonomi: Mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan meningkatkan perekonomian lokal.
- Pertimbangan Geografis dan Demografis: Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi geografis yang dianggap lebih efektif dipecah untuk mempermudah pengelolaan.
- Potensi Daerah: Mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan manusia di daerah yang dianggap bisa lebih optimal jika wilayah tersebut berdiri sendiri.
- Kondisi Sosial Budaya: Pertimbangan terkait homogenitas sosial, budaya, dan kearifan lokal yang mendorong kebutuhan untuk pemekaran agar lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Selain beberapa aspek diatas, maka secara yuridis, pembentukan daerah otonomi baru didasarkan pada:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah diubah beberapa kali, terbaru dengan UU Nomor 9 Tahun 2015): Mengatur syarat-syarat, prosedur, dan mekanisme pemekaran daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah: Mengatur lebih rinci mengenai prosedur teknis pemekaran, termasuk kriteria administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan.

Upaya pemekaran Kabupaten Buol merupakan sebuah Upaya mewujudkan aspirasi masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang memadai dan percepatan pembangunan. Terlebih jika didasarkan pada realitas, Kabupaten Buol secara geografis sangat luas, sehingga pemerataan pembangunan dan layanan dasar harus ditingkatkan. Ketersedian sumber daya, terutama sumber daya alam juga menjadi alasan logis perlunya percepatan pengelolaan melalui desentralisasi pengambilan keputusan strategis dan cepat melalui pemekaran daerah.

Berangkat dari bebagai perspektif tersebut, maka akhirnya Kabupaten Buol menjadi daerah otonomi baru. Sebagai proses panjang pemekaran Kabupaten Buol termaktub dalam **UU No. 51 Tahun 1999** tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Sejak saat itulah Kabupaten Buol mandiri dan terpisah dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Buol Tolitoli.

2.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan daerah umumnya dilihat dari pertumbuhan produk *Domestic Regional Bruto* (PDRB). Pertumbuhan PDRB menggambarkan nilai tambah sektoral yang ada di Kabupaten Buol. Peningkatan nilai tambah dapat dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan dengan tahun dasar tertentu. Penentuan PDRB harga konstan dimaksudkan untuk melihat

perkembangan produksi tanpa dipengaruhi oleh harga yang berlaku. Artinya produksi riil akan dilihat dengan perhitungan PDRB harga konstan.

Sementara perhitungan PDRB harga berlaku didasarkan pada realitas harga komoditas yang berlaku saat tahun dilakukannya perhitungan. Dengan demikian konsep ini mengadopsi dua perubahan sekaligus yakni perubahan kapasitas produksi dan harga produksi. Untuk melihat bagaimana peran tiap sektor PDRB, maka dapat dilihat proporsi tiap sektor. Berikut dikemukakan proporsi sektoral PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Buol tahun 2019-2023 :

Tabel 2.1 Proprsi PDRB Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku 2019-2023

Lapangan Usaha/ *Industry*		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry, and Fishing*	45,37	46,23	47,55	48,24	48,15
B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*	2,09	1,82	1,77	1,76	1,86
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	13,01	13,35	13	13,21	12,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ *Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,2	0,2	0,19	0,18	0,18
F	Konstruksi/ *Construction*	10,69	9,94	9,7	9,33	9,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	6,43	6,21	6,1	6,36	6,49
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	3,49	2,59	2,49	2,65	2,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	0,62	0,57	0,57	0,55	0,57
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	1,4	1,52	1,51	1,43	1,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	1,03	1,2	1,27	1,25	1,2
L	Real Estat/ *Real Estate Activities*	2,93	3,02	2,86	2,8	2,97
M,N	Jasa Perusahaan/ *Business Activities*	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Lapangan Usaha/ *Industry*		2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	5,11	5,4	5,19	4,85	4,81
P	Jasa Pendidikan/ *Education*	3,6	3,61	3,43	3,19	3,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	2,24	2,45	2,54	2,44	2,5
R,S,T ,U	Jasa Lainnya/ *Other Services Activities*	1,77	1,79	1,71	1,64	1,66
	Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product*	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Kabupaten Buol dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa sektor yang memberikan sumbangsih besar dalam perekonomian Kabupaten Buol adalah pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, administrasi kepemerintahan dan jasa Pendidikan.

Tabel diatas memberikan informasi bahwa perekonomian Kabupaten Buol didominasi oleh sektor pertanian dengan porsi yang makin besar. Porsi yang makin besar ini menggambarkan masih rendahnya tranformasi ekonomi modern, yang dicirikan oleh sektor pertanian yang makin kecil porsinya dan meningkatnya porsi industri pengolahannya. Di sisi lain, proporsi sektor pengolahan telah mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir.

Hal ini merupakan tantangan dalam pengelolaan sektor ekonomi di Kabupaten Buol dalam jangka panjang, sebab tanpa intervensi yang memadai, maka nilai tambah berbagai komoditas yang ada di Kabupaten Buol kurang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat banyak.

Selain mencermati porsi sektoral, adalah menarik untuk melihat pertumbuhan PDRB secara sektoral sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pertumbuhan sectoral PDRB Kabupaten Buol Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/*Industry*		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	0,34	-1,07	6,30	3,73	2,48
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	13,59	-15,47	3,97	2,00	8,28
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	-0,34	-0,24	1,88	3,93	3,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	7,65	3,36	2,97	4,11	6,92
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	-0,56	-1,90	1,64	1,97	2,40
F	Konstruksi/*Construction*	9,03	-12,15	4,67	3,72	4,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	3,15	-8,16	4,63	8,31	5,63
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	4,87	-30,03	3,51	7,81	4,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	4,66	-11,00	8,72	4,60	8,41
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	9,85	8,47	6,13	3,63	6,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	2,08	14,62	8,95	-1,21	1,01
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	0,21	0,76	2,32	4,91	5,81
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	11,51	-2,78	2,00	4,19	5,60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	5,37	2,66	2,26	-1,74	4,25
P	Jasa Pendidikan/*Education*	3,62	-0,54	2,52	-0,40	4,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	8,83	5,70	6,86	2,00	5,82
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	2,17	-0,26	2,00	4,00	5,89
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**2,14**	**-2,89**	**4,88**	**3,66**	**3,59**

Sumber : Kabupaten Buol dalam Angka, 2023

Tabel diatas menunjukkan pertumbuhan PDRB Sektoral dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021 secara umum pertumbuhan sektoral mengalami kontraksi akibat adanya wabah covid sehingga aktivitas ekonomi dan sosial mengalami kendala. Namun demikian trend peningkatan mulai terjadi di tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan peningkatan yang positif. Sektor yang tumbuh paling besar di tahun 2023 adalah sektor akomodasi dan makan minum yang kemudian diikuti oleh pertambangan dan real estate.

2.1.2 Tingkat Pengangguran

Pembangunan dalam jangka panjang dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi. Dalam jangka panjang pemerintah harus menciptakan keseimbangan antara *supply* tenaga kerja dan *demand* tenaga kerja sehingga tidak meningkatkan pengangguran terbuka. Kebijakan ketenagakerjaan dan investasi akan selalu sejalan karena keduanya akan menciptakan keseimbangan antara ketenagakerjaan dan kependudukan.

Tenaga kerja akan menjadi input dan motor penggerak pada semua sektor ekonomi. Ketersediaan tenega kerja yang banyak merupakan sebuah kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya ketersediaan tenaga kerja yang tidak dibarengi dengan serapan tenaga kerja akan menjadi bumerang bagi daerah, karena akan meningkatkan pengangguran terbuka. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus berimbang antara *supply* dan *demand* tenaga kerja. Berikut dikemukakan kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Buol :

Tabel 2.3 Jumlah angkatan kerja dan penagguran di Kabupaten Buol Tahun 2023

Kegiatan Seminggu Lalu *Activity During The Previous Week*	Jenis Kelamin (*Sex*)		
	Laki-Laki (*Male*)	Perempuan (*Female*)	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja /*Economic Activity*	46.763	26.889	73.652
Bekerja / *Working*	45.733	25.609	71.342
Pengangguran Terbuka/*Unemployment*	1.030	1.280	2.310
Bukan Angkatan Kerja/*Not Economically Acctive*	7.852	24.573	32.425
Sekolah / *Attending School*	3.517	3.910	7.427
Mengurus Rumah Tangga/*Housekeeping*	1.568	18.686	20.254
Lainnya / *Others*	2.767	1.977	4.744
Jumlah / *Total*	54.615	51.462	106.077
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *Economically ActciveParticipation Rate*	85,62	52,25	69,43
Tingkat Pengangguran *Unemployment Rate*	2,20	4,76	3,14

Sumber : Kabupaten Buol dalam Angka, 2023

Dari data di atas terlihat bahwa umumnya, tingkat angkatan kerja yang terserap di dunia kerja masuk dalam kategori tinggi. Hal ini tercermin dari penangguran terbuka yang hanya mencapai 3,14 % pada tahun 2023.

2.1.3 Tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta keterbatasan akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai perspektif:

1. **Kemiskinan Absolut**: Didefinisikan sebagai kondisi di mana pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan tertentu yang telah ditetapkan secara internasional, seperti $1.90 per hari menurut standar Bank Dunia. Ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan nilai pendapatan seperti ini maka

keluarga yang bersangkutan tidak mampu kebutuhan pokok, terutama kebutuhan kalori yang diperlukan secara layak.

2. **Kemiskinan Relatif**: Didefinisikan relatif terhadap standar hidup masyarakat di sekitarnya. Seseorang dianggap miskin jika pendapatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Dalam konteks ini bisa saja seseorang dianggap miskin, tetapi masih mampu memenuhi kebutuhan sehari hari.

Upaya penurunan angka kemiskinan telah menjadi perhatian pemerintah dari waktu ke waktu, namun tingkat penurunannya relatif rendah. Berbagai kendala muncul diberbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda baik secara struktural maupun kultural.

Proses pembangunan merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, maka kesejahteraan dari aspek ekonomi, sosial dan kesehatan menjadi prioritas. Namun demikian dalam banyak fakta, tingkat kesejahteraan yang diidamkan belum tercapai yang terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Bahkan di beberapa tempat masih ditemukan kemiskinan ekstrem yang memerlukan tindakan *extraordinary*.

Kemiskinan ekstrim juga masih ditemukan di Kabupaten Buol, yang menyebar di berbagai daerah yang memerlukan penanganan yang berbeda. Hal ini penting untuk dilakukan pemetaan guna menentukan faktor utama penyebab kemiskianan, sehingga *treatment* yang dilakukan akan secara tepat mengurangi angka kemiskinan daerah. Angka kemiskinan se Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Tengah.

Kab/kota	2021	Peringkat	2022	Peringkat	2023	Peringkat
Sulawesi Tengah	13		12,33		12,41	
Banggai Kepulauan	13,72	9	13,44	5	12,9	7
Banggai	7,83	12	7,33	12	6,94	12
Morowali	13,75	8	12,58	10	12,31	11
Poso	15,92	3	15,18	3	15,16	3

Donggala	16,73	1	16,3	1	16,25	2
Tolitoli	13,51	10	12,74	9	12,85	8
Buol	14,06	6	12,85	8	13,36	6
Parigi Moutong	15,28	4	14,63	4	14,91	4
Tojo Una-una	16,6	2	16,12	2	16,74	1
Sigi	13,05	11	12,3	11	12,83	10
Banggai Laut	14,17	5	13,17	6	14,15	5
Morowali Utara	13,9	7	12,97	7	12,85	8
Kota Palu	7,17	13	6,63	13	6,56	13

Sumber : Kabupaten Buol dalam Angka, 2023 (data setelah dianalisis)

Dari data di atas nampak bahwa kemiskinan di Kabupaten Buol masih tinggi dalam 3 tahun terakhir. Tingkat kemiskinan Kabupaten Buol dalam 3 tahun terakhir juga masih lebih tinggi dari rata rata kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian punya tingkat capaian relatifnya yang tidak bergerak membaik. Artinya bahwa program pengentasan kemisikinan di Kabupaten Buol telah memberikan hasil positif, namun percepatannya lebih rendah dari kabupten lainnya.

Tahun 2022, capaian penurunan angka kemiskinan relatif berhasil yang awalnya berada pada peringkat 6 di tahun 2021, membaik menjadi peringkat 8 dari 13 kabupaten/kota. Namun demikian pencapaian ini secara relatif memburuk lagi di tahun 2023, karena peringkat angka kemiskinannya meningkat ke peringkat 6 dari 13 kabupaten/kota.

Jika dicermati lebih mendalam, penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan jangka panjang pemerintah Kabupaten Buol. Hal ini mengingat kemampuan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dalam 3 tahun secara rata rata hanya sebesar 0,35 persen per tahun dari total penduduk miskin. Sementara target pemerintah sebagaimana upaya pencapaian SGDs adalah berkisar di 7-7 persen di tahun 2030.

Realitas ini adalah ironi ditengah tingginya potensi ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Buol yang mana daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti sektor kelautan, perkebunan, dan lainnya. Oleh karenanya kerja kolaboratif

antar stakeholder sangat diperlukan untuk mengidentifikasi sebab-sebab kemiskinan dan upaya penanganannya secara komprehensif. Potensi pengentasan kemiskinan dapat dielaborasi melalui berbagai unsur baik lembaga pemerintah, pemerhati social, dunia usaha, akademisi dan potensi kerjasama internasional.

2.1.4 Capaian IPM

Proses pembangunan diarahkan untuk mencapai derajat kesejahteraan secara luas yang biasanya diukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Capaian IPM yang lebih tinggi menggambarkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. IPM dibentuk dari hasil pembangunan aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan terutama usia harapan hidup. IPM juga merupakan salah satu indikator pembangunan daerah yang selalu di evaluasi dari waktu ke waktu.

Tabel 2.5 Capaian IPM per kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2023

Kabupaten	2019		2020		2021		2022		2023	
	IPM	RANK	IPM	RANK	IPM	RANK	IPM	RANK	IPM	RANK
Sulawesi Tengah	69,5		69,55		69,79		70,28		70,95	
Banggai Kepulauan	65,13	12	65,42	12	65,61	12	66,08	12	66,82	12
Banggai	70,36	4	70,52	4	70,6	4	71,08	4	71,7	4
Morowali	72,02	2	72,21	2	72,29	2	72,55	2	73,02	2
Poso	71,4	3	71,28	3	71,45	3	71,93	3	72,48	3
Donggala	65,49	8	65,56	9	65,72	10	66,25	10	66,95	10
Tolitoli	65,42	10	65,69	8	66,3	8	66,76	8	67,66	8
Buol	67,69	7	67,82	7	68,25	7	68,72	7	69,57	7
Parigi Moutong	65,47	9	65,44	10	65,82	9	66,26	9	67,11	9
Tojo Una-una	64,52	13	64,59	13	64,74	13	65,54	13	66,39	13
Sigi	68,16	6	68,12	6	68,49	5	69,05	5	69,93	5
Banggai Laut	65,27	11	65,43	11	65,65	11	66,22	11	66,93	11
Morowali Utara	68,45	5	68,36	5	68,48	6	68,97	6	69,73	6
Kota Palu	81,5	1	81,47	1	81,7	1	82,02	1	82,52	1

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah, data diolah kembali

Tabel diatas memberikan informasi lengkap capaian IPM di Provinsi Sulawesi Tengah, yang secara relatif dapat kita bandingkan dari waktu ke waktu. Data di atas memberikan informasi bahwa secara secara absolut telah terjadi peningkatan IPM di Kabupaten Buol, artinya bahwa skor capaian IPM membaik dari tahun ke tahun.

Tetapi jika dilihat secara relatif, Kabupaten Buol tidak membaik dibandingkan daerah lain. Hal ini dapat dilihat pada capaian yang tidak beranjak dari pertingkat 7 selama 5 tahun terakhir. Ini artinya bahwa peningkatan capaian IPM di Kabupaten Buol tidak lebih cepat dibanding daerah lain di Provinsi Sulawesi Tengah, sementara itu angka kemiskinanya masih relatif tinggi. Upaya perencanaan pembangunan yang tepat dengan pelaksanaan di lapangan akan sangat penting guna memastikan bahwa setiap pengeluaran rupiah akan berdampak pada capaian indikator kunci pencapaian IPM di Kabupaten Buol.

2.2 Teori Perkembangan Aktivitas dan Fungsi Daerah

Perkembangan wilayah, pembangunan berkelanjutan mengambil peran sebagai sarana untuk memberikan arahan dalam perkembangan kewilayahan. Karena pada prinsipnya perkembangan ini dapat membentuk pola yang teratur ataupun sebaliknya. Perkembangan wilayah dapat terjadi dalam proses yang berkesinambungan. Wilayah yang berkembang pada awalnya akan mengalami beberapa proses. Terjadinya perkembangan suatu wilayah dipicu oleh berbagai faktor, yang umumnya didominasi oleh aktivitas ekonomi. Teori kewilayahan lahir karena dilatarbelakangi oleh pertanyaan ekonomi yang berupaya untuk menjawab, dimana lokasi lahan yang paling optimal dari segi ekonomi. Karena besarnya pengaruh ekonomi terhadap kewilayahan, muncul dua model deliniasi wilayah, yakni :

(1) wilayah secara fungsional;

(2) wilayah secara administratif.

Secara politis, wilayah dapat dideliniasi dalam batasan administrasi yang telah ditetapkan. Namun dari aspek lainnya, wilayah yang memiliki homogrenitas tidak dapat dipisahkan dan dideliniasi secara langsung mengikuti batasan administrasi. Hal tersebut yang menciptakan pendeliniasian wilayah secara fungsional.

Umumnya pengembangan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah.

Friedman dan Allonso (1978), mengemukakan bahwa pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya (Tri Utomo,1999).

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal

wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana 12 pembangunan nasional, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah (Friedmann & Allonso, 1978).

Kabupaten Buol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015, luas wilayah Kabupaten Buol sebesar 4.043,57 Km2. Wilayah Kabupaten Buol terbagi kedalam 11 (sebelas) kecamatan, yaitu: Lakea, Karamat, Biau, Momunu, Tiloan, Bokat, Bukal, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat, dan Paleleh. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tiloan, yaitu sebesar 1.437,70 Km2 atau sekitar 35,55% dari total luas Kabupaten Buol, sedangkan Kecamatan Karamat memiliki luas terkecil yaitu 153,10 Km2 (3,79%).

Kabupaten Buol telah mengalami pertumbuhan aktivitas yang cukup pesat hingga saat ini. Secara administrasi, jumlah penduduk Kabupaten Buol tercatat sebesar 150,524 ribu penduduk. Namun secara fungsional, jumlah tersebut terhitung besar. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Buol tercatat sebagai salah satu bagian dari Kawasan pengembangan. Terbentuknya wilayah secara fungsional bukan hanya sebagai bentuk proses yang alami karena unsur kesamaan entitas pada satu wilayah, namun juga dapat muncul karena pergerakan aktivitas.

Ludlow (2008) menjelaskan dampak dari sprawl tersebut akan cenderung negatif, seperti peningkatan konsumsi energi, konsumsi lahan dan air, polusi udara serta banyak dampak lain yang mungkin akan terjadi. Fenomena tersebut terjadi karena adanya respon dari perkembangan wilayah secara fungsional.

Tulisan dari Dieleman dan Wegner (2004) menjelaskan bahwa Kota Portland, Amerika Serikat berhasil keluar dari permasalahan sprawl dengan menerapkan kota kompak. Mereka berupaya menekan pertumbuhan perumahan yang tidak tertata dan tanpa fasilitas dasar dan penunjang. Setiap perkembangan hunian akan diintervensi dengan penerapan kota kompak. Penyediaan fasilitas dasar dan penunjang serta pusat-pusat aktivitas diupayakan untuk dapat menekan pergerakan dan eksploitasi lahan berlebihan untuk fungsi hunian. Struktur ruang perkotaan harus diperhatikan untuk menempatkan setiap fungsi-fungsinya. Penerapan sistem kota kompak dapat ditunjang dengan konsep hirarki kota pusat oleh Losch (1938) Teori tersebut membagi sistem layanan wilayah ke dalam beberapa hirarki, dengan beberap fungsi yang disesuaikan dengan skala pelayanannya.

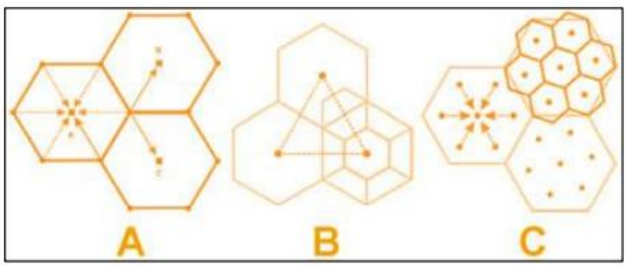

Gambar 2.1 Model Hierarki Kota Losch

- Hirarki pertama akan diperuntukkan sebagai fungsi layanan lingkungan. fasilitas yang tersedia adalah fasilitas untuk skala lingkungan terkecil, seperti pasar lingkungan, sekolah dasar, dan beberapa fasilitas lainnya;
- Hirarki kedua akan diperuntukkan sebagai layanan untuk fungsi yang lebih besar, dimana fasilitas yang disediakan dapat melayani beberapa wilayah pada hirarki pertama, seperti hotel, pusat perbelanjaan, bank dan beberapa pusat hiburan;
- Hirarki ketiga diperuntukkan sebagai wilayah dengan tingkat layanan tertinggi. Pelayanan tersebut akan mencakup dua hirarki di bawahnya. Pelayanan seperti sekolah tingkat atas dan tinggi, rumah sakit, pusat bisnis dan beberapa aktivitas skala kota lainnya.

Bentuk yang diilustrasikan oleh Losch adalah bentuk segi enam untuk setiap hirarkinya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing segi enam tersebut akan diisi oleh beberapa bidang yang lebih kecil, sehingga sistem layanan dari setiap hirarki dapat maksimal. Bentuk segi enam juga memungkinkan tidak adanya gap antar pelayanan yang dapat ditinggilkan, karena keseluruahan ruang telah terisi oleh bidang yang lain. Selain itu, hal lain yang diperhatikan adalah intervensi terhadap pasar tanah. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah menjalankan fungsi ruang terbuka publik dan hijau oleh pemerintah (Tim Peneliti Prodi PWK UGM).

Industri dan permukiman yang berkembang pada daerah pinggiran Kabupaten Buol memungkinkan konsep kota kompak untuk dikembangkan. Konsep kota kompak pada Kabupaten Buol dapat dimulai dengan mulai mengembangkan penggunaan lahan campuran pada daerah-daerah pinggiran kota, wilayah yang disinyalir mengalami sprawl terbesar. Pengamanan lahan untuk ruang-ruang terbuka hijau dan ruang publik akan meningkatkan kekompokan bentuk ruang, dan akan mengembalikan fungsi kota seperti yang dahulu dirancang. Penataan aktivitas dengan konsep penggunaan lahan campuran diikuti dengan pengawasan terhadap struktur ruang kawasan yang telah ditetapkan di dalam dokumen rencana penataan ruang. Hal ini agar hirarki fungsi dari Kabupaten Buol tidak menyebar tanpa aturan. Fungsi-fungsi dari setiap hirarki harus diperjelas. Agar ekspansi aktivitas dari satu wilayah tidak serta merta terjadi.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas pada Kabupaten Buol secara konstan akan mempengaruhi daya dukung lahan, dan pada akhirnya akan terlampaui. Daya dukung merupakan sebuah konsep yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan dengan berorientasi pada keberlanjutan.

Pengertian (konsep) dan ruang lingkup daya dukung lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Permasalahan turunan yang sangat tampak pada Kabupaten Buol adalah terkait dengan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perkembangan aktivitas dan pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan akan sumberdaya air. Tulisan dari Wijitkosum (2008) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan secara langsung antara pengendalian pembangunan dengan efektivitas pemanfaatan sumber daya air. Pertumbuhan pembangunan yang direncanakan dengan matang akan memberikan penjagaan terhadap sumber daya. Selain itu tulisan tersebut juga memberikan saran melalui tiga poin utama untuk dapat mengimbangi pemanfaatan air dalam proses pertumbuhan wilayah:

a. Penggunaan air yang efektif dengan memperhatikan kepentingan penggunaannya;
b. Memperbesar cadangan air dengan berupaya meningkatkan sumber-sumber penghasil;
c. Reformasi struktur harga untuk dapat menunjang poin sebelumnya.

Dengan menerapkan konsep pengembangan wilayah yang kompak dan pengamanan terhadap sumber daya, permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh perkembangan wilayah pada Kabupaten Buol tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Selain itu juga permasalahan yang tengah terjadi dapat ditasi secara bertahap.

2.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan

seluruh nilai tambah *(added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Biasanya BPS dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional dapat disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK). Dimana PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (RKPD Kabupaten Buol, 2023).

Ahli ekonomi Klasik membagi empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi karena pertambahan penduduk ini akan memengaruhi tingkat produksi nasional dan pendapatan suatu wilayah. Uraian tersebut dapat dilihat bahwa, apabila terdapat kekurangan penduduk dan produksi marginal lebih tinggi dari

pada pendapatan perkapita, maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu, produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapitamenjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi : memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaranpasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan.

2.2.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat di artikan sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaanyang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah sebagai pencapaian aspirasi setiap warga masyarakat. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di Indonesia dan di berbagai negara berkembang, istilah pembangunan seringkali lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan seringkali secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik.

Menurut Todaro (2000) pembangunan harus memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedomanpraktis dalam memahami pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan (sustainance) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom) untuk memilih. Todaro

berpendapat banhwa pembangunan di pandang suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasioanl, disamping tetap mengejar ekselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya pembanunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan induvidual.

Dengan demikian pembangunan ekonomi adalah suatu proses pengarahan kepada terjadinya pemerataan pembangunan ekonomi(equity) dan pertumbuhan yang keberlanjutan (sustainability). Proses pembangunan tersebut harus disusun secara sengaja dan terencana sehingga dapat mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang dalam jangka panjang. Menurut Penulis Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau suatu system sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut akademisi ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti: ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan

modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Arsyad, 1999).

Salah satu indikator yang sangat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pembagunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses 16 yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh sistem kelembagaan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product* (GDP) / *gross national product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan, atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kenaikan output per kapita, yaitu sisi output totalnya (gross domestic product / GDP) dan jumlah penduduknya. Output per kapita ialah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Proses kenaikan output per kapita dianalisis dengan cara melihat apa yang terjadi dengan output total di suatu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Menurut pandangan parah ekonomi klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill), maupun pandangan ekonomi neo-klasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah

penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Suryana, 2000). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang telah dicapai pada masa sebelumnya.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai teori umum pertumbuhan ekonomi dari aliran klasik dan neo-klasik. Teori dari beberapa ahli ekonomi ini pada dasarnya untuk menciptakan tingkat kesejahteraan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup dengan sumber daya terbatas yang ada di bumi ini.

2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Adam Smith dalam bukunya "An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation" mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana, 2000).

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain :

a. Pertumbuhan output total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada tiga, yaitu :

1) Sumber daya alam yang terjadi (faktor produksi tanah) Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara. Maksudya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya

maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sember daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

2) Sumber daya insane (jumlah penduduk) Sumber daya insane mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

3) Stok barang modal Stok modal merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung 19 pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimal dari sumber daya alam).

b. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada usia muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat subsisten maka jumlah penduduk akan menurun.

Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja (Suryana, 2000)

2.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan klasik. Ekonom yang menjadi

perintis dalam mengembangan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan (Arsyad, 1999). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kapada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

Menurut teori neo-klasik, faktor-faktor produksi 20 yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah jumlah tenaga kerja dan capital (modal). Modal bisa dalam bentuk finance atau barang modal. Penambahan jumlah tenaga kerja dan modal dengan faktor-faktor produksi lain, misalnya tingkat produktivitas dari masing-masing faktor produksi tersebut atau secara keseluruhan tetap akan menambah output yang dihasilkan. Presentase pertumbuhan output bisa lebih besar (increasing return to scale), sama (constant return to scale), atau lebih kecil (descreasing return to scale) dibandingkan presentase pertumbuhan jumlah dari kedua faktor produksi tersebut (Tambunan, 2001).

Model pertumbuhan yang didasarkan pada model pertumbuhan neo-klasik ini memiliki kelemahan. Model tersebut tidak bisa menjelaskan mengapa di banyak negara di dunia pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada yang diperkirakan dalam model ini. Hal ini bisa terjadi, karena modal pertumbuhan neo-klasik hanya melihat pada satu sumber saja, yaitu kontribusi dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi. Dengan demikian, banyak faktor produksi lain yang tidak dimasukan ke dalam model tersebut, ternyata sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Salah satunya yang paling penting adalah teknologi. Dalam model di atas faktor teknologi dianggap konstan sehingga tidak dimasukkan ke dalam model (Tambunan, 2001).

Todaro (2003), mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*)

2. Tinggi rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia
3. Adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memilih (*freedom form servitude*) yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil penelitian, mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat digambarkan menggunakan pergeseran kurva PPF ke kanan yang artinya kapasitas perekonomian mengalami peningkatan sehingga akan meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan untuk masyarakat. Dala teori ekonomi kemampuan yang dimiliki untuk memproduksi berbagai barang dan jasa dapat digambarkan melalui kurva PPF (*Production Possibility Frontier*):

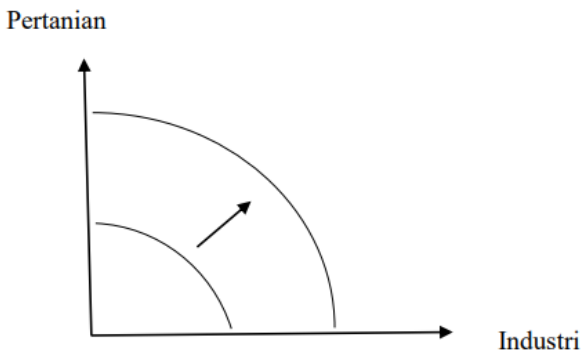

Gambar 2.2 Kurva *Production Possibility Frontier*

Sumbu horizontal menunjukkan bahwa kemampuan untuk memproduksi barang-barang industri sedangkan pada sumbu vertical menunjukkan kemampuan untuk memproduksi barang pada sektor pertanian. Kurva PPF secara keseluruhan menunjukkan kemampuan maksimal perekonomian untuk memproduksi berbagai macam barang antara barang pertanian dan barang industri dengan sumber daya ekonomi yang dimilki. Semakin besar PPF maka semakin tinggi pula kemampuan untuk tingkat produksinya dan semakin besar kekayaan yang dimiliki oleh Negara tersebut. Dengan adanya kemampuan teknologi yang semakin canggih, kurva PPF dapat

digeser ke kana sehingga besarnya kapasitas produksinya akan semakin besar dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan bertambah baik, Gordon (1993).

2.2.4 Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (1997) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembanguan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Arsyad, 1997).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Dalam 15 pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Arsyad, 1997).

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda disetiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya konsisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah kedaerah yang

melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal dalam Jhingan (1993) mengenai dampak balik pada suatu daerah. Oleh karena itu, apabila prosees perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah yang terbelakang meupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

Rostow (1987) mengatakan bahwa dalam suatu proses pembangunan ekonomi atau proses transformasi yang terjadi pada masyarakat tradisioal menjadi masyarakat modern adalah proses dimana terjadinya multidimensional. Selain itu terdapat 5 tahapan dalam pembangunan ekonomi yaitu:

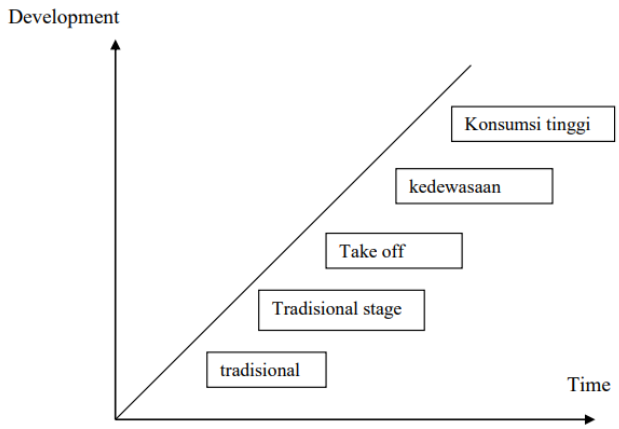

Gambar 2.3 Kurva Teori Pembangunan Rostow

1) Tahap Masyarakat Tradisional *(The Traditional Society)*
2) Tahap Persyaratan Tinggal Landas *(Precondition for take-off)*
3) Tahap Tinggal Landas *(Take Off)*
4) Tahap Menuju Kedewasaan *(The Drive To Maturity)*
5) Tahap Masa Konsumsi Tinggi *(The Age Of High Mass Consumtion)*

Pada dasarnya perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dikatakan sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang ada di daerah tersebut serta untuk memperbaiki kapasitas sektor

swasta untuk menciptakan nilai sumberdaya swasta secara benar dan bertanggung jawab (Arsyad, 1999). Secara sederhana tujuan dari strategi pembangunan ekonomi daerah adalah agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi para penduduk serta diharapkan dapt menciptakan stabilitas ekonomi daerah.

Menurut Arsyad (2002) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan melakukan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta agar terciptanya lapangan kerja serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya menekankan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi melainkan mengarah pada kualitas dari peningkatan tersebut.

Sampai detik ini tidak ada satu teori pun yang dapat menjabarkan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu dalam memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Teori Pertumbuhan Wilayah Berbasis Sumber Daya Alam (resource endowment theory)

Teori pertumbuhan wilayah berbasis sumber daya alam menjabarkan tentang bagaimana suatu daerah dapat melakukan pengembangan dengan mengandalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Karena sumber daya alam sangat mempengaruhi dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat melakukan pengembangan pada daerah tersebut. Adisasmita (2013).

b. Teori Transformasi Sektoral (Sectoral Transformation Theory)

Para ekonom sudah lama menyadari bagaimana struktur ekonomi akan mengalami perubahan dalam proses kegiatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Rahardjo (2013) terjadinya perubahan pada struktur ekonomi dapat dilihat dari:

1) Pada sektor pertanian produksi mengalami peningkatan yang lebih lambat dari pada peningkatan produksi nasional
2) Peningkatan pada sektor industri lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi nasional.
3) Peningkatan yang terjadi pada sektor jasa juga cukup cepat. Teori pendekatan (sektor) menjabarkan bahwa peran sektor primer (pertanian dan pertambangan) memiliki kecenderungan negatif terhadap nilai PDRB karena dapat terjadinya penurunan sedangkan sektor sekunder (industri manufaktur) dan sektor tersier (jasa) akan mengalami peningkatan.

c. Teori Ekonomi Basis (economic base theory)

Teori ekonomi basis (economic base theory) pada dasarnya menjelaskan tentang laju pertumbuhan ekonomi daerah ditunjukkan dengan tingginya tingkat ekspor daerah itu. Pengertian ekspor pada eonomi regional adalah menjual berbagai jenis barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari satu Negara ke Negara lain. Teori ini merupakan teori yang membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan disuatu wilayah menjadi pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service (pelayanan) atau sektor non basis. Artinya sektor non basis merupakan sektor yang bersifat endogeneous (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhan ekonomi akan meningkat tergantung dengan kondisi perekonomian wilayah tersebut secara menyeluruh (Tarigan, 2005).

d. Teori Lokasi

Para ahli ekonomi regional sering mengatakan bahwa salah satu faktor yang memiliki peran penting dan sangat berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah faktor lokasi. Pernyataan itu sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan pada umumnya cenderung melakukan

penekanan biaya dengan cara memilih lokasi yang paling dekat dengan pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas dan suitabilitas suatu lokasi antara lain upah tenaga kerja, biaya energi, adanya pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan, serta kualitas pemerintah daerah Arsyad (1999).

e. Teori Tempat Sentral (Central Place Theory)

Teori ini menekankan bahwa ada hirarki tempat (hierarchy of places). Setiap tempat dianggap memiliki peran dan didukung dengan sejumlah tempat yang ruang lingkupnya lebih kecil yang akan menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori tempat sentral ini dapat digunakan pada pembangunan ekonomi daerah. Misalnya, suatu daerah dapat menjadi penyedia jasa sedangkan daerah lain sebagai daerah pemukiman (Arsyad, 1999).

f. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah perkotaan yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar teori kausasi kumulatif (cumulative causation). Kesenjangan anatar daerah maju dan terbelakang semakin diperparah oleh kecenderungan kekuatan-kekuatan pasar. Daerah yang maju akan cenderung mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah lain (Arsyad, 1999).

2.3 Sejarah Arah Kebijakan Daerah

2.3.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025

Arah Kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan

program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Dengan merumuskan kebijakan umum, kita bisa mendapatkan cara untuk membuat atau memperoleh program-program yang paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Diperlukan kebijakan umum untuk menyusun program-program prioritas yang mendasar, sehingga kebijakan umum dapat menjadi panduan dalam menetapkan program utama yang sesuai. Kebijakan biasa dibentuk dalam empat sudut pandang berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, yakni :

1. Kebijakan pada persfektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi merekan dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan Sumber Daya Manusia, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberikan jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif di atas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi Pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan arah

kebijakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun arah kebijakan tahunan dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 : Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya saing dan produktivitas daerah guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.
2. Tahun 2019 : Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan Ekonomi Kawasan Perdesaan Untuk percepatan Pengembangan Wilayah
3. Tahun 2020 : Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan
4. Tahun 2021 : Peningkatan dan Kualitas Layanan Publik berbasis Kabupaten Pintar (Smart Regency) untuk pemantapan perekonomian daerah Kabupaten Buol.
5. Tahun 2022 : Pemantapan kesejahteraan dan kemandirian Daerah.

Adapun pentahapan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I (Tahun 2025-2029)

Transformasi Buol :

- Pemenuhan pelayanan Dasar Kesehatan, pendidikan dan Perlindungan Sosial
- Hilirisasi Sumber Daya Alam dan Penguatan Riset Inovasi serta Produktivitas Tenaga Kerja;
- Kelembagaan tepat Fungsi dan Kolaboratif, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, Peningkatan Integritas Partai Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil

Landasan Transformasi :

- Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta Membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai Landasan Transformasi dan Pembangunan;
- Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai landasan dan Modal Dasar Pembangunan;

Kerangka Implementasi Transformasi :

- Memperkuat Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan sebagai landasan Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Disparitas dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
- Penyediaan Pelayanan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Layanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Yang Memadai, Kosistensi Perencanaan dan Pendanaan, Keranfka Pengendalian, Sistem Insentif dan Mekanisme Perubahan.

II. Arah Kebijakan Pembagunan Tahap II (Tahun 2030-2034)

Transformasi Buol:

- Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Inklusif;
- Peningkatan Produktivitas secara Masif dan Perluasan Sumber Pertumbuhan Ekonomi;
- Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Berkualitas, Regulasi Berbasis Teknologi-Informatif, Partai Politik Berintegritas dan Masyarakat Sipil Partisipatif;

Landasan Transformasi:

- Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas serta Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi untuk

mewujudkan Landasan yang Kokoh bagi Transformasi dan Pembangunan;

- Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi sebagai Pendorong Pembangunan Sosial Ekonomi yang Setara dan Inklusif;

Kerangka Implementasi Transformasi:

- Percepatan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan sebagai Pendorong Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Baru;
- Mempercepat Pelayanan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Layanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan sebagai pendorong Ekonomi dan Industri Berbasis SDA;
- Percepatan Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logi s Pembangunan, Skema Pendanaan dan Penganggaran serta Pengembangan Kapasitas Pembiayaan dengan Manajemen Investasi yang Berkualitas.

III. Arah Kebijakan Pembagunan Tahap III (Tahun 2035-2039)

Transformasi Buol:

- Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesehatan;
- Economic Power House yang Terintegrasi dengan Jaringan Rantai Global dan Domestik serta Eksport yang kokoh;
- Kelembagaan Adaptif, Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Kompetitif, Partai Politik Modern, Regulasi Adaptif dan Masyarakat Sipil Mandiri;

Landasan Transformasi:

- Kabupaten Buol yang Berkeadilan, Bebas Korupsi, Menjunjung Tinggi Hak Azasi Manusia, Berdemikrasi Substansial, Aman dan Nyaman, serta Berpengaruh dan Memimpin di Kawasan;
- Mewujudkan Ketangguhan Manusia, Masyarakat, Beserta Alam dan Lingkungan dalam Menghadapi Berbagai Perubahan;

Kerangka Implementasi Transformasi:

- Mengembangkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Kewilayahan Baru;
- Mengembangkan Pelayanan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Layanan Dasar antar wilayah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan sebagai pendorong Ekonomi dan Industri Berbasis SDA;
- Mengembangkan Sisten Pengendalian yang Kontinu dan Pa.rtisipatif dengan Memanfaatkan Sistem Elektronik Terpadu dan Tata Kelola Data Pembangunan.

IV. Arah Kebijakan Pembagunan Tahap IV (Tahun 2040-2045)

Transformasi Buol:

- Manusia Buol yang Unggul;
- Daerah Berpendapatan Menengah sampai Tinggi;
- Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif, Kolaboratif**;**

Landasan Transformasi:

- Kabupaten Buol Yang Mandiri, Aman dan Damai serta Berpengaruh dan Memimpin dalam Tatanan BERKAH;
- Mewujudkan Kabupaten Buol sebagai Pusat Budaya Tutur yang Berkelanjutan;

Kerangka Implementasi Transformasi:

- Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Berkeadilan dan Berdaya Saing;
- Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Layanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan sebagai Penunjang Sub Hub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA;
- Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Dinamis, Transparan, Responsif dan Komunikatif.

2.3.2 Program Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah Kabupaten Buol.

Adapun arah/tujuan pembangunan Kabupaten Buol dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yang mengacu dan selaras dengan RPJPD adalah sebagai berikut:

1). Kesehatan untuk Semua
2). Pendidikan berkualitas yang merata
3). Perlindungan sosial yang adaftif
4). Ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan produktifitas ekonomi
5). Penerapan ekonomi hijau
6). Transformasi difital
7). Integrasiekonomi domestik dan global
8). Perkotaan sebagi pusat pertumbuhan ekonomi
9). Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial
11). Stabilitas ekonomi makro
12). Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
13). Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14). Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
15). Lingkungan hidup berkualitas
16). Berketahanan energi
17). Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan
18). Pembangunan Kewilayahan
19). Pemantapan konektifitas laut, udara dan darat
20). Pelayanan moda terpadu
21). Sinkronisasi perencanaan

22). Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
23). Manajemen Resiko
24). Layanan data berbasis sistim elektronik
25). Pembiayaan dan pendanaan

2.4 Kuadran keberlanjutan Pembangunan Kabupaten Buol.

Proses pembangunan dalam jangka panjang harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekologi dan kesejahteraan. Secara konsep pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Ini memberikan makna bahwa penerapan konsep ini secara terpadu akan membantu menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan resilient, serta memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan sosial.

Hal ini penting mengingat berbagai fakta lapangan menunjukkan bahwa pembangunan dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan seringkali meniadakan konsep perlindungan lingkungan, akibatnya pembangunan yang diharapkan, justru akan menimbulkan biaya lingkungan yang lebih besar dari manfaat yang diperolah.

Analisis pembangunan keberlanjutan Kabupaten Buol dapat lakukan dengan melakukan pemetaan capaian pembanguan sosial ekonomi dengan pembangunan lingkungan. Aspek pembangunan sosial ekonomi secara umum dapat dilihat dari komponen IPM, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dari aspek kesejahteraan ekonomi, pembangunan pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan, Pada sisi yang lain pembangunan lingkungan hidup dapat tercermin dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka kuadran pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Komponen IPM se Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023

Kabupaten/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Riil per Kapita
	2023	2023	2023	2023
Banggai Kepulauan	66,87	13,09	8,62	8.066
Banggai	71,02	13,34	8,63	10.400
Morowali	69,37	13,38	9,37	11.708
Poso	71,33	13,74	9,53	9.622
Donggala	67,86	12,61	7,99	8.766
Toli-Toli	66,78	13,04	8,77	8.665
Buol	69,73	13,17	9,09	8.678
Parigi Moutong	64,62	12,51	8,04	10.471
Tojo Una-Una	66,41	12,37	8,51	8.550
Sigi	70,35	13,05	9,03	8.891
Banggai Laut	66,08	13,03	8,64	8.470
Morowali Utara	69,97	12,29	8,94	9.623
Kota Palu	71,45	16,51	11,74	15.501

Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Kabupaten/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Riil per Kapita	Indeks kesejahteraan sosial
	2023	2023	2023	2023	
Banggai Kepulauan	- 0,8	- 0,1	- 0,4	- 0,9	-1,05555
Banggai	1,1	0,1	- 0,4	0,3	0,675748
Morowali	0,3	0,1	0,4	1,0	0,866121
Poso	1,2	0,5	0,6	- 0,1	0,905061
Donggala	- 0,3	- 0,6	- 1,1	- 0,5	-0,92997
Toli-Toli	- 0,8	- 0,2	- 0,2	- 0,6	-0,87941
Buol	0,5	- 0,1	0,1	- 0,6	-0,02681
Parigi Moutong	- 1,8	- 0,7	- 1,0	0,3	-1,25793
Tojo Una-Una	- 1,0	- 0,8	- 0,5	- 0,6	-1,25283
Sigi	0,8	- 0,2	0,0	- 0,5	0,134988
Banggai Laut	- 1,1	- 0,2	- 0,4	- 0,7	-1,14572
Morowali Utara	0,6	- 0,9	- 0,1	- 0,1	0,021805
Kota Palu	1,3	3,1	2,9	2,9	3,944494

Guna memetakan aspek pembangunan lingkungan, maka capaian IKLH kabupaten akan menjadi dasar dalam penentuan skor yang akan digunakan dalam penentuan kuadran. Berikut adalah data indeks pembangunan lingkungan:

Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Lingkungan

Kabupaten	IKLH 2023	z score	Indeks pembangunan lingkungan
Buol	84,19	1,11	1,85

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka nampak bahwa indeks kesejahteraan Kabupaten Buol memiliki angka negatif smentara aspek lingkungan memiliki indeks positif. Dalam proses penggambaran grafik, maka:

Sumbu Y (Indeks kesejahteraan) : -0,023
Sumbu X (Indeks lingkungan) : 1,85

Berdasarkan analisis kuadran keberlanjutan, posis Kabupaten Buol berada pada kuadran II. Kuadran II memberikan makna bahwa kondisi lingkungan hidup masih baik, sementara aspek kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum sejahtera. Kondisi ini sesuai realitas bahwa capaian pembangunan sosial jika dilihat dari indikatot TPB di Kabupaten Buol masih banyak item yang belum mencapai target. Tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan salah satu cermin masih lemahnya pembangunan sosial ekonomi. Berbagai indikator Kesehatan juga belum mencapai target nasional. Meski demikian, untuk meningkatkan kesejahteraan masih memiliki peluang. Hal ini dapat dilihat dari daya dukung lingkungan yang masih baik, termasuk dukungan sumber daya alam yang melimpah.

Indeks lingkungan hidup

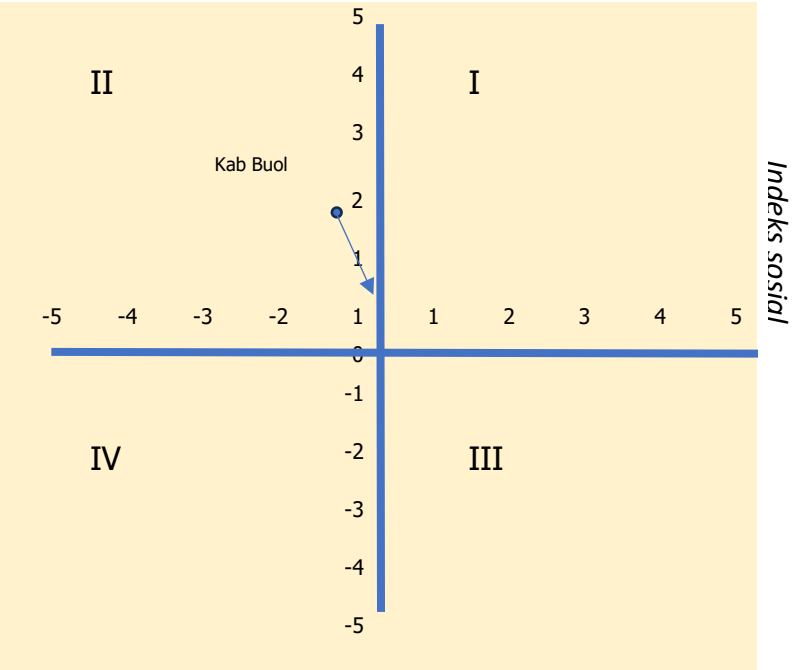

Upaya pembangunan di kabupaten Buol harus di dorong untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka Panjang, tanpa harus

mendegradasi lingkungan. Dengan demikian aspek pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buol dapat memposisikan Kabupaten Buol dikuadran 1 di masa depan, yakni kesejahteran sosial yang berkelanjutan dengan lingkungan alam yang tetap Lestari.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAERAH

3.1 Aspek Geografis dan Demografis

3.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Buol secara astronomis terletak pada posisi 120° - 122°09 Bujur Timur dan 0,35° - 1,20°Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Buol memiliki batas batas sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Gorontalo;
- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli;
- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan publikasi data BPS Kabupaten Buol (2024), luas wilayah daratan Kabupaten Buol mencapai 4.034,57 km^2. Kecamatan Tiloan merupakan kecamatan terluas 1.437,70 km^2, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Karamat yang hanya memiliki luas 153,10 km^2. selengkapnya tertera pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Daratan, Jumlah Desa dan Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol, Tahun 2024

Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibu Kota Kecamatan	Jarak (mil Laut/Km)
Lakea	208,55	5,16	7	Desa Lakea II	38,07
Biau	217,80	5,39	7	Kelurahan Leok II	0,00
Karamat	153,10	3,79	7	Desa Busak I	19,97
Momunu	400,40	9,90	16	Desa Lamadong I	7,39
Tiloan	1.437,70	35,56	9	Desa Air Terang	26,25
Bokat	196,10	4,85	15	Desa Bokat	10,98

Kecamatan	Luas (Km^2)	Persentase (%)	Jumlah Desa/Kel	Keterangan	
				Ibu Kota Kecamatan	Jarak (mil Laut/Km)
Bukal	355,52	8,79	14	Desa Unone	15,05
Bunobogu	327,15	8,09	10	Desa Bonobugu Selatan	29,14
Gadung	160,38	3,97	11	Desa Bulagidun	54,80
Paleleh	386,19	9,55	12	Desa Paleleh	98,98
Paleleh Barat	200,68	4,96	7	Desa Timbulon	82,70
Luas Kabupaten	**4.043,57**	**100,00**	**115**		

Sumber: Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2024

Presentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Buol diuraikan dalam gambar di bawah ini:

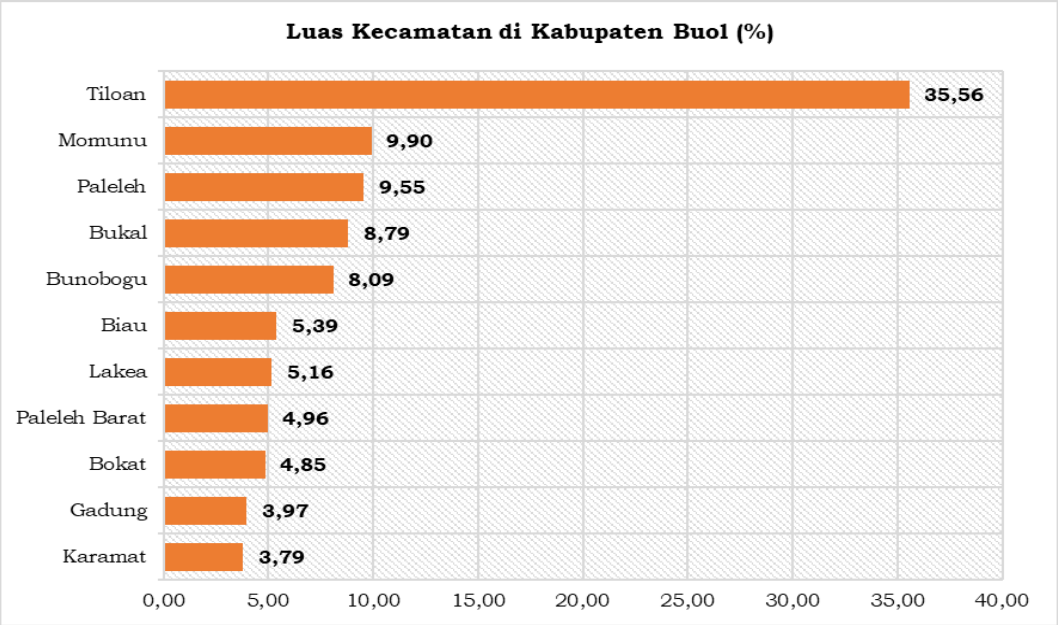

Sumber: BPS Tahun 2024 (Diolah kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3. 1 Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Buol

Jumlah Kecamatan di kabupaten Buol sebanyak 11 kecamatan yang meliputi Lakea, Biau, Karamat, Momunu, Tiloan, Bokat, Bukal, Bunobogu, Gadung, Paleleh dan Paleleh Barat. Kecamatan Tiloan memiliki luas tertinggi

dibanding kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Buol. Adapun luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jarak setiap Kecamatan dengan ibukota kabupaten di Kabupaten Buol selengkapnya tertera pada peta administratif Kabupaten Buol pada Gambar 3.2.

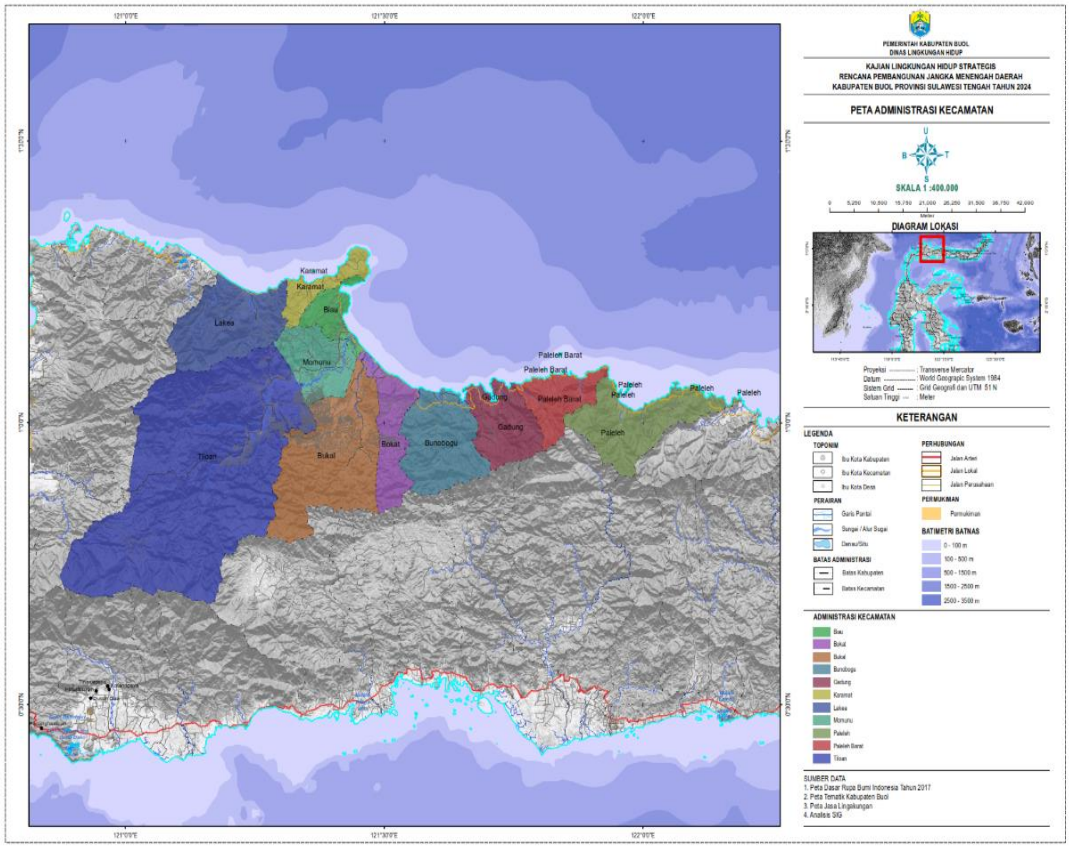

Sumber: Dokumen DDTLH Kabupaten Buol, Tahun 2023 (diolah kembali tim ahli)

Gambar 3.2 Peta Administrasi

Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Buol tersebut, maka wilayah kabupaten ini berada di wilayah daratan Pulau Sulawesi dan terletak di wilayah pesisir dan non pesisir yang memiliki potensi sumberdaya alam dominan pada pertanian tanaman pangan, perkebunan, serta sumberdaya alam pendukung seperti tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan darat.

Kabupaten Buol memiliki kondisi topografi yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan sebagian datar dan agak landai. Dominasi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut membuat ketinggian wilayah

Kabupaten Buol secara umum berada di atas 500 meter dari permukaan laut. Kecamatan Tiloan merupakan wilayah tertinggi di Kabupaten Buol. Terdapat beberapa desa pada Kecamatan Tiloan yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut. Kecamatan Karamat merupakan wilayah terendah. Kecamatan Karamat Kepulauan berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Uraian tersebut selengkapnya tertera pada peta Topografi Kabupaten Buol pada Gambar 3.3 sebagai berikut.

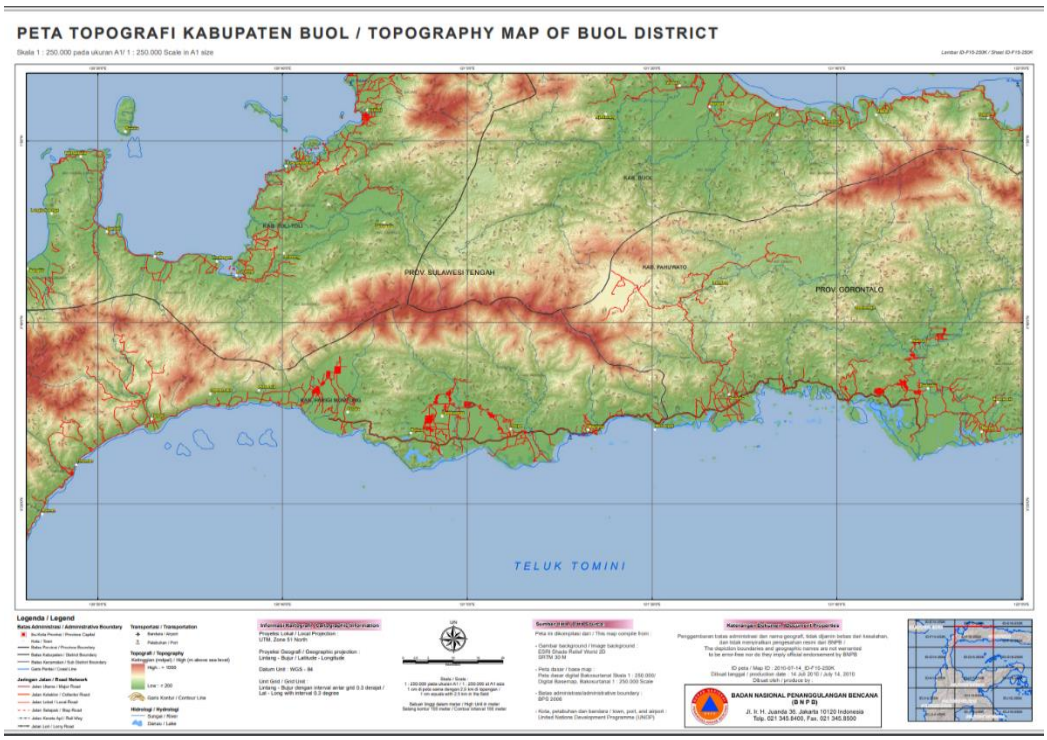

Sumber: Badan Nasional Penganggulan Bencana, Tahun 2023

Gambar 3.3 Peta Topografi

Kabupaten Buol memiliki kemiringan lereng yang bervariasi mulai dari 0% sampai di atas 40%. Kemiringan lereng pada Kabupaten Buol terbagi menjadi:

1. Kemiringan 0-2% (datar-landai), tersebar di seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Karamat. Kondisi kemiringan ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman.
2. Kemiringan 3-15% (landai agak miring), tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kondisi kemiringan ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, tetapi diperlukan usaha konservasi tanah dan air.

3. Kemiringan 16-40% (miring agak curam), tersebar di seluruh kecamatan. Kondisi kemiringan ini cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian. Namun perlu dikelola dengan baik pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konservasi.
4. Kemiringan di atas 40%, merupakan bagian terluas dari wilayah Kabupaten Buol. Kondisi kemiringan ini sangat potensial terkena erosi sehingga perlu upaya pelestarian kawasan hutan lindung.

3.1.2 Aspek Demografis

Istilah kependudukan *(population)* dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (natailitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk *(migration)* dan mobilitas sosial. Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah- masalah sosial dan ekonomi.

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat banyak merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya

pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu, pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kab. Buol (ribu/jiwa)												Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Buol (ribu/jiwa)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lakea	10,122	10,300	10,483	10,647	10,819	10,985	11,139	11,300	11,040	11,161	11,300	11425.09	11551.57	11679.44	11808.73	11939.45	12071.62	12205.26
Biau	30,754	32,515	33,959	35,615	37,369	39,178	41,020	42,970	29,516	29,709	29,950	21502.11	29791.74	29712.92	29634.31	29555.91	29477.72	29399.73
Karamat	8,569	8,677	8,788	8,882	8,981	9,075	9,157	9,244	9,734	9,840	9,963	10114.31	10267.91	10423.85	10582.16	10742.87	10906.02	11071.64
Momunu	14,302	14,469	14,640	14,786	14,938	15,081	15,204	15,337	15,665	15,868	16,098	16289.56	16483.41	16679.56	16878.04	17078.88	17282.12	17487.77
Tiloan	10,899	11,348	11,819	12,283	12,771	13,268	13,768	14,292	9,384	9,449	9,529	9401.84	9276.38	9152.59	9030.46	8909.95	8791.06	8673.74
Bokat	12,920	13,031	13,148	13,237	13,333	13,420	13,448	13,565	15,045	15,239	15,460	18259.80	21566.65	25472.37	30085.42	35533.88	41969.06	49569.66
Bukal	14,010	14,226	14,449	14,644	14,848	15,045	15,224	15,411	14,746	14,922	15,123	15239.05	15355.99	15473.83	15592.58	15712.23	15832.80	15954.30
Bunobogu	9,040	9,124	9,210	9,277	9,349	9,416	9,469	9,527	9,764	9,851	9,955	10051.45	10148.83	10247.15	10346.43	10446.67	10547.87	10650.06
Gadung	11,651	11,769	11,891	11,988	12,092	12,189	12,269	12,356	11,912	11,983	12,072	12114.93	12158.01	12201.24	12244.63	12288.17	12331.87	12375.72
Paleleh	11,579	11,669	11,761	11,830	11,905	11,971	12,021	12,077	12,342	12,452	12,583	12688.07	12794.01	12900.84	13008.57	13117.19	13226.72	13337.16
Paleleh Barat	5,576	5,657	5,741	5,815	5,891	5,965	6,031	6,100	6,106	6,154	6,213	6280.57	6348.88	6417.93	6487.73	6558.29	6629.62	6701.72
Jumlah	139,422	142,785	145,889	149,004	152,296	155,593	158,750	162,179	145,254	146,628	148,246	143,367	155,743	160,362	165,699	171,883	179,066	187,427

Sumber : BPS Kabupaten Buol dalam Angka, 2024.

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk *(in migration*) lebih besar dari pada migrasi keluar *(out migration).* Penduduk Kabupaten Buol Tahun 2019 sebanyak 153,991 jiwa, pada tahun 2020 meningkat menjadi 163,829 jiwa, pada tahun 2021 meningkat menjadi 166,339, pada tahun 2022 meningkat menjadi 169,478 jiwa.

Rata-rata pertumbuhan penduduk periode Tahun 2022 sekitar 10,25 persen (Tahun 2019-2022), tertinggi di Kecamatan Tiloan dan Karamat antara Tahun 2019-2022. Lonjakan jumlah penduduk tersebut perlu menjadi

perhatian pemerintah daerah, khususnya bagi penduduk Pendatang yang bekerja di Kabupaten Buol.

Presentase laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Buol diuraikan dalam gambar di bawah ini:

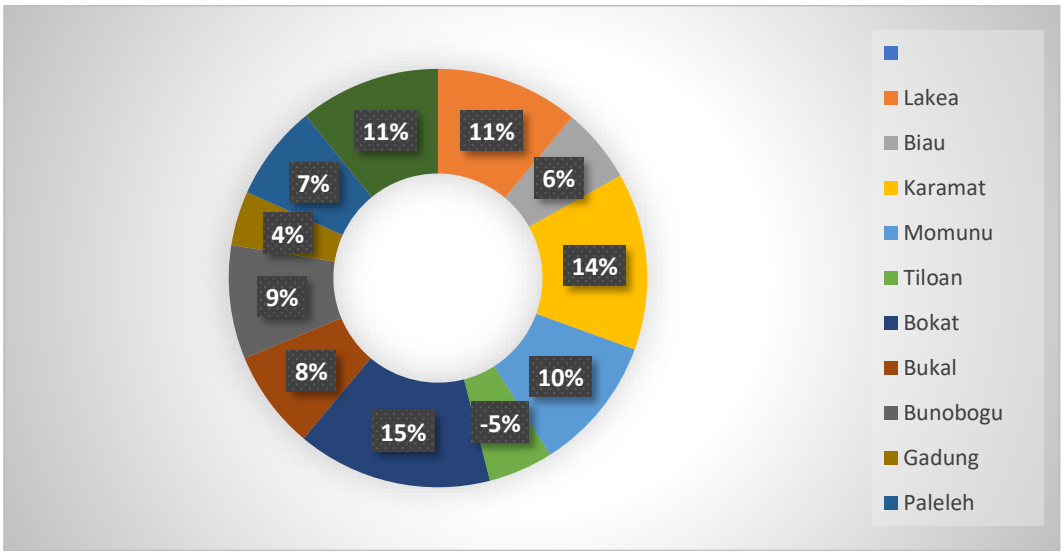

Sumber : BPS Kabupaten Buol dalam Angka, 2024 (diolah kembali).

Gambar 3.4 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Perbandingan jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan *"Sex Ratio"* adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, yakni semakin besar porsi penduduk perempuan, maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu, hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Tabel 3.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
Lakea	5.925	5.617	11.542	105,04
Biau	15.485	14.833	30.318	103,99
Karamat	5.262	5005	10.267	105,3
Momunu	8.413	7.929	16.342	105.04
Tiloan	4.904	4.545	9.449	107,2
Bokat	8.114	7.833	15.947	103,58
Bukal	7.892	7.347	15.239	107,53
Bunobogu	5.176	4.953	10.129	104,29
Gadung	6.212	5.956	12.168	104,23
Paleleh	6.476	6.267	12.743	103,18
Paleleh Barat	3.372	3.008	6.380	111,18
Buol	**75.950**	**72.296**	**150.524**	**105,05**

Sumber: BPS Kabupaten Buol dalam Angka Tahun 2024 (diolah kembali)

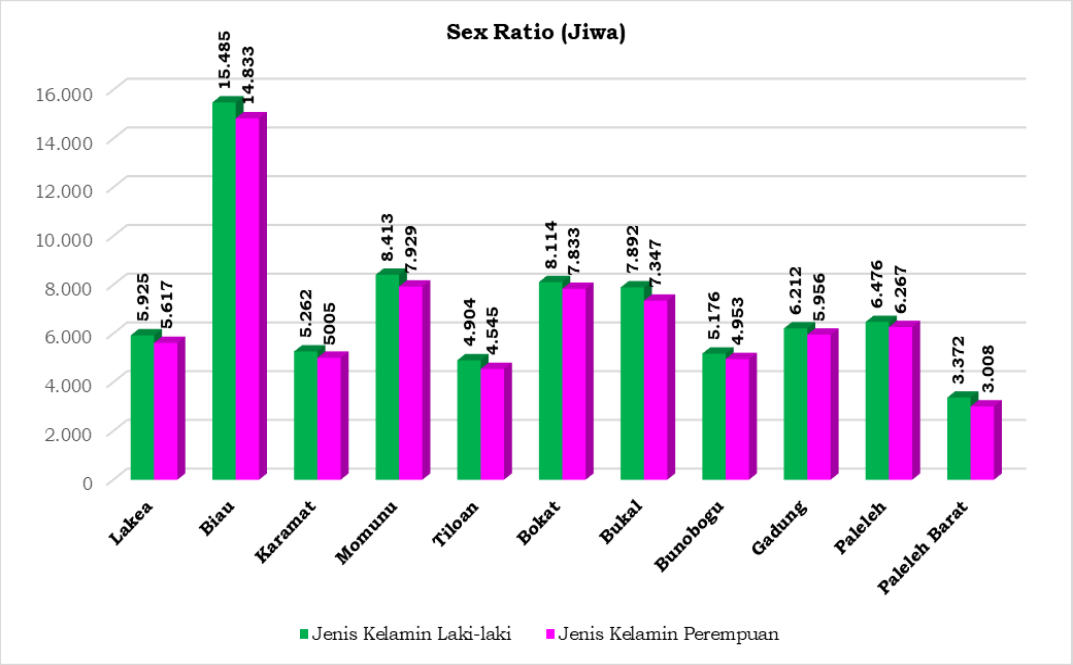

Sumber: BPS Kabupaten Buol dalam Angka Tahun, 2024 (diolah kembali)

Gambar 3.5 Sex Ratio Jumlah Penduduk Kabupaten Buol

3.2 Ekoregion

Ekoregion atau (*ecological regions*) merupakan sebuah konsep ruang (spasial), dalam UU. No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan wilayah ekoregion dilakukan dengan mempertimbangkan kesamaan karateristik bentang alam, daeran aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Ekoregion merupakan kerangka kerja yang bersifat spasial yang dapat difungsikan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. **Holistik**, menyatukan beragam karakteristik di bentang alam ke dalam satuan unit spasial dengan kesamaan sifat dan potensinya.

b. **Fleksibel**, unit spasial yang serbaguna (*multipurpose*) untuk ragam aplikasi mulai dari inventarisasi, perlindungan, monitoring dan pengelolaan.

c. **Pembandingan**, karena proses regionalisasi menggunakan beragam faktor maka ekoregion dapat digunakan untuk membandingkan satu unit spasial dengan unit lainnya terkait dengan respon lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi.

d. **Prediksi**, dengan mengamati perilaku sistem yang berada dalam ekoregion maka dimungkinkan untuk memprediksi suatu area tanpa ke lapangan.

e. **Scalable**, ekosistem sebagai sistem memiliki sifat skala. Artinya setiap pola dan distribusi dapat dilihat (generalisasi) pada skala tertentu untuk dapat informasi yang dimaksud. Dengan demikian ekoregion dapat digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena lingkungan.

f. **Robust model**, merupakan model yang dapat menggambarkan kompleksitas interaksi yang ada dalam bentang alam. Berkaitan dengan penggunan region (wilayah) sebagai model, penting untuk memahami

hubungan antara ukuran (size), skala, dan beragam informasi spasial pada skala yang berbeda. Ekoregion dapat menyediakan cara untuk mengintegrasikan beragam pola rencana dan pengelolaan, baik proses sosial maupun fisikal antar skala (pendekatan skala ragam).

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 Tahun 2018 Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, terdapat 3 (tiga) jenis ekoregion di Kabupaten Buol yaitu Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu - Bogani Nani Wartabone dengan luas 335.202,00 7Ha atau 90,46%, Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bukit Kalamotu dengan luas 35.343,96 Ha atau 9,54% dan Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Mangolo - Morowali - Pati dengan luas 6,72 Ha atau 0,002% dari total luas Kabupaten Buol.

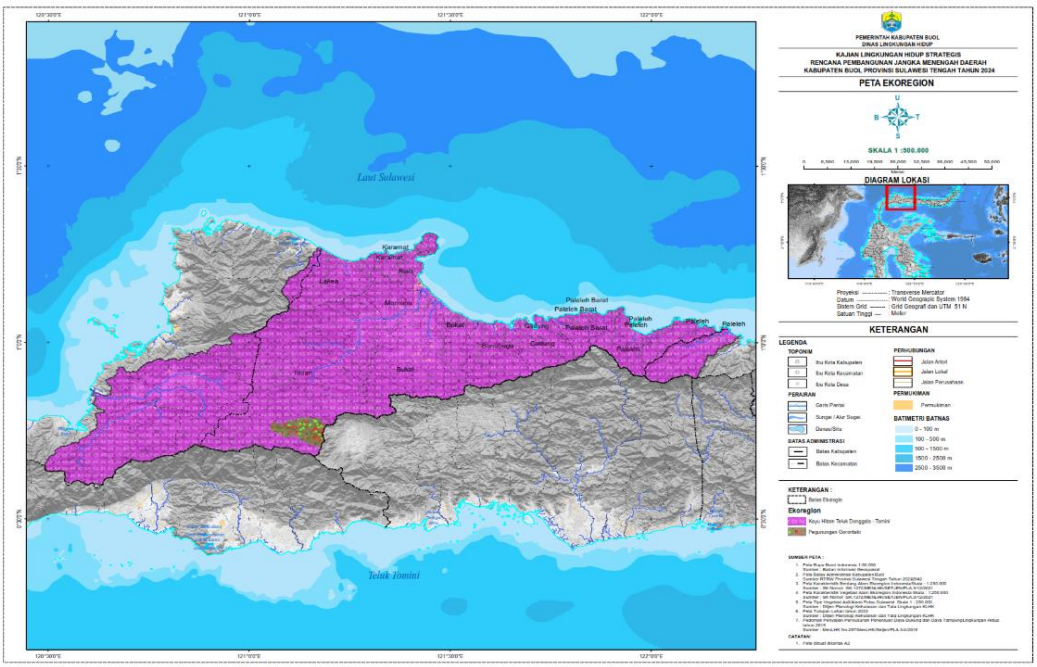

Sumber : SK 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021

Gambar 3.6 Peta Ekoregion Kabupaten Buol

3.2.1 Bentang Lahan/*Landscape*

Bentanglahan berasal dari kata *landscape* (Inggris), atau *landscap* (Belanda) dan landschaft (Jerman), yang secara umum berarti pemandangan. Arti pemandangan mengandung 2 (dua) aspek, yaitu: (a) aspek visual dan (b)

aspek estetika pada suatu lingkungan tertentu *(Zonneveld, 1979 / Widiyanto dkk, 2006)*. Ada beberapa penulis yang memberikan pengertian mengenai bentanglahan, antara lain:

a. Bentang lahan merupakan gabungan dari bentuklahan (*landform*). Bentuklahan merupakan kenampakan tunggal, seperti sebuah bukit atau lembah sungai. Kombinasi dari kenampakan tersebut membentuk suatu bentanglahan, seperti daerah perbukitan yang baik bentuk maupun ukurannya bervariasi / berbeda-beda, dengan aliran air sungai di sela-selanya (Tuttle, 1975).

b. Bentang lahan ialah sebagian ruang permukaan bumi yang terdiri atas sistem-sistem, yang dibentuk oleh interaksi dan interpen-densi antara bentuklahan, batuan, bahan pelapukan batuan, tanah, air, udara, tetumbuhan, hewan, laut tepi pantai, energi dan manusia dengan segala aktivitasnya, yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan (Surastopo, 1982).

c. Bentang lahan merupakan bentangan permukaan bumi dengan seluruh fenomenanya, yang mencakup: bentuklahan, tanah, vegetasi, dan atribut-atribut lain, yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia (Vink, 1983).

d. Bentang lahan adalah bentangan permukaan bumi yang di dalamnya terjadi hubungan saling terkait (*interrelationship*) dan saling kebergantungan (*interdependency*) antar berbagai komponen lingkungan, seperti: udara, air, batuan, tanah, dan flora fauna, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya (Verstappen, 1983)

Dari pengertian bentang lahan tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) unsur penyusun bentang lahan, yaitu: udara, batuan, tanah, air, bentuklahan, flora, fauna, dan manusia, dengan segala aktivitasnya. Kedelapan unsur bentanglahan tersebut merupakan faktor-faktor penentu terbentuknya bentanglahan, yang terdiri atas: faktor geomorfik (G), litologik (L), edafik (E), klimatik (K), hidrologik (H), oseanik (O), biotik (B), dan faktor antropogenik (A).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, Kabupaten Buol memiliki 13 (tigabelas) jenis klasifikasi bentanglahan dengan kedalaman skala informasi 1:250.000, seperti disajikan pada Gambar 3.7 dan Tabel 3.4 sebagai berikut.

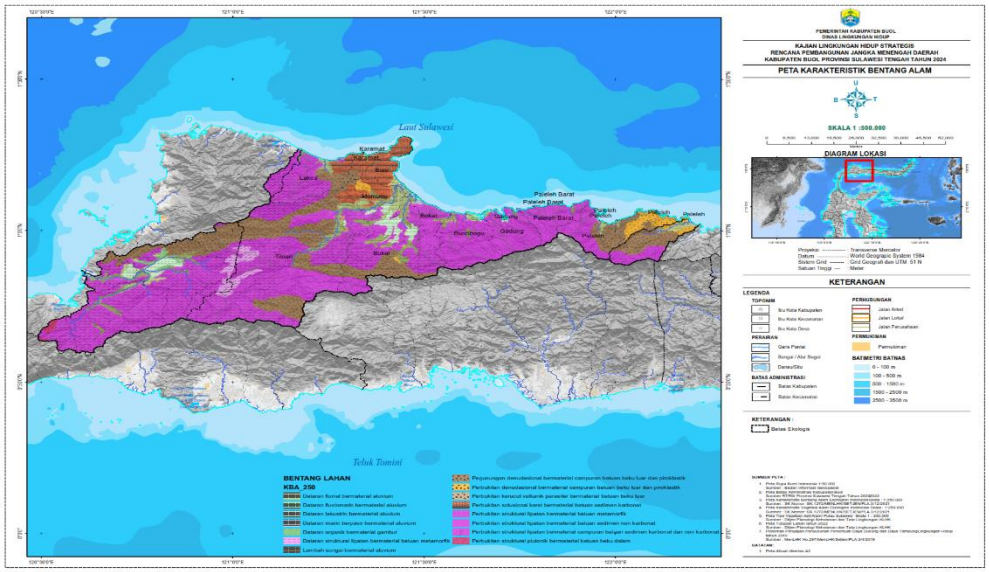

(Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2022)

Gambar 3.7 Peta Bentang Alam Kabupaten Buol

Tabel 3.4 Klasifikasi dan Luas Bentang Alam Kabupaten Buol

No.	Bentang Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	379,13	0,10
2.	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	1.269,27	0,34
3.	Dataran fluvial bermaterial aluvium	3.961,13	1,07
4.	Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	5.275,89	1,42
5.	Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	5.609,60	1,51
6.	Dataran lakustrin bermaterial aluvium	6.548,68	1,77
7.	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	8.741,73	2,36
8.	Lembah fluvial bermaterial aluvium	16.146,08	4,36
9.	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	27.113,91	7,32
10.	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	30.582,24	8,25
11.	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	68.049,24	18,36
12.	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	96.426,42	26,02
13.	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	100.449,36	27,11
	Total	**370.552,68**	**100,00**

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2022.

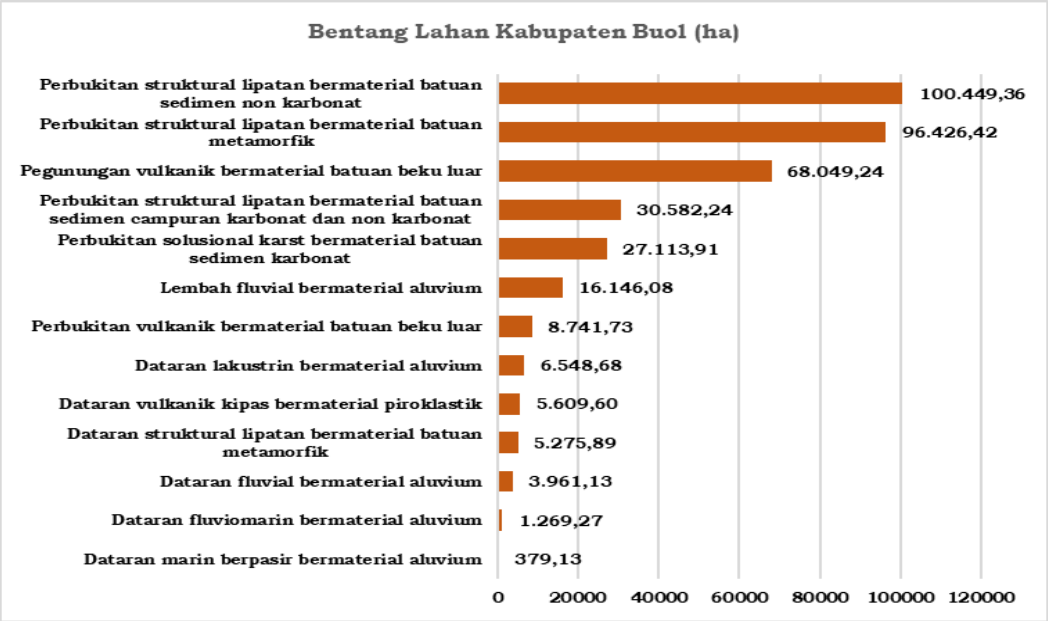

(Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2022)

Gambar 3.8 Bentang Alam Kabupaten Buol

Kabupaten Buol memiliki 13 (tiga belas) jenis klasifikasi bentang lahan di dominasi oleh jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat dengan luas 100.449,36 ha atau 27,11% dan Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik dengan luas 96.426,42 ha atau 26,02% dari total luas wilayah Kabupaten Buol. Definisi operasional bentanglahan Kabupaten Buol disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5 Definisi Operasional Bentanglahan Kabupaten Buol

No	Bentang Lahan	Definisi Operasional
1	Dataran aluvial berombak bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	Dataran ini mempunyai relief berombak/bergelombang (undulating to rolling), tersusun atas material batuan karbonat, seperti batugamping atau batunapal, terbentuk dari hasil proses denudasi perbukitan rendah yang sudah lanjut.
2	Dataran fluvial bermaterial aluvium	Dataran ini mempunyai relief yang relatif rata (flat), tersusun atas material aluvium dari hasil proses deposisi fluviatil (aliran air permukaan)
3	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	Dataran ini mempunyai relief relatif rata (flat), tersusun atas material aluvium dari hasil proses fluvial dan marin (arus dan gelombang laut)
4	Dataran lakustrin bermaterial aluvium	Dataran lakustrin mempunyai relief yang datar tersusun atas material aluvium hasil pengendapan genangan air dari danau atau genangan air

No	Bentang Lahan	Definisi Operasional
		permanen. Endapan ini pada umumnya mempunyai stratifikasi perlapisan material yang horisontal.
5	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	Dataran marin ini terletak di sepanjang pantai, umumnya berelief datar, dan dicirikan oleh material aluvium berukuran pasir. Material yang menyusun ini berasal dari proses deposisi arus dan gelombang laut terhadap sedimen yang dibawanya. Sumber material bisa berasal dari pedalaman (hinterland) maupun dari material sepanjang pantai.
6	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	Dataran ini merupakan bagian dari kompleks bentuklahan karst yang mempunyai relief datar dan tersusun atas batuan karbonat seperti batugamping (limestones), gipsum atau lainnya.
7	Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	Dataran ini terbentuk di atas struktur tektonik kulit bumi berupa lipatan yang mempunyai relief datar dan tersusun atas batuan sedimen campuran antara karbonat dan non karbonat, seperti batupasir (sandstones), batugamping (limestones), batuliat (claystones), napal (marls) atau lainnya.
8	Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik	Dataran ini mempunyai relief datar hingga landai, dari udara mempunyai pola seperti kipas, dan tersusun atas material piroklastik. Aliran lahar merupakan proses yang membentuk bentuklahan ini
9	Lembah fluvial bermaterial aluvium	Bentuklahan ini merupakan suatu lembah memanjang dimana di dalamnya terdapat sungai yang mengalir sepanjang tahun (perenial) atau hanya pada musim penghujan (intermitten) dan juga bentuklahan minor seperti dataran banjir (flood plain), tanggul alam (natural levee), rerawaan (back swamps), dan tebing lembah sungai (bluff).
10	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	Bentuklahan ini merupakan kerucut vulkanik (volcanic cone) yang mempunyai relief pegunungan dan memiliki lereng bervariasi dari terjal hingga miring dan landai. Bentuklahan ini sebagian besar tersusun atas batuan beku luar dari aliran-aliran lava di lapisan permukaan. Material tersebut adalah hasil dari aktivitas gunungapi tersebut dari awal hingga aktivitasnya yang terakhir dan membentuk gunungapi

No	Bentang Lahan	Definisi Operasional
		stratovulkano.
11	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	Bentuklahan ini mempunyai relief perbukitan dan memiliki lereng yang bervariasi mulai dari terjal hingga agak miring dan tersusun atas batuan metamorfik di permukaan (seperti sekis, gneis, batu sabak, filit, atau lainnya). Pola-pola struktur lipatan ini di antaranya dicirikan oleh adanya punggungan-punggungan homoklinal memanjang (hogback) dan lembah-lembah yang ada di antaranya (subsequent valley). Terbentuknya perbukitan ini dihasilkan oleh tenaga tektonik terhadap perlapisan-perlapisan batuan sedimen yang ada dan membentuk struktur pelipatan. Selain itu proses metamorfisme telah merubah batuan sedimen atau beku menjadi batuan metamorfik yang sekarang berada di permukaan.
12	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat	Bentuklahan ini mempunyai relief perbukitan dan memiliki lereng yang bervariasi mulai dari terjal hingga agak miring. Perbukitan ini tersusun atas campuran batuan sedimen karbonat (seperti batugamping, batunapal atau lainnya) dan batuan sedimen non karbobat (seperti batupasir, batuliat, breksi, konglomerat, atau lainnya). Pola-pola struktur lipatan dicirikan antara lain oleh adanya punggungan-punggungan homoklinal memanjang (hogback) dan lembah di antaranya (subsequent valleys). Terbentuknya perbukitan ini dihasilkan oleh tenaga tektonik terhadap perlapisan-perlapisan batuan sedimen sehingga terbentuk struktur lipatan.
13	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	Bentuklahan ini berupa bukit berbentuk kubah, mempunyai lereng bervariasi dari sangat miring hingga agak miring dimana permukaannya tersusun secara dominan dari batuan beku luar (aliran lava). Lava yang muncul dari proses vulkanik ini pada umumnya bersifat effusif (tidak eksplosif)

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2022

3.2.2 Tipe Vegetasi Alami

Wujud vegetasi merupakan cerminan fisiognomi (penampakan luar) dari interaksi antara tumbuhan, hewan dan lingkungannya (Webb & Tracey 1994).

Untuk mengenal tipe-tipe ekosistem dapat digunakan berbagai ciri, tetapi ciri-ciri vegetasi (komunitas tumbuhan) adalah yang paling mudah digunakan. Dengan demikian tipe vegetasi dapat digunakan sebagai pengganti dan wakil dari ekosistem karena kehidupan sebagian besar hewan bergantung kepada vegetasi, dan juga karena vegetasi lebih mudah dikenal dan diteliti (Specht 1981).

Vegetasi alami adalah mosaik komunitas tumbuhan dalam lanskap yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Vegetasi alami beradaptasi dengan lingkungannya dan karena itu ada dalam keharmonisan dengan unsur-unsur lain dari lanskap. Vegetasi alami bukan hanya merupakan sebuah komponen dari keanekaragaman hayati yang menyediakan sumberdaya alam, tetapi juga mempunyai peran penting dalam segi hidrologi dan perbaikan iklim. Dengan demikian luasan, kualitas dan keanekaragaman vegetasi alami setiap lanskap perlu dikonservasi secara maksimal. Tanpa pengetahuan dan informasi yang memadai, hendaknya sumberdaya alam tidak dilepas begitu saja dalam upaya untuk membantu manusia memanfaatkan lingkungan. (Kuswata Kartawinata). Struktur, komposisi spesies dan sebaran geografi vegetasi ditentukan oleh faktor lingkungan, terutama iklim dan tanah. Hubungan antara vegetasi dan tanah sangat erat sehingga dapat dianggap sebagai suatu seutuhan (*entity*). Lingkungan tumbuhan adalah semua faktor (terutama suhu, air, kimia dan fisik) yang memengaruhinya, yang disebut "habitat" (Walter 1973).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017, Kabupaten Buol memiliki 10 (sepuluh) jenis klasifikasi tipe vegetasi asli/alami seperti disajikan pada Gambar berikut.

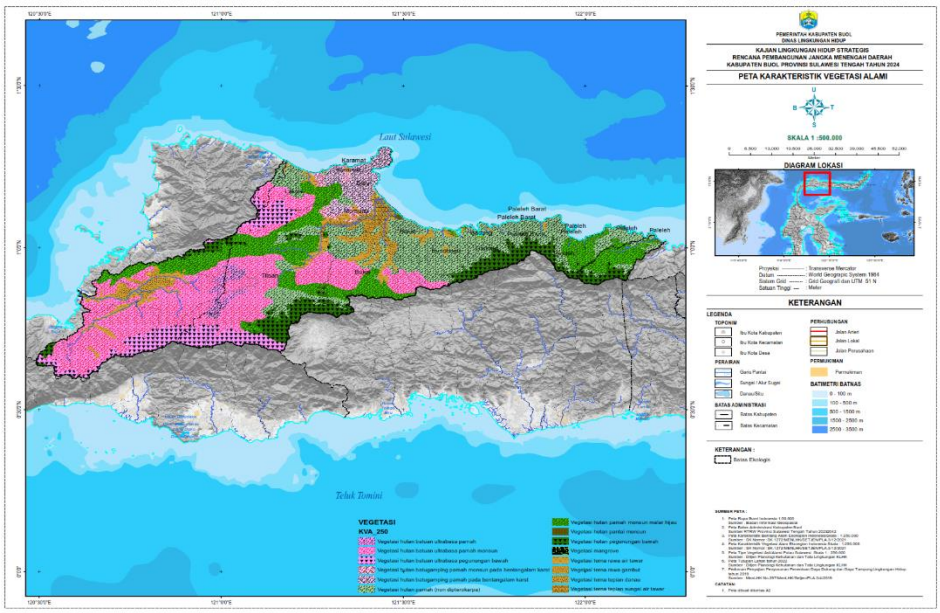

(Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2022)

Gambar 3.9 Peta Tipe Vegetasi Alami Kabupaten Buol

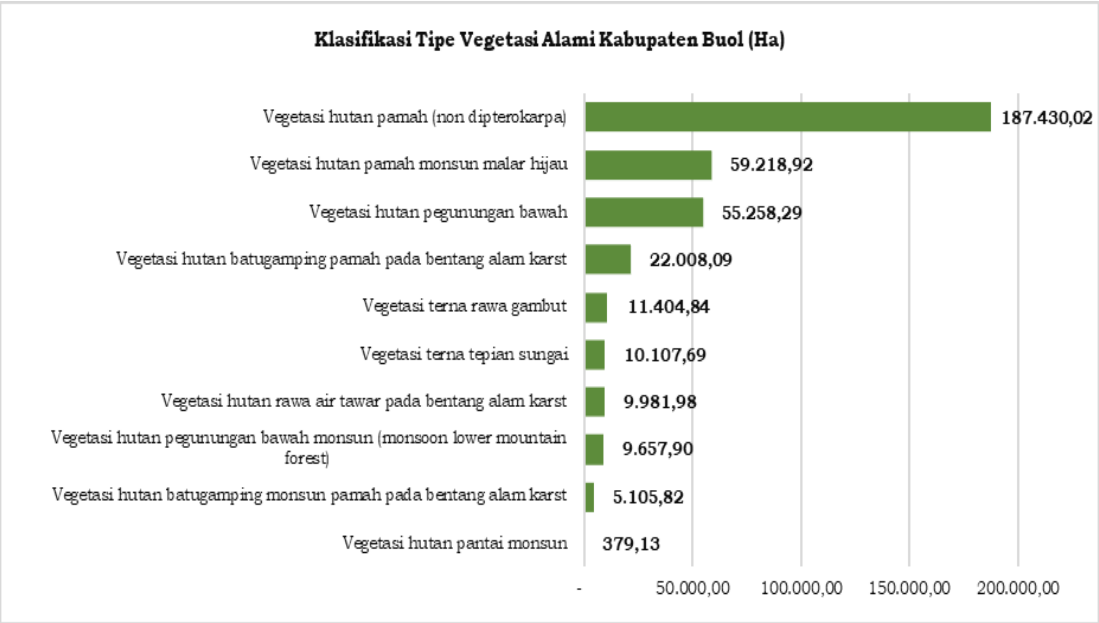

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2022

Gambar 3.10 Klasifikasi Tipe Vegetasi Alami Kabupaten Buol

Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) memiliki luas paling dominan yaitu 187.430,02 Ha atau 50,58% dan jenis Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau sebesar 59.218,92 atau 15,98% dari total luas wilayah Kabupaten

Buol. Definisi operasional vegetasi alami di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.6 Definisi Operasional Vegetasi Alami Kabupaten Buol

No	Tipe Vegetasi Alami	Definisi Operasional
1	Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan pada bentang alam karst	Vegetasi yang tumbuh menyusun komunitas hutan batugamping pada substrat batuan gamping di ekosistem pegunungan monsun. Umumnya terdapat pada elevasi di atas 1000 m dpl.
2	Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	Vegetasi yang berupa varian dari tipe hutan dipterokarpa pamah dan hutan non dipterokarpa pamah yang berkembang pada lahan pamah bentang alam karst. Tidak banyak spesies yang mampu tumbuh beradaptasi si wilayah yang berbatu gamping, sehingga banyak ditemukan spesies endemic dan langka.
3	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	Vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30–45 m, batangnya lurus dan relatif ramping, tajuknya lebat berdaun kecil, sedang sampai lebar dan selalu hijau, tumbuh pada tanah pada tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah yang beraneka (kompleks) pada elevasi 0 - 1000 m, Bergantung kepada wilayah dan iklimnya dominasi spesies pada komunitas ini adalah bukan dari kelompok Dipterocarpaceae.
4	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau	Vegetasi dengan komunitas hutan yang tumbuh dan berkembang pada lahan kering pamah pada wilayah yang beriklim monsun dengan karakteristik hutan-hutan yang selalu hijau atau malar hijau meskipun pada musim kemarau yang kering. Struktur dan komposisi floristik hutan tersebut mirip seperti hutan hujan meskipun perawakannya lebih kecil dan stratifikasi pohon tidak terlalu kompleks.
5	Vegetasi hutan pegunungan bawah	Vegetasi yang terdapat pada wilayah dengan elevasi (750) 1000-2500 m. Vegetasi pada habitat ini dapat berupa hutan lebat dengan tajuk yang

No	Tipe Vegetasi Alami	Definisi Operasional
		tidak rata dengan komposisi floristik yang kaya spesies. Umumnya ukuran batang pohonnya sudah mengecil, demikian juga daunnya. Pada batang pohon biasanya tumbuh melimpah berbagai jenis epifit dan tumbuhan memanjat dan juga lumut tumbuh baik pada batang pohon maupun substrat tanah dan batuan di lantai dasar hutan. Jenis-jenis dari suku Fagaceae dan Lauraceae melimpah. Jenis-jenis pohon lain yang umum terdapat antara lain adalah *Schima wallichii, Dacrycarpus imbricatus, Turpinia pomifera, Eugenia banksii, Engelhardia spicata, Lithocarpus* spp., Quercus spp., Palaquium spp., dan juga paku pohon (Cyathea spp.).
6	Vegetasi hutan pantai monsun	Wilayah pantai yang beriklim monsun dengan komunitas vegetasi di sepanjang pantai di belakang pantai pasir yang ditumbuhi komunitas pes-caprae, dimana berkembang spesies dominan dari semak atau komunitas perdu dan pohon kecil. Komposisi floristik hutan pantai seragam di seluruh Indonesia, baik yang terdapat di kawasan beriklim basah maupun beriklim kering (monsun). Spesies semak atau komunitas perdu dan pohon kecil. yang banyak ditemukan di wilayah ini adalah *Ardisia elliptica, Caesalpina bonduc, Clerodendron inerme, Colubrina asiatica, Cycas rumphii, Desmodium umbellatum, Dodonaea viscosa, Erythrina variegata, Messerschmidia argentea, Pemphis acidula, Pluchea indica, Premna corymbosa, Scaevola taccada, Sophora tomentosa* dan *Tacca leontopetaloides*. Spesies pohon lain juga ditemukan antara lain adalah *Barringtonia asiatica* dan *Calophyllum inophyllum.*
7	Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)	Vegetasi yang terdapat pada wilayah yang beriklim monsun dengan elevasi 1000 m dpl - 2000 m dpl. Umumnya didominasi oleh spesies pohonnya berdaun berukuran sedang sedang (mesofil) dan penampakan tajuk pohon (kanopi) yang relatif tidak rata. Beberapa spesies pohon yang mencirikan adalah Castanopsis acuminatissima, yang berasosiasi dengan Lithocarpus dan Araucaria

No	Tipe Vegetasi Alami	Definisi Operasional
		spp Pada elevasi mendekati 1700 m dpl terdapat transisi ke hutan berlumut yang dicirikan oleh hutan Nothofagus. Sesuai dengan kondisi iklim wilayah ini keragaman spesiesnya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah pegunungan bawah yang relatif basah.

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2022

3.2.3 Penutupan Lahan

Penutupan Lahan adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan kenampakan penutupan lahan dan vegetasi. Penafsiran untuk penutupan lahan vegetasi dibagi kedalam dua klasifikasi utama yaitu areal berhutan dan areal tak berhutan.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesi (RBI) skala 1:50.000 tahun 2016 tersedia peta penutupan lahan. Peta penutupan lahan tersebut diperbarui dengan menggunakan Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018 dan tahun 2019. Peta penggunaan lahan yang merupakan terbitan dari Kanwil/Kanta ATR/BPN masih tersedia untuk jangka waktu tahun yang sudah melebihi 2 tahun. Untuk memperbarui peta penggunaan lahan, diperlukan proses survei setiap jenis penutupan lahan. Oleh karena itu, peta penutupan lahan yang berasal dari RBI dan sudah diperbarui akan menjadi salah satu bahan untuk melakukan analisis dan penyusunan rencana pola ruang. Jenis dan distribusi luas Penutupan lahan Kabupaten Buol selengkapnya dapat dilihat di Gambar berikut.

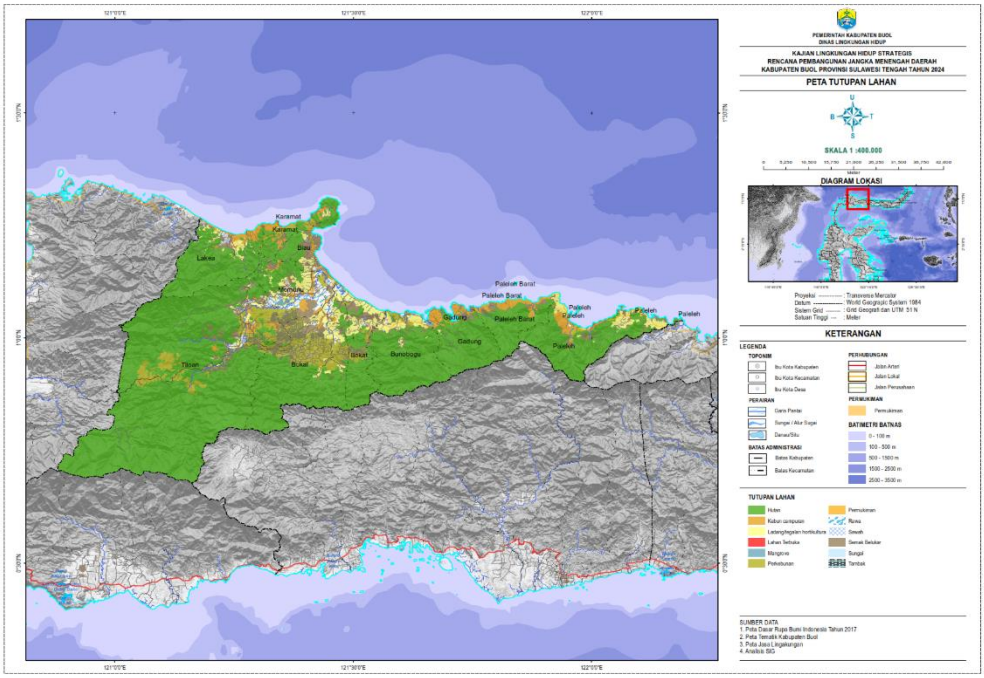

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2022

Gambar 3.11 Peta Penutupan Lahan Kabupaten Buol

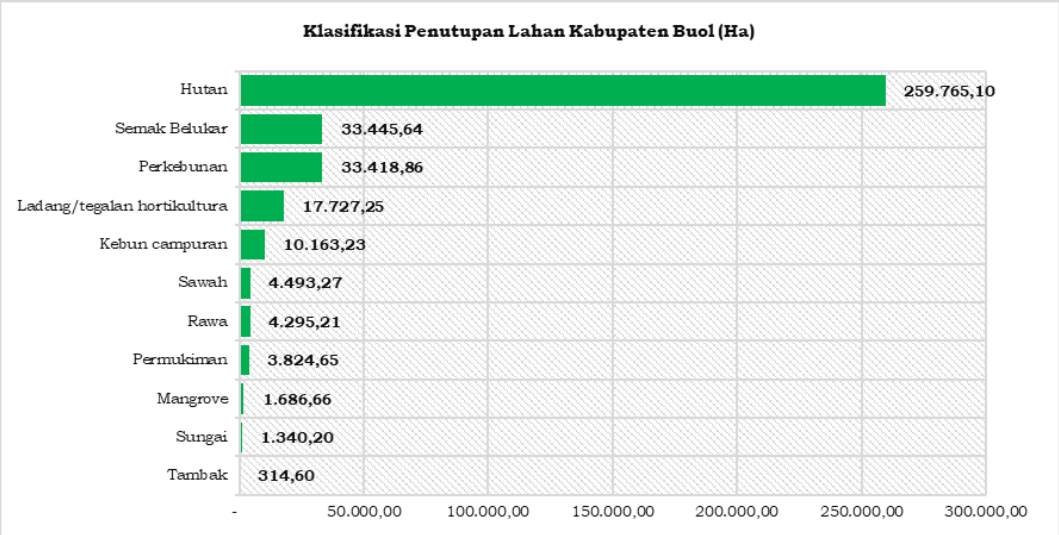

Sumber : Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK 2022

Gambar 3.12 Klasifikasi Penutupan Lahan Kabupaten Buol

Penutupan lahan terluas di Kabupaten Buol adalah Hutan dengan luas kurang lebih 259.765,10 Ha atau 70,10% dari total luas kabupaten. Selanjutnya Semak belukar seluas 33.445,64 atau 9,03% dan perkebunan sekitar 33.418,86 atau 9,02%.

3.3 Baseline Enam Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kemampuan atau kemampuan ekosistem dalam mendukung kehidupan organisme dengan baik dan mempertahankan produktivitas, kemampuan beradaptasi dan memperbaharui diri dan disebut sebagai daya dukung lingkungan. Uraian tersebut memberi makna bahwa daya dukung lingkungan adalah daya dukung kehidupan manusia. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis yang berbeda-beda seiring dengan aktivitas manusia untuk berbagai kepentingan, sehingga daya dukung lingkungan sangat bervariasi. Selain itu daya dukung lingkungan juga memberikan makna kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan keduanya. Disisi lain proses Pembangunan setiap daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Manusia adalah makhluk hidup yang kebutuhannya lebih kompleks dari pada makhluk hidup lain di muka bumi ini.

1. **Daya Dukung Pangan**

Status daya dukung dan daya tampung pangan sangat ditentukan antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) sehingga menghasilkan status terlampaui atau tidak terlampaui daya dukung daya tampung penyediaan pangan diukur oleh angka ambang batas penduduk. Jika ketersedian yang ada melampaui ambang batas kebutuhan penduduknya maka akan terlampaui daya dukung daya tampung suatu wilayah tersebut.

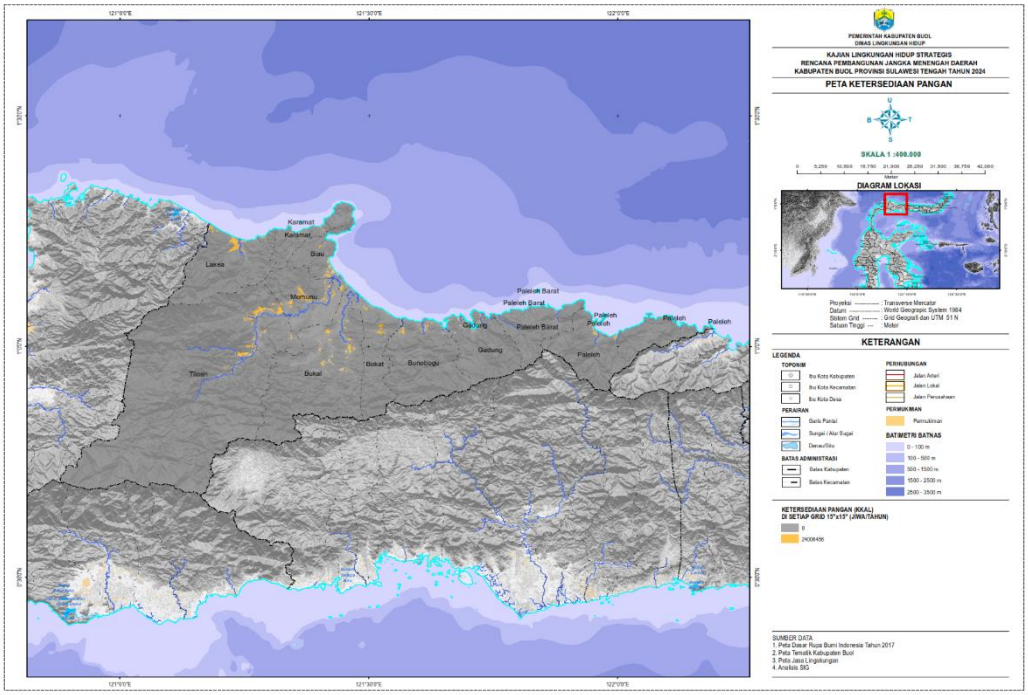

Sumber: DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.13 Peta Ketersediaan Pangan Kabupaten Buol

Ketersediaan pangan dalam system grid sebesar 35.766.157.687 Kkal/tahun dan dengan jumlah populasi penduduk dalam system grid sebesar 147.880 jiwa maka ambang batas penduduk dalam penyediaan pangan Kabupaten Buol sebesar 45.576 jiwa, terdapat selisih (minus) jumlah penduduk sebesar –102.304 jiwa. Asumsinya adalah semakin tinggi nilai indeks jasa lingkungan penyediaan di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan di wilayah tersebut.

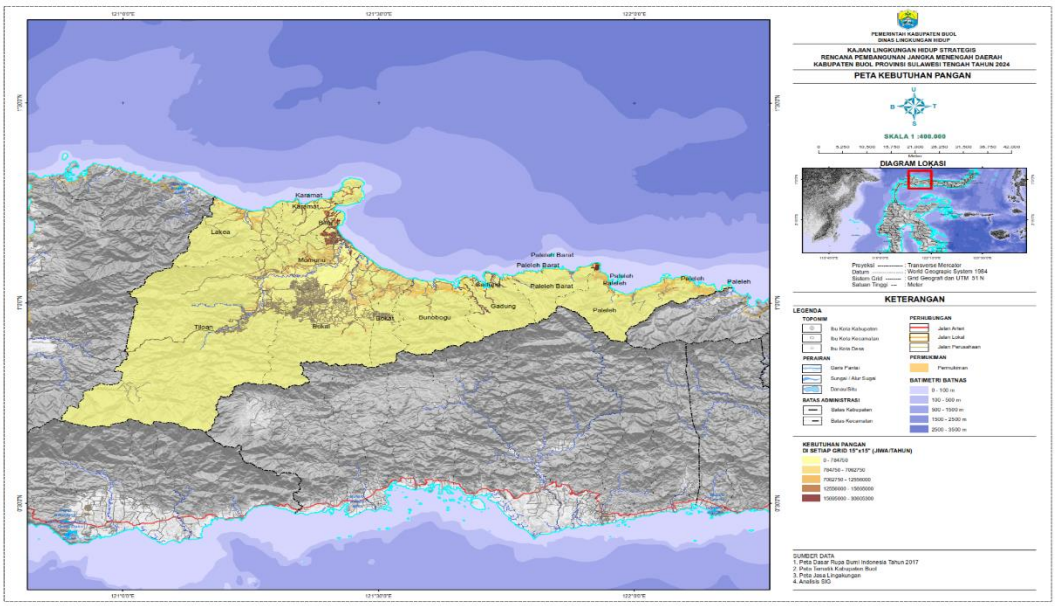

Sumber: DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.14 Peta Kebutuhan Pangan Kabupaten Buol

Dengan hasil tersebut maka secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan pangan kabupaten Buol sudah Terlampaui.

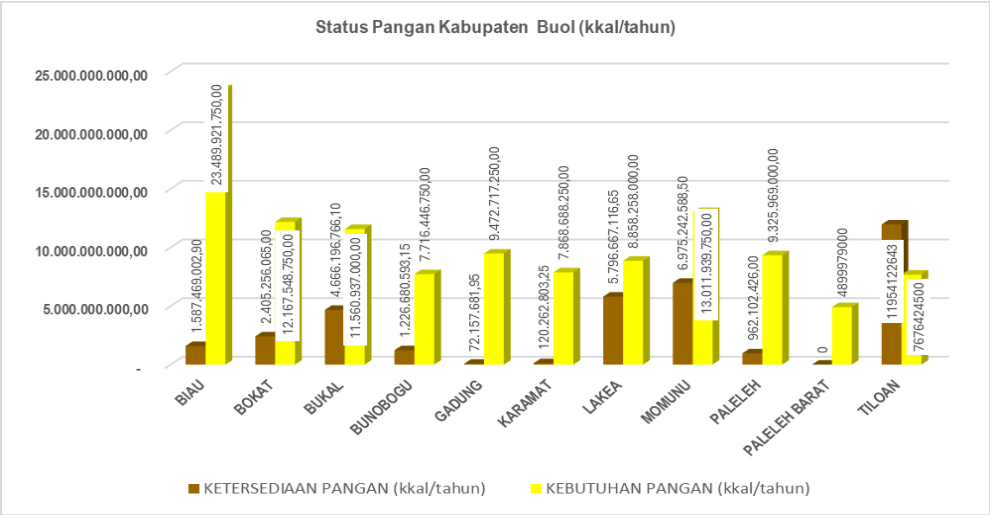

Sumber: DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.15 Status Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol

Terlihat bahwa secara administrasi hanya Kecamatan Tiloan yang ketersediaan pangannya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pangannya namun secara keseluruhan di Kabupaten Buol Status panganya sudah Terlampaui.

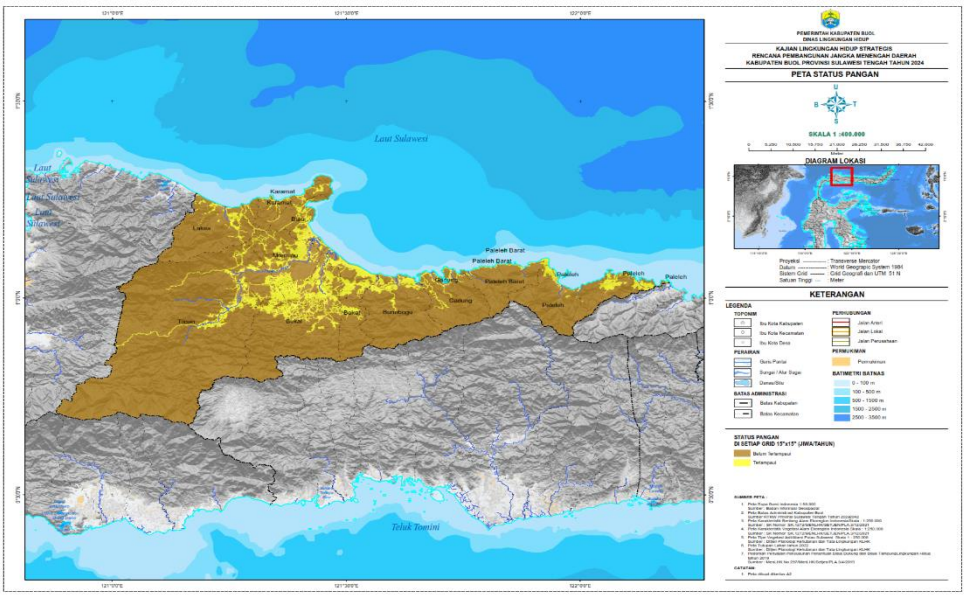

Gambar 3.16 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Buol

Secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan pangan Kabupaten Buol Terlampaui, pada 10 adminitrasi kecamatan di wilayah Kabupaten Buol. Status ini menjadi bagian penting untuk menjalankan kebijakan pangan dimasa yang akan datang.

2. Daya Dukung Air

Ketersediaan air di Kabupaten Buol dihitung menggunakan data air dari beberapa sungai. Asumsinya air sungai yang melintas di Kabupaten Buol dapat digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal.

Ketersediaan air di Kabupaten Buol dihitung menggunakan data debit air baku permukaan material aliran sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Buol. Dengan asumsi material air sungai yang melintas di Kabupaten Buol dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal. Debit air sungai yang bersumber dari Cipta Karya Sumberdaya Air (CIKASDA) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yaitu debit andalan (Q80) sungai 3.062.350.000 m3/tahun yang selanjutnya didistribusikan ke dalam sistem grid berdasarkan indeks jasa lingkungan penyedia air Kabupaten Buol, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai indeks di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran

potensi ketersediaan di wilayah tersebut. Dihasilkan ketersediaan air total untuk Kabupaten Buol sebesar 2.663.122.321 m3/tahun.

Tabel 3.7 Debit Air (Q80) Sungai di Kabupaten Buol

NAMA SUNGAI	DEBIT SESAAT	Debit Andalan (Q80)	
	(m3/detik)	(Juta m3/Tahun)	m3/Tahun
Leok I	0,08	29,2	29.200.000
Bunobogu	0,02	7,3	7.300.000
Bokat	0,05	18,25	18.250.000
Bukamog	0,29	105,85	105.850.000
Modo	0,19	69,35	69.350.000
Matinan	2,6	949	949.000.000
Lakea	3,64	1328,6	1.328.600.000
Air Terang	1,52	554,8	554.800.000
Total			3.062.350.000

Sumber : (CIKASDA, 2023)

Ketersediaan Air dalam *system grid* sebesar 2.663.122.321 m3/tahun yang kemudian dikurangi kebutuhan air untuk lahan serta dengan jumlah populasi penduduk dalam *system grid* sebesar 140.887 jiwa.

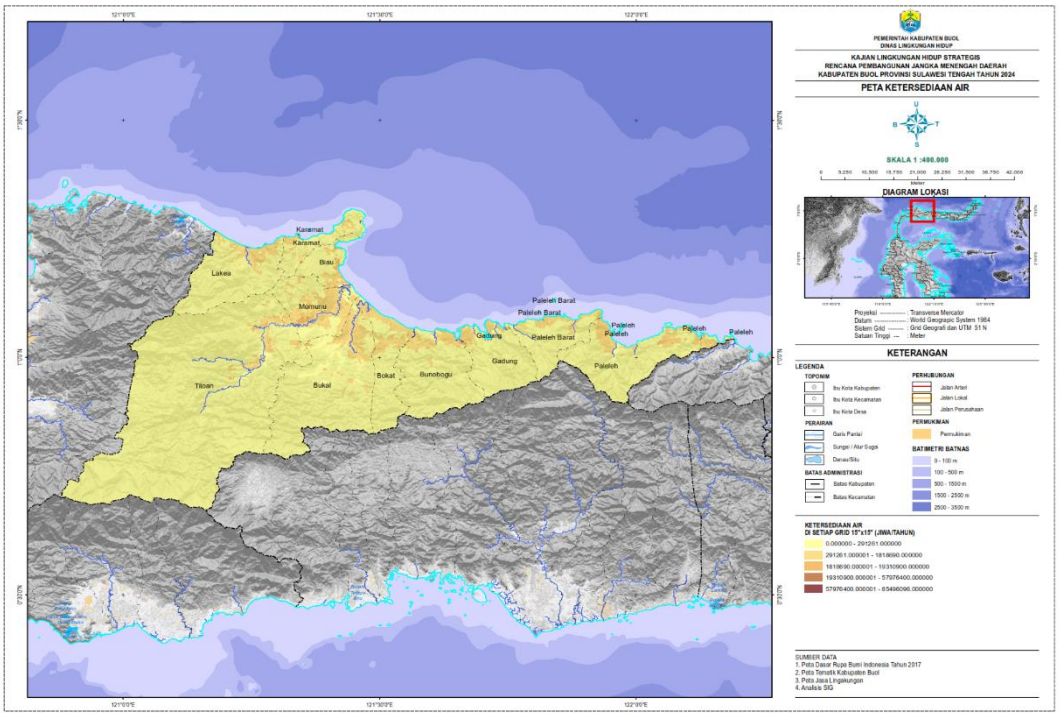

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.17 Peta Ketersediaan Air Kabupaten Buol

Analisis yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kebutuhan air untuk lahan dan domestik (rumah tangga). Kebutuhan lahan dihitung menggunakan pendekatan distribusi kebutuhan air untuk lahan berdasarkan tutupan lahan 1 liter air/detik (Lutfi Muta'ali, 2019) yang dikonversi kedalam kapita dengan perbandingan air kebutuhan lahan (Siswanto, 2014).

Kebutuhan domestik/rumah tangga dihitung berdasarkan angka standar air minum dan rumah tangga sebesar 43,2 m3/tahun dengan koefisien 2,0 merupakan faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan, domestik dan lainnya, Hasil yang diperoleh bahwa kebutuhan air total untuk Kabupaten Buol sebesar 719.458.565 m3/tahun.

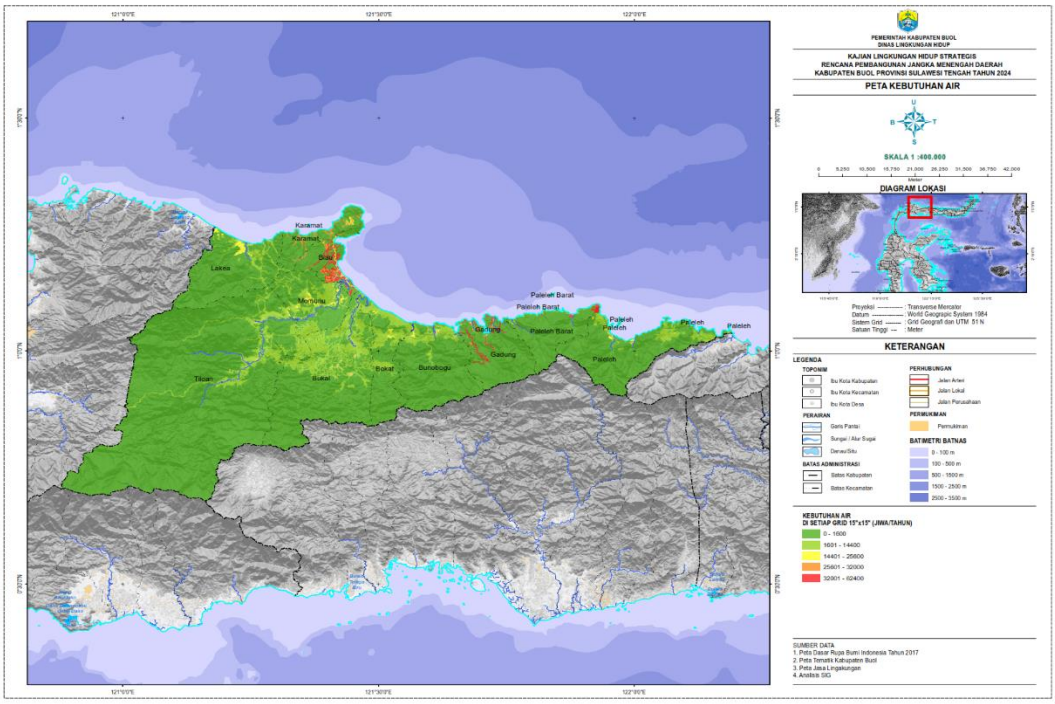

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.18 Peta Kebutuhan Air Kabupaten Buol

Dengan ketersediaan Air dalam *system grid* sebesar 2.663.122.321 m3/tahun yang kemudian dikurangi kebutuhan air untuk lahan serta dengan jumlah populasi penduduk dalam *system grid* sebesar 140.887 jiwa maka

ambang batas penduduk dalam penyedia air Kabupaten Buol sebesar 22.650.211 jiwa, terdapat selisih (surplus) jumlah penduduk sebesar 22.495.859 jiwa.

Dengan hasil tersebut maka secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyedia Air kabupaten Buol Belum Terlampaui.

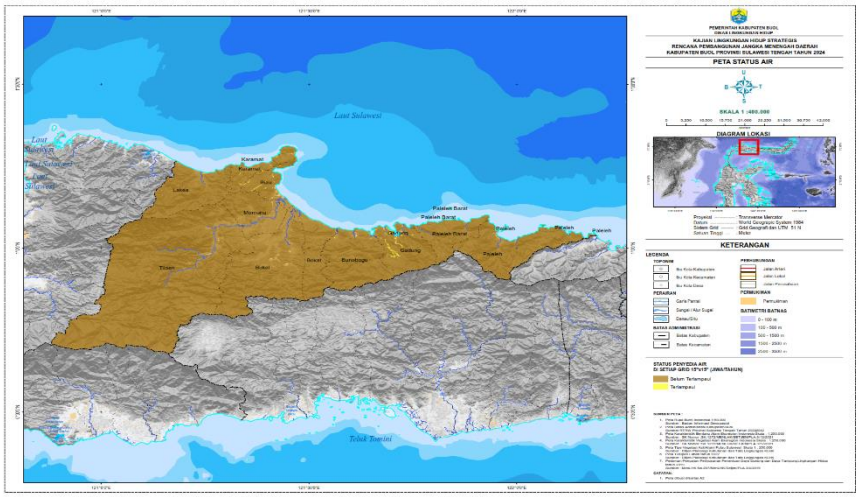

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.19 Peta Status Air Kabupaten Buol

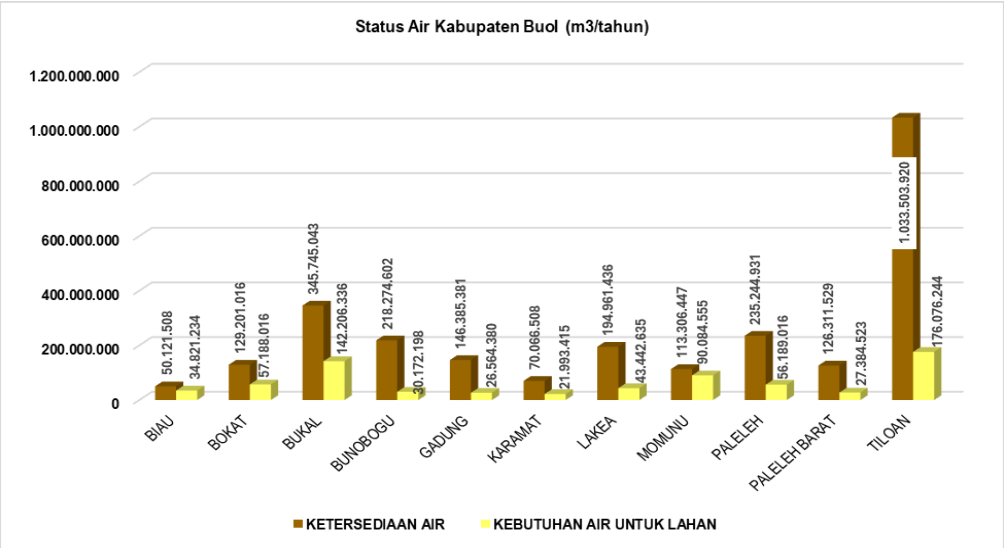

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.20 Daya Dukung dan Daya Tampung Penyedia Air Kabupaten Buol

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa hasil tersebut maka secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyedia Air kabupaten Buol **Belum Terlampaui**.

3.3.2 Perkiraan Mengenai Dampak Risiko Lingkungan Hidup

Dampak dan risiko lingkungan hidup dalam kajian ini dipandang dari perubahan kondisi lingkungan hidup yang mendasar, dan dapat diukur melalui media lingkungan seperti kualitas udara, kualitas air dan masalah persampahan. Pemerintah daerah diharuskan melakukan upaya-upaya strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang telah terjadi, dengan tujuan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan, sehingga fungsi lingkungan hidup akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang.

1. Kualitas Udara

Salah satu kerusakan lingkungan yang masuk dalam dampak resiko lingkungan hidup pencemaran udara, yang ditandai dengan penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer tersebut bisa berupa sulfur dioksida (So2), Karbon monoksida (CO), Nitrogen dioksida (No2), Ozon (O3), Hidrokarbon (HC), dan Particulate Matter<10µm (PM-10). Beberapa parameter yang ditetapkan untuk menentukan tingkat kualitas udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Buol pada tahun 2023 dilakukan pada 4 lokasi pemantauan yaitu wilayah transportasi, industri,

pemukiman dan perkantoran.

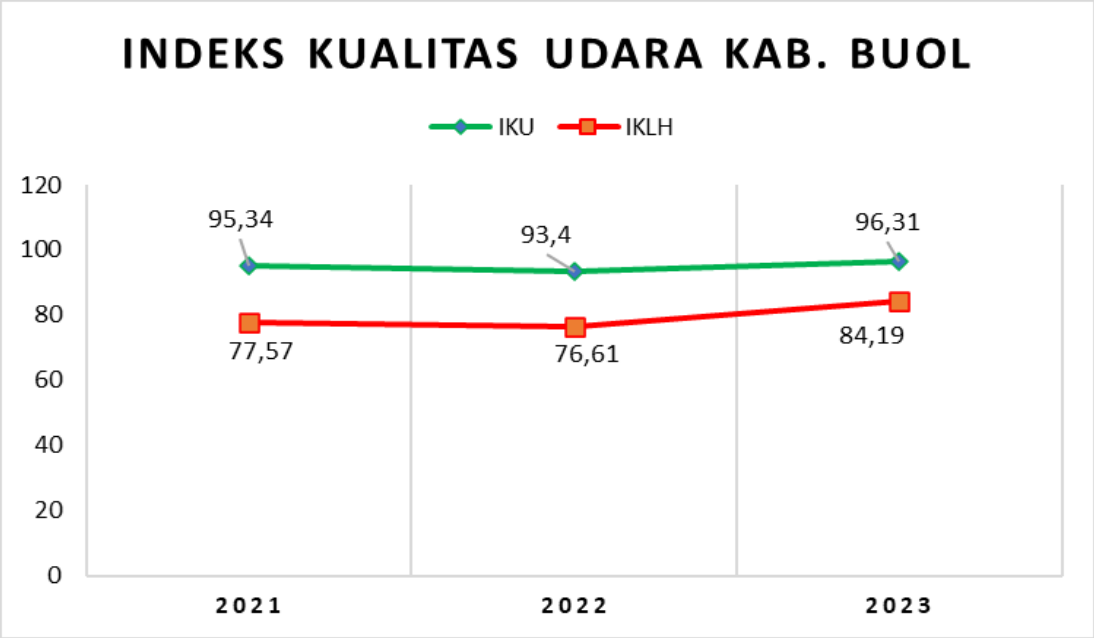

Sumber: DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.21 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Buol

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan pengaturan kualitas udara, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan kualitas udara di Kabupaten Buol disajikan pada gambar berikut.

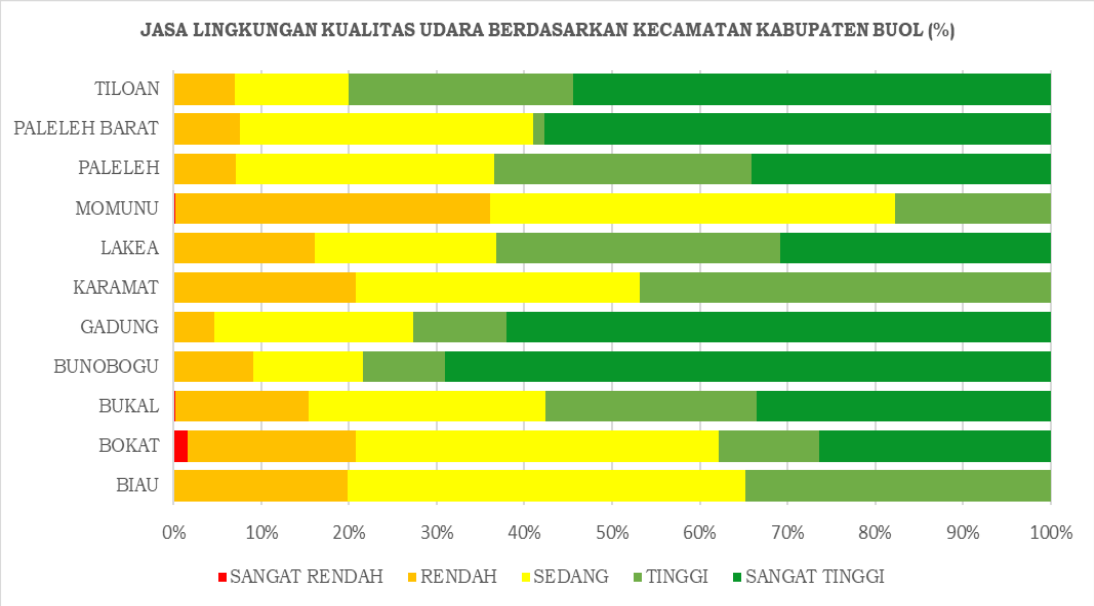

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.22 Jasa Lingkungan Udara berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol

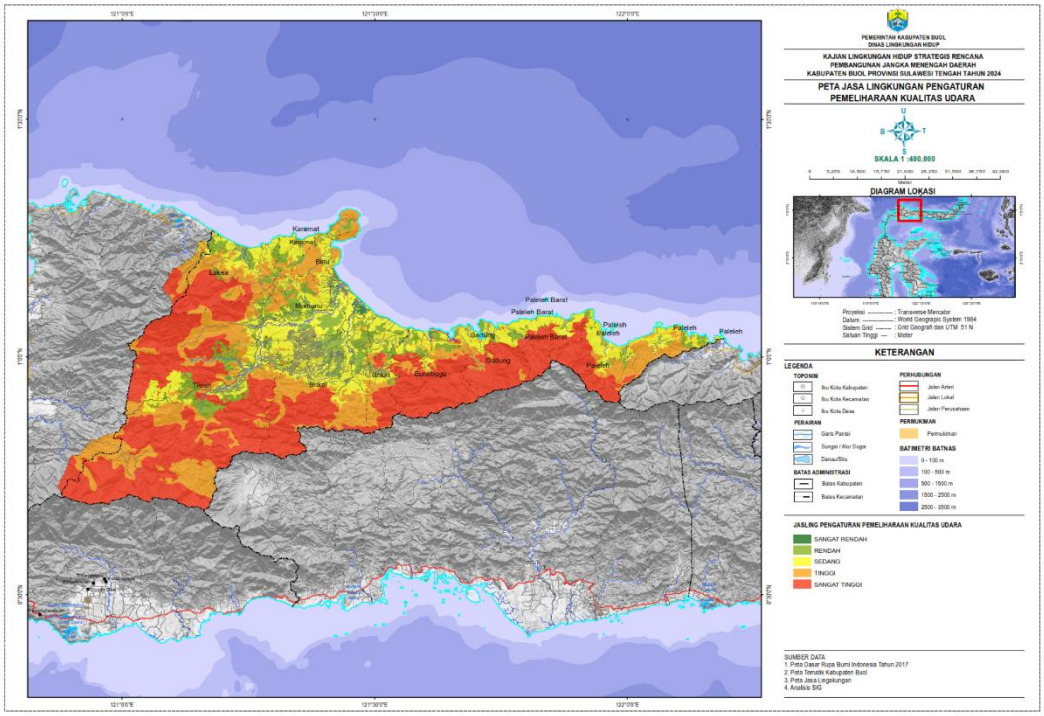

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.23 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Kabupaten Buol

Jasa lingkungan pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Buol sangat penting untuk diketahui mengingat wilayah ini terus berkembang sehingga peningkatan pembangunan di kawasan tersebut tentunya juga akan meningkatkan polutan yang diproduksi dari penggunaan sumber-sumber polutan tinggi seperti kendaraan bermotor, *air conditioner* dan sebagainya.

Tabel 3.8 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol

NO	KECAMATAN	JASA LINGKUNGAN PENGATURAN PEMELIHARAAN KUALITAS UDARAKABUPATEN BUOL (%)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
1	BIAU	0,00%	0,35%	0,80%	0,61%	0,00%
2	BOKAT	0,07%	0,85%	1,84%	0,51%	1,17%
3	BUKAL	0,03%	2,11%	3,75%	3,36%	4,66%
4	BUNOBOGU	0,00%	0,70%	0,97%	0,72%	5,34%
5	GADUNG	0,00%	0,25%	1,20%	0,57%	3,29%
6	KARAMAT	0,00%	0,61%	0,95%	1,38%	0,00%
7	LAKEA	0,01%	1,15%	1,49%	2,33%	2,21%
8	MOMUNU	0,01%	1,64%	2,12%	0,81%	0,00%
9	PALELEH	0,00%	0,57%	2,36%	2,35%	2,73%
10	PALELEH BARAT	0,00%	0,30%	1,34%	0,05%	2,32%
11	TILOAN	0,00%	2,80%	5,22%	10,26%	21,83%
Total		**0,12%**	**11,34%**	**22,04%**	**22,95%**	**43,55%**

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Berdasarkan perhitungan jasa ekosistem terlihat bahwa kinerja layanan jasa lingkungan pengatur pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Buol saat ini dominan berada di rentang kelas berpotensi Sangat Tinggi (tinggi) dengan luas sebesar 43,55 % dari total luas Kabupaten Buol. Kelas berpotensi Tinggi memiliki luas sebesar sebesar 22,95 % dan kelas berpotensi Sedang memiliki luas sebesar 22,04 % sedangkan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan pengatur kualitas udara sebesar 11,46 % dari total luas Kabupaten Buol.

2. Kualitas Air

Kualitas adalah karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan tertentu dari berbagai sumber air. Menurut Acehpedia (2010), kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi, atau uji kenampakan (bau dan warna). Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkatan mutu air ini dibagi berdasarkan kemungkinan penggunaannya bagi suatu

peruntukan air (*designatetd beneficial water uses*). Sedangkan status mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

Pengukuran baku mutu air di Sungai di Kabupaten Buol sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ditentukan oleh beberapa sifat fisik air seperti : suhu, warna, kekeruhan, nilai salinitas dan konduktivitas atau Daya Hantar Listrik (DHL), total *dissolved solid* (TDS), nilai *Total Suspended Solid* (TSS); taraf keudaraan di dalam tubuh air yang diidentifikasi lewat beberapa sifat : *dissolved oxygen* (DO) dan chemical oxygen demand (COD); taraf kehidupan mikroba air *Biological Oxygen Demand* (BOD) dan kandungan NO^3. Hasil pengukuran dan pengujian baku mutu air Sungai masih memenuhi baku mutu yang diprasyaratkan PP No. 82 Tahun 2001. Adapun gambaran pengujian baku mutu disajikan pada gambar berikut

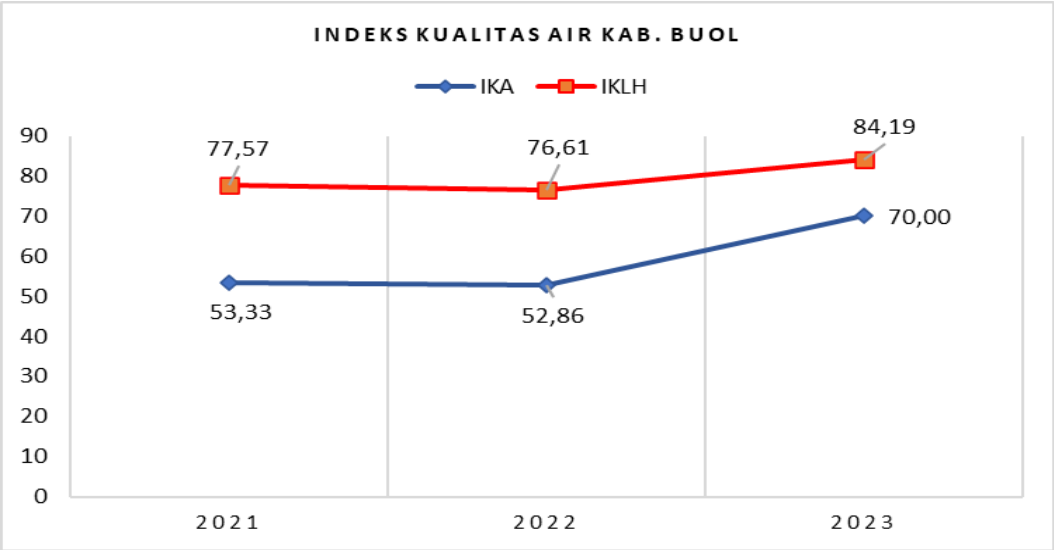

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.24 Indeks Kulaitas Air Kabupaten Buol

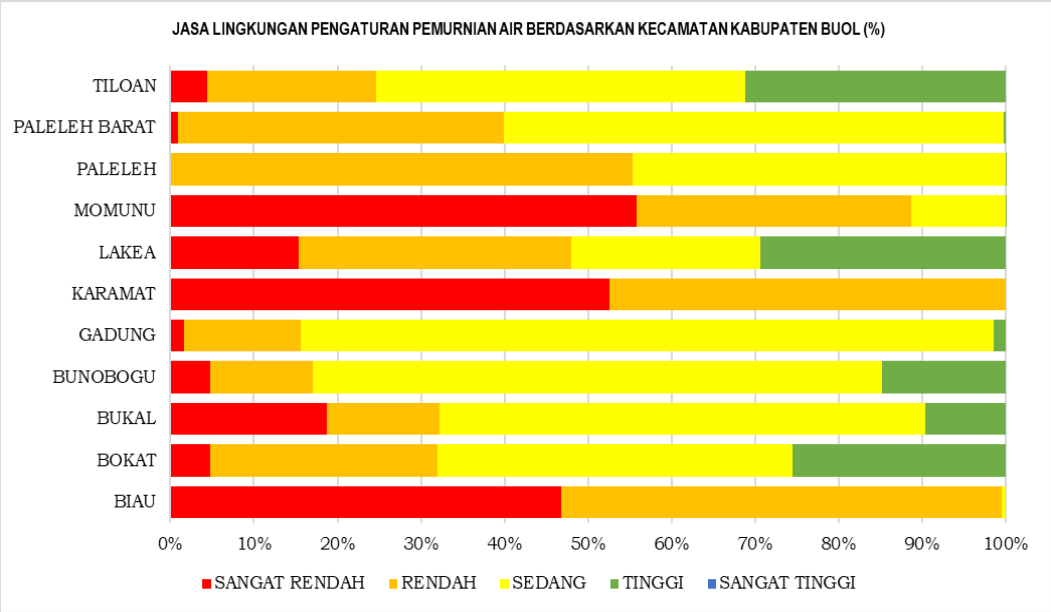

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.25 Jasa Lingkungan Pengaturan Permurnian Air berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol

Hal yang perlu mendapat perhatian pada pengembangan lahan pertanian adalah daya dukung lingkungan, karena pengembangan lahan pertanian akan meningkatkan pembukaan lahan yang dapat menyebabkan meningkatnya erosi dan sedimentasi, serta penurunan kuantitas dan kualitas air. Penurunan kualitas air dapat pula disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat akan perlindungan sumber air dan sepadan sungai. Adapun sebaran wilayah fungsi ekosistem pengaturan pemurnian air di Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut.

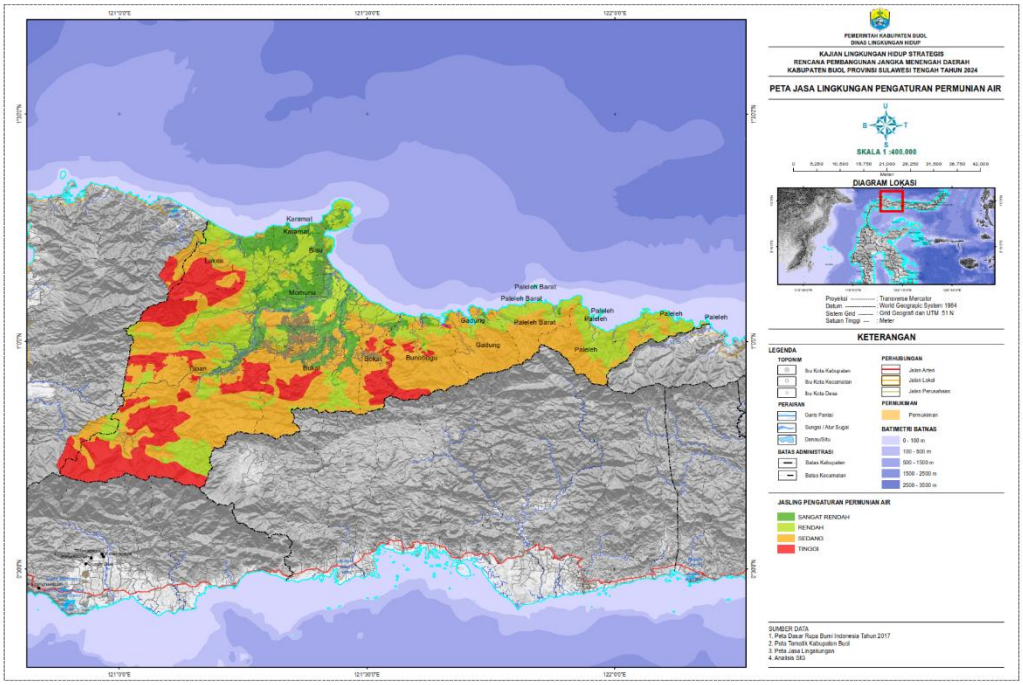

Sumber: DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.26 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Buol.

Tabel 3.9 Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol

NO	KECAMATAN	Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Buol (%)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
1	BIAU	0,82%	0,92%	0,01%	0,00%	0,00%
2	BOKAT	0,21%	1,21%	1,89%	1,13%	0,00%
3	BUKAL	2,60%	1,88%	8,09%	1,34%	0,00%
4	BUNOBOGU	0,37%	0,95%	5,26%	1,15%	0,00%
5	GADUNG	0,08%	0,75%	4,39%	0,08%	0,00%
6	KARAMAT	1,55%	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%
7	LAKEA	1,10%	2,35%	1,63%	2,11%	0,00%
8	MOMUNU	2,56%	1,51%	0,52%	0,00%	0,00%
9	PALELEH	0,00%	4,43%	3,58%	0,00%	0,00%
10	PALELEH BARAT	0,04%	1,57%	2,40%	0,01%	0,00%
11	TILOAN	1,77%	8,10%	17,70%	12,53%	0,00%
Total		**11,11%**	**25,06%**	**45,48%**	**18,35%**	**0,00%**

Berdasarkan hasil analisis kinerja jasa lingkungan, sebaran kinerja layanan pengatur pemurnian air di Kabupaten Buol dominan berada di rentang kelas berpotensi Sedang sebesar 45,48 %, kelas berpotensi Rendah (rendah) memiliki luas sebesar 25,06 %, kelas berpotensi sangat rendah 11,11 % dan kelas berpotensi Tinggi (tinggi memiliki luas sebesar 18,35 % dari total luas Kabupaten Buol.

Wilayah yang memiliki tingkat kinerja jasa lingkungan pengatur pemurnian air kategori Tinggi (tinggi) berada di Kecamatan Tiloan dengan luas sebesar 12,35 %, dan Kecamatan Lakea dengan luas sebesar 2,11 %. Kategori kelas berpotensi Sedang berada di Kecamatan Tiloan dengan luas sebesar 17,70 %, sebagian wilayah Kecamatan Bukal sebesar 8,09 % dan Kecamatan Bunobogu sebesar 5,26 % dari total luas Kabupaten Buol. Kategori rendah fungsi layanan pengaturan pemurnian air di Kabupaten Buol sebagian besar berada di Kecamatan Tiloan dengan luas sebesar 8,10 %, sebagian wilayah Kecamatan Paleleh sebesar 4,43 % dan Kecamatan Lakea sebesar 2,35 % dari total luas Kabupaten Buol.

Tingkat kinerja jasa lingkungan pengatur pemurnian air di Kabupaten Buol juga sangat dipengaruhi oleh bentuk penggunaan lahan yang terdapat di wilayah tersebut seperti disajikan pada gambar berikut

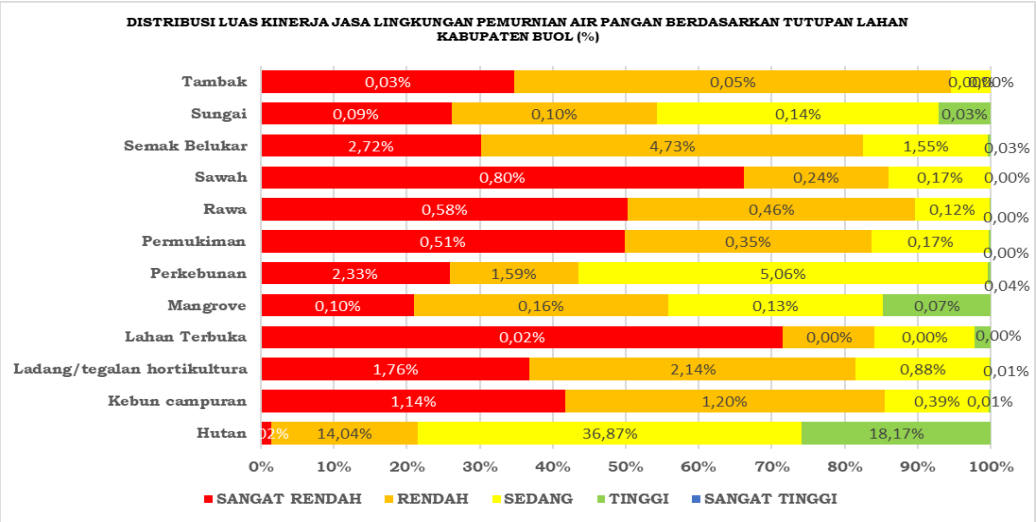

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.27 Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Berdasarkan Tutupan Lahan di Kabupaten Buol

Kelas berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) dipengaruhi oleh tutupan lahan berupa hutan dengan luas sebesar 18,17 % dan, kelas berpotensi sedang juga dipengaruhi oleh tutupan lahan berupa hutan dengan luas sebesar 36,87 %, dan untuk kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) didominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan luas sebesar 14,04 %, perkebunan sebesar 5,06 % dan semak belukar sebesar 4,73 % dari total luas Kabupaten Buol.

3. Persampahan

Pengelolaan sampah yang belum tertangani menjadi persoalan tersendiri pada setiap daerah yang terus mengalami perkembangan seperti di Kabupaten Buol. Kurangnya penerapan regulasi persampahan di daerah, lemahnya kebijakan daerah terhadap penanganan sampah, budaya bersih masyarakat yang minim dan sarana prasarana pengelolaan sampah yang terbatas serta lemahnya penegakan hukum dalam penanganan sampah menjadi faktor penyebab permasalahan sampah di daerah. Persoalan kebersihan sangat berkaitan dengan masalah sampah, persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan dan pedesaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan.

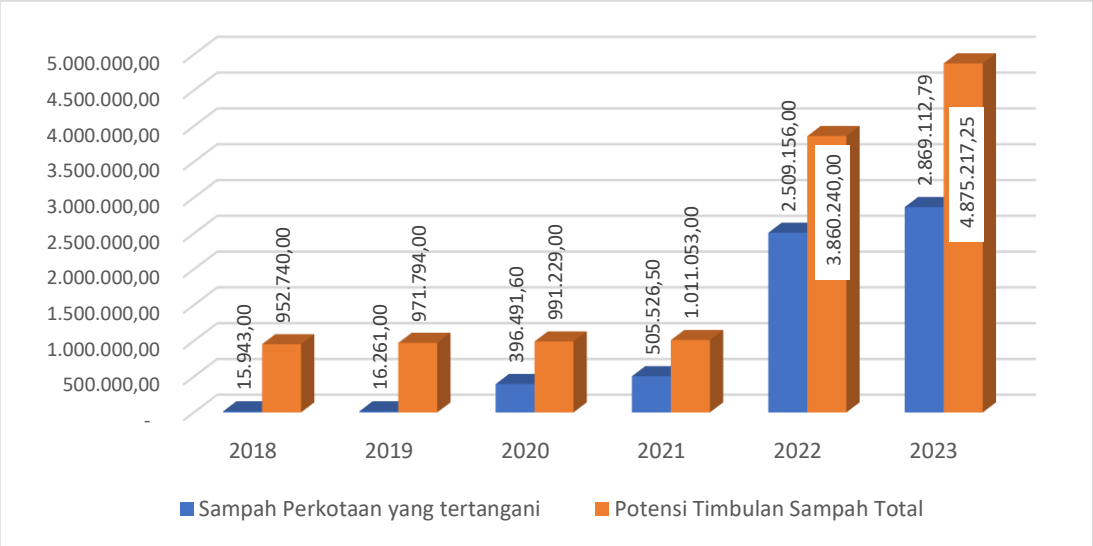

Sumber : DDTLH Kabupaten Buol, 2023. (diolah Kembali oleh Tim Pembuat KLHS)

Gambar 3.28 Sampah yang Tertangani dan Sampah yang tidak Tertangani

3.3.3 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

1. Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Fungsi ekosistem yang memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Buol disajikan pada Gambar dibawah ini :

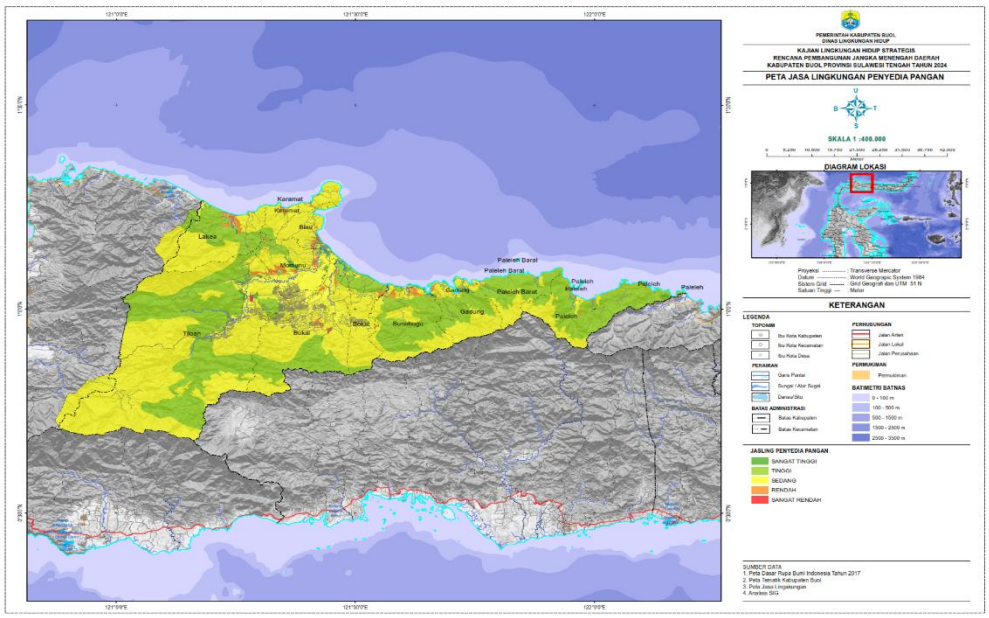

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.29 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Buol

Secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Buol berada di rentang kelas berpotensi Sedang dengan total luas 57,33%. Berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) seluas 1,64% dan berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) seluas 40,85% dari total luas Kabupaten Buol. Kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan ekosistem penyedia pangan tersebar di seluruh Kecamatan namun luas dominan berada di Kecamatan Tiloan dengan luas 24,82%, dan Kecamatan Bukal dengan luas 9,89%. Sementara itu sebesar 1,64% luas wilayah yang berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) di Kabupaten Buol terdistribusi dominan di Kecamatan Momunu 0,32% dan di Kecamatan Lakea seluas 0,29%. Untuk kelas Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam memberikan layanan penyedia pangan seluas 40,85% terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 15,15% dan di Kecamatan Palele dengan luas 6,31% dari total luas total wilayah Kabupaten Buol.

Tabel 3.10 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol

NO	KECAMATAN	JASA LINGKUNGAN PENYEDIA PANGAN BERDASARKAN KECAMATAN KABUPATEN BUOL (%)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
1	Biau	0,01%	0,17%	1,38%	0,06%	0,13%
2	Bokat	0,00%	0,12%	3,05%	1,16%	0,10%
3	Bukal	0,03%	0,21%	9,89%	3,72%	0,06%
4	Bunobogu	0,01%	0,21%	2,82%	4,59%	0,09%
5	Gadung	0,00%	0,06%	2,61%	2,52%	0,10%
6	Karamat	0,01%	0,07%	2,78%	0,06%	0,03%
7	Lakea	0,03%	0,29%	3,84%	3,01%	0,03%
8	Momunu	0,02%	0,34%	3,37%	0,72%	0,13%
9	Paleleh	0,00%	0,06%	1,65%	6,19%	0,12%
10	Paleleh barat	0,00%	0,02%	1,11%	2,88%	0,00%
11	Tiloan	0,04%	0,10%	24,82%	14,95%	0,20%
Total		**0,16%**	**1,64%**	**57,33%**	**39,87%**	**0,98%**

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

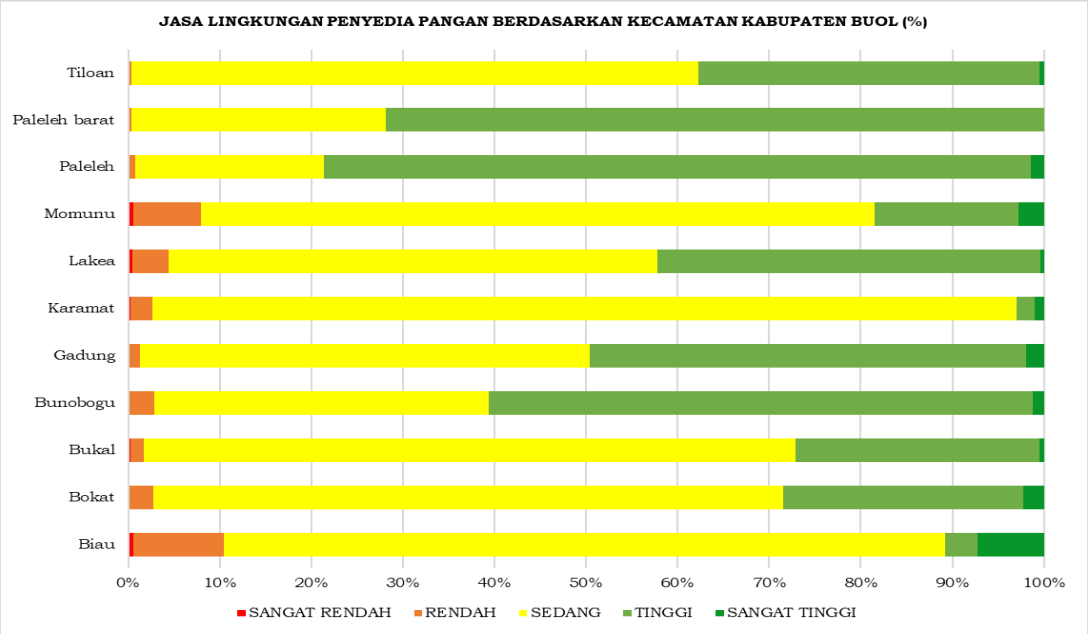

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.30 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol

Jenis penutupan lahan yang berpengaruh di kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan penyedia pangan adalah jenis hutan dengan luas 39,34%. Kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam

memberikan layanan penyedia pangan dipengaruhi oleh jenis penutupan lahan permukiman 0,42 % serta untuk kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dipengaruhi oleh jenis penutupan hutan dengan luas 30,61% dari total luas wilayah Kabupaten Buol.

Dalam pertimbangan pembuatan perencanaan, khususnya perencanaan lahan pertanian yang berkelanjutan jenis – jenis bentanglahan dengan struktur morfologi dataran yang berpotensial terhadap lahan pangan seperti jenis fluvial dan vulkanik dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hasil indikatif kemampuan kierja jasa penyedia pangan berdasarkan olahan data menunjukkan beberapa wilayah potensial terhadap lahan pangan masih tersedia dan dapat dimaksimalkan agar dapat menunjang kebutuhan pokok pangan dan menjadi filter dalam pembangunan khusunya alih fungsi lahan yang sangat cepat menjadi pemukiman yang imbasnya akan mengerus lahan-lahan yang potensial untuk bahan pangan.

2. Jasa Lingkungan Penyedia Air

Jasa lingkungan memberikan manfaat penyedia air yaitu ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Jasa penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutupan lahan. Penyedia air permukaan sehingga fungsi penyedia air lebih difokuskan kepada air yang siap untuk dimanfaatkan dengan indikator kemampuan ekstraksi maksimum air secara berkelanjutan. Gambaran mengenai kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Buol disajikan pada Gambar :

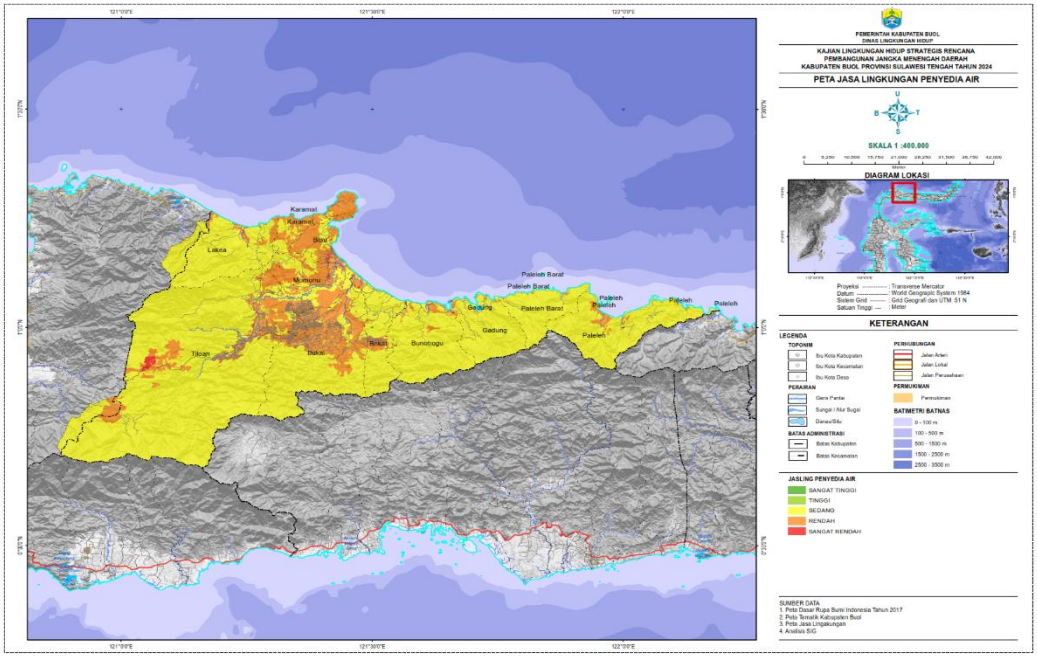

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.31 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Buol

Dari sebaran di Gambar Peta 3.31 dapat dilihat bahwa secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem penyedia air di Kabupaten Buol berada di rentang kelas berpotensi Sedang dengan luas 81,675%. Kelas dengan potensi Rendah (sangat rendah – rendah) seluas 18,09% dan berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) hanya seluas 0,23% dari total luas Kabupaten Buol.

Tabel 3.11 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol

NO	KECAMATAN	JASA LINGKUNGAN PENYEDIA AIR BERDASARKAN KECAMATAN KABUPATEN BUOL (%)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
1	BIAU	0,10%	1,04%	0,61%	0,00%	0,01%
2	BOKAT	0,01%	0,69%	3,73%	0,00%	0,00%
3	BUKAL	0,00%	4,71%	9,19%	0,00%	0,00%
4	BUNOBOGU	0,01%	0,37%	7,33%	0,00%	0,01%
5	GADUNG	0,03%	0,18%	5,08%	0,00%	0,01%
6	KARAMAT	0,06%	2,28%	0,61%	0,00%	0,00%
7	LAKEA	0,03%	0,57%	6,61%	0,00%	0,00%
8	MOMUNU	0,05%	2,40%	2,08%	0,00%	0,06%
9	PALELEH	0,00%	0,42%	7,59%	0,00%	0,01%
10	PALELEH BARAT	0,00%	0,04%	3,96%	0,00%	0,01%
11	TILOAN	0,17%	4,94%	34,90%	0,00%	0,10%
Total		**0,45%**	**17,64%**	**81,67%**	**0,01%**	**0,22%**

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

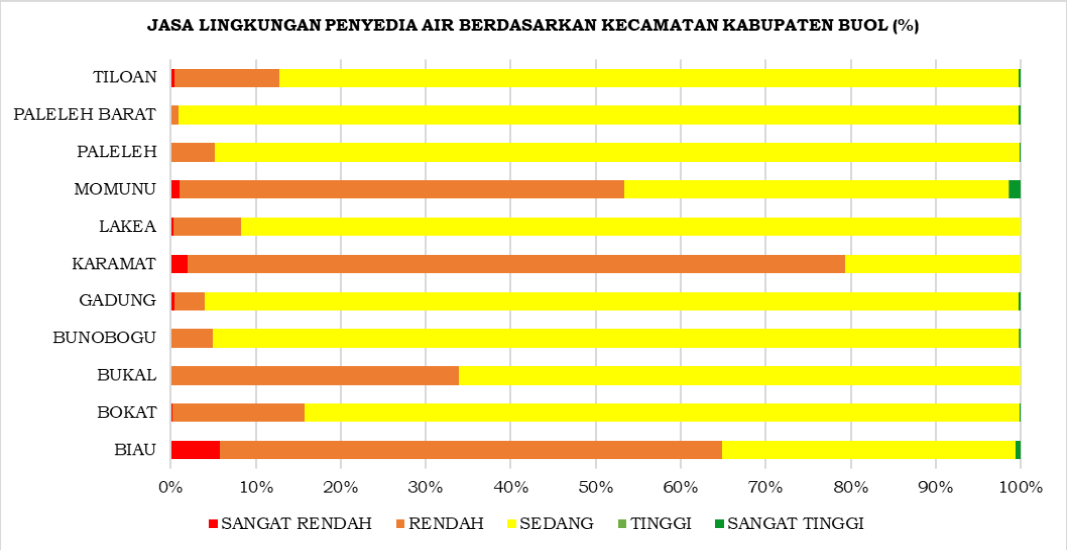

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.32 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol

Kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan ekosistem penyedia air tersebar di seluruh Kecamatan namun luas dominan berada di Kecamatan Tiloan dengan luas 34,90%, Kecamatan Bukal dengan luas 9,19% dan Kecamatan Paleleh dengan luas 7,59%. Sementara itu sebesar 18,09% luas wilayah yang berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) di Kabupaten Buol terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 5,13% dan di Bukal seluas 4,71%. Untuk kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam memberikan layanan penyedia air hanya seluas 0,23% dan terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 0,10% dari total luas total wilayah Kabupaten Buol.

Perhitungan kinerja jasa lingkungan jenis bentanglahan yang berpengaruh di kelas berpotensi Sedang dengan luas total 81,67% dalam memberikan layanan penyedia air adalah jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat dengan luas 26,38% dan jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik dengan luas 24,72% dari luas Kabupaten Buol. Kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dengan luas total 18,09% dipengaruhi oleh jenis bentanglahan Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat dengan luas 5,10% dan jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat dengan luas 3,43%. Sementara itu untuk kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas total 0,23% dalam memberikan layanan penyedia air dipengaruhi oleh jenis bentanglahan Lembah fluvial bermaterial aluvium dengan luas 0,12% dari total luas wilayah Kabupaten Buol.

Tipe vegetasi yang memberikan pengaruh di kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan penyedia air di Kabupaten Buol adalah tipe Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) dengan luas 44,30% dan tipe Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau dengan luas 15,43%. Sedangkan untuk kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan penyedia air dipengaruhi oleh tipe Vegetasi hutan pamah (non

dipterokarpa) dengan luas 6,23% dan tipe Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst dengan luas 4,35%. Serta untuk kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dipengaruhi oleh tipe Vegetasi terna tepian sungai dengan luas 0,09% dari total luas wilayah Kabupaten Buol.

Jenis penutupan lahan yang berpengaruh di kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan penyedia air adalah jenis Hutan dengan luas 66,12%. Kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan penyedia air dipengaruhi oleh jenis penutupan lahan hutan dengan luas 3,91% serta untuk kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dipengaruhi oleh jenis penutupan lahan Sungai dengan luas 0,08% dari total luas wilayah Kabupaten Buol.

Sebaran daya dukung jasa penyediaan air ini memberikan informasi penting bagi kita dalam menentukan pengelolaan lingkungan hidup. Pemanfaatan wilayah pada kawasan dimana daya dukungnya rendah, hendaknya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dihindari yang bersifat mengekploitasi air bersih atau merusak ekosistemnya. Dengan potensi alam yang ada sebaiknya pemanfaatan wilayah pada kawasan dimana daya dukungnya sangat tinggi dan tinggi atas jasa penyedia air dapat diarahkan pada pemanfaatan jasa tersebut yang sedemikian rupa untuk tujuan Pembangunan.

3. Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor -faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer, pada kawasan bervegetasi dan pada daerah

bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.

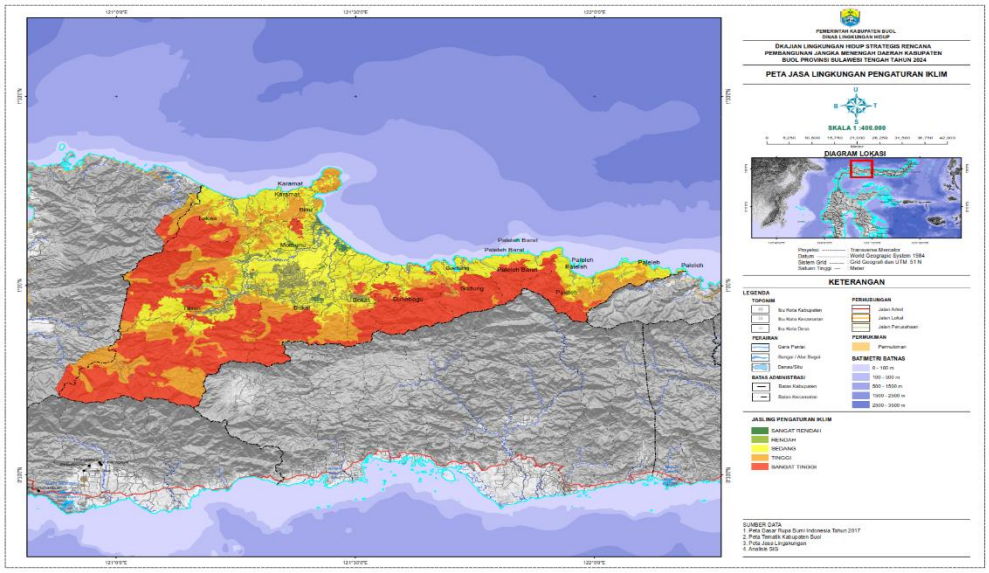

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.33 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Buol

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Jasa pengatur iklim adalah juga layanan yang sangat penting untuk mengendalikan iklim mikro suatu wilayah. Wilayah yang lingkungan hidupnya rusak akan mengalami peningkatan suhu mengakibatkan kelembaban udara yang tidak baik. Untuk itu dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memasukkan jasa pengaturan iklim sebagai salah satu indikatornya.

Tabel 3.12 Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol

NO	KECAMATAN	JASA LINGKUNGAN PENGATURAN IKLIM BERDASARKAN KECAMATAN KABUPATEN BUOL (%)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
1	BIAU	0,08%	0,24%	0,86%	0,49%	0,08%
2	BOKAT	0,08%	0,12%	2,56%	0,51%	1,17%
3	BUKAL	0,11%	0,17%	5,61%	3,36%	4,66%
4	BUNOBOGU	0,01%	0,05%	1,61%	0,68%	5,38%
5	GADUNG	0,00%	0,04%	1,41%	0,57%	3,29%
6	KARAMAT	0,01%	0,03%	1,53%	1,35%	0,03%
7	LAKEA	0,03%	0,10%	2,53%	2,33%	2,21%
8	MOMUNU	0,02%	0,29%	3,51%	0,51%	0,25%
9	PALELEH	0,00%	0,09%	2,87%	2,32%	2,73%
10	PALELEH BARAT	0,00%	0,02%	1,63%	0,04%	2,33%
11	TILOAN	0,00%	0,28%	7,80%	10,18%	21,84%
Total		**0,34%**	**1,42%**	**31,92%**	**22,35%**	**43,97%**

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

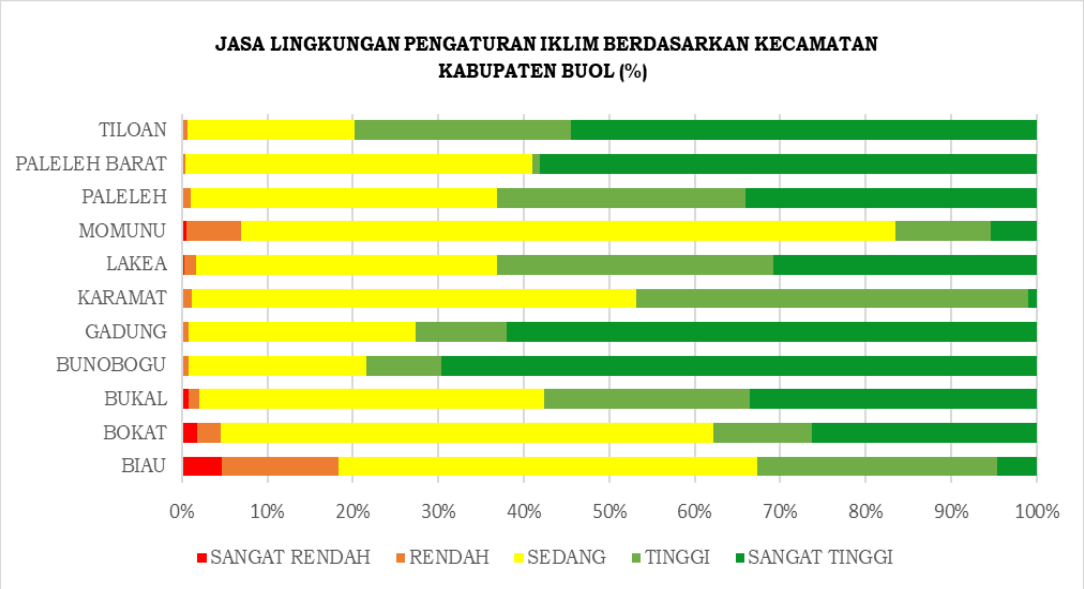

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.34 Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Buol

Dari sebaran beberapa peta diatas dapat dilihat bahwa secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem pengatur iklim di Kabupaten Buol berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat

tinggi) dengan luas 66,32%. Kelas dengan potensi Sedang seluas 31,92% dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) hanya seluas 1,76% dari total luas Kabupaten Buol.

Kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam memberikan layanan ekosistem pengatur iklim tersebar di seluruh Kecamatan namun luas dominan berada di Kecamatan Tiloan dengan luas 32,02%, Kecamatan Bunobogu dengan luas 6,06% dan Kecamatan Palele dengan luas 5,05%. Sementara itu sebesar 31,92% luas wilayah yang berpotensi Sedang di Kabupaten Buol terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 7,80% dan di Kecamatan Bukal seluas 5,61%. Untuk kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan pengatur iklim seluas 1,76% dan terdistribusi dominan di Kecamatan Biau seluas 0,32% dan di Kecamatan Momunu dengan luas 0,31% dari total luas total wilayah Kabupaten Buol.

Dengan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan serat kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan dan perbukitan maka dapat dipahami bahwa kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam mengatur iklim di wilayah ini berfungsi dengan baik. Luas Hutan dengan kepadatan vegetasi yang berada di struktur bentanglahan pegunungan yang dominan menjadi faktor kunci pengatur pengurangan emisi carbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global.

Kabupaten Buol memiliki sumberdaya alam hutan yang luas. Hutan merupakan aset berharga untuk penyejukan Bumi, zat nitrogen di daun pepohonan sangat membantu dalam memantulkan sinar matahari kembali ke atmorfer. Kandungan nitrogen di daun dapat menyerap CO_2 dari atmosfer, dengan kandungan nitrogen yang tinggi bisa lebih efektif dua kali lipat dalam pengurangan level CO_2 di atmosfer. Dari analisis di atas maka dalam perencanaan pengembangan wilayah ke depan sangat perlu tetap mempertahankan dan menjaga kelestarian hutan di wilayah ini agar fungsi

ekosistem pengatur iklim tetap terus mendukung keberlangsungan perikehidupan generasi manusia di masa yang akan datang.

Dalam perhitungan kinerja jasa lingkungan ini jenis bentanglahan yang berpengaruh di kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam memberikan layanan pengatur iklim adalah jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik dengan luas 23,54% dan jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat dengan luas 20,90%. Kelas berpotensi Sedang dipengaruhi juga oleh jenis bentanglahan Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen campuran karbonat dan non karbonat dengan luas 6,48% dan jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat dengan luas 6,11%. Sementara itu untuk kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan pengatur iklim dipengaruhi oleh jenis Lembah fluvial bermaterial aluvium dengan luas 0,35% dan jenis Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat dengan luas 0,25% dari total luas wilayah Kabupaten Buol.

4. Jasa Lingkungan Pengatur Air

Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu Kawasan. Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 3.35 sebagai berikut.

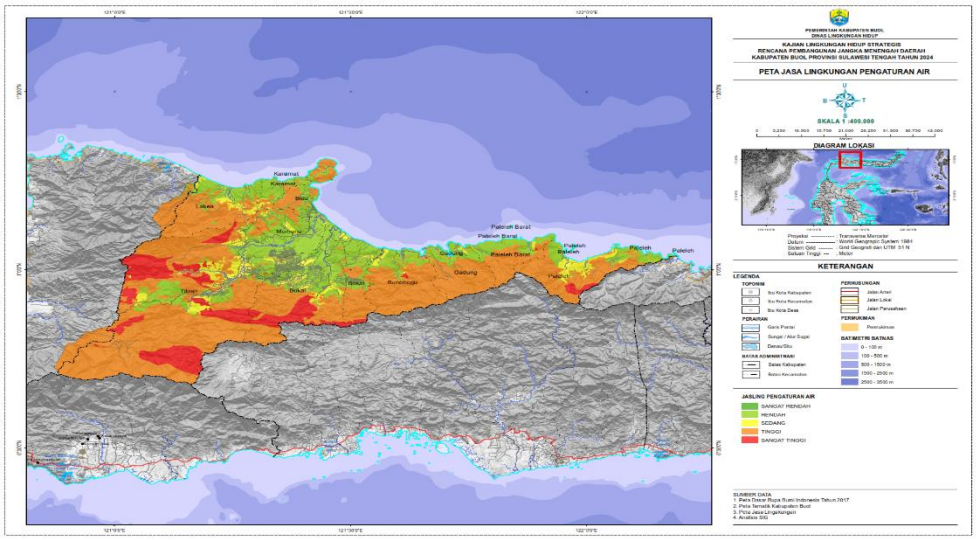

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.35 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Kabupaten Buol

Secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem pengatur air di Kabupaten Buol berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas 66,53 %. Kelas dengan potensi Sedang hanya seluas 6,28 % dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) seluas 27,19 % dari total luas Kabupaten Buol.

Tabel 3.13 Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Air Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol

NO	KECAMATAN	JASA LINGKUNGAN PENGATUR AIR BERDASARKAN KECAMATAN KABUPATEN BUOL (%)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
1	BIAU	0,16%	0,98%	0,02%	0,59%	0,00%
2	BOKAT	0,07%	2,51%	0,18%	1,62%	0,06%
3	BUKAL	0,08%	4,87%	0,91%	5,89%	2,16%
4	BUNOBOGU	0,02%	1,47%	0,18%	6,01%	0,05%
5	GADUNG	0,03%	1,37%	0,05%	3,83%	0,02%
6	KARAMAT	0,02%	1,53%	0,02%	1,38%	0,00%
7	LAKEA	0,01%	2,00%	0,63%	4,54%	0,01%
8	MOMUNU	0,04%	3,52%	0,21%	0,76%	0,06%
9	PALELEH	0,02%	1,80%	1,11%	4,69%	0,39%
10	PALELEH BARAT	0,02%	1,58%	0,05%	2,35%	0,01%
11	TILOAN	0,01%	5,09%	2,92%	24,49%	7,61%
Total		**0,47%**	**26,72%**	**6,28%**	**56,17%**	**10,36%**

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

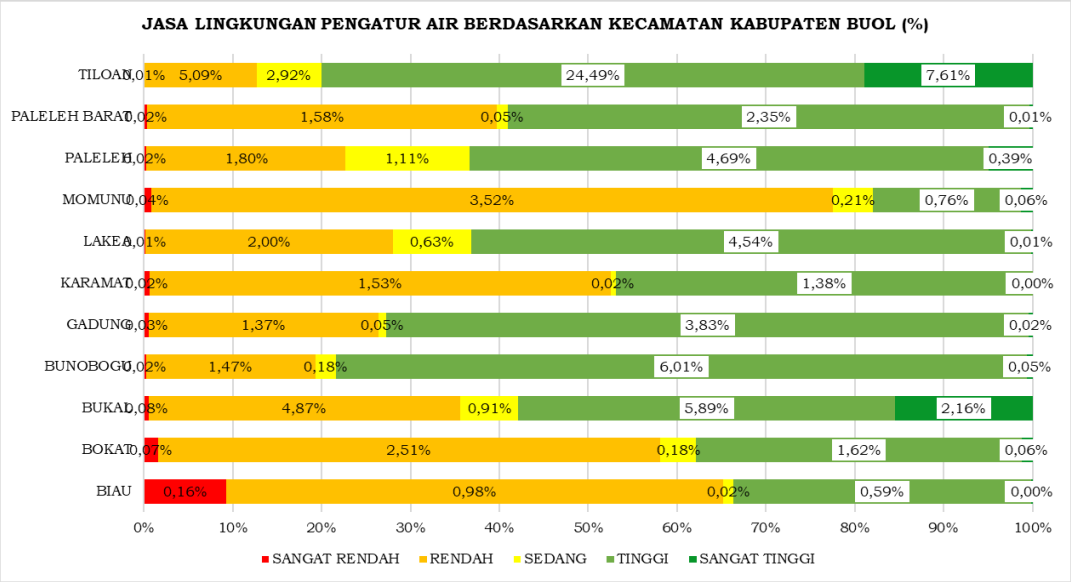

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.36 Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Kabupaten Buol

Kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam memberikan layanan ekosistem pengatur air tersebar di seluruh Kecamatan namun luas dominan berada di Kecamatan Tiloan dengan luas 32.10 %, Kecamatan Bukal dengan luas 8,05 % dan Kecamatan Bunobogu dengan luas 6,06 %. Sementara itu sebesar 6,28 % luas wilayah yang berpotensi Sedang di Kabupaten Buol terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 2,92 %. Kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan pengatur air seluas 27,19 % dan terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 5,09 % dari total luas total wilayah Kabupaten Buol.

3.3.3. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi lingkungan tidak hanya menangani masalah lingkungan, tetapi juga mengatasi pelestarian sumber daya alam, efisiensi industri dan pembangunan ekonomi, pada prinsipnya efisiensi lingkungan memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi melalui efisiensi produksi. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada prinsip bertahan dari penggunaan teknologi dan metode produksi dengan efisiensi tinggi,

penggunaan sumber daya alam dan energi yang lebih sedikit untuk jumlah produksi yang sama dan produksi limbah yang lebih sedikit.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan melalui pendekatan kajian kinerja jasa lingkungan penyedia serat. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan karbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta bio-chemical. Ketersediaan spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasarnya. Kinerja jasa lingkungan serat dapat digambarkan pada peta sebagai berikut.

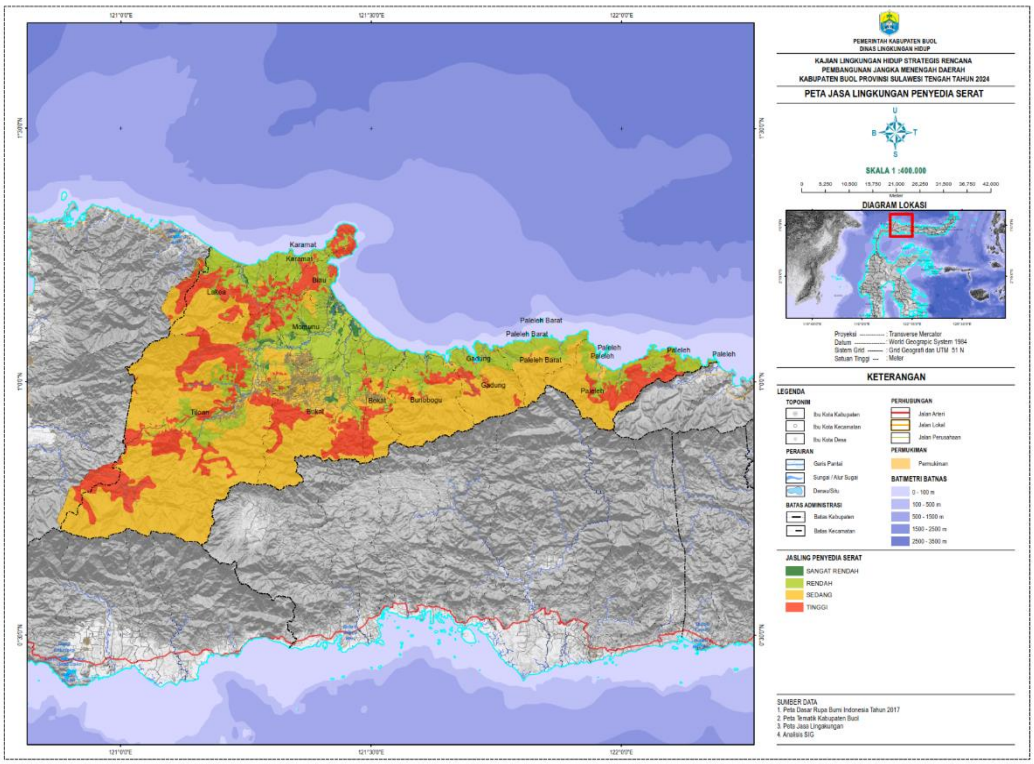

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.37 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Serat Kabupaten Buol

Secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem penyedia serat (fiber) di Kabupaten Buol berada di rentang kelas berpotensi Sedang dengan luas 53,76 %, kelas dengan potensi Rendah (sangat rendah – rendah) seluas 26,70 % sementara kelas dengan potensi tinggi seluas 19,55 % dari total luas Kabupaten Buol. Kelas berpotensi Sedang dalam memberikan layanan ekosistem penyedia serat (fiber) tersebar di seluruh Kecamatan namun luas dominan berada di Kecamatan Tiloan dengan luas 27,99 % dan Kecamatan Bukal dengan luas 7,12 %. Sementara itu sebesar 26,70 % luas wilayah yang berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) di Kabupaten Buol terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 4,19 % dan di Kecamatan Bukal seluas 3,43% dari total luas total wilayah Kabupaten Buol.

Tabel 3.14 Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Serat Berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol

NO	KECAMATAN	JASA LINGKUNGAN PENYEDIA SERAT BERDASARKAN KECAMATAN KABUPATEN BUOL (%)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
1	BIAU	0,24%	0,91%	0,11%	0,49%	0,00%
2	BOKAT	0,08%	2,19%	1,67%	0,49%	0,00%
3	BUKAL	0,18%	3,43%	7,12%	3,18%	0,00%
4	BUNOBOGU	0,03%	1,65%	5,38%	0,66%	0,00%
5	GADUNG	0,00%	1,48%	3,29%	0,53%	0,00%
6	KARAMAT	0,01%	1,55%	0,04%	1,35%	0,00%
7	LAKEA	0,08%	2,57%	2,27%	2,28%	0,00%
8	MOMUNU	0,33%	3,29%	0,47%	0,51%	0,00%
9	PALELEH	0,00%	2,66%	3,09%	2,26%	0,00%
10	PALELEH BARAT	0,00%	1,66%	2,33%	0,03%	0,00%
11	TILOAN	0,15%	4,19%	27,99%	7,77%	0,00%
Total		**1,11%**	**25,59%**	**53,76%**	**19,55%**	**0,00%**

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

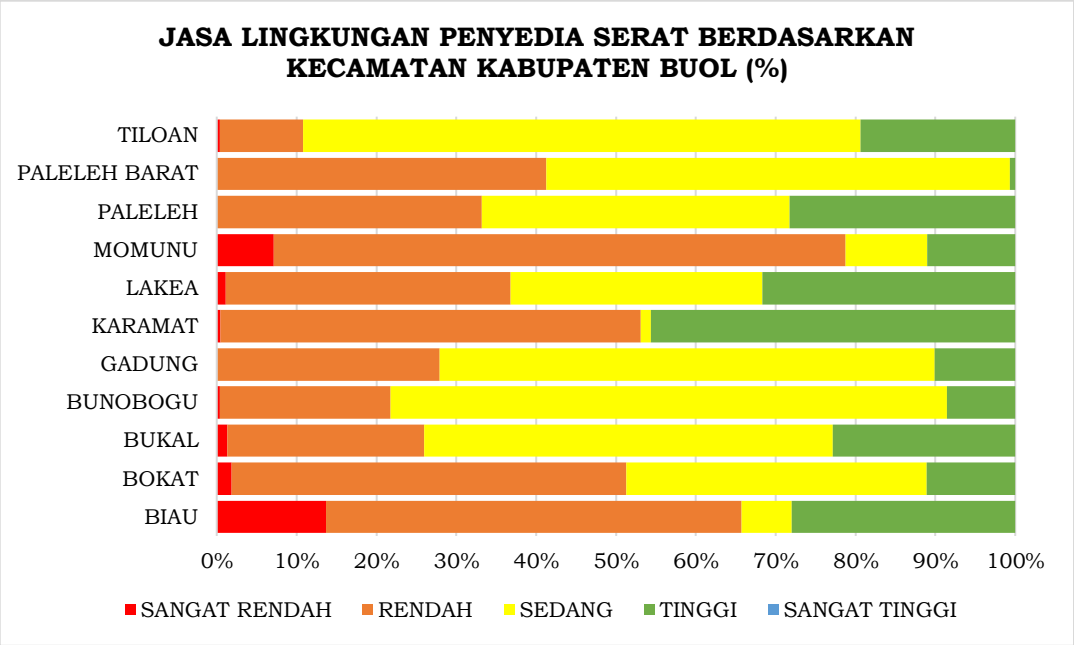

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.38 Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Serat Kabupaten Buol

Berdasarkan indikator kinerja jasa layanan penyedia serat dengan ketersediaan *spesies* atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar maka berdasarkan data vegetasi dan tutupan lahan Kabupaten Buol berpotensi memiliki *supply* serat yang cukup baik. Dengan vegetasi alami hutan serta tutupan hutan lahan kering sekunder yang berada di Kabupaten Buol yang cukup memberikan pengaruh sehingga dapat dipahami wilayah ini berada di kelas Sedang dalam layanan jasa fungsi ekosistem ini, tidak menutup kemungkinan dengan pengembangan produksi abiotik yang maksimal layanan penyedia serat dapat ditingkatkan.

3.3.4 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan serius bagi setiap wilayah. Kondisi iklim berubah sedemikian rupa sehingga perlu kapasitas institusi perkotaan dan sistem tata kelola terkait dalam menangani perubahan iklim (Wamsler & Brink, 2014). Perspektif perubahan iklim, kerentanan adalah "sejauh mana suatu sistem rentan terhadap, atau tidak mampu mengatasi efek

buruk dari perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim yang ekstrem" (Edenhofer *et al.* 2014). Kajian kerentanan dalam perubahan iklim didefinisikan ke dalam beberapa pandangan yang memfokuskan definisi pada tempat dan sistem, dan yang lainnya memfokuskan pada manusia, mata pencaharian, sektor-sektor, dan variabel ekosistem.

1. Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan dan sensitivitas suatu sistem wilayah. Kajian kerentanan akan dilakukan dengan melihat tingkat kerentanan wilayah dari aspek ekonomi, sosial dan fisik suatu sistem wilayah. Ketiga aspek tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 3.39 sebagai berikut.

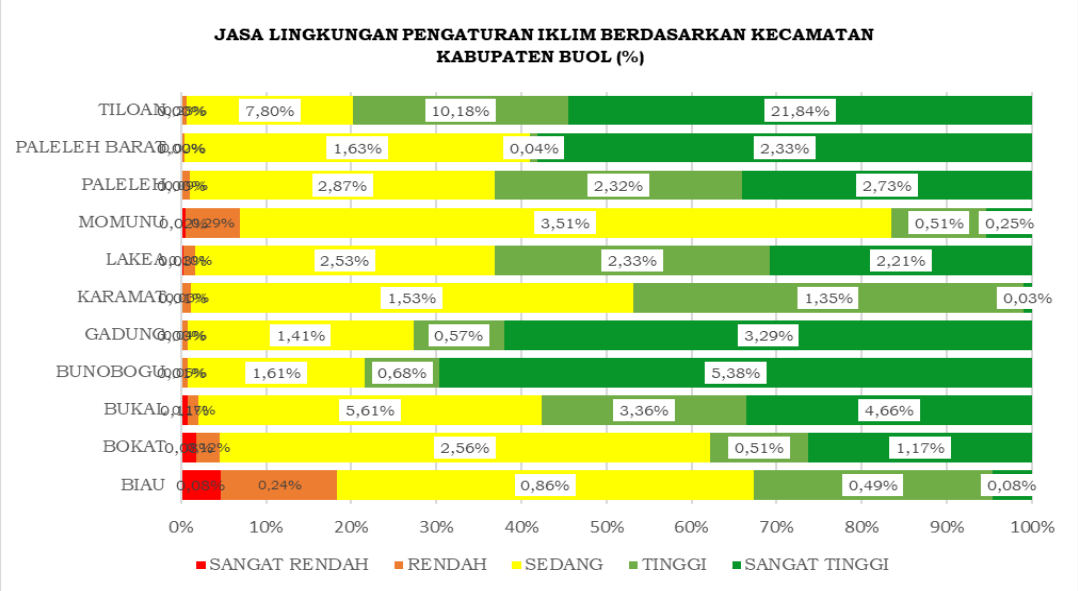

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.39 Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Buol

Dari sebaran beberapa gambar diatas dapat dilihat bahwa secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem

pengatur iklim di Kabupaten Buol berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas 66,32%. Kelas dengan potensi Sedang seluas 31,92% dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) hanya seluas 1,76% dari total luas Kabupaten Buol.

2. Tingkat Adaptasi Perubahan Iklim

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun aksi adaptasi perubahan iklim dan mengintegrasikan dalam rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau sektor spesifik. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya. Kemampuan adaptasi mengacu pada kemampuan suatu wilayah dalam menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dengan cara mengetahui kemampuan setiap wilayah.

Secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan jasa ekosistem pengatur iklim di Kabupaten Buol berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas 66,32 %. Kelas dengan potensi Sedang seluas 31,92 % dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) hanya seluas 1,76% dari total luas Kabupaten Buol.

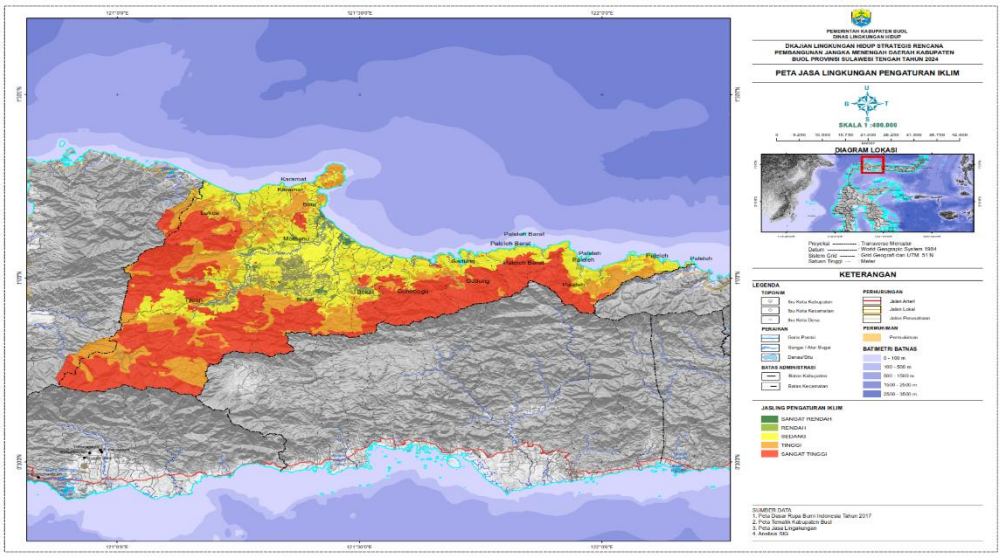

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.40 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Buol

Kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam memberikan layanan ekosistem pengatur iklim tersebar di seluruh Kecamatan namun luas dominan berada di Kecamatan Tiloan dengan luas 32,02%, Kecamatan Bunobogu dengan luas 6,06% dan Kecamatan Palele dengan luas 5,05%. Sementara itu sebesar 31,92% luas wilayah yang berpotensi Sedang di Kabupaten Buol terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 7,80% dan di Kecamatan Bukal seluas 5,61%. Untuk kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan pengatur iklim seluas 1,76% dan terdistribusi dominan di Kecamatan Biau seluas 0,32% dan di Kecamatan Momunu dengan luas 0,31% dari total luas total wilayah Kabupaten Buol.

3.3.5 Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati

Jasa lingkungan dalam fungsi fungsi ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara

spesies dan ekosistem yang menjadi habita perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap keberlangsungan perikehidupan.

Sebaran di peta terlihat bahwa kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Buol berada di rentang kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dengan luas 66,55%. Kelas dengan potensi Sedang seluas 7,25% dan kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) seluas 26,21% dari total luas Kabupaten Buol.

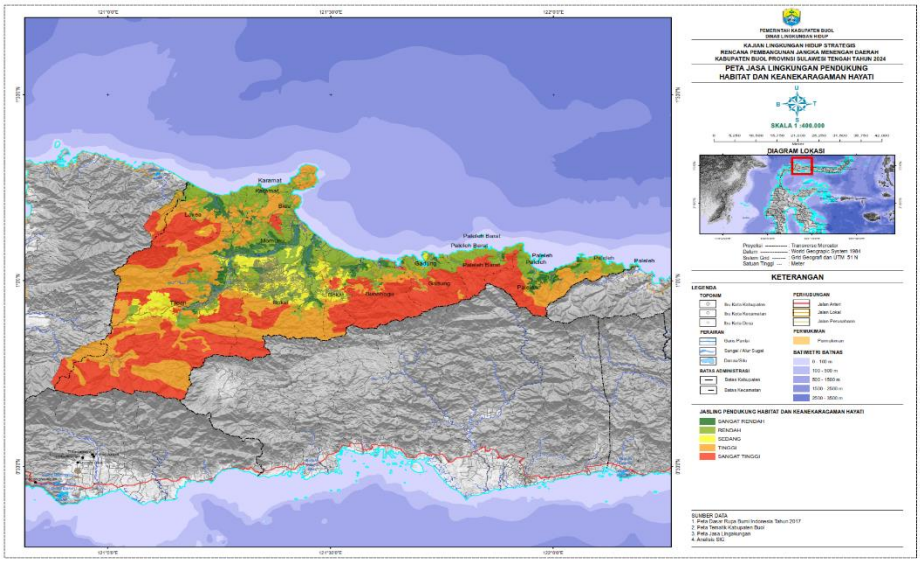

Sumber: Dokumen DDTLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.41 Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragamana Hayati

Kelas berpotensi sangat tinggi dalam memberikan layanan ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati tersebar di seluruh Kecamatan namun luas dominan berada di Kecamatan Tiloan dengan luas 32,00%, dan Kecamatan Bukal dengan luas 8,05%. Sementara itu sebesar 6,84% luas wilayah yang berpotensi Sedang di Kabupaten Buol terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 2,31%. Untuk kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan pengatur pengendalian hama seluas 26,92% dan terdistribusi dominan di Kecamatan Tiloan seluas 5,81%

dan di Kecamatan Bukal dengan luas 5,28% dari total luas total wilayah Kabupaten Buol.

Tabel 3.15 Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragamanhayati berdasarkan Administrasi Kecamatan Kabupaten Buol

NO	KECAMATAN	Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragamanhayati di Kabupaten Buol (%)				
		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
1	BIAU	0,05%	1,10%	0,00%	0,52%	0,09%
2	BOKAT	0,21%	1,67%	0,87%	0,55%	1,13%
3	BUKAL	0,73%	2,50%	2,63%	5,36%	2,69%
4	BUNOBOGU	0,36%	1,25%	0,06%	0,71%	5,35%
5	GADUNG	0,08%	1,30%	0,06%	0,56%	3,30%
6	KARAMAT	0,07%	1,50%	0,00%	1,35%	0,03%
7	LAKEA	0,76%	1,85%	0,04%	2,34%	2,21%
8	MOMUNU	1,03%	2,39%	0,34%	0,57%	0,26%
9	PALELEH	0,83%	2,10%	0,00%	2,66%	2,42%
10	PALELEH BARAT	0,04%	1,61%	0,00%	0,04%	2,33%
11	TILOAN	1,30%	3,49%	3,23%	15,48%	16,61%
Total		**5,46%**	**20,75%**	**7,25%**	**30,14%**	**36,41%**

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

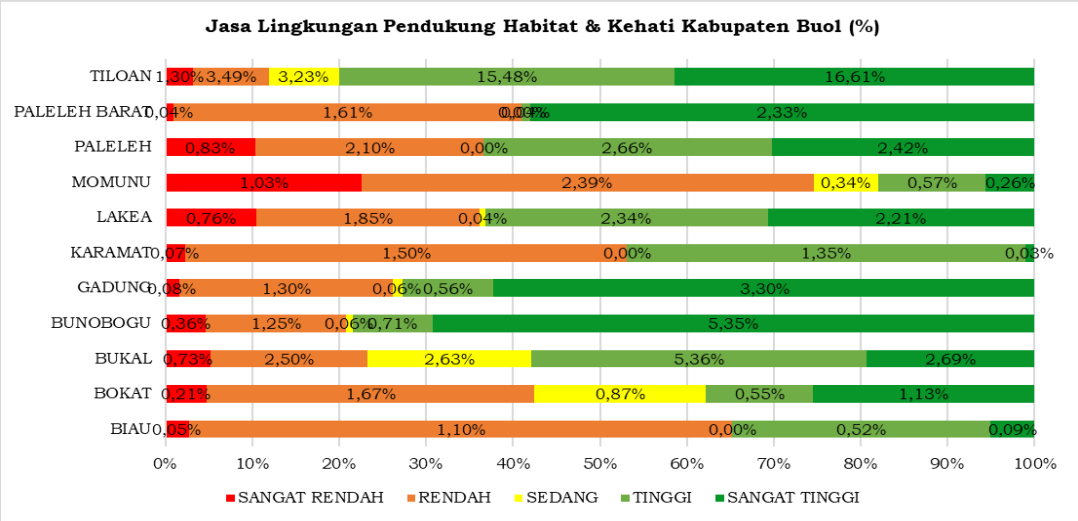

Sumber : Dokumen DDTLH Kabupaten Buol Tahun 2023 (diolah Kembali oleh tim ahli pendamping)

Gambar 3.42 Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Habitat & Kehati Kabupaten Buol

Dalam perhitungan kinerja jasa lingkungan ini jenis bentanglahan yang berpengaruh di kelas berpotensi sangat tinggi dalam memberikan layanan Pendukung Habitat & Keanekaragaman Hayati adalah jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfikdengan luas 23,53% dan jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat dengan luas 20,90%. Kelas berpotensi Sedang dipengaruhi oleh jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat dengan luas 4,08%. Sementara itu untuk kelas berpotensi Rendah (sangat rendah – rendah) dalam memberikan layanan Pendukung Habitat & Keanekaragaman Hayati dipengaruhi oleh jenis Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonatdengan luas 6,21% dan jenis Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat dengan luas 4,46% dari total luas wilayah Kabupaten Buol.

Vegetasi dan tutupan hutan merupakan habitat yang sangat baik bagi berbagai macam species baik flora maupun fauna. Hutan memberikan fungsi terhadap layanan ekosistem ini untuk menyediakan "rumah" pembiakan, makan dan tempat tinggal terhadap spesies. Dari hasil pengolahan data, luas vegetasi dan tutupan hutan di wilayah ini sangat dominan, serta struktur geomorfologi perbukitan dan pegunungan ikut memberi andil besar terhadap fungsi layanan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Buol berjalan dengan baik dan seimbang.

Meski dengan persentase luas yang dominan di kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) dalam layanan ekosistem ini, namun angka jumlah endemik di Kabupaten Buol dalam trennya terus menurun. Hal ini dapat disebabkan karena habitat tempat tinggal fauna endemik untuk mencari makanan mulai berkurang karena banyaknya penebangan hutan liar.

Jika hal ini terus terjadi tanpa adanya perhatian dapat menyebabkan maskot yang berasal dari Sulawesi ini hanya akan tinggal nama, sehingga perlunya dilakukannya tindakan preventif berupa upaya konservasi untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses – proses ekologi

maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Serta pengawasan secara intensif agar tidak adanya penebangan dan pemburuan liar, sehingga peran pemerintah dan partisipasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk dapat menjaga kelangsungan hidup dari satwa endemik dari Sulawesi Tengah khususnya yang ada di Kabupaten Buol.

3.4 Gambaran Keuangan Daerah Dalam Indikator Pencapaian TPB Kabupaten Buol

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow* program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang

disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan Keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.
2) Disiplin Anggaran Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3) Keadilan Anggaran Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk

kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh pendapatan pada APBD baik berasal dari PAD

maupun dari dana transfer pusat dan provinsi. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pola hubungan kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

Kemampuan Keuangan	Rasio kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	➢ 25 – 50	Konsultatif
Sedang	➢ 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	➢ 75 - 100	Delegatif

1. Pola hubungan Instruktif, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Realisasi APBD merujuk pada pelaksanaan atau eksekusi dari anggaran tersebut selama periode yang bersangkutan. Dalam realisasi APBD, pemerintah daerah akan mengimplementasikan rencana anggaran yang telah disetujui, termasuk mengumpulkan pendapatan dan menyalurkan belanja sesuai dengan prioritas dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Buol dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hal pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun komponen-komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah;retribusi daerah;hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah), dana perimbangan meliputi (dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;dana alokasi umum; dan dana alokasi khusus), lain-lain pendapatan daerah yang sah (meliputi hibah; dana darurat;bagi hasil pajak bagi provinsi dan pemerintah Daerah Lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus; bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan lainnya).

Adapun pendapatan daerah Kabupaten Buol secara trend dalam 5 (lima) tahun terkahir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 pendapatan Kabupaten Buol sebesar 984.698.721.115,27 milliar turun menjadi 837.850.459.591 milliar pada tahun 2023. Pendapatan terbesar bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 88% terhadap pendapatan daerah. Trend perkembangan pendapatan Kabupaten Buol selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :

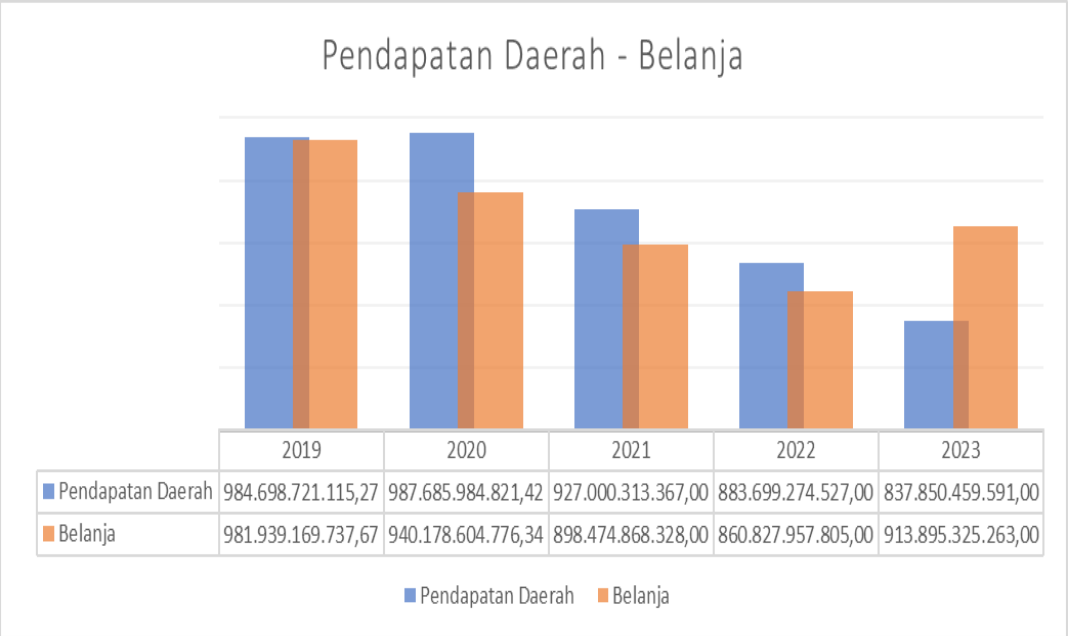

	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	984.698.721.115,27	987.685.984.821,42	927.000.313.367,00	883.699.274.527,00	837.850.459.591,00
Belanja	981.939.169.737,67	940.178.604.776,34	898.474.868.328,00	860.827.957.805,00	913.895.325.263,00

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Buol, 2024

Gambar 3.43 Trend perkembangan pendapatan Kabupaten Buol 5 tahun terakhir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari 4 yaitu: Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah. Struktur PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagian besar berasal dari Lain-Lain PAD yang sah yaitu rata-rata dalam 5 tahuhn terakhir berkontribusi sebesar 81% dari PAD.

Pajak Daerah sebagai salah satu komponen dalam perhitungan PAD dan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dapat ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah. Trend realisasi pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari tahun 2019 sampai dengan 2023 di Kabupaten Buol cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2019, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Buol sebesar 7.854.799.373,78 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 realisasi pajak cenderung stagnan, kemudia pada tahun 2023 realisasi pajak mengalami

kenaikan yakni sebesar 7.988.637.332 miliar. Sumber PAD Kabupaten Buol dapat di gambarkan sebagai berikut :

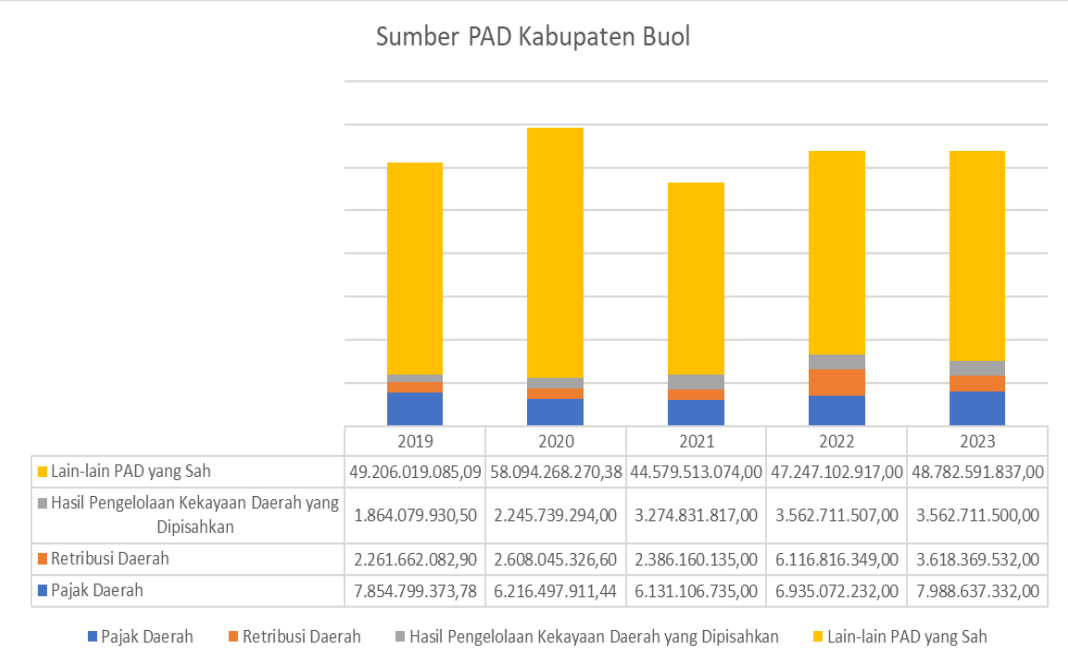

	2019	2020	2021	2022	2023
Lain-lain PAD yang Sah	49.206.019.085,09	58.094.268.270,38	44.579.513.074,00	47.247.102.917,00	48.782.591.837,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.864.079.930,50	2.245.739.294,00	3.274.831.817,00	3.562.711.507,00	3.562.711.500,00
Retribusi Daerah	2.261.662.082,90	2.608.045.326,60	2.386.160.135,00	6.116.816.349,00	3.618.369.532,00
Pajak Daerah	7.854.799.373,78	6.216.497.911,44	6.131.106.735,00	6.935.072.232,00	7.988.637.332,00

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Buol, 2024

Gambar 3.44 Sumber PAD Kabupaten Buol, 2024

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak, retribusi dan pendapatan lainnya yang sah yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah :

a. Belum disesuaikannya regulasi yang mengatur tata kelola pendapatan.

b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi daerah yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Beberapa subjek pajak dan retribusi daerah bahkan ada yang berusaha menghindari pajak dan retribusi daerah daerah.

c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah.

e. Ketercukupan SDM baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :

A. Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana desa

a) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan dana transfer khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)

i. Dana bagi hasil adalah pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

ii. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Insentif Daerah Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu

c) Dana Desa Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Transfer Antar Daerah Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan

a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah.

b) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas: bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

3. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

b. Dana Darurat Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3). Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan, kesehatan serta prasarana pendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Mandatory Spending diamanatkan untuk pemenuhan belanja Pendidikan 20%, belanja Kesehatan 10%, belanja Alokasi Dana Desa 10% dan belanja Infrastruktur sebesar 25%, oleh karenanya Pemerintah Daerah tahun ketahun terus berupaya untuk memenuhi dan mempertahankan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2023 diarahkan untuk:

1. Penyesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan belanja sesuai amanat PMK 212 Tahun 2022 dan PMK 208 Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan insfrastruktur dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi;
2. Penyesuaian Kembali belanja pegawai pada setiap Perangkat Daerah;
3. Penyesuaian Belanja DAK Fisik berdasarkan sisa saldo lebih tahun sebelumnya; dan
4. Penyesuaian Belanja BLUD berdasarkan sisa saldo lebih tahun sebelumnya;

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 19 sebesar Rp.602.951.960.584,83 miliar, namun pada tahun 2023 meningkat sebesar 773.640.713.806 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh :

a. Tambahan belanja dalam rangka pemenuhan target-target pada RPJMD 2019-2024
b. Tambahan belanja pegawai khususnya pada Gaji ASN
c. Penyesuaian Belanja yang bersumber dari SILPA DAK Fisik
d. Belanja kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah
e. Belanja Bantuan Sosial dalam rangka pengentasan Kemiskinan Ekstrem

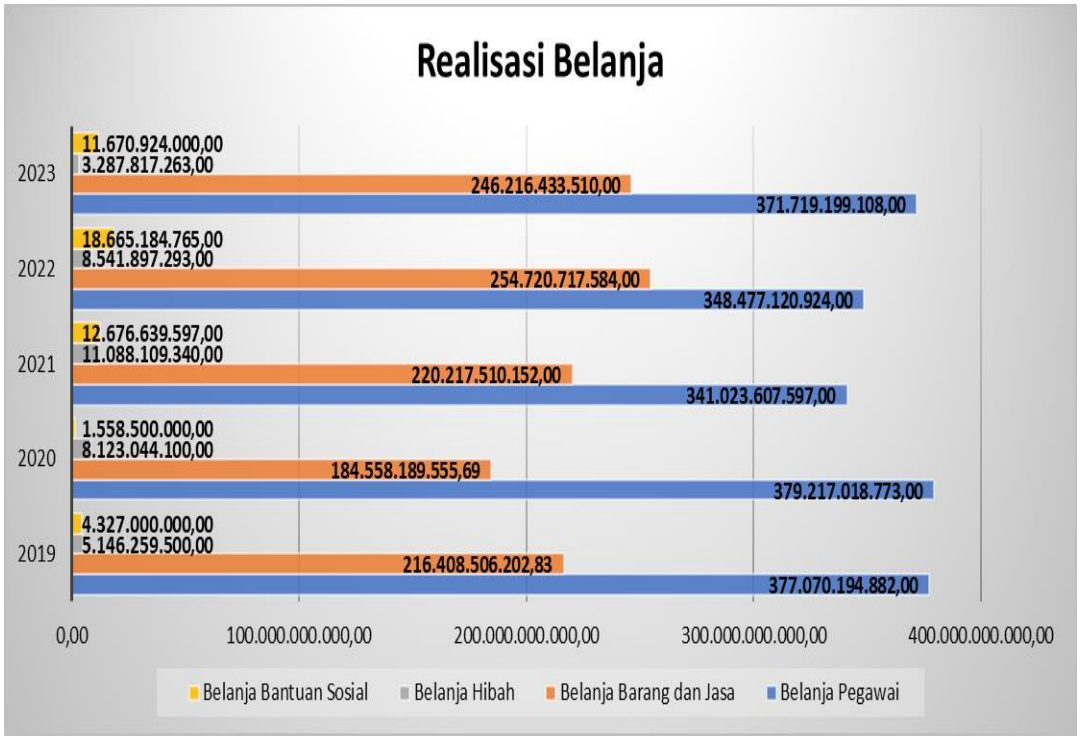

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Buol, 2024

Gambar 3.45 Realisasi Belanja Operasional Kab Buol

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023. Belanja modal pada pada Tahun 2019 sebesar 227.428.102.853 miliar, namun pada tahun2023 mengalami penurunan sebesar 67,6% atau Rp.133.682.030.112 miliar.

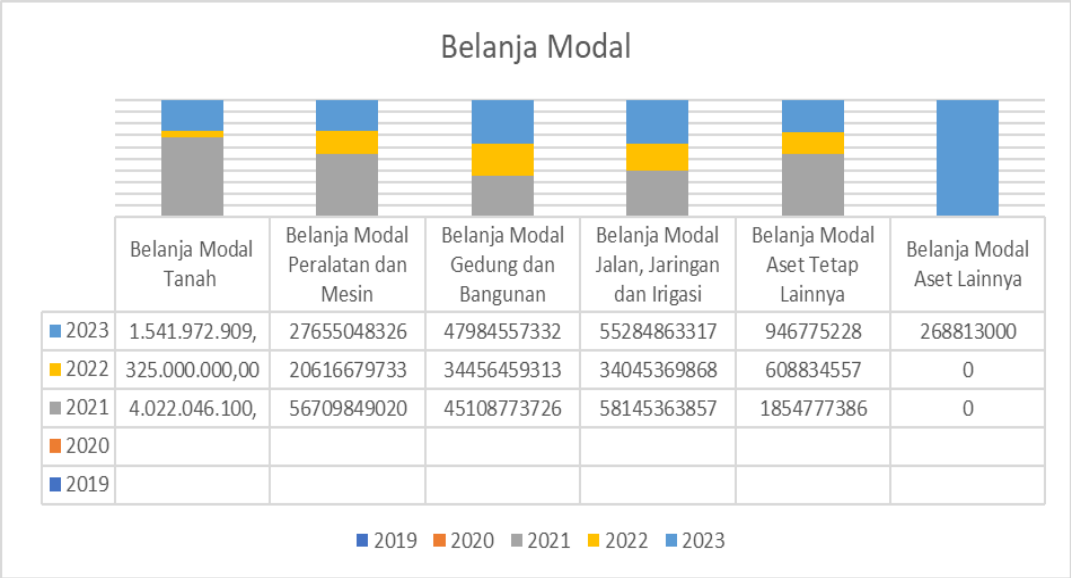

	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal Aset Lainnya
2023	1.541.972.909,	27655048326	47984557332	55284863317	946775228	268813000
2022	325.000.000,00	20616679733	34456459313	34045369868	608834557	0
2021	4.022.046.100,	56709849020	45108773726	58145363857	1854777386	0
2020						
2019						

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Buol, 2024

Gambar 3.46 Realisasi Belanja Modal Kab Buol

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada tahun 2019 BTT sebesar Rp.119.757.500 namun pada Tahun 2023, jumlah Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami kenaikan sebesar 11,7% atau Rp 1.020.531.298 miliar.

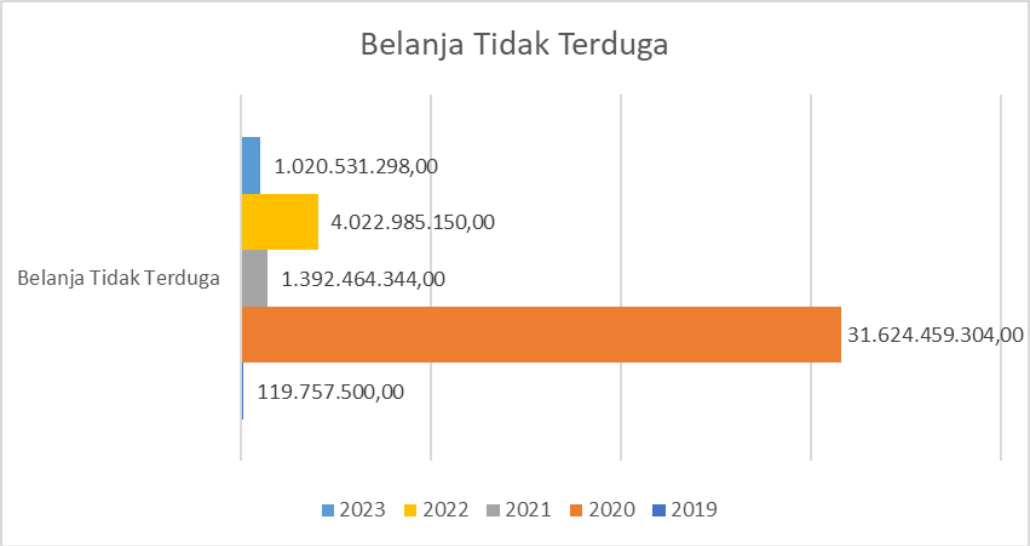

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Buol, 2024

Gambar 3.47 Realisasi Belanja Modal Kab Buol

5. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diprediksi sama dengan belanja transfer pada APBD Murni Tahun 2023. Belanja transfer pada tahun 2019 sebesar 151.439.348.799,84 miliar, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 belanja transfer mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2023 belanja transfer mengalami penurunan sebesar 146.298.389.972 miliar. Berikut Gambaran Belanja Daerah pada pada 5 tahun terakhir :

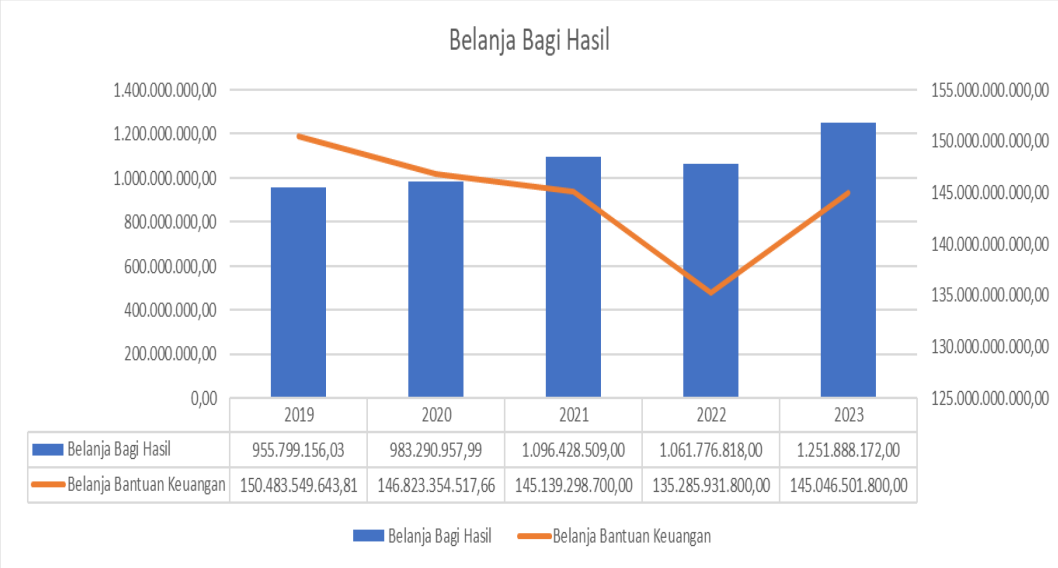

	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Bagi Hasil	955.799.156,03	983.290.957,99	1.096.428.509,00	1.061.776.818,00	1.251.888.172,00
Belanja Bantuan Keuangan	150.483.549.643,81	146.823.354.517,66	145.139.298.700,00	135.285.931.800,00	145.046.501.800,00

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Buol, 2024

Gambar 3.48 Realisasi Belanja Transfer Kab Buol

4). Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayan Daerah

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan piutang daerah, sedangkan komponan pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal (investasi) penerimaan daerah dan pembayaran pokok utang.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

A. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pada tahun 2019 sebesar 15.040.738.340,70 miliar, pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pembiayaan sebesar 6.189.074.268,51, namun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 penerimaan pembiayaan daerah sebesar 78.804.174.542 miliar. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelunya.

a. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, berupa penyertaan modal investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Pada tahun 2019 pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 8.289.894.581 miliar dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1.500.000.000 miliar.

Berdasarkan klasifikasi anggaran menurut pengguna anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun 2023, Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah OPD dengan jumlah anggaran paling besar di Kabupaten Buol yaitu sebesar 276.332.622.465 miliar atau sebesar 35,23%, selanjutnya diikuti oleh Dinas kesehatan sebesar, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 12,14%, RSUD Mokoyurli sebesar 10,17%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 7,59%, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman sebesar 3,82.

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Buol, 2024

Gambar 3.49 OPD dengan Persentase Anggaran Terbesar di Kabupaten Buol Tahun 2023

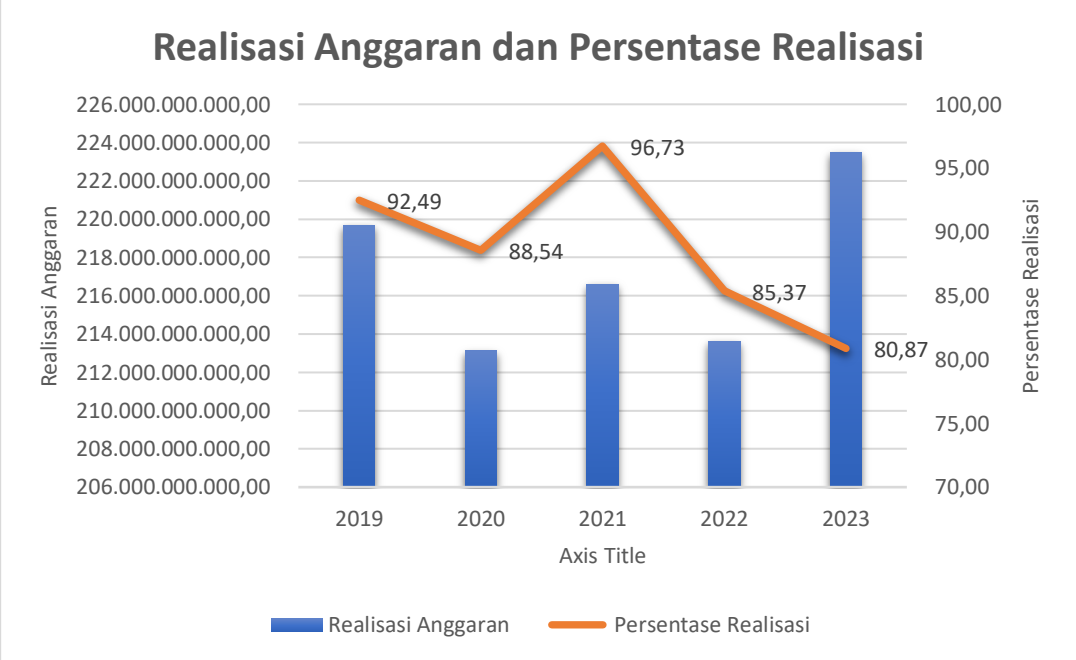

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Buol, 2024

Gambar 3.50 Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Tahun 2023

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah OPD yang selama 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mendapatkan porsi anggaran paling besar dalam belanja daerah Kabupaten Buol. Meskipun begitu rata-rata realisasi penggunaan anggaran selama 5 tahun terakhir hanya sebesar 30,03%. Dimana pada tahun 2023, realisai penggunaan anggaran sebesar 223.473.697.586 Miliar atau 80,87% dari anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar 276.332.622.465 Miliar. Serapan anggaran ini meningkat 1,94% dari tahun 2022, dimana pada tahun 2022, realisasi penggunaan anggaran sebesar 213.585.378.101 Miliar atau 31,60%% dari anggaran tahun 2022.

3.4.1 Kinerja Keungan Kabupaten Buol dalam Pencapaian Indikator TPB

Bagian ini dijelaskan mengenai ketercapaian keuangan daerah Kabupaten Buol dalam melaksanakan indikator TPB. Dalam hal ini, anggaran yang dapat dilihat untuk mencapai indikator TPB adalah penggunaan anggaran pada belanja langsung. Belanja langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah yang merupakan tools untuk mencapai indikator TPB.

Berikut ini merupakan tabel rekapitulasi anggaran belanja langsung Kabupaten Buol yang digunakan untuk melaksanakan indikator TPB. Dibawah ini merupakan kinerja keuangan daerah Kabupaten Buol dirinci per organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pencapaian indikator TPB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

No	Perangkat Daerah	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	237.499.812.906,36	219.666.802.374,00	240.703.250.935,85	213.117.689.074,00	223.921.999.400,00	216.598.971.360,00	250.177.683.761,00	213.585.378.101,00	276.332.622.465,00	223.473.697.586,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105.099.611.288,73	95.306.587.004,00	98.498.491.294,58	89.747.227.912,00	108.840.078,00	84.458.711.669,00	35.304.478.206,00	34.536.590.691,00	94.995.700.788,00	83.159.794.394,00
3	RSUD Mokoyurli	36.052.146.299,00	33.782.890.703,00	81.420.195.551,38	76.133.069.289,00	50.215.521.145,00	47.076.420.967,00	50.215.521.145,00	47.076.420.967,00	79.560.186.066,00	34.043.588.399,00
4	RSUD (BLUD)	35.627.300.665,00	34.149.140.100,00								
5	RSUD Pratama					4.933.532.667,00	3.575.801.172,00	4.933.532.667,00	3.575.801.172,00	304.619.904,00	275.695.623,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.220.807.489,11	128.699.987.216,10	110.346.055.100,69	103.289.638.884,00	60.636.583.472,00	56.160.337.064,00	69.864.358.591,00	61.460.040.041,00	59.363.263.790,00	58.168.476.948,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.217.795.252,09	7.168.020.632,00	9.705.221.777,19	9.643.818.907,00	7.006.642.274,00	6.940.435.525,00	15.196.547.837,00	14.937.416.395,00	29.902.926.013,00	29.777.133.514,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.692.360.090,29	3.646.066.484,00	3.206.895.902,72	3.150.006.606,00	4.270.868.127,00	4.069.297.634,00	4.311.177.660,00	4.256.619.919,00	4.311.177.660,00	4.256.619.919,00
9	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	8.908.894.758,52	8.501.763.420,00	8.691.993.286,15	8.593.323.920,00	8.554.600.693,00	8.399.833.303,00	11.108.822.597,00	10.967.600.705,00	11.390.881.431,00	11.180.619.008,00
10	Dinas Sosial	1.605.158.547,23	1.588.066.409,00	7.269.858.493,00	7.238.245.228,00	6.874.095.250,00	6.294.573.486,00	7.897.146.964,00	7.347.954.460,00	8.845.468.896,00	8.785.630.985,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.013.856.363,57	4.975.420.245,00	5.019.182.564,10	4.836.355.842,00	5.132.011.434,00	4.931.909.145,00	5.393.687.644,00	5.340.808.919,00	5.100.009.170,00	5.069.978.854,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.948.207.090,91	6.810.782.716,00	7.394.394.974,19	7.318.361.320,00	7.646.235.577,00	7.521.431.786,00	7.082.302.991,00	7.052.120.363,00	4.925.283.536,00	4.846.157.409,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.768.585.836,55	1.766.242.977,00	4.762.633.048,00	4.686.686.199,00	6.195.158.028,00	5.877.618.367,00	5.402.162.858,00	5.383.593.660,00	5.887.813.057,00	5.871.817.424,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.752.133.127,03	2.608.667.161,00	5.041.381.045,02	4.907.815.934,00	6.416.926.976,00	6.340.924.817,00	212.680.300,00	212.250.413,00	6.064.391.091,00	5.991.186.823,00
15	Dinas Perhubungan			5.918.630.696,39	5.277.263.321,00	7.655.383.030,00	7.227.695.584,00	4.582.734.435,00	4.452.590.069,00	4.090.033.221,00	4.063.686.809,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	4.741.214.911,76	4.643.211.412,00	6.364.117.645,18	6.265.985.291,00	5.487.247.744,00	5.386.958.833,00	4.222.242.373,00	4.194.922.471,00	5.953.147.514,00	5.774.188.807,00
17	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	11.222.608.733,52	10.893.093.960,00	7.170.261.872,34	7.012.264.059,00	6.654.730.346,00	6.411.178.883,00	7.135.630.923,00	6.894.614.078,00	5.163.550.924,00	5.039.354.811,00
18	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.794.238.338,76	4.663.130.125,00	4.608.926.550,92	4.527.386.142,00	4.733.609.981,00	4.626.803.424,00	5.099.672.346,00	5.049.066.774,00	4.569.279.951,00	4.462.867.756,00
19	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	8.729.676.786,46	8.562.430.279,00	6.301.078.869,63	5.205.378.826,00	7.080.546.366,00	6.940.961.897,00	4.904.333.264,00	4.871.819.157,00	8.020.103.197,00	7.949.889.003,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	760.080.608,03	743.696.601,00	2.599.261.062,51	2.511.524.092,00	2.527.177.413,00	2.466.230.420,00	2.515.926.099,00	2.436.607.638,00	2.823.932.304,00	2.749.219.413,00

21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.992.145.258,12	52.630.282.646,00	26.465.932.776,40	24.079.597.425,00	31.628.596.848,00	29.007.319.104,00	33.354.939.762,00	29.187.626.508,00	21.785.437.515,00	21.299.937.921,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.696.286.349,43	7.159.599.207,00	8.841.575.415,00	8.654.359.602,00	12.265.435.375,00	12.081.604.648,00	11.393.378.054,00	10.299.866.736,00	5.967.229.441,00	5.833.620.015,00
23	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.301.307.116,45	6.871.990.232,00	7.020.054.133,91	6.632.982.228,00	5.126.305.670,00	4.872.300.787,00			5.036.493.612,00	4.872.268.865,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.401.984.236,47	7.265.008.945,00	6.044.980.852,40	5.890.782.505,00	5.946.022.546,00	5.706.515.198,00	6.726.616.317,00	6.638.450.739,00	7.132.286.657,00	7.000.228.140,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.006.695.577,24	14.101.912.810,00	16.696.818.374,35	16.135.506.759,44	165.721.963,00	161.829.494.150,00	162.627.835.438,00	76.376.272.517,00	12.427.019.531,00	11.933.450.013,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.303.906.788,67	7.944.833.574,00	6.283.883.970,28	6.199.854.352,00	6.686.848.877,00	6.414.717.581,00	7.754.699.604,00	6.888.190.259,00	5.535.085.441,00	5.381.747.523,00
27	Inspektorat Daerah	7.130.520.026,12	7.026.659.873,00	8.143.066.299,77	7.974.962.043,00	9.151.628.220,00	8.577.562.130,00	9.218.771.520,00	9.043.999.498,00	9.900.969.996,00	9.493.728.981,00
28	Sekretariat Daerah	32.303.210.938,25	31.300.945.974,00	18.827.067.065,86	18.601.696.373,00	26.363.103.387,00	24.486.011.914,00	30.584.648.454,00	29.467.065.301,00	28.296.463.069,00	27.879.712.597,00
29	Sekretariat DPRD	20.206.845.990,00	19.826.617.163,00	12.070.824.273,03	11.905.130.232,00	24.241.199.339,00	21.920.337.423,00	28.038.960.780,00	27.904.033.898,00	27.530.229.045,00	27.425.404.046,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.558.267.370,00	4.426.134.916,00	1.716.420.812,99	1.779.430.015,00	19.847.073.686,00	18.993.107.076,00	3.181.451.406,00	3.039.290.859,00	3.867.206.528,00	3.441.806.732,00
31	Kecamatan Biau	14.212.893.570,81	14.055.146.806,00	12.078.680.246,57	11.921.751.177,00	10.311.480.765,00	10.118.368.812,00	10.140.279.871,00	10.033.678.026,00	12.048.425.934,00	11.900.464.154,00
32	Kecamatan Karamat	2.092.302.518,94	2.058.112.894,00	2.222.120.691,80	2.171.266.579,00	2.304.137.964,00	2.196.891.069,00	2.427.332.264,00	2.414.016.927,00	2.308.064.204,00	2.272.991.677,00
33	Kecamatan Lakea	2.054.364.114,96	1.973.832.985,00	2.048.444.111,35	1.901.108.262,00	2.952.631.231,00	2.902.664.294,00	2.218.247.289,00	2.033.591.297,00	2.125.221.323,00	2.069.687.886,00
34	Kecamatan Momunu	2.414.356.114,37	2.308.510.379,00	2.352.761.154,00	2.313.794.463,00	2.359.121.072,00	2.230.098.780,00	2.258.730.876,00	2.238.961.748,00	2.208.394.902,00	2.164.646.389,00
35	Kecamatan Tiloan	2.337.626.196,18	2.302.241.378,00	1.889.491.730,00	1.806.417.735,00	2.024.874.347,00	1.955.891.581,00	2.225.817.675,00	2.198.995.136,00	3.388.664.847,00	3.285.811.496,00
36	Kecamatan Bukal	2.450.123.066,36	2.441.729.574,00	2.535.774.930,00	2.376.348.697,00	2.563.268.317,00	2.470.061.125,00	2.434.187.271,00	2.311.565.477,00	2.565.340.010,00	2.467.122.820,00
37	Kecamatan Bokat	2.924.938.952,93	2.900.846.194,00	3.159.063.983,00	3.007.558.147,00	3.048.199.178,00	2.899.279.844,00	3.141.847.695,00	3.133.581.614,00	3.419.732.114,00	3.397.327.360,00
38	Kecamatan Bunobogu	2.308.832.053,51	2.222.985.346,00	2.277.134.671,56	2.225.726.808,00	2.300.803.668,00	2.251.889.096,00	2.427.332.264,00	2.414.016.927,00	2.385.476.335,00	2.365.059.865,00
39	Kecamatan Gadung	2.416.327.849,25	2.405.083.190,00	2.576.449.205,26	2.528.891.907,00	2.271.665.576,00	2.172.113.635,00	2.429.670.803,00	2.367.872.371,00	2.403.578.727,00	2.322.018.559,00
40	Kecamatan Paleleh Barat	2.681.968.901,56	2.657.626.527,00	1.453.817.092,50	1.418.864.789,00	1.825.798.773,00	1.738.512.771,00	1.890.867.128,00	1.874.174.586,00	1.933.259.750,00	1.910.951.138,00
41	Kecamatan Paleleh	2.716.248.687,28	2.647.324.785,00	2.503.027.765,58	2.460.665.419,00	2.524.046.894,00	2.444.359.501,00	2.424.825.322,00	2.414.863.942,00	2.603.971.585,00	2.589.026.500,00

Secara umum, PDRB Kabupaten Buol baik atas dasar harga berlaku (PDRB-ADHB) dan atas dasar harga konstan 2010 (PDRB-ADHK) meningkat. Tahun 2023, PDRB-ADHB Kabupaten Buol tercatat sebesar Rp. 7.183,59 miliar. Nilai PDRB-ADHB tahun 2023 meningkat sebanyak Rp. 470,95 miliar dibanding tahun 2022. Peningkatan di tahun 2023 lebih kecil disbanding peningkatan pada tahun 2022. PDRB Kabupaten Buol atas dasar harga berlaku (ADHB) periode 2019-2022 yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.716,68 miliar rupiah (2019), Rp. 5.637,53 miliar rupiah (2020), Rp. 6.133,10 miliar rupiah (2021), dan 6.712,64 miliar rupiah (2022).

Dilihat dari sisi pertumbuhan, PDRB ADHB Kabupaten Buol periode 2019-2023 tumbuh berada pada kisaran 17-22 persen per tahun. Pertumbuhan PDRB ADHB tertinggi yaitu pada tahun 2023, dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi yang terjadi di tahun tersebut. Kemudian, pertumbuhan PDRB ADHD terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, meskipun pada tahun 2023 pertumbuhannya melambat.

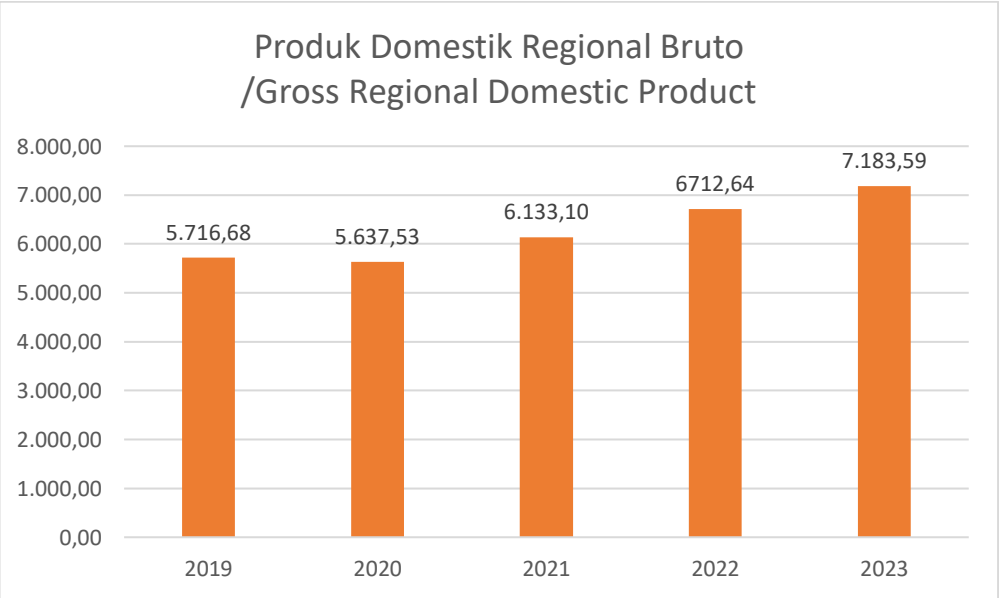

Sumber : Kabupaten Buol Dalam Angka, 2024

Gambar 3.51 Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

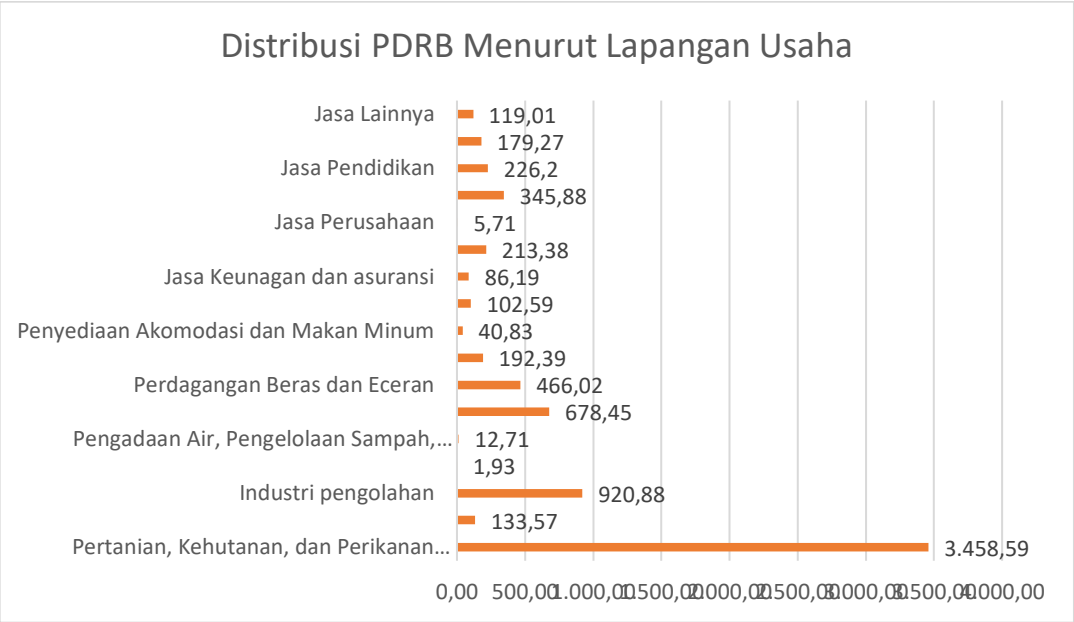

Sumber : Kabupaten Buol Dalam Angka, 2024

Gambar 3.52 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2023

Selain PDRB Lapangan Usaha, dapat dilihat juga berdasarkan Pengeluaran. PDRB Pengeluaran tersusun atas enam komponen yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT), konsumsi pemerintah, pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori, dan net ekspor barang dan jasa. Berdasarkan komponen penyusunnya, lebih dari setengah PDRB-ADHB Buol bersumber dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT). Tahun 2023, nilai PK-RT sebesar Rp4.047,682 miliar. Diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar Rp. 2.556,941 miliar, dan komponen konsumsi pemerintah sebesar Rp. 1.200,482 miliar. Ketiga komponen tersebut termasuk ke dalam tiga terbesar yang memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHD dibandingkan dengan komponen konsumsi LNPRT sebesar Rp. 89,739 miliar, komponen perubahan inventori sebesar Rp. 8,879 miliar, dan komponen net ekspor sebesar Rp. -720,133 miliar. Seluruh kontribusi penyusun PDRB pengeluaran disajikan lengkap pada gambar berikut.

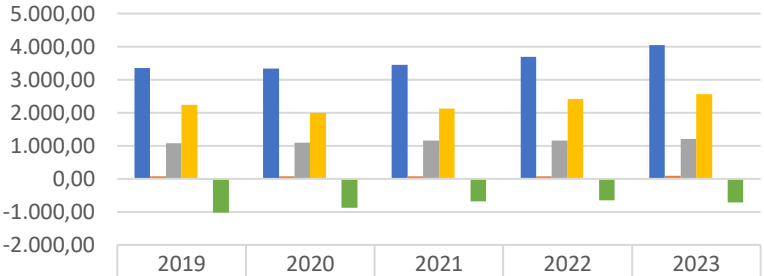

	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.352,60	3.341,58	3.443,67	3.691,83	4.047,68
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	72	70,131	72,936	80,945	89,739
pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.079,51	1.101,73	1.155,80	1.159,96	1.200,48
Pembentukan Modal tetap bruto	2.237,27	1.992,67	2.130,82	2.413,00	2.556,94
Perubahan Inventori	-5,24	7,34	10,94	9,26	8,88
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.018,39	-875,93	-681,07	-642,36	-720,13

Sumber : Kabupaten Buol Dalam Angka, 2024

Gambar 3.53 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023

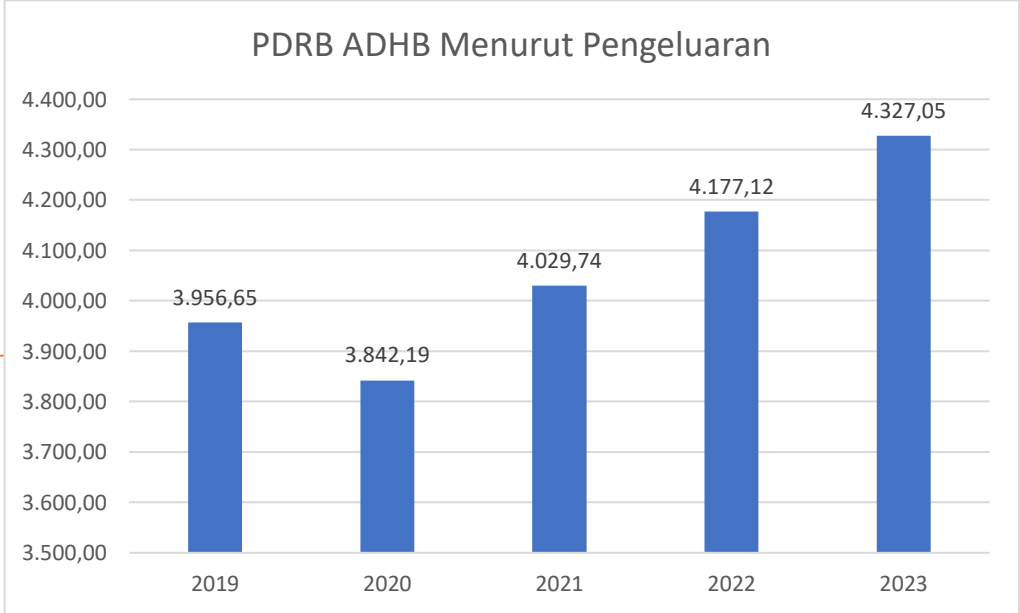

Sumber : Kabupaten Buol Dalam Angka, 2024

Gambar 3.54 Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2019-2023

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Tidak seperti PDRB-ADHK yang dipengaruhi oleh perubahan harga dan volume barang dan jasa, perubahan PDRB-ADHK hanya dipengaruhi oleh perubahan volume barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dengan demikian, PDRB-ADHK lebih tepat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena hanya mencerminkan perubahan secara riil (Silvia et al.,2013).

Tahun 2023 PDRB Kabupaten Buol Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp. 4.327,05 miliar. Nilai PDRB-ADHK tahun 2023 meningkat sebanyak Rp. 149,94 miliar. Nilai PDRB-ADHK periode 2019-2022 masing-masing sebesar Rp. 3.956,65 miliar Rupiah (2019), Rp. 3.842,19 miliar Rupiah (2020), Rp. 4.029,74 miliar Rupiah (2021), dan Rp. 4.177,05 miliar Rupiah (2022).

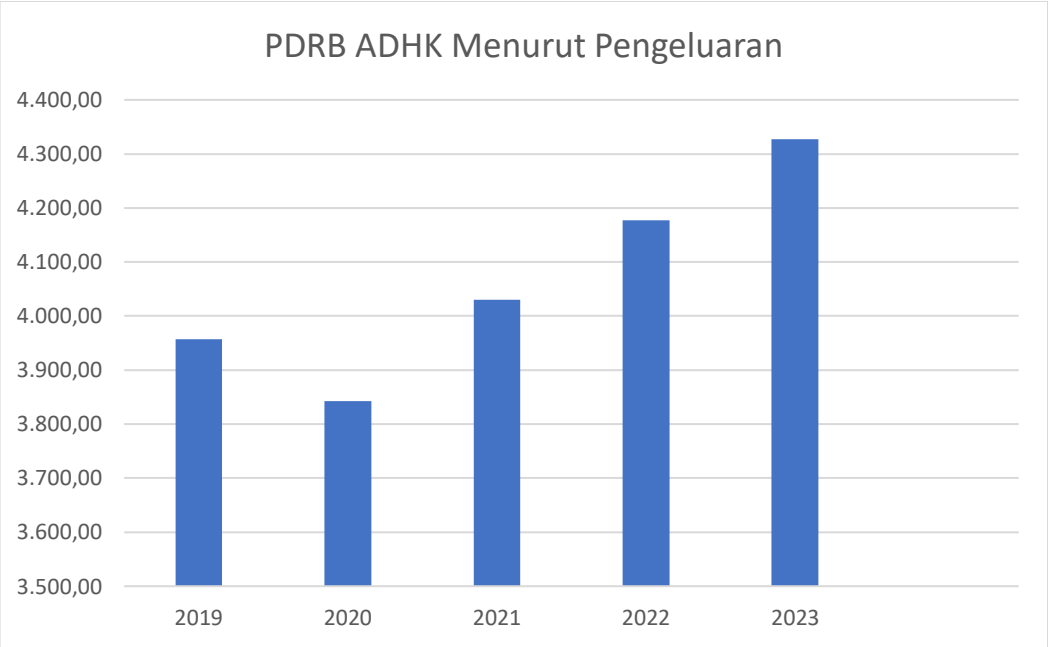

Sumber : Kabupaten Buol Dalam Angka, 2024

Gambar 3.55 Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran, 2019-2023

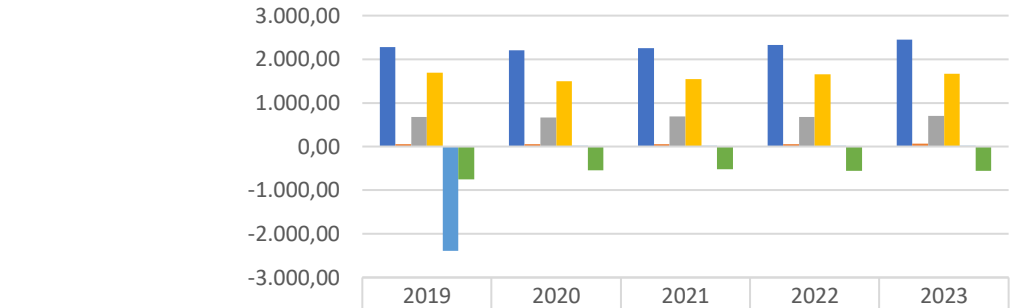

	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.279,98	2.207,39	2.255,40	2.333,02	2.453,71
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	57,941	55,015	56,115	59,86	63,478
pengeluaran Konsumsi Pemerintah	679,492	668,091	691,073	679,288	697,693
Pembentukan Modal tetap bruto	1.693,73	1.491,29	1.545,72	1.653,06	1.669,23
Perubahan Inventori	-2.392	5,135	5,581	5,748	5,019
Net Ekspor Barang dan Jasa	-752,999	-548,722	-524,149	-553,846	-562,079

Sumber : Kabupaten Buol Dalam Angka, 2024

Gambar 3.56 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto/ *Gross Regional Domestic Product* Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan ekonomi bermuara kepada aspek peningkatan kualitas hidup Masyarakat dan perubahan struktur yang terjadi di tengah Masyarakat, sementara pertumbuhan ekonomi adalah indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi (Silaban et al.2022).

Sumber: Kabupaten Buol dalam angka 2024 (diolah kembali)

Gambar 3.57 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buol, 2019-2023

Grafik di atas, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol selama periode 2019-2023 mengalami fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol mencapai angka terendah pada tahun 2020 yaitu tumbuh sebesar -2,98 persen, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi (COVID-19) yang terjadi. Namun pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,65 persen, kembali mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan akibat dari perbaikan ekonomi pasca dampak pandemi di tahun 2020. Kemudian mengalami pertumbuhan yang melambat meskipun tidak begitu signifikan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 3,53 persen dan tahun 2023 sebesar 3,47 persen.

3.5 Peran Pemangku Kepentingan dalam Pencapaian TPB di Kabupaten Buol

TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, yang komprehensif serta saling terkait atau integration. Kemajuan salah satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB merupakan suatu aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan

pelaksanaannya harus memberikan manfaat pada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal".

Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memberikan peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Peran OPD Kabupaten Buol dalam Pencapaian Target TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Peran OPD Kabupaten Buol dalam Pencapaian Target TPB, Tahun 2024

No	Klasifikasi	Tindak Lanjut
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	Tujuan 17
2	Badan Kesahtuan Bangsa dan Politik Daerah	Tujuan 10 dan 16
3	Badan Penanggulangan Bnecana Daerah	Tujuan 16
4	Badan Pendapatan Daerah	Tujuan 16 dan 17
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tujuan 1 dan 8
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-LITBANG	Tujuan 1; 8 dan 10
7	Badan Pusat Statistik	Tujuan 5 dan 16
8	Badan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA	Tujuan 1; 11 dan 13
9	BPJS Kesehatan	Tujuan 1; 16 dan 17
10	BPJS Ketenagakerjaan	Tujuan 17
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Tujuan 1; 2; 3 dan 6
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tujuan 4; 9; 16 dan 17

No	Klasifikasi	Tindak Lanjut
13	Dinas Kesehatan	Tujuan 1; 8 dan 10
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tujuan 6; 7; 11; 12 dan 15
15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Tujuan 1; 3; 5 dan 16
16	Dinas Koperasi Usaha Kceil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Tujuan 8
17	Dinas Lingkungan Hidup	Tujuan 1; 4 dan 8
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 9
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tujuan 2
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tujuan 1 dan 6
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tujuan 1;6 dan 11
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan 1 dan 10
23	Dinas Perhubungan	Tujuan 1; 3; 16 dan 17
24	Dinas Sosial	Tujuan 8 dan 9
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tujuan 8
26	Inspektorat Daerah	Tujuan 16
27	POLRES	Tujuan 10 dan 16
28	Sekretaris Daerah	

Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Filantropi berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang masih tertinggal dalam kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dana filantropi juga memainkan peran dalam kegiatan pengenalan dan penguatan demokrasi, HAM, pemberdayaan gender, perubahan sosial lainnya. Untuk menggerakkan filantropi dan pebisnis, diperlukan fasilitasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Filantropi dan bisnis setidaknya dapat memberikan peran dalam pelaksanaan TPB baik dalam pengembangan bisnis (ekonomi) maupun bantuan sosial serta lingkungan. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendisemiasikan dan melakukan advokasi tentang TPB, membangun

kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.

Setiap platform ini memberikan peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB.

Salah satu dari tiga prinsip yang digunakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) selain universal (semua negara) dan integratif (dimensi social-ekonomilingkungan) adalah *no-one left behind*, yang berarti TPB harus memberi manfaat bagia semua, terutama pada kelompok rentan, serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Menurt Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan pembangunan ini melibatkan 4 (empat) stakeholders yaitu:

A. Pemerintah dan Parlemen

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017, pemerintah daerah Kabupaten Buol berkomitmen dengan melaksanakan agenda Sustainable Development Goals ke dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bagi pemerintah Kabupaten Buol, upaya pelaksanaan itu diwujudkan dengan pemberian kewenangan bagi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk masing-masing indikator TPB. OPD yang mengkoordinasi pemetaan kewenangan ini adalah Bappeda Kabupaten Buol sesuai dengan peran masing-masing OPD.

B. Akademisi dan Pakar

Fungsi akademisi dan pakar dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Buol yang telah dilakukan adalah:

1. Diseminasi hasil penelitian teknologi tepat guna untuk pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan limbah plastik untuk bahan bakar industri mikro dan kecil, sumur resapan dan lain-lain
2. Diseminasi hasil penelitian teknologi tepat guna untuk pengolahan air tanah menjadi air bersih.
3. Mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR, dll).

C. Ormas dan Media

Secara spesifik beberapa peran yang dapat dilakukan kelompok masyarakat dan media dalam pelaksanaan TPB antara lain:

1. Membangun Pemahaman Publik tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.
2. Monitoring pelaksanaan pembangunan yang berpotensi mencemari kualitas lingkungan hidup, khususnya yang berpotensi menurunkan kualitas air permukaan Advokasi kepada masyarakat terkait dengan permasalahan kekerasan ibu dan anak.
3. Meningkatkan indeks partisipasi kasar pendidikan mulai dari TK sampai SMP, melalui pendirian sekolah swasta yag dikelola oleh ormas (Muhammadiyah, NU, dan lain-lain). Dapat dilihat melalui jumlah sekolah negeri sebanyak 13 dan sekolah sebanyak 197.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan, melalui pendirian rumah sakit dan klinik yang mengkhususkan kesehatan ibu dan anak.

BAB IV
ANALISIS PENCAPAIAN TPB DI KABUPATEN BUOL

4.1 Analisis Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Penilaian capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengacu Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB. Perpres tersebut merupakan komitmen pelaksanaan dan pencapaian SDGs yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Kategori capaian indikator TPB Kabupaten Buol berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yakni: SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional). SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional), TR (tidak relevan), dan NA (tidak ada data). Kategori "SS" berarti capaian indikator telah sesuai dengan target RPJMN sampai pada tahun 2019 (target Perpres No, 59 tahun 2017); kategori "SB" sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target RPJMN sampai pada tahun 2019 (target Perpres No, 59 tahun 2017); kategori "TR" tidak relevan; selanjutnya kategori "NA" bermakna bahwa indikator TPB tersebut belum ada dalam program OPD di Kabupaten Buol, sehingga data indikator yang diinginkan tidak ada datanya. Pencapaian TPB di Kabupaten Buol dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.1 dan Gambar 4.1.

Tabel 4.1 memberikan informasi bahwa capaian terhadap 220 indikator TPB di Kabupaten Buol, secara keseluruhan yang telah memenuhi target target RPJMN tahun 2019 (Perpres No. 59 tahun 2017), mencapai 102 indikator (37%), belum mencapai target nasional sebanyak 60 indikator (28%), tidak sesuai dengan karakteristik daerah sebanyak 15 indikator (7%), serta tidak ada data sebesar 43 indikator (28%).

Tabel 4.1 Pencapaian TPB di Kabupaten Buol

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SS	SB	TR	NA	Jumlah
1. Tanpa Kemiskinan	6	12	0	6	24
2. Tanpa Kelaparan	4	4	0	2	10
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	3	6	11	35
4. Pendidikan Berkualitas	4	7	0	2	13
5. Kesetaraan Gender	5	4	0	5	14
6. Air Bersih	5	2	2	9	18
7. Akses Energi	0	0	0	2	2
8. Pertumbuhan Ekonomi	11	5	0	3	19
9. Inovasi Industri Infrastruktur	7	4	2	0	13
10. Berkurangnya Kesenjangan	3	6	0	2	11
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	4	0	4	5	13
12. Produksi Berkelanjutan	0	0	0	5	5
13. Perubahan Iklim	1	0	0	1	2
15. Ekosistem Daratan	1	0	0	3	4
16. Perdamaian dan Keadilan	9	10	0	2	21
17. Kemitraan Berkelanjutan	7	4	1	4	16
JUMLAH	**82**	**61**	**15**	**62**	**220**
PENCAPAIAN	**37%**	**28%**	**7%**	**28%**	**100%**

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Ket: SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan); dan NA (tidak ada data).

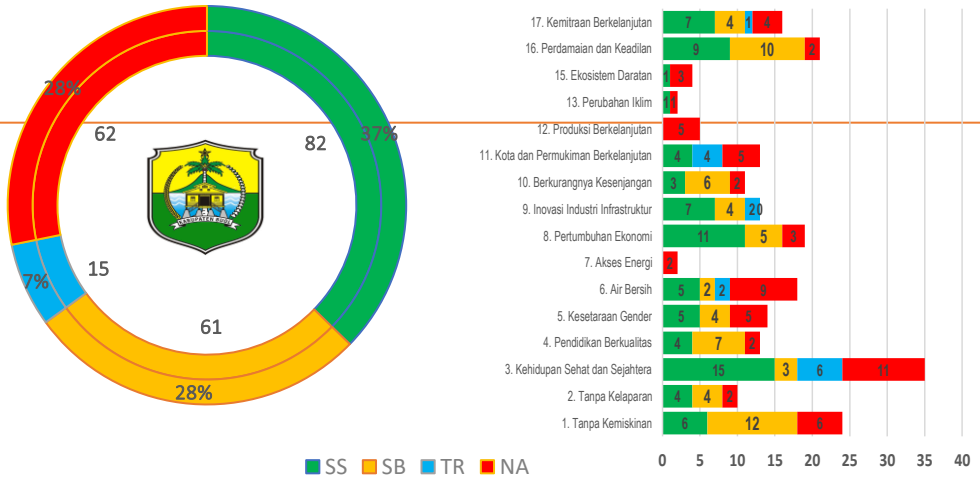

Gambar 4.1 Persentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Buol

Diketahui bahwa dari 96 indikator pada pilar sosial terdapat sebanyak 34 indikator (35%) yang sudah mencapai target, belum mencapai target adalah sebanyak 30 indikator (31%), tidak sesuai dengan karakteristik daerah sebanyak 6 indikator (6%), dan tidak ada data sebanyak 26 indikator (27%). Pada pilar lingkungan dengan total terdapat 42 indikator, capaian yang sudah mencapai target adalah sebanyak 11 indikator (26%), belum mencapai target adalah sebanyak 2 indikator (5%), tidak sesuai dengan karakteristik daerah sebanyak 6 indikator (14%), dan tidak ada data hanya 23 indikator (55%). Pada pilar ekonomi dengan total 61 indikator, capaian yang sudah mencapai target adalah sebanyak 25 indikator (46%), belum mencapai target adalah sebanyak 19 indikator (31%), dan tidak sesuai dengan karakteristik daerah sebanyak 3 indikator (5%) serta tidak memiliki data sebanyak 11 indikator (18%). Sedangkan pada pilar hukum dan tata kelola dengan total 21 indikator, capaian yang sudah mencapai target adalah sebanyak 9 indikator (43%), belum mencapai target adalah sebanyak 10 indikator (48%), dan tidak memiliki data sebanyak 2 indikator (10%).

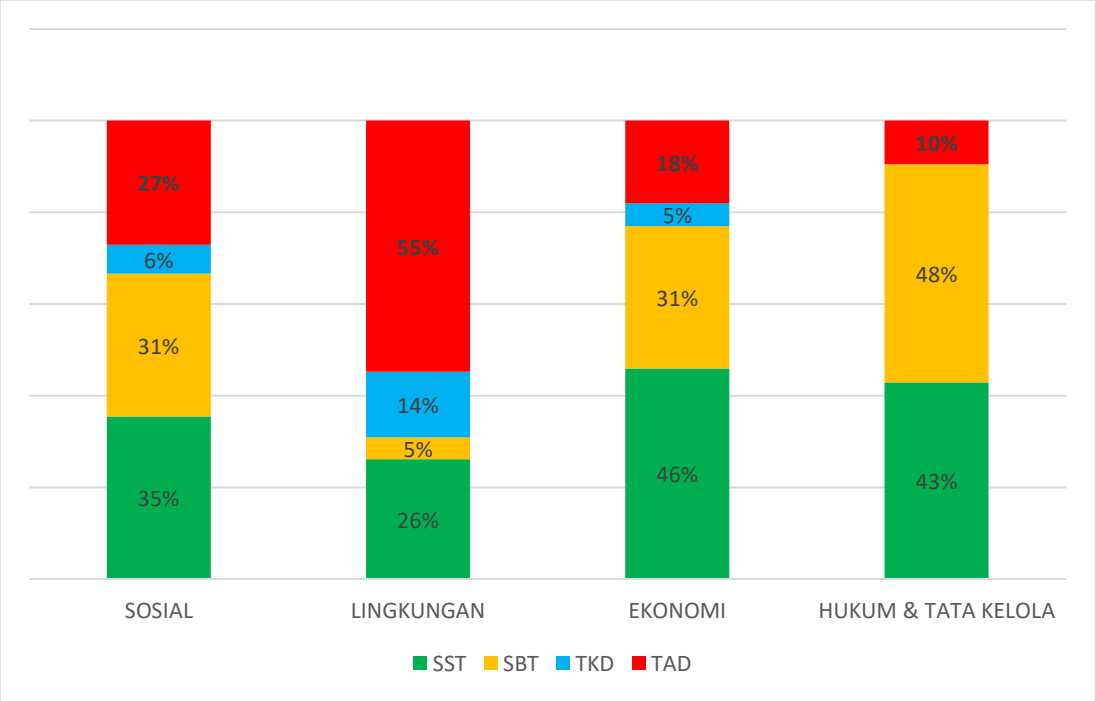

Gambar 4.2
Persentase Capaian Pilar TPB di Kabupaten Buol

4.2 Indikator Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Secara keseluruhan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Buol dianalisis berdasarkan empat pilar yang terbagi dalam 220 indikator. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional berjumlah 82 indikator (37%). Secara lengkap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah mencapai target dapat dilihat pada gambar berikut.

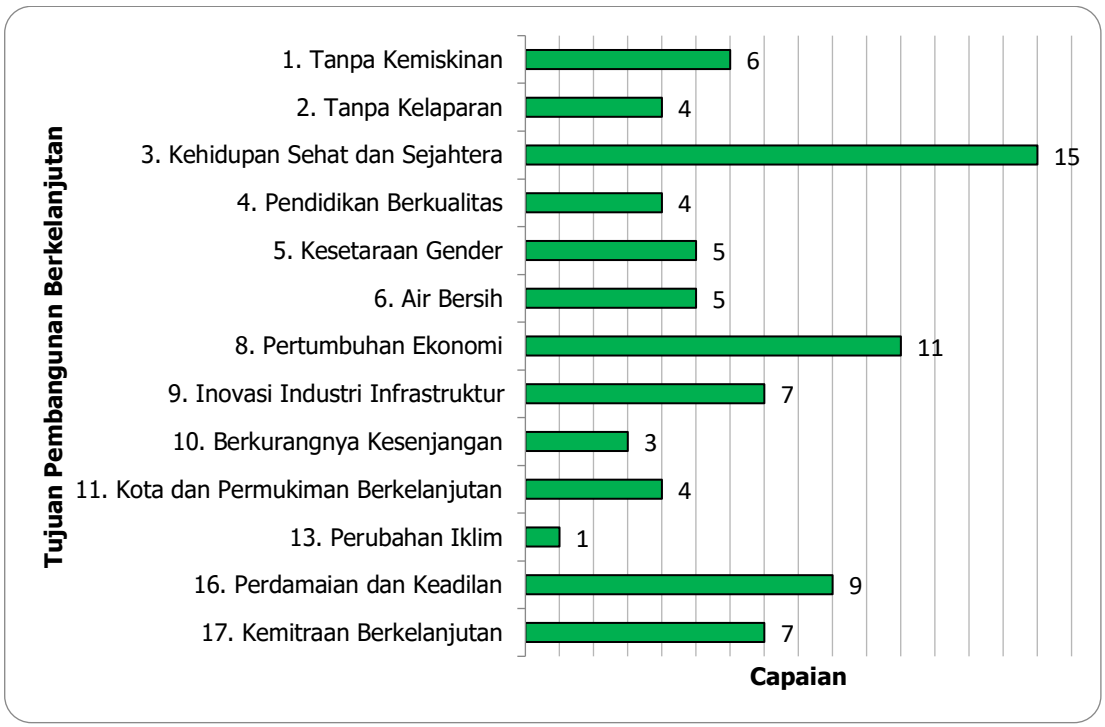

Gambar 4.3
Indikator Yang Telah Mencapai Target Nasional

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, diketahui bahwa sebanyak 82 indikator telah mencapai target nasional. TPB ke 3 yakni tujuan kehidupan sehat dan sejahtera menjadi tujuan yang indikatornya telah banyak tercapai yakni sebanyak 15 indikator. Secara rinci, 82 indikator yang telah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rincian Indikator Yang Telah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	SOSIAL	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	-	-	51,811	24,912	0
1	SOSIAL	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. (Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan)	97.50%	96.50%	95.40%	94.37%	93.32%
1	SOSIAL	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	96.61%	96.66%	97.55%	97.02%	97.48%
1	SOSIAL	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (umur 0-18)	84.10%	86.76%	91.04%	89.04%	89.72%
1	SOSIAL	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	51	0	0
1	SOSIAL	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	43.7%	43.6%	45.1%	44.3%	45.0%
2	SOSIAL	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	0	0	29.4	0	0

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
2	SOSIAL	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	18.40%	22.40%	19.00%	20.53%	20.83%
2	SOSIAL	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	46.32%	53.80%	26.86%	22.87%	13.14%
2	SOSIAL	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	36.76%	63.67%	37.54%	46.77%	47.16%
3	SOSIAL	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	266/100.000 KH	136/100.000 KH	247/100.000 KH	266/100.000 KH	136/100.000 KH
3	SOSIAL	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	10/1000 KH	6/1000 KH	5/1000 KH	10/1000 KH	6/1000 KH
3	SOSIAL	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	8/1000 KH	6/1000 KH	5/1000 KH	8/1000 KH	6/1000 KH
3	SOSIAL	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	9/1000 KH	6/1000 KH	5/1000 KH	9/1000 KH	6/1000 KH
3	SOSIAL	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.24	0.25	0.31	0.34	0.37
3	SOSIAL	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	-	150	94	38	0
3	SOSIAL	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.051	0.53	0.07	0	0
3	SOSIAL	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	11%	2%	27%	0%	16%
3	SOSIAL	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.				44.10%	0.00%
3	SOSIAL	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun	57%	59%	59%	64%	65%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
			yang berstatus kawin.(angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun)					
3	SOSIAL	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	-	-	-	28.81%	28.81%
3	SOSIAL	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	159,669	161,725	160,486	192,125	192,533
3	SOSIAL	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	96.60%	97.30%	102.51%	104.72%	107.67%
3	SOSIAL	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	35.57	36.10	34.80	34.72	34.34
3	SOSIAL	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk)	1133	1337	1428	1567	1715
4	SOSIAL	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	63.18%	66.27%	72.96%	75.10%	79.99%
4	SOSIAL	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat;	114.00%	97.97%	98.63%	110.62%	115.06%
4	SOSIAL	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	SOSIAL	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
5	SOSIAL	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	-	5	6	8	9
5	SOSIAL	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	SOSIAL	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. (Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD)	1	1	1	1	1
5	SOSIAL	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	-	-	-	7	7
5	SOSIAL	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. (persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki/menguasai handphone)	49.60%	51.70%	59.95%	65.98%	71.16%
6	LINGKUNGAN	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan)	41%	91%	97%	104%	110%
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	-	-	-	108	108
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	-	-	-	17	17

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
6	LINGKUNGAN	6.3.2.(a)	Kualitas air danau. (Indeks Kualitas Air)	-	-	48.63%	58.00%	67.37%
6	LINGKUNGAN	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	57.70	30.56	48.63	58.00	53.47
8	EKONOMI	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	10.50%	11.00%	37.00%	46.00%	59.25%
8	EKONOMI	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	14,893	16,160	16,160	16,254	17,427
8	EKONOMI	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	4.05%	4.36%	3.64%	3.07%	2.87%
8	EKONOMI	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	36.05%	35.77%	33.48%	26.45%	25.17%
8	EKONOMI	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. (Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD)	150,235,000	63,380,000	28,000,000	98,500,000	37,382,500
8	EKONOMI	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	3770	408	17	1742	3467
8	EKONOMI	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.(Kunjungan wisata)	4,991	59,593	40,447	51,365	55,419
8	EKONOMI	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	1,235,977	##### ##### #	676,329,104.69	1,083,700,343	1,421,246,906
8	EKONOMI	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	112	353	344	298	303
8	EKONOMI	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	24	22	38	37	44
8	EKONOMI	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	65.00%	68.00%	66.00%	67.33%	67.83%
9	EKONOMI	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	2	2	2	2	2

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
9	EKONOMI	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	4	4	4	4	4
9	EKONOMI	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	-0.34	-0.24	1.88	3.93	5.98
9	EKONOMI	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	65.00%	68.00%	66.00%	70.00%	70.50%
9	EKONOMI	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	63%	100%	100%	100%	100%
9	EKONOMI	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	61.16%	65.70%	65.80%	67.10%	69.42%
9	EKONOMI	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet (penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet)	53.60%	44.70%	64.80%	65.00%	70.60%
10	EKONOMI	10.1.1*	Koefisien Gini. (Indeks Gini)	0.309	0.289	0.321	0.266	0.258
10	EKONOMI	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	6	13	4	5	6
10	EKONOMI	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	-	13.8%	8.2%	5.4%	0.7%
11	LINGKUNGAN	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	46.15%	47.02%	64.47%	70.87%	80.03%
11	LINGKUNGAN	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	64	64	64	64	64
11	LINGKUNGAN	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	51	0	0

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
11	LINGKUNGAN	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	100%	100%	100%	100%	100%
13	LINGKUNGAN	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	51	0	0
15	LINGKUNGAN	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.(Indeks tutupan lahan)	-	-	86.12	86.12	86.12
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	100%	100%	100%	100%	100%
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0	0	0	0	0
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. (Realisasi Belanja Daerah)	1,147,718,790,399	############	1,033,253,603,764	1,076,177,773,758	1,018,945,180,441

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	55.61	57.61	59.61	60.29	62.29
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	87.35%	63.92%	81.07%	90.07%	86.93%
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	90.07%	89.79%	89.93%	89.93%	89.51%
17	EKONOMI	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	49.60%	51.70%	59.95%	65.98%	71.16%
17	EKONOMI	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	61.16%	65.70%	65.80%	67.10%	69.42%
17	EKONOMI	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	86%	89.80%	92.59%	97.34%	100%
17	EKONOMI	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	62%	70%	80%	86.67%	96%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
17	EKONOMI	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	1	2	0	0	5
17	EKONOMI	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	9,404	5,595	5,809	7,676	8,177
17	EKONOMI	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).		92.68%	93.33%	96.67%	100%

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

4.3 Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

Indikator yang sudah dilaksanakan, namun belum mencapai target nasional dari 220 indikator yang ada di Kabupaten Buol adalah 61 indikator (28%). Indikator yang masuk pada kategori ini akan menjadi salah satu prioritas utama dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD ke depan. Secara lengkap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah dilaksanakan, namun belum mencapai target nasional dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.

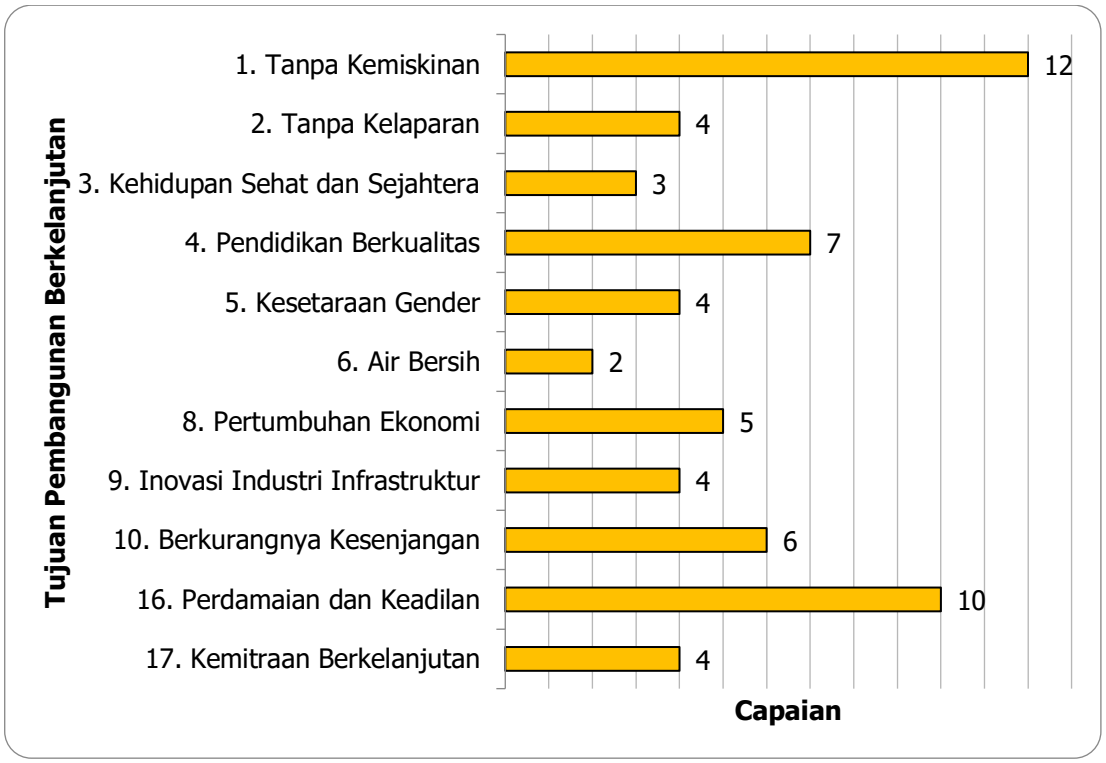

Gambar 4.4
Indikator Yang Belum Mencapai Target Nasional

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas, diketahui bahwa sebanyak 61 indikator belum mencapai target nasional. TPB ke 1 yakni tanpa kemiskinan memiliki indikator yang belum mencapai target nasional terbanyak, yakni 12 indikator. Secara rinci, 61 indikator yang belum mencapai target nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rincian Indikator Yang Telah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	SOSIAL	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. (Angka kemiskinan)	15.19%	13.93%	14.06%	12.85%	13.36%
1	SOSIAL	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	0%	0%	35.36%	46.35%	79.77%
1	SOSIAL	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. (Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial)	16.00%	11.00%	16.00%	16.00%	16.00%
1	SOSIAL	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.(Tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR))	-	-	-	54.83%	54.83%
1	SOSIAL	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses	75%	71%	86%	85%	91%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
			terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan)					
1	SOSIAL	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. (Persentase rumah tinggal bersanitasi)	60.04%	60.87%	67,40%	61.70%	62.53%
1	SOSIAL	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	75.30%	75.26%	76%	76.81%	77.21%
1	SOSIAL	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (Persentase rumah tangga pengguna listrik)	94.26%	94.88%	96.97%	95.87%	89.72%
1	SOSIAL	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	-	-	-	15	15

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	SOSIAL	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-	-	753	753
1	SOSIAL	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	-	-	-	13	13
1	SOSIAL	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	6	6	6	6	6
2	SOSIAL	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	8.49	8.85	10.63	11.92	12.99
2	SOSIAL	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	48	55	41	47	48
2	SOSIAL	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak	-	-	8.6	8.6	8.6

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
			pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.					
2	SOSIAL	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	80.10	85.20	75.70	73.40	73.50
3	SOSIAL	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	100	100	100	100	100
3	SOSIAL	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	8%	9%	10%	11%	12%
3	SOSIAL	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	74.00%	80.00%	80.00%	80.00%	83.00%
4	SOSIAL	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum	-	-	-	95.00%	95.00%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
			dalam: (i) membaca, (ii) matematika.					
4	SOSIAL	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	-	-	-	52.00%	52.00%
4	SOSIAL	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	-	-	-	38.00%	38.00%
4	SOSIAL	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	109.72%	107.91%	106.86%	107.77%	106.34%
4	SOSIAL	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	79.08%	90.84%	89.08%	97.78%	102.78%
4	SOSIAL	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	-	-	-	99.45%	99.45%
4	SOSIAL	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	-	-	-	34.00%	34.00%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
5	SOSIAL	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	-	-	1	1	1
5	SOSIAL	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	8	12	28	36
5	SOSIAL	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	-	-	24	38	52
5	SOSIAL	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	-	-	21.15%	20.19%	19.23%
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	-	-	-	74.00%	74.00%
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses	63.35%	65.58%	66.15%	67.83%	69.23%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
			terhadap layanan sanitasi layak.					
8	EKONOMI	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	0.43%	8.15%	3.71%	2.53%	2.02%
8	EKONOMI	8.1.1.(a)	PDRB per kapita (ADHB) AKAN DIGANTI DATA ADHK			Rp 41,827.60	45,280,40	Rp 47,723.89
8	EKONOMI	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	77.14%	72.85%	69.46%	64.72%	60.88%
8	EKONOMI	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	32.32%	29.35%	34.80%	36.16%	37.40%
8	EKONOMI	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	-	2.90%	1.97%	1.36%	0.54%
9	EKONOMI	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	1.62%	-0.28%	0.66%	-0.03%	-0.51%
9	EKONOMI	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	15.28%	14.42%	18.39%	14.18%	14.18%
9	EKONOMI	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	32.12%	12.31%	11.05%	-2.58%	-13.11%
9	EKONOMI	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. (proporsi anggaran litbang terhadap APBD)	2.71%	2.71%	0.21%	-0.62%	-1.87%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
10	EKONOMI	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. (Angka kemiskinan)	17.60%	16.39%	16.60%	16.12%	15.62%
10	EKONOMI	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	28	22	9	5	1
10	EKONOMI	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	0	0	1	2	6
10	EKONOMI	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	4.74	3.17	4.25	3.46	3.215
10	EKONOMI	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. (persentase penduduk miskin di desa tertinggal)	17.16%	16.39%	16.60%	16.12%	15.84%
10	EKONOMI	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	0%	0%	35.36%	46.35%	79.77%
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	0	0	3	3	3
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	-	12	18	28	35
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	-	8	12	20	25
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	-	-	62.61%	62.90%	63.19%
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	16%	16%	16%	16%	16%
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	79.05	79.97	80.89	81.81	82.73
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	87.09%	82.74%	78.39%	74.04%	69.69%
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	-	-	15 orang	15 orang	15 orang
17	EKONOMI	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	188,718	184,282	170,676	157,344	148,323
17	EKONOMI	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	5.76%	6.79%	7.89%	7.21%	8.28%
17	EKONOMI	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestic	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
17	EKONOMI	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	3.46%	3.70%	3.80%	4.00%	4.17%

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

4.4. Indikator Yang Tidak Sesuai Dengan Karakteristik Daerah

Indikator yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah dari 220 indikator yang ada di Kabupaten Buol adalah sebanyak 15 indikator (7%). Secara ringkas dan rinci, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan Tabel 4.4 berikut.

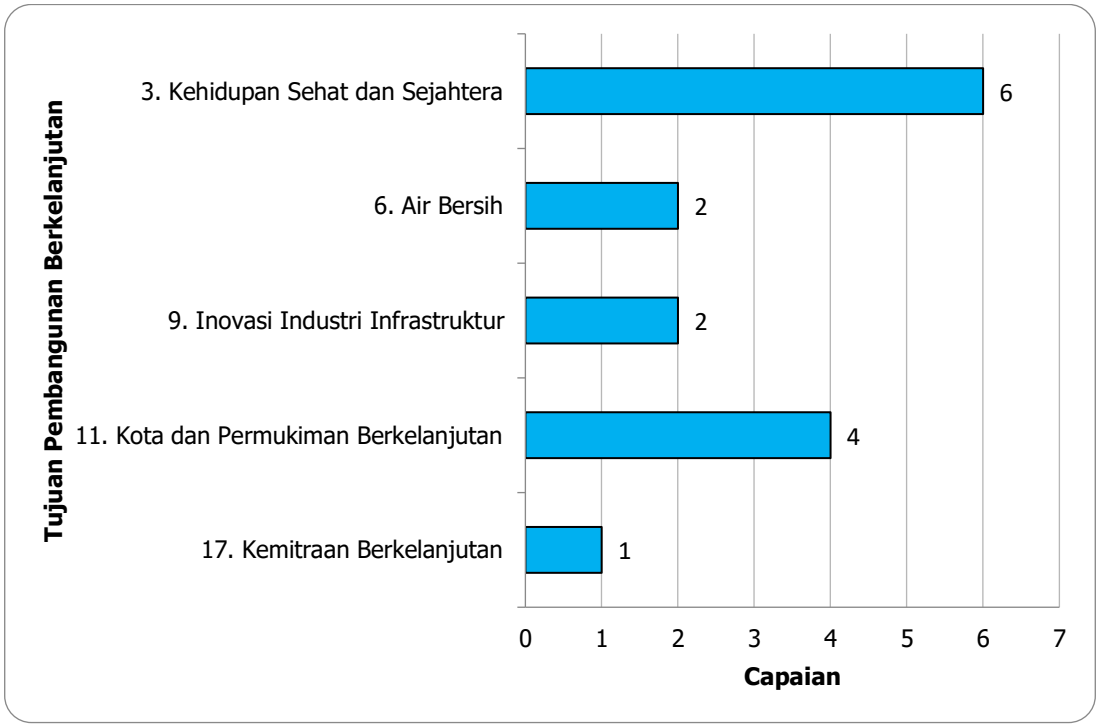

Gambar 4.5
Indikator Yang Tidak Sesuai Dengan Karakteristik Daerah

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas, diketahui bahwa sebanyak 15 indikator tidak sesuai dengan karakteristik daerah dengan keadaan yang sesungguhnya di Kabupaten Buol. Secara rinci, 15 indikator yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rincian Indikator Yang Tidak Sesuai Dengan Karakteristik Daerah

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	TARGET RPJMN 2019
3	SOSIAL	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Meningkat menjadi 95%
3	SOSIAL	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Meningkat menjadi 300
3	SOSIAL	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat
3	SOSIAL	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	Meningkat menjadi 34 provinsi
3	SOSIAL	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Meningkat menjadi 35.
3	SOSIAL	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. (jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa)	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Meningkat menjadi 280
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota,	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	TARGET RPJMN 2019
			kawasan dan komunal.		
6	LINGKUNGAN	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan IPLT di 409 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota
9	EKONOMI	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	1000 Km (skala nasional)
9	EKONOMI	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	Bertambah 3.258 km
11	LINGKUNGAN	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)
11	LINGKUNGAN	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	5 metropolitan (skala nasional)
11	LINGKUNGAN	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	ada

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET PERPRES 59/2017	TARGET RPJMN 2019
11	LINGKUNGAN	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.	Meningkat/ada
17	EKONOMI	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. (Proporsi rumah tangga dengan akses internet)	Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah USO, dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	1

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

4.5 Indikator Yang Tidak Memiliki Data

Indikator yang tidak memiliki data di Kabupaten Buol adalah sebanyak 62 indikator (28%). Secara ringkas dan rinci, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak memiliki data dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan Tabel 4.6 berikut.

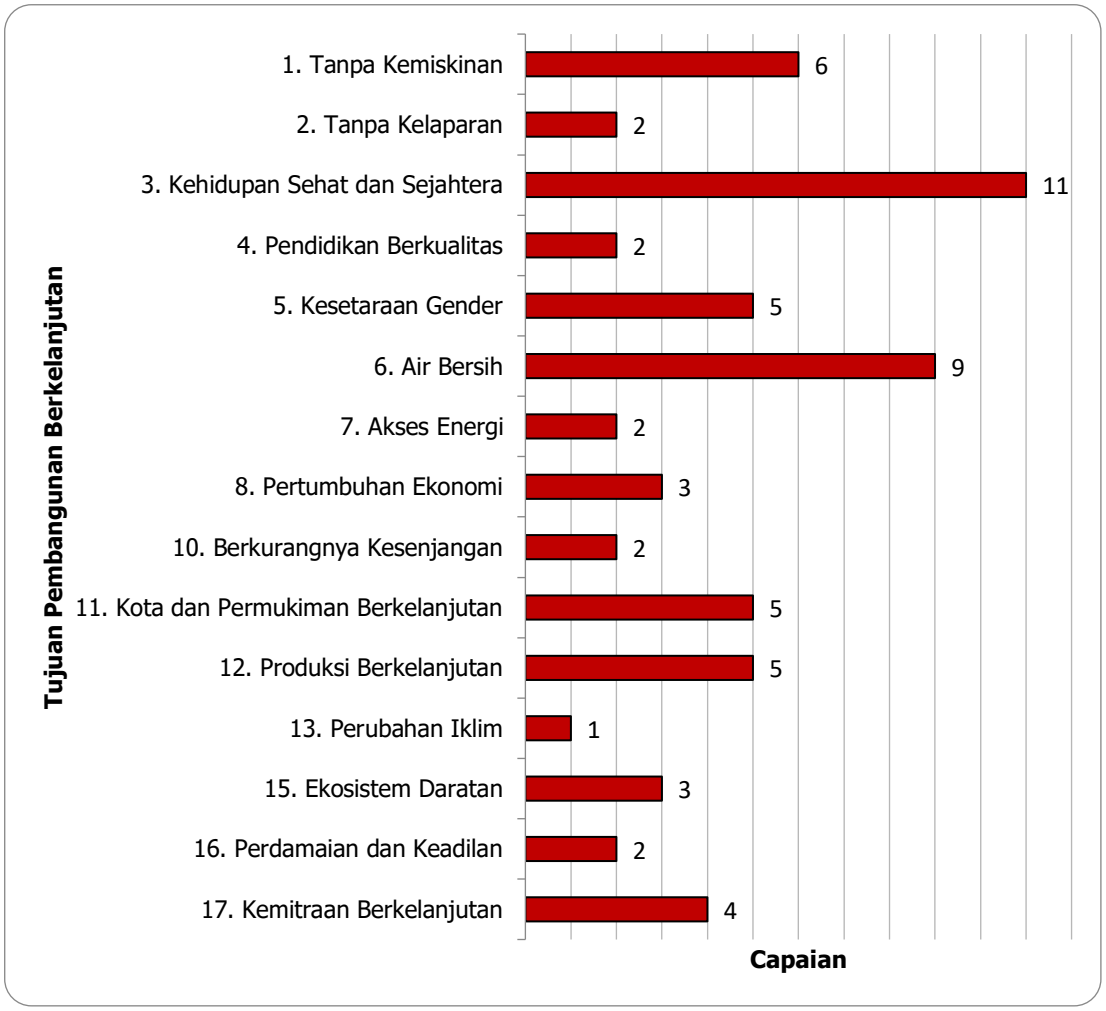

Gambar 4.6
Indikator Yang Tidak Tidak Memiliki Data

Selain indikator TPB yang belum mencapai target, indikator TPB yang belum memiliki data ini juga akan menjadi salah satu prioritas dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD dan RPJPD ke depan. Secara ringkas dan rinci, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak memiliki dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5
Rincian Indikator Yang Tidak Mmeiliki Data

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
1	SOSIAL	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
1	SOSIAL	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)
1	SOSIAL	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
1	SOSIAL	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
1	SOSIAL	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
1	SOSIAL	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
2	SOSIAL	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (Prevalensi Balita Gizi Kurang)
2	SOSIAL	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
2	SOSIAL	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
3	SOSIAL	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
3	SOSIAL	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
3	SOSIAL	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
3	SOSIAL	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
3	SOSIAL	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
3	SOSIAL	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
3	SOSIAL	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
3	SOSIAL	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).
3	SOSIAL	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan. (Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need))
3	SOSIAL	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.
4	SOSIAL	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. (Angka rata-rata lama sekolah)
4	SOSIAL	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5	SOSIAL	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. (jumlah kasus kekerasan seksual)
5	SOSIAL	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. (Rata-rata usia kawin pertama wanita)
5	SOSIAL	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
5	SOSIAL	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
5	SOSIAL	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
6	LINGKUNGAN	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
6	LINGKUNGAN	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
6	LINGKUNGAN	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
6	LINGKUNGAN	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
7	EKONOMI	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.
7	EKONOMI	7.3.1*	Intensitas energi primer.
8	EKONOMI	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.
8	EKONOMI	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
8	EKONOMI	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
10	EKONOMI	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
10	EKONOMI	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
11	LINGKUNGAN	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
11	LINGKUNGAN	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
11	LINGKUNGAN	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
11	LINGKUNGAN	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
11	LINGKUNGAN	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
12	LINGKUNGAN	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
12	LINGKUNGAN	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
12	LINGKUNGAN	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
12	LINGKUNGAN	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
12	LINGKUNGAN	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
13	LINGKUNGAN	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
15	LINGKUNGAN	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
15	LINGKUNGAN	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
15	LINGKUNGAN	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
17	EKONOMI	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
17	EKONOMI	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
17	EKONOMI	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
17	EKONOMI	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

4.6 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Buol

Proses identifikasi awal penguatan isu strategis pembangunan berkelanjutan diawali dengan diskusi bersama tim pembuat KLHS dan stakeholder kunci yang dilakukan pada Konsultasi Publik I, Focus Grup Discusion (FGD) dan Konsultasi Publik II KLHS RPJMD Kabupaten Buol. Tim Pembuat KLHS melaksanakan pelingkupan isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) menjadi isu utama (paling strategis) yang meliputi kegiatan antara lain:

a. Mengidentifikasi dan menghasilkan pengutaan isu-isu lingkungan, isu-isu sosial- budaya, isu-isu ekonomi dan isu-isu hukum dan tata kelola yang dilakukan pada konsultasi publik KLHS dengan melihat GAP capaian TPB
b. Mengumpulkan data dan informasi terkait isu strategis dari dokumen

RPJPD teknoratik.

c. Menganalisis keterkaitan antara isu TPB dengan isu dari hasil konsultasi publik 1 dan konsultasi publik 2.

d. Mengumpulkan hasil dokumen perencanaan strategis lainnya seperti RTRW, RDTR, dan dokumen lainnya.

Hasil identifikasi dan penilaian isu pembangunan berkelanjutan selanjutnya dilakukan penapisan isu dengan mempertimbangkan 6 muatan kajian lingkungan hidup strategis dan selanjutnya diperoleh isu utama (paling strategis) pembangunan berkelanjutan dengan melihat karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Pemetaan isu strategis menggunakan metode critical decission factor, disngkat CDF, atau faktor terpenting pembuatan keputusan (Partidario, 2016). Pendekatan CDF mengkaji isu-isu strategis, isu lingkungan, isu gap/permasalah TPB, dan kerangka acuan kebijakan atau isu penting perencanaan pembangunan. Pendekatan identifikasi isu mengarah pada akar masalah, irisan isu kemudian ditetapkan sebagai critical decission factor atau faktor-faktor penting yang akan diselesaikan dalam perencanaan pembangunan. Skema ilustrasi CDF dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

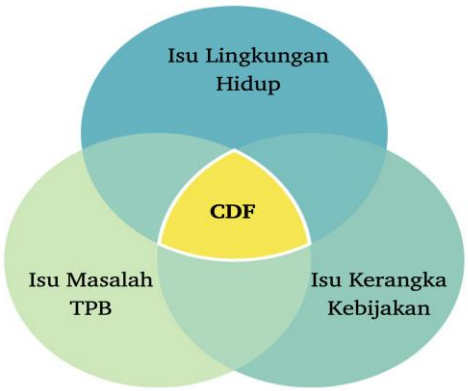

Sumber: Analisis, 2023

Gambar 4.7 Pendekatan CDF Dalam Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis

4.6.1 Kajian isu strategis lingkungan hidup

Berdasarkan hasil diskusi komunitas terumpun, dan kajian isu yang ada dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Buol, diperoleh daftar isu lingkungan hidup, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.6 Daftar isu Lingkungan Hidup KLHS RPJMD

Kelompok Isu	Daftar Isu
Masalah Lingkungan	1. Tata kelola lingkungan 2. Adanya potensi bencana alam 3. Infrastruktur 4. perubahan iklim 5. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati 6. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan 7. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam 8. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan 9. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau 10. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

4.6.2 Kajian isu berbasis kajian tujuan pembangunan berkelanjutan

Kajian isu berbasis capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dilaksanakan dengan mengidentifikasi indikator-indikator yang belum mencapai target nasional, belum dilaksanan, dan TPB yang tidak memiliki data. Tabel di bawah ini menyajikan indikator- indikator yang belum mencapai target nasional sebagai isu strategis TPB.

Tabel 4.7 Strategis TPB Berbasis Indikator-Indikator Yang Belum Mencapai Target Nasional

No. Target	Target
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya,

No. Target	Target
	setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
8,6	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

No. Target	Target
9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
15.1	Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
16,10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
17.18	Pada tahun 2030, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

4.6.3 Kajian isu berbasis kerangka kebijakan

Kajian isu berbasis kerangka kebijakan berbasis pada isu-isu strategis yang terdapat pada rencana pembangunan, mulai dari tingkat nasional, regional, Provinsi hingga di tingkat Kabupaten, yakni KLHS RPJPN, Kebijakan LH Pulau Sulawesi, isu pada dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, isu dokumen RPPLH, isu pada dokumen RTRW. Daftar isu tersebut isu tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Isu Berbasis Kerangka Kebijakan

Sumber Dokumen Perencanaan	Daftar Isu
Isu KLHS RPJPN	1. Perubahan iklim 2. Polusi dan kerusakan lingkungan 3. Keanekaragaman hayati
Kebijakan Lingkungan Hidup Pulau Sulawesi	1. Rendahnya kualitas air, baik air tanah maupun air permukaan 2. perlindungan ekosistem 3. kerusakan lingkungan 4. ketersediaan sanitasi, dan kebersihan yang belum memadai 5. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang belum memadai 6. Kurangnya lapangan pekerjaan dan produktivitas masyarakat 7. Kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan 8. kurangnya akses pendidikan yang merata
Isu RPPLH Provinsi Sulawesi Tengah	1. Perubahan polar ruang pasca gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. 2. Mitigasi LH dampak industry tambang 3. Alih fungsi hutan dan lahan untuk tambang dan sawit 4. Pencemaran air 5. Kebencanaan 6. Pengelolaan sampah 7. Pelestarian SDA dan KEHATI
Isu RPPLH Kabupaten Buol	1. Keberlangsungan Ketersediaan Pangan 2. Keberlangsungan jasa Pengatur Air dan Penyimpan Air 3. Dampak Perubahan Iklim dan Kebencanaan 4. Sistem pengelolaan sampah/tingkat pelayanan 5. Koordinasi pengelolaan LH dengan internal dan eksternal 6. Dampak Alih Fungsi Lahan dan Hutan 7. Penurunan Keanekaragaman Hayati

Sumber Dokumen Perencanaan	Daftar Isu
	8. Kawasan Bernilai Ekologis Pesisir dan pulau-pulau kecil 9. Sistem pengelolaan air limbah domestik dan industri
Isu RTRW	1. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan 2. Pengembangan prasarana wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yangterpadu dan merata di seluruh wilayah 3. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung 4. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup 5. Pengembangan kegiatan berbasiskan perikanan serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budidaya 6. Pengembangan sektor pertanian dan perikanan melalui peningkatan kualitas sumberdaya lahan pertanian, perkebunan dan perikanan 7. Pengembangan potensi kelautan dan perikanan 8. Pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan 9. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya 10. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan 11. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis kabupaten 12. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara
Isu RPJPD, RPJMD, RKPD Kabupaten Buol	1. Keamanan Daerah, 2. Iklim Demokrasi 3. Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi 4. Kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 5. Pengelolaan Sumber Daya Pertanian 6. Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan 7. Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing 8. Pengembangan struktur ekonomi yang tangguh 9. Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan. 10. Pembangunan Perdesaan Yang Mandiri

Sumber Dokumen Perencanaan	Daftar Isu
	11. Menjaga Keseimbangan Pembangunan Desa-Kota (*Balancing Lingkages*) 12. Pembangunan konservasi 13. Peningkatan Kualitas Lingkungan

4.6.4 Identifikasi Faktor Penting Pembuatan Keputusan *(Critical Decision Factors)* Sebagai Penentu Isu Strategis

Pendekatan CDF mengkaji isu-isu strategis, isu lingkungan dan keberlanjutan, isu gap/permasalah TPB, dan isu kerangka acuan kebijakan atau isu penting perencanaan pembangunan. Pendekatan identifikasi isu mengarah pada akar masalah, kemudian ditetapkan sebagai *critical decission factor* atau faktor-faktor penting yang akan diselesaikan dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan irisan isu yang telah dikemukakan sebelumnya maka isu strategis di Kabupaten Buol adalah :

1. Adaptasi terhadap perubahan iklim
2. Tatakelola pemerintahan
3. Kerentanan sosial
4. Kemiskinan
5. Tatakelola lingkungan hidup

BAB V
ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUOL

5.1 Analisis Capaian Indikator pada OPD Berdasarkan Proporsi Anggaran

Kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap OPD di Kabupaten Buol berfokus kepada analisis capaian masing-masing indikator TPB yang sudah dilakukan setiap OPD. Capaian ini dilihat dari urusan yang ditangani oleh OPD bahwa hasil dari kondisi capaian dan analisis menjadi salah satu bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Kabupaten Buol yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing OPD dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD.

Mengacu Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB, komitmen pelaksanaan dan pencapaian SDGs yang dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Analisa capaian indikator TPB dengan menggunakan 4 kriteria penilaian. Kriteria SST (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional) adalah indikator yang sudah dilaksanakan oleh OPD dan sudah mencapai target nasional; kriteria SBT (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional) adalah indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh OPD namun belum mencapai target nasional, kriteria TKD (tidak sesuai dengan karakteristik daerah) adalah indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Buol; serta TAD (tidak ada data) adalah indikator TPB yang tidak ada data di OPD tersebut. Berdasarkan analisis pencapaian indikator TPB Kabupaten Buol per satuan OPD dapat diketahui bahwa pelaksanaan TPB sudah dilakukan pada masing-masing OPD selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol

Nama OPD	SS	SB	TR	NA	Jumlah Indikator
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	0	0	1	2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	0	2	0	2	4
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	0	9	15
Badan Pendapatan Daerah	0	2	0	1	3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2	3	0	0	5
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-LITBANG	4	1	2	3	10
Badan Pusat Statistik	5	0	0	0	5
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA	1	0	0	0	1
BPJS Kesehatan	1	0	0	1	2
BPJS Ketenagakerjaan	0	2	0	0	2
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4	0	0	0	4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	0	1	5
Dinas Kesehatan	17	5	6	10	38
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	3	0	0	3
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	7	2	1	0	10
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3	3	0	0	6
Dinas Lingkungan Hidup	3	0	2	11	16
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	2	2	7	12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2	0	0	3
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7	6	0	8	21

Nama OPD	SS	SB	TR	NA	Jumlah Indikator
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	0	1	2
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4	8	0	2	14
Dinas Perhubungan	2	0	2	0	4
Dinas Sosial	5	9	0	1	15
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	3	0	2	9
Inspektorat Daerah	0	1	0	0	1
POLRES	4	1	0	0	5
Sekretaris Daerah	0	1	0	2	3
JUMLAH	82	61	15	62	220
PENCAPAIAN	37%	28%	7%	28%	100%

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Berdasarkan analisis pencapaian indikator TPB Kabupaten Buol, setiap OPD dapat diketahui bahwa pelaksanaan TPB sudah dilakukan pada masing-masing OPD selama 5 tahun terakhir (2019-2023). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mempunyai tanggung jawab paling banyak dalam pelaksanaan indikator TPB, yaitu 38 indikator. Secara rinci, telah dijelaskan sebagai berikut.

A. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buol memiliki 2 indikator TPB yang tidak ada data, yakni indikator Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister, serta indikator Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

B. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah berperan penting dalam menjaga integritas nasional di tingkat daerah dengan memastikan bahwa masyarakat tetap bersatu dan stabil dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Buol Kabupaten Buol memiliki 4 indikator TPB dengan capaian 2 indikator belum mencapai target nasional, yakni indikator Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II); dan 2 indikator lainnya tidak ada data, yakni indikator Indeks Kebebasan Sipil, serta Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Secara detail, dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Tabel 5.2 berikut.

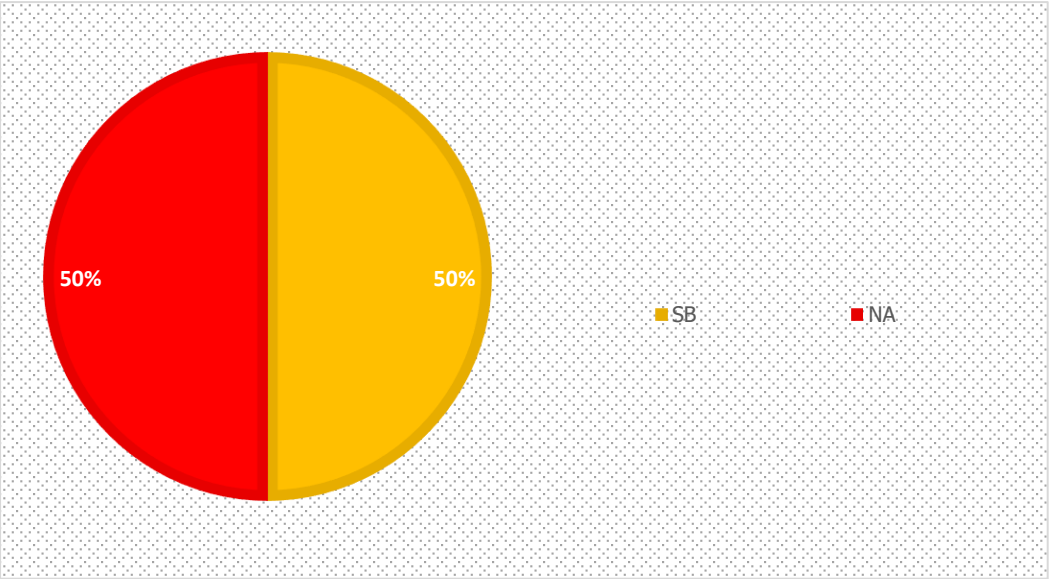

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.1
Persentase Capaian TPB
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Tabel 5.2
Detail Capaian TPB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	**SB**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	**SB**
10	EKONOMI	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	**NA**
10	EKONOMI	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	**NA**

Ket: *SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); dan NA (tidak ada data).*

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di wilayahnya. Tugas utamanya meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buol memiliki 15 indikator dengan capaian sebanyak 3 indikator (20%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Selain itu, 3 indikator (20%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Sedangkan 9 indikator lainnya (60%) tidak memiliki data, termasuk indikator Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Secara detail, dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan Tabel 5.3 berikut.

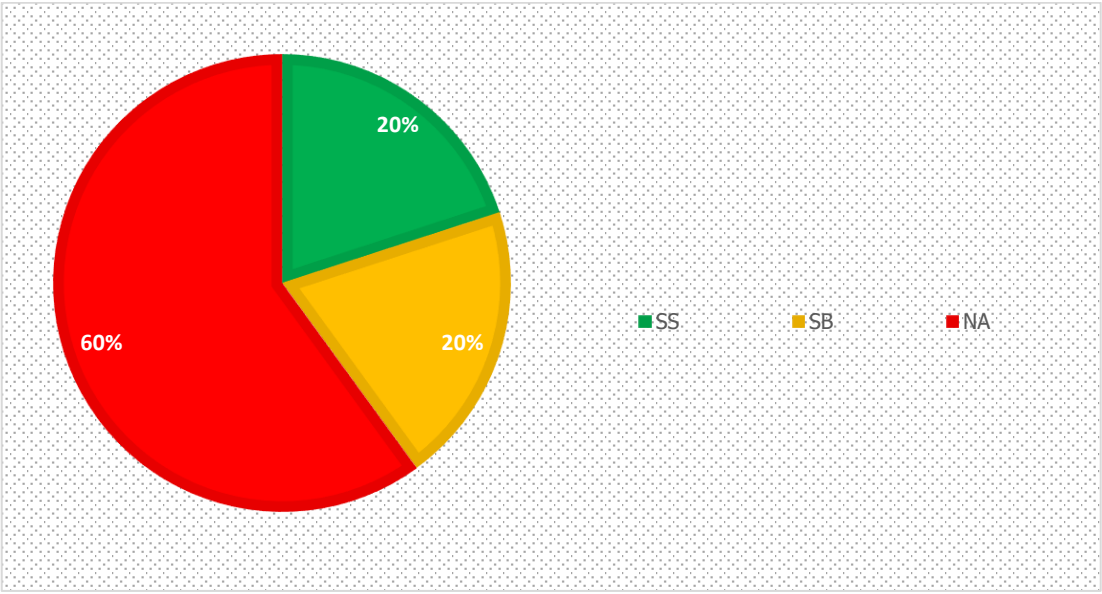

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.2
Persentase Capaian TPB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 5.3
Detail Capaian TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
1	SOSIAL	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	**SB**
1	SOSIAL	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	**SB**
1	SOSIAL	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	**SB**
1	SOSIAL	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	**NA**
1	SOSIAL	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	**NA**
1	SOSIAL	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	**NA**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
1	SOSIAL	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	**NA**
1	SOSIAL	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	**SS**
11	LINGKUNGAN	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	**NA**
11	LINGKUNGAN	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	**NA**
11	LINGKUNGAN	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	**NA**
11	LINGKUNGAN	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	**NA**
11	LINGKUNGAN	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	**SS**
13	LINGKUNGAN	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	**NA**
13	LINGKUNGAN	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); dan NA (tidak ada data).*

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

D. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, optimalisasi penggunaan aset daerah, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset juga berperan dalam menyusun kebijakan keuangan daerah, melaksanakan audit internal, dan memberikan bimbingan

teknis kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal pengelolaan keuangan dan aset.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol memiliki 5 indikator dengan capaian sebanyak 2 indikator (40%) sudah mencapai target nasional, termasuk indikator Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Sedangkan 3 indikator lainnya (60%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Secara detail, dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan Tabel 5.4 berikut.

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.3
Persentase Capaian TPB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Tabel 5.4
Detail Capaian TPB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
1	SOSIAL	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	**SS**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	**SS**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
17	EKONOMI	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	**SB**
17	EKONOMI	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	**SB**
17	EKONOMI	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.(Pendapatan Asli Daerah)	**SB**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional.*

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

E. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-LITBANG

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-LITBANG bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah dengan merumuskan kebijakan, program, dan rencana pembangunan daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-LITBANG Kabupaten Buol memiliki 10 indikator dengan capaian sebanyak 4 indikator (40%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan; 1 indikator (10%) belum mencapai target nasional, yakni indikator Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. (proporsi anggaran litbang terhadap APBD); 2 indikator (20%) tidak sesuai dengan karakteristik daerah, termasuk indikator Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil; serta 3 indikator (30%) tidak memiliki data, termasuk indikator Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. Secara detail, dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

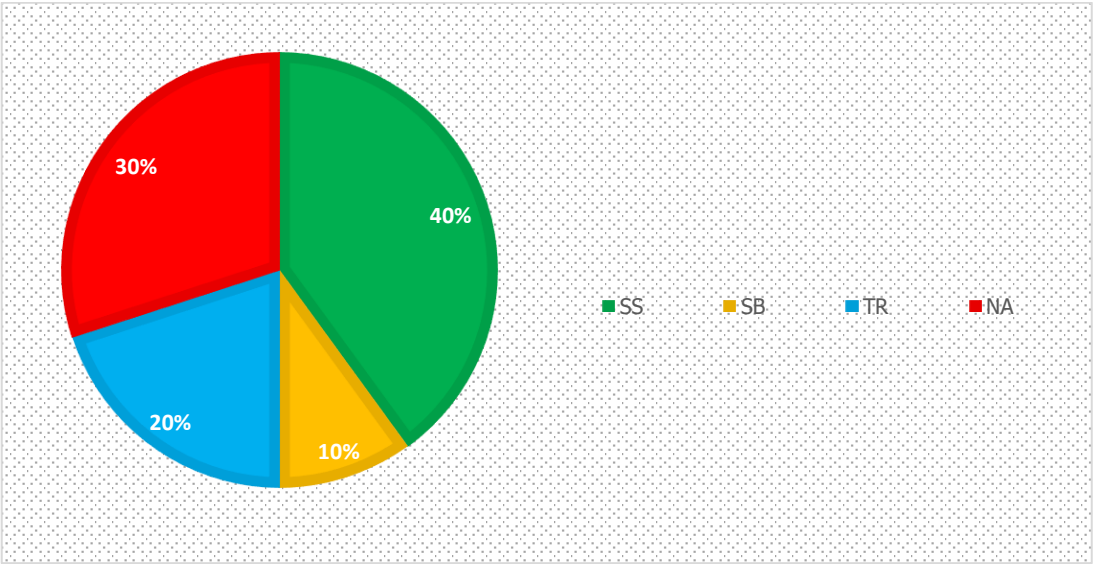

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.4
Persentase Capaian TPB Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-LITBANG

Tabel 5.5
Detail Capaian TPB Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah-LITBANG

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
7	EKONOMI	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	**NA**
7	EKONOMI	7.3.1*	Intensitas energi primer.	**NA**
9	EKONOMI	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. (proporsi anggaran litbang terhadap APBD)	**SB**
9	EKONOMI	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	**SS**
10	EKONOMI	10.1.1*	Koefisien Gini. (Indeks Gini)	**SS**
11	LINGKUNGAN	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	**TR**
11	LINGKUNGAN	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	**TR**
11	LINGKUNGAN	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog	**SST**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
			Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. (Realisasi Belanja Daerah)	**SS**
17	EKONOMI	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	**NA**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

F. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik bertugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan publikasi data statistik yang mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. BPS mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemerintah melalui penyediaan data yang akurat dan relevan melalui survei dan sensus secara berkala, memberikan layanan informasi statistik kepada publik, serta bekerja sama dengan berbagai instansi dalam pengembangan dan pemanfaatan data statistik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol memiliki 5 indikator dengan capaian telah mencapai target nasional, termasuk indikator Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. Secara detail, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Detail Capaian TPB Badan Pusat Statistik

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
17	EKONOMI	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	**SS**
17	EKONOMI	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi	**SS**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
			statistik BPS sebagai rujukan utama.	
17	EKONOMI	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	**SS**
17	EKONOMI	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	**SS**
17	EKONOMI	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

G. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah adalah unit dalam pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, efisien, dan akuntabel. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja terkait dalam pengadaan barang dan jasa, serta mengelola sistem informasi pengadaan untuk memudahkan akses dan monitoring oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Buol juga hanya memiliki 1 indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional, yakni indikator Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.

H. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan di Kabupaten Buol memiliki 2 (dua) indikator TPB dengan capaian masing-masing adalah 1 indikator telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional, yakni Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan 1 indikator tidak memiliki data, yakni proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.

I. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Buol hanya memiliki 2 (dua) indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional. Indikator tersebut yakni proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (pada pilar Sosial dan Ekonomi).

J. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan sektor pariwisata, serta mendukung partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan daerah. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol memiliki 4 indikator dengan capaian telah mencapai target nasional, termasuk indikator Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara. Secara detail, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Detail Capaian TPB
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
8	EKONOMI	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. (Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD)	**SS**
8	EKONOMI	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	**SS**
8	EKONOMI	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.(Kunjungan wisata)	**SS**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
8	EKONOMI	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

K. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting dalam menjaga keabsahan dan keakuratan data kependudukan serta menyediakan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol memiliki 5 indikator dengan capaian 2 indikator (40%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Persentase anak yang memiliki akta kelahiran, 2 indikator (40%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur, dan 1 indikator lainnya (20%) tidak memiliki data, yakni Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). Secara detail, dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

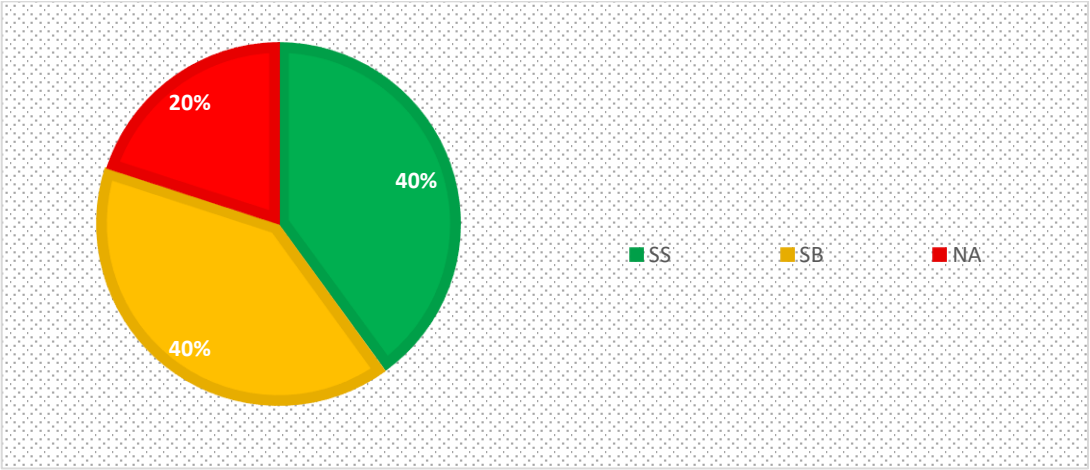

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.5
Persentase Capaian TPB
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 5.8
Detail Capaian TPB
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
1	SOSIAL	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (umur 0-18)	**SS**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	**SB**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	**SB**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	**SS**
17	EKONOMI	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	**NA**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

L. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Buol memiliki 38 indikator dengan capaian 17 indikator (45%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Selain itu, 5 indikator (13%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin; 6 indikator (16%) tidak sesuai dengan karakteristik daerah, termsuk indikator Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa (jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa); serta 10 indikator

(26%) tidak memiliki data, termasuk indikator Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (Prevalensi Balita Gizi Kurang).

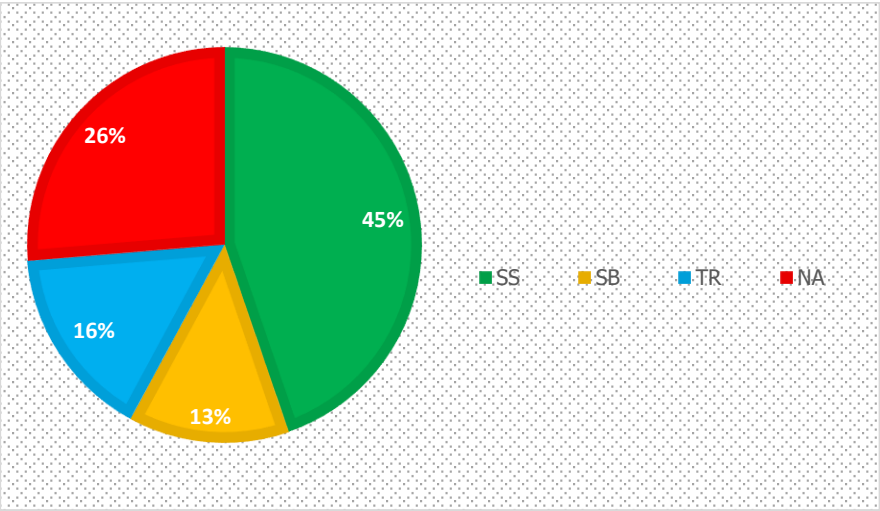

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.6
Persentase Capaian TPB Dinas Kesehatan

Tabel 5.9
Detail Capaian TPB Dinas Kesehatan

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
1	SOSIAL	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.(Tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR))	**SB**
1	SOSIAL	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	**NA**
1	SOSIAL	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. (Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan)	**SS**
2	SOSIAL	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada	**SB**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
			usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	
2	SOSIAL	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (Prevalensi Balita Gizi Kurang)	**NA**
2	SOSIAL	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	**NA**
2	SOSIAL	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	**SS**
2	SOSIAL	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	**SS**
2	SOSIAL	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	**SS**
2	SOSIAL	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	**SS**
3	SOSIAL	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	**TR**
3	SOSIAL	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	**TR**
3	SOSIAL	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	**TR**
3	SOSIAL	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	**TR**
3	SOSIAL	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	**TR**
3	SOSIAL	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. (jumlah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa)	**TR**
3	SOSIAL	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	**SB**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
3	SOSIAL	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	**SB**
3	SOSIAL	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	**SB**
3	SOSIAL	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	**NA**
3	SOSIAL	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	**NA**
3	SOSIAL	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	**NA**
3	SOSIAL	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	**NA**
3	SOSIAL	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	**NA**
3	SOSIAL	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan. (Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need))	**NA**
3	SOSIAL	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	**NA**
3	SOSIAL	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	**SS**
3	SOSIAL	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk)	**SS**
3	SOSIAL	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	**SS**
3	SOSIAL	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	**SS**
3	SOSIAL	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	**SS**
3	SOSIAL	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	**SS**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
3	SOSIAL	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	**SS**
3	SOSIAL	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	**SS**
3	SOSIAL	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	**SS**
3	SOSIAL	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	**SS**
3	SOSIAL	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	**SS**
3	SOSIAL	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

M. Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab atas pengembangan ketahanan pangan meliputi pengembangan teknologi pertanian, penyuluhan kepada petani, pengelolaan sumber daya alam, pengawasan keamanan pangan, serta pengelolaan dan distribusi. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buol memiliki 3 indikator yang belum mencapai target nasional, termasuk indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Secara detail, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10
Detail Capaian TPB Dinas Ketahanan Pangan

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
2	SOSIAL	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	**SB**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
2	SOSIAL	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	**SB**
2	SOSIAL	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	**SB**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

N. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Buol memiliki 10 indikator dengan capaian 7 indikator (70%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 2 indikator (20%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan 1 indikator lainnya (10%) tidak relevan dengan karakteristik daerah, yakni Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. (Proporsi rumah tangga dengan akses internet).

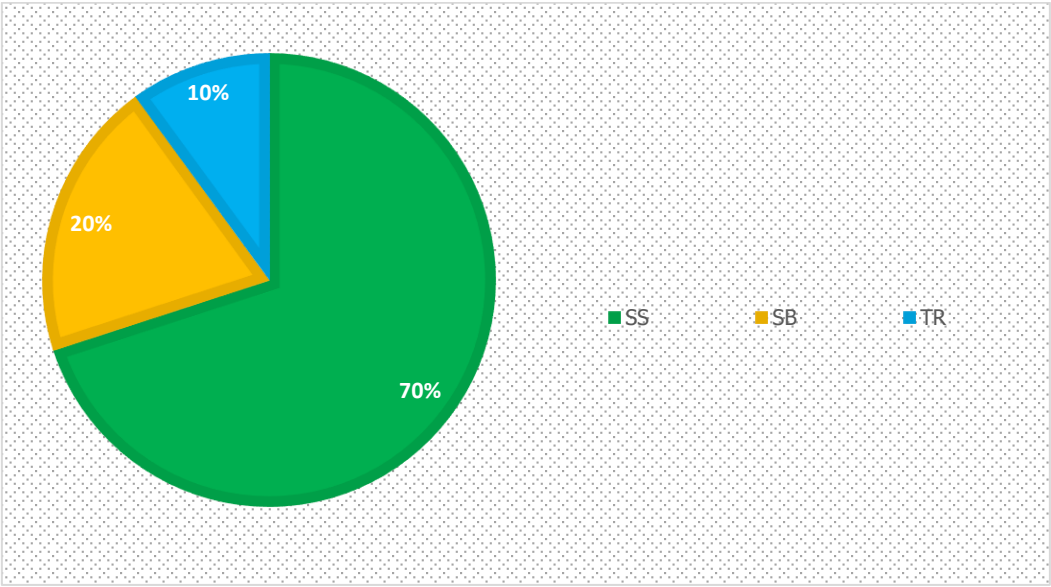

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.7
Persentase Capaian TPB
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Tabel 5.11
Detail Capaian TPB
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
4	SOSIAL	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	**SS**
5	SOSIAL	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. (persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki/menguasai handphone)	**SS**
9	EKONOMI	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	**SS**
9	EKONOMI	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	**SS**
9	EKONOMI	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet (penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet)	**SS**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	**SB**
17	EKONOMI	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. (Proporsi rumah tangga dengan akses internet)	**TR**
17	EKONOMI	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	**SB**
17	EKONOMI	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	**SS**
17	EKONOMI	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

O. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil dan menengah, serta memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol memiliki 6 indikator dengan capaian 3 indikator (50%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan; dan 3 indikator (50%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Proporsi

nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. Secara detail, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Detail Capaian TPB
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
8	EKONOMI	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	**SS**
8	EKONOMI	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	**SS**
9	EKONOMI	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	**SB**
9	EKONOMI	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	**SB**
9	EKONOMI	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	**SB**
9	EKONOMI	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

P. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, melindungi sumber daya alam, dan memastikan kualitas lingkungan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol memiliki 16 indikator dengan capaian 3 indikator (19%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Kualitas air sungai sebagai sumber air baku, 2 indikator (13%) tidak sesuai dengan karakteristik daerah, termasuk indikator Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); serta 11 indikator

(69%) tidak memiliki data, termasuk indikator Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.

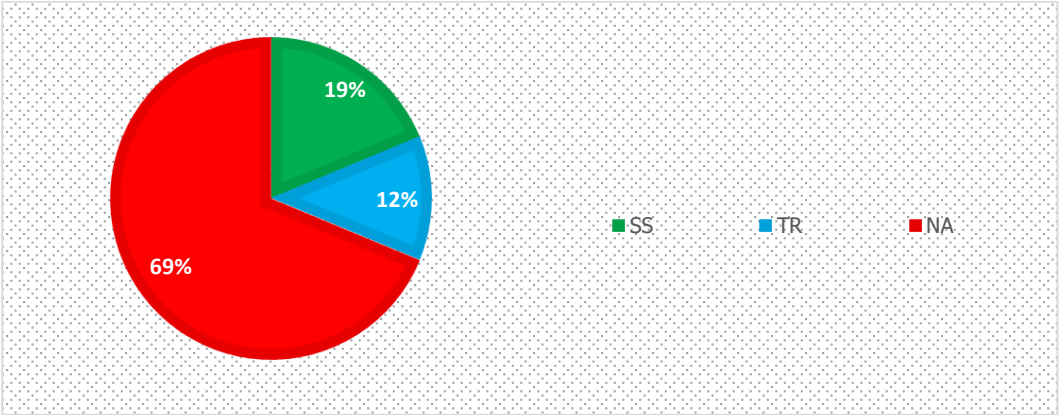

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.8
Persentase Capaian TPB Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.13
Detail Capaian TPB Dinas Lingkungan Hidup

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
6	LINGKUNGAN	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	**TR**
6	LINGKUNGAN	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	**NA**
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	**NA**
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	**NA**
6	LINGKUNGAN	6.3.2.(a)	Kualitas air danau. (Indeks Kualitas Air)	**SS**
6	LINGKUNGAN	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	**SS**
11	LINGKUNGAN	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan	**TR**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
			menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	
11	LINGKUNGAN	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	**NA**
12	LINGKUNGAN	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	**NA**
12	LINGKUNGAN	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	**NA**
12	LINGKUNGAN	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	**NA**
12	LINGKUNGAN	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	**NA**
12	LINGKUNGAN	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	**NA**
15	LINGKUNGAN	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	**NA**
15	LINGKUNGAN	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	**NA**
15	LINGKUNGAN	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.(Indeks tutupan lahan)	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Q. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas mengelola infrastruktur publik dan menata ruang termasuk merencanakan, membangun, dan memelihara berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, serta menyusun kebijakan penataan ruang dan tata kota. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola aset daerah terkait infrastruktur dan

menyediakan informasi serta layanan publik terkait perizinan dan pembangunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol memiliki 12 indikator dengan capaian 1 indikator (8%) telah mencapai target nasional, yakni indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; 2 indikator (17%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak; 2 indikator (14%) tidak sesuai dengan karakteristik daerah, termasuk indikator Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP); serta 7 indikator (58%) tidak memiliki data, termasuk indikator Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

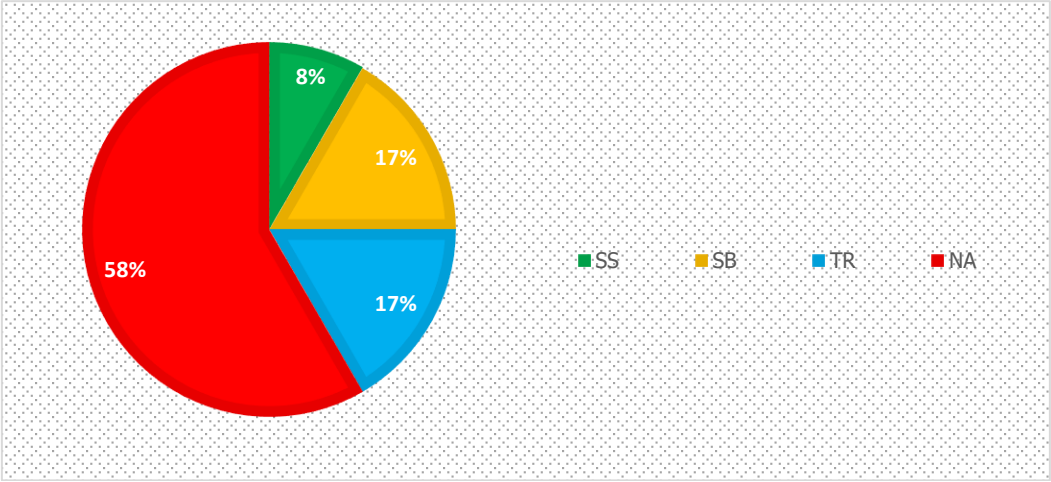

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.9
Persentase Capaian TPB
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.14
Detail Capaian TPB Dinas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	**TR**
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	**SB**
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	**SB**
6	LINGKUNGAN	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	**NA**
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	**NA**
6	LINGKUNGAN	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	**NA**
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	**NA**
6	LINGKUNGAN	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	**NA**
11	LINGKUNGAN	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	**TR**
11	LINGKUNGAN	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	**SS**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
17	EKONOMI	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	**NA**
17	EKONOMI	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	**NA**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

R. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol memiliki 3 indikator dengan capaian 1 indikator (33%) telah mencapai target nasional, yakni indikator Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan; serta 3 indikator (67%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Jumlah desa tertinggal.

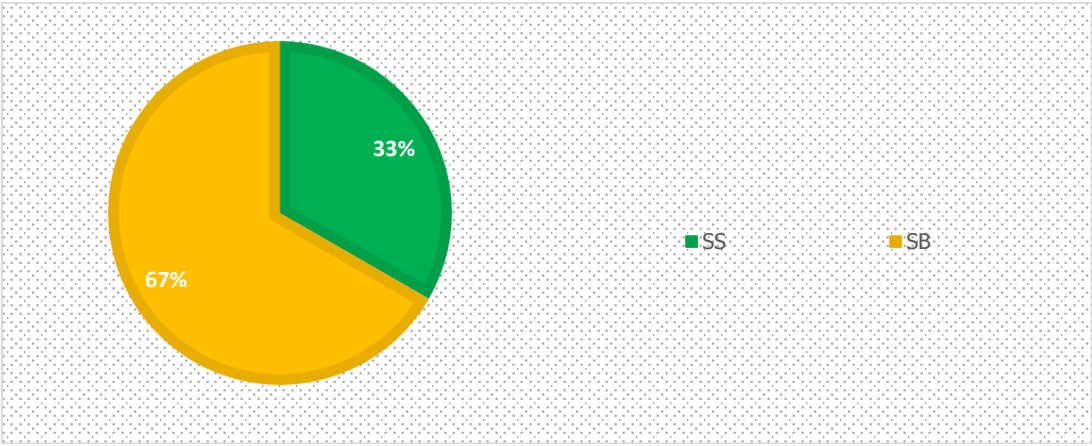

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.10
Persentase Capaian TPB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 5.15
Detail Capaian TPB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
10	EKONOMI	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	**SS**
10	EKONOMI	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	**SB**
10	EKONOMI	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	**SB**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

S. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol memiliki 21 indikator dengan capaian 7 indikator (33%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan; 6 indikator (29%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir; serta 8 indikator (38%) tidak

memiliki data, termasuk indikator Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.

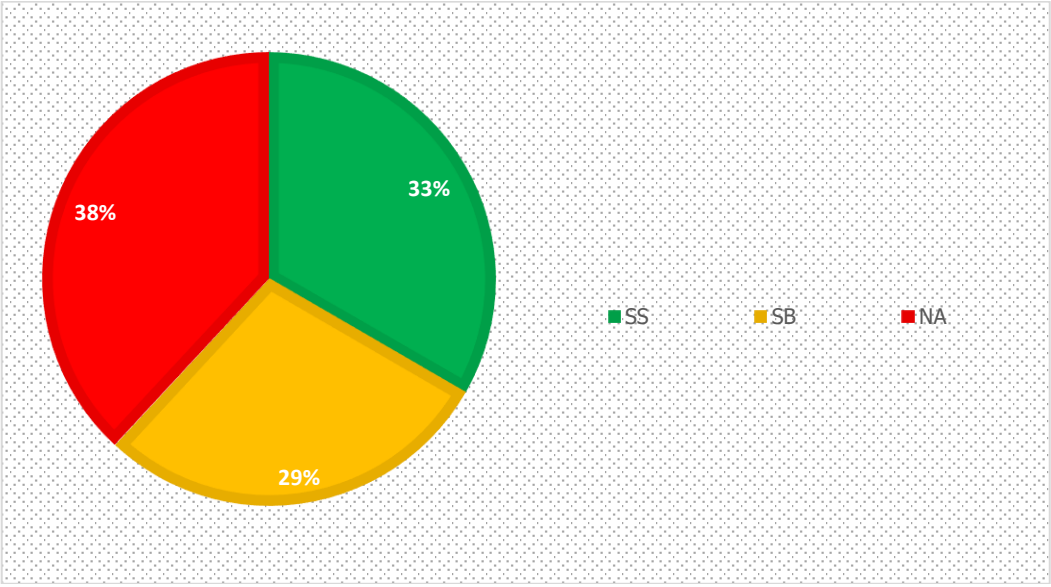

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.11
Persentase Capaian TPB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 5.16
Detail Capaian TPB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
3	SOSIAL	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	**NA**
3	SOSIAL	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	**NA**
3	SOSIAL	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	**NA**
3	SOSIAL	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR)	**SS**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
			semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.(angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun)	
3	SOSIAL	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	**SS**
5	SOSIAL	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	**SB**
5	SOSIAL	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	**SB**
5	SOSIAL	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. (Jumlah pernikahan dini sebelum usia ……tahun)	**SB**
5	SOSIAL	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	**SB**
5	SOSIAL	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. (jumlah kasus kekerasan seksual)	**NA**
5	SOSIAL	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. (Rata-rata usia kawin pertama wanita)	**NA**
5	SOSIAL	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	**NA**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
			(Age Specific Fertility Rate/ASFR).	
5	SOSIAL	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	**NA**
5	SOSIAL	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	**NA**
5	SOSIAL	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	**SS**
5	SOSIAL	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	**SS**
5	SOSIAL	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. (Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD)	**SS**
5	SOSIAL	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	**SS**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	**SB**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	**SB**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*

T. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggung jawab atas fasilitasi dan pelayanan terhadap investasi dan perizinan usaha. Tugas utamanya meliputi penyediaan layanan terpadu bagi investor dalam proses perizinan, pemberian informasi tentang regulasi investasi, serta memfasilitasi proses penanaman modal di daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buol memiliki 2 indikator dengan capaian 1 indikator telah mencapai target nasional, yakni indikator Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa; serta 1 indikator tidak memiliki data, yakni indikator Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).

Tabel 5.17
Detail Capaian TPB
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
8	EKONOMI	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	**SS**
8	EKONOMI	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	**NA**

ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

U. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor pendidikan dan kebudayaan utamanya termasuk merumuskan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal, mengawasi mutu pendidikan, serta mempromosikan dan melestarikan budaya daerah. Dengan fokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, serta pelestarian kebudayaan lokal,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan penting dalam pembangunan sosial dan identitas budaya masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol memiliki 14 indikator dengan capaian 4 indikator (29%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat; 8 indikator (57%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika; serta 2 indikator (14%) tidak ada data, termasuk indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. (Angka rata-rata lama sekolah). Secara detail, dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

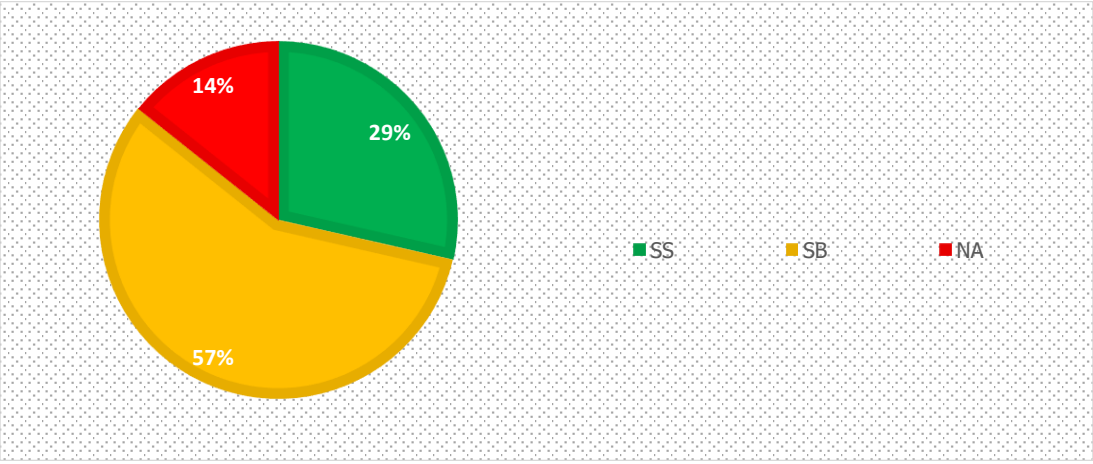

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 5.18
Detail Capaian TPB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
1	SOSIAL	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	**SB**
1	SOSIAL	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	**SS**
4	SOSIAL	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan	**SB**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
			pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	
4	SOSIAL	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	**SB**
4	SOSIAL	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	**SB**
4	SOSIAL	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	**SB**
4	SOSIAL	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	**SB**
4	SOSIAL	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	**SB**
4	SOSIAL	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	**SB**
4	SOSIAL	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. (Angka rata-rata lama sekolah)	**NA**
4	SOSIAL	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	**NA**
4	SOSIAL	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat;	**SS**
4	SOSIAL	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	**SS**
4	SOSIAL	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*

V. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor transportasi meliputi perencanaan transportasi, pengelolaan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan terminal, pengaturan lalu lintas, serta pelayanan angkutan umum. Dengan fokus pada efisiensi, keamanan, dan keterjangkauan transportasi, Dinas Perhubungan berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Buol memiliki 4 indikator dengan capaian 2 indikator (50%) telah mencapai target nasional, yakni indikator Jumlah dermaga penyeberangan dan Jumlah pelabuhan strategis; serta 2 indikator (50%) tidak sesuai dengan karakteristik daerah, yakni indikator Panjang pembangunan jalan tol dan Panjang jalur kereta api. Secara detail, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.19
Detail Capaian TPB Dinas Perhubungan

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
9	EKONOMI	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	**TR**
9	EKONOMI	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	**TR**
9	EKONOMI	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	**SS**
9	EKONOMI	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

W. Dinas Sosial

Dinas Sosial bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, utamanya meliputi penyaluran bantuan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pengelolaan dan pemantauan kondisi sosial. Dalam hal ini, Dinas Sosial berperan dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada kelompok

rentan, serta mengelola program-program kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Buol memiliki 15 indikator dengan capaian 5 indikator (33%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan; 9 indikator (60%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (Persentase rumah tangga pengguna listrik); serta 1 indikator (7%) tidak memiliki data, yakni indikator Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. Secara detail, dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

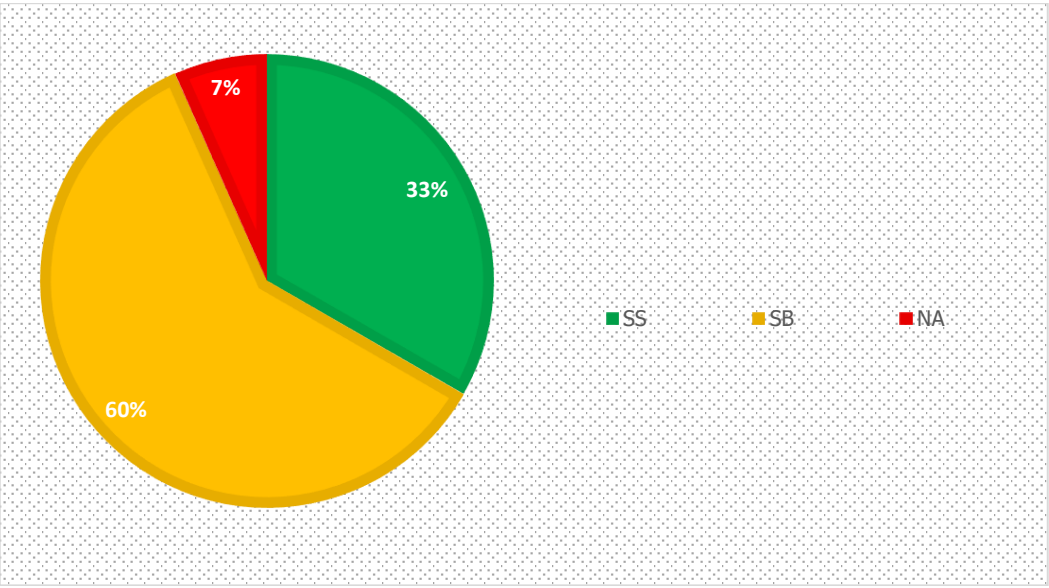

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.13
Persentase Capaian TPB Dinas Sosial

Tabel 5.20
Detail Capaian TPB Dinas Sosial

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
1	SOSIAL	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah	**SB**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
			secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	
1	SOSIAL	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. (Angka kemiskinan)	**SB**
1	SOSIAL	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. (Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial)	**SB**
1	SOSIAL	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan)	**SB**
1	SOSIAL	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. (Persentase rumah tinggal bersanitasi)	**SB**
1	SOSIAL	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (Persentase rumah tangga pengguna listrik)	**SB**
1	SOSIAL	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	**SS**
6	LINGKUNGAN	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	**NA**
6	LINGKUNGAN	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (Proporsi rumah tangga dengan akses	**SS**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
			berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan)	
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	**SS**
6	LINGKUNGAN	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	**SS**
10	EKONOMI	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. (Angka kemiskinan)	**SB**
10	EKONOMI	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	**SB**
10	EKONOMI	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. (persentase penduduk miskin di desa tertinggal)	**SB**
10	EKONOMI	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

X. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program transmigrasi, yang mencakup pemberian bantuan bagi transmigran, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan sosial. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol memiliki 9 indikator dengan capaian 4 indikator (44%) telah mencapai target nasional, termasuk

indikator Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; 3 indikator (33%) belum mencapai target nasional, termasuk indikator Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin; serta 1 indikator lainnya (22%) tidak ada data, yakni indikator Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). Secara detail, dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

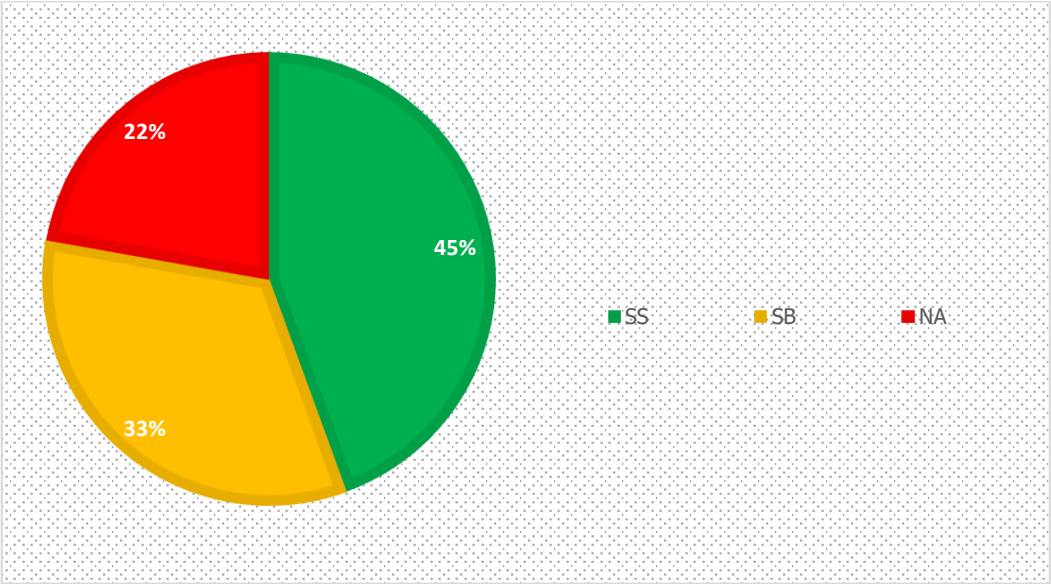

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.14
Persentase Capaian TPB
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 5.21
Detail Capaian TPB
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
8	EKONOMI	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	**SB**
8	EKONOMI	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	**SB**
8	EKONOMI	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	**SB**

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
2	SOSIAL	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	**NA**
8	EKONOMI	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	**NA**
8	EKONOMI	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	**SS**
8	EKONOMI	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	**SS**
8	EKONOMI	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	**SS**
8	EKONOMI	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Y. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah bertanggung jawab atas pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program-program pemerintah yang meliputi pemeriksaan internal terhadap kegiatan pemerintah, penegakan disiplin aparatur, pencegahan dan deteksi korupsi, serta memberikan rekomendasi dan saran perbaikan kepada pemerintah daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Buol hanya memiliki 1 indikator yang belum mencapai target nasional, yakni indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Z. Polres

POLRES (Kepolisian Resor) yang merupakan satuan pelaksana Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tingkat kabupaten/kota. POLRES Kabupaten Buol bertanggung jawab atas penegakan hukum, pencegahan

tindak pidana, penanganan kejahatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Tugas utamanya meliputi penyelidikan, penyidikan, patroli, pengaturan lalu lintas, penegakan peraturan, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. POLRES bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti kejaksaan, pengadilan, dan dinas terkait, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

POLRES Kabupaten Buol memiliki 5 indikator dengan capaian 4 indikator (80%) telah mencapai target nasional, termasuk indikator Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi; serta 1 indikator (20%) belum mencapai target nasional, yakni indikator Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Secara detail, dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

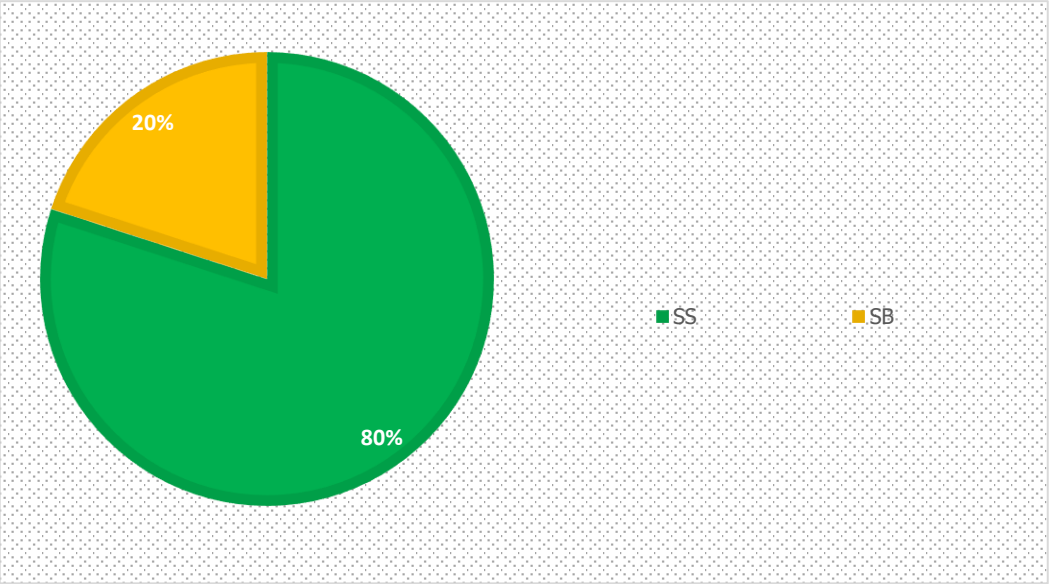

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.15
Persentase Capaian TPB Polres

Tabel 5.22
Detail Capaian TPB Polres

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	**SB**
11	LINGKUNGAN	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	**SS**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	**SS**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	**SS**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	**SS**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

AA. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Buol memiliki 3 indikator TPB dengan capaian 1 indikator (33%) sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, yakni persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota); serta 2 indikator lainnya (67%) tidak memiliki data, termasuk Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Secara detail, dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut.

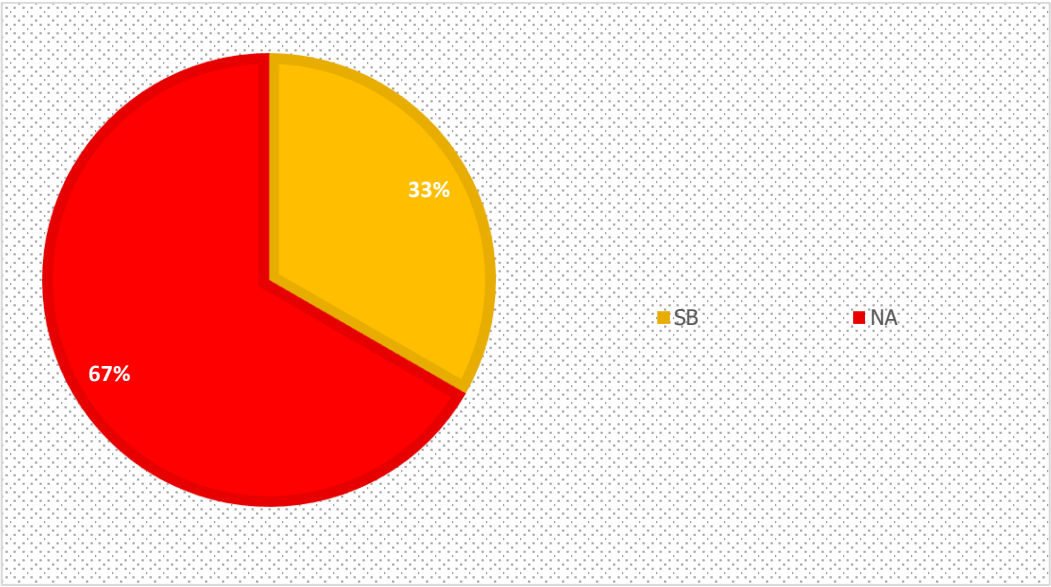

Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

Gambar 5.16
Persentase Capaian TPB Sekretaris Daerah

Tabel 5.23
Detail Capaian TPB Sekretaris Daerah

No TPB	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	Ket.
15	LINGKUNGAN	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	**NA**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	**SB**
16	HUKUM & TATA KELOLA	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	**NA**

Ket: *SS (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional); SB (sudah dilaksanakan, tetapi belum mencapai target nasional); TR (tidak relevan/tidak sesuai dengan karakteristik daerah); dan NA (tidak ada data).*
Sumber: Data Sekunder diolah kembali, 2024

5.2 Analisis Proyeksi Capaian Indikator TPB

NO	INDIKATOR TPB	TARGET NASIONAL S.D TAHUN 2030	CAPAIAN THN 2023	ISU STRATEGIS TERKAIT TPB	PROYEKSI CAPAIAN BUOL					TARGET PROYEKSI NASIONAL					STATUS CAPAIAN 2045	OPD	INDIKASI ANGGARAN PER TAHUN (MILYAR)
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
	1. Mengakhiri kemiskinan																
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Menurun menjadi 7-8%	13,36%	Tingginya angka kemiskinan	11,98%	11,51%	11,03%	10,56%	10,09%	11,57%	10,68%	9,79%	8,89%	8,00%	Tidak tercapai	Badan Pusat Statistik	5,953
2	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	79,77%	Belum tercapainya Jaminan Sosial ketenagakerjaan	78,70%	80,03%	81,36%	82,69%	84,03%	83,18%	84,89%	86,59%	88,30%	90,00%	Tidak tercapai	BPJS Ketenagakerjaan	
3	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkat menjadi 17,12%	16,00%	Belum tercapainya layanan disabilitas	17,00%	17,50%	18,00%	18,50%	19,00%	16,37%	16,56%	16,75%	16,93%	17,12%	Tidak tercapai	Dinas Sosial Daerah	8,845
4	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkat menjadi 65%	54,83%	Prevalensi penggunaan kontrasepsi pada PUS	54,83%	54,83%	54,83%	54,83%	54,83%	58,22%	59,92%	61,61%	63,31%	65,00%	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,995
5	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkat menjadi 100%	62,53%	Belum terlayaninya masyarakat atas air minum layak	64,83%	65,41%	65,99%	66,58%	67,16%	75,02%	81,27%	87,51%	93,76%	100,00%	Tidak tercapai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	59,363
6	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkat menjadi 82,2%	77,21%	belum tercapainya APM SMP sederajat	78,26%	78,80%	79,34%	79,88%	80,41%	78,87%	79,71%	80,54%	81,37%	82,20%	Tidak tercapai	Badan Pusat Statistik	5,953
7	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkat menjadi 100%	89,72%	Belum meratanya sebaran energi listrik	91,10%	90,30%	89,49%	88,68%	87,87%	93,15%	94,86%	96,57%	98,29%	100,00%	Tidak tercapai	Badan Pusat Statistik	5,953
8	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Meningkat	6,00%	Terbatasnya sumber daya pengentasan kemiskinan	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	9,00%	10,50%	12,00%	13,50%	15,00%	Tidak tercapai	Sekretaris Daerah	28,296
	2. Mengakhiri kelaparan																
9	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menurun	48	Tingginya prevalensi kekurangan pangan	44,6	43,8	43	42,2	41,4	32	24	16	8	0	Tidak tercapai	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	21,785
10	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Menurun	8,6	Masih tingginya malmutrisi pada balita	8,6	8,6	8,6	8,6	8,60	5,73	4,30	2,87	1,43	-	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,995
11	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	73,5	Belum tercapainya konsumsi pangan harapan	67,58	65,08	62,58	60,08	57,58	79,83	83,00	86,17	89,33	92,50	Tidak tercapai	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	21,785
	3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera																
12	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Menurun	100	Masih tingginya penyakit tropis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67	50,00	33,33	16,67	0,00	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,995
13	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkat menjadi 85 %	12,00%	Belum semua persalinan di tangani nakes	14%	15%	16%	17%	18%	36%	49%	61%	73%	85%	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,995
14	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Meningkat	83,00%	Belum seluruhnya obat dan vaksin di puskesmas	87%	88%	90%	92%	94%	89%	92%	94%	97%	100%	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,995

NO	INDIKATOR TPB	TARGET NASIONAL S.D TAHUN 2030	CAPAIAN THN 2023	ISU STRATEGIS TERKAIT TPB	PROYEKSI CAPAIAN BUOL					TARGET PROYEKSI NASIONAL					STATUS CAPAIAN 2045	OPD	INDIKASI ANGGARAN PER TAHUN (MILYAR)
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
	4. Pendidikan Berkualitas																
15	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkat	95,00%	Belum tercapainya standar kemampuan anak sekolah SD pada kemampuan dasar menhitung dan	95%	95%	95%	95%	95%	97%	98%	98%	99%	100%	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	276,332
16	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkat menjadi 84,2%	52,00%	Terbatasnya sekolah SD terakreditasi B	52%	52%	52%	52%	52%	63%	68%	73%	79%	84%	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	276,332
17	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkat menjadi 81%	38,00%	Terbatasnya sekolah SMP terakreditasi B	38%	38%	38%	38%	38%	52%	60%	67%	74%	81%	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	276,332
18	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkat menjadi 114,09%	106,34%	Belum tercapainya APK SD/sederajat	105%	104%	104%	103%	102%	109%	111%	112%	113%	115%	Tidak tercapai	Badan Pusat Statistik	5,953
19	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkat menjadi 106,94%	102,78%	Belum tercapainya APKSMP/sederajat	114%	119%	125%	130%	135%	104%	105%	106%	106%	107%	Tidak tercapai	Badan Pusat Statistik	5,953
20	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkat	99,45%	Terbatasnya sekolah dengan akses internet	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	276,332
21	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Meningkat	34,00%	Belum seluruhnya guru tersertifikasi	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	49,33%	57,00%	64,67%	72,33%	80,00%	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	276,332
	5. Kesetaraan Gender																
22	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	bertambah sebanyak 16	1	Terbatasnya jumlah kebiajkan rrsponsif gender	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	8,50	11,00	13,50	16,00	Tidak tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,064
23	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menurun	36	Tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak	56,00	66,00	76,00	86,00	96,00	24,00	18,00	12,00	6,00	0,00	Tidak tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,064
24	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menurun	52	masih terdapatnya kasus pernikahan dini	80,00	94,00	108,00	122,00	136,00	34,67	26,00	17,33	8,67	0,00	Tidak tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,064
25	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Menurun menjadi 9,9%	19,23%	Masih tingginya unmeet need	17,31%	16,35%	15,39%	14,43%	13,47%	16,12%	14,57%	13,01%	11,46%	9,90%	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,995
	6. Air Bersih																
26	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Meningkat	74,00%	Belum semua masyarakat memiliki fasilitas cuci tangan pakai sabun	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	82,67%	87,00%	91,33%	95,67%	100,00%	Tidak tercapai	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,995
27	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan	Meningkat menjadi 100%	69,23%	Masih tingginya rumah tangga belum	72,03%	73,43%	74,83%	76,23%	77,63%	79,48%	84,61%	89,74%	94,87%	100,00%	Tidak tercapai	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	59,363

NO	INDIKATOR TPB	TARGET NASIONAL S.D TAHUN 2030	CAPAIAN THN 2023	ISU STRATEGIS TERKAIT TPB	PROYEKSI CAPAIAN BUOL					TARGET PROYEKSI NASIONAL					STATUS CAPAIAN 2045	OPD	INDIKASI ANGGARAN PER TAHUN (MILYAR)
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
	8. Pertumbuhan Ekonomi																
28	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkat	2,02%	rendahnya pertumbuhan PDRB per kapita	2,39%	2,15%	1,90%	1,66%	1,42%	3,68%	4,51%	5,34%	6,17%	7,00%	Tidak tercapai	Badan Pusat Statistik	5,953
29	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	47.723,89	rendahnya pertumbuhan PDRB	54.241,6	57.346,4	60.451,1	63.555,9	66.660,7	48.482,6	48.861,9	49.241,3	49.620,6	50.000,0	Tidak tercapai	Badan Pusat Statistik	5,953
30	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkat	60,88%	Terbatasnya lapangan kerja formal non pertanian	52,75%	48,69%	44,62%	40,56%	36,49%	67,25%	70,44%	73,63%	76,81%	80,00%	Tidak tercapai	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	5,100
31	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	51%	37,40%	rendahnya lapangan kerja formal	40,79%	42,49%	44,19%	45,89%	47,58%	41,93%	44,20%	46,47%	48,73%	51,00%	Tidak tercapai	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	5,100
32	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Meningkat	0,54%	rendahnya tenaga kerja formal bidang pertanian	-1,00%	-1,77%	-2,54%	-3,31%	-4,08%	3,69%	5,27%	6,85%	8,42%	10,00%	Tidak tercapai	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	5,100
	9. Inovasi Industri Infrastruktur																
33	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB	-0,51%	rendahnya pertumbuhan industri manufaktur	-1,31%	-1,71%	-2,11%	-2,52%	-2,92%	2,33%	3,75%	5,16%	6,58%	8,00%	Tidak tercapai	Badan Pusat Statistik	5,953
34	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Meningkat	14,18%	rendahnya proporsi pekerja manufaktur	14,31%	14,07%	13,83%	13,58%	13,34%	19,45%	22,09%	24,73%	27,36%	30,00%	Tidak tercapai	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	5,100
35	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Meningkat	-13,11%	Belum laju nilai tambah industri kecil	-34,18%	-44,72%	-55,25%	-65,79%	-76,32%	7,93%	18,44%	28,96%	39,48%	50,00%	Tidak tercapai	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5,163
36	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Meningkat	1,87%	terbatasnya anggaran riset pemerintah	0,83%	0,81%	0,79%	0,77%	0,75%	2,58%	2,93%	3,29%	3,64%	4,00%	Tidak tercapai	BAPPEDA	7,132
	10. Berkurangnya Kesenjangan																
37	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Meningkat	3,22	belum maksimalknya pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal	2,66	2,39	2,11	1,84	1,56	2,16	1,64	1,11	0,59	0,06	Tidak tercapai	BAPPEDA	7,132
38	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	Menurun menjadi 14%	15,84%	Tingginya anga kemiskinan di daerah tertinggal	15,26%	14,97%	14,68%	14,39%	14,09%	15,23%	14,92%	14,61%	14,31%	14,00%	Tidak tercapai	BAPPEDA	7,132

NO	INDIKATOR TPB	TARGET NASIONAL S.D TAHUN 2030	CAPAIAN THN 2023	ISU STRATEGIS TERKAIT TPB	PROYEKSI CAPAIAN BUOL					TARGET PROYEKSI NASIONAL					STATUS CAPAIAN 2045	OPD	INDIKASI ANGGARAN PER TAHUN (MILYAR)
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
	16. Perdamaian dan Keadilan																
39	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Meningkat menjadi 4,0	2,88	Rendahnya indeks perilaku korupsi	5,12	5,97	6,83	7,68	8,54	3,25	3,44	3,63	3,81	4,00	Tidak tercapai	Inspektorat Daerah	9,900
40	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menurun	0,03%	masih terdapatnya kekerasan	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,07%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	Tidak tercapai	POLRES	
41	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menurun	35,3	masih tingginya anga kekerasan pada anak	51,33	59,33	67,33	75,33	83,33	23,56	17,67	11,78	5,89	0,00	Tidak tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,064
42	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Menurun	25,3	masih tingginya anga kekerasan pada anak remaja	37,33	43,33	49,33	55,33	61,33	16,89	12,67	8,44	4,22	0,00	Tidak tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,064
43	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	63,19%	Masih rendahnya kepatuhan terhadap UU layanan publik	63,77%	64,06%	64,35%	64,64%	64,93%	75,46%	81,60%	87,73%	93,87%	100,00%	Tidak tercapai	Sekretaris Daerah	28,296
44	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Meningkat	16,00%	Rendahnya partisipai wanita dalam politik	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,67%	23,00%	25,33%	27,67%	30,00%	Tidak tercapai	Komisi Pemilihan Umum Daerah	
45	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Meningkat	4,00%	terbatasnya jumlah perempuan dalam jabatan publik	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	9,33%	12,00%	14,67%	17,33%	20,00%	Tidak tercapai	Komisi Pemilihan Umum Daerah	
46	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Meningkat	82,73%	Belum semua kelahiran memiliki akta lahir	84,57%	85,49%	86,41%	87,33%	88,25%	88,49%	91,36%	94,24%	97,12%	100,00%	Tidak tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,887
47	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Meningkat menjadi 77,4%	69,69%	Belum semua bayi kelompok miskin memiliki akta	60,99%	56,64%	52,29%	47,94%	43,59%	72,26%	73,55%	74,83%	76,12%	77,40%	Tidak tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,887
48	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Meningkat	15,0	Terbatasnya pejabat tersertifikasi	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	18,33	20,00	21,67	23,33	25,00	Tidak tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,953
	17. Kemitraan Berkelanjutan																
49	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Di atas 12%	8,28%	Rendahnya penerimaan pajak daerah	9,37%	9,91%	10,46%	11,00%	11,55%	10,52%	11,64%	12,76%	13,88%	15,00%	Tidak tercapai	Badan Pendapatan Daerah	5,036
50	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkat	1,00%	Terbatasnya pajak daerah	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	Tidak tercapai	Badan Pendapatan Daerah	5,036
51	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	4,17%	Terbatasnya jaringan kabel optik	4,51%	4,69%	4,86%	5,03%	5,20%	26,45%	37,59%	48,72%	59,86%	71,00%	Tidak tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,953

5.3 Analisis Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung

5.3.1 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan pangan Kabupaten Buol Terlampaui, pada 10 administrasi kecamatan di wilayah Kabupaten Buol. Proyeksi daya dukung dan daya tampung pangan di Kabupaten Buol disajikan pada gambar berikut.

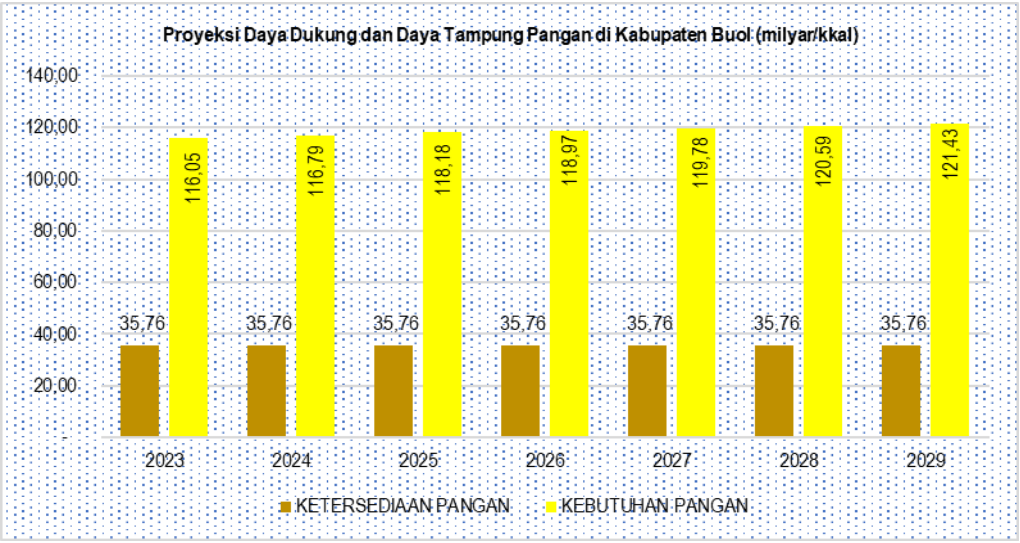

Sumber : Analisis Tim Ahli Penyusun

Gambar 5.17 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Jika diasumsikan bahwa tidak terjadi penambahan lahan pangan dalam 5 tahun kedepan dengan ketersediaan pangan tahun 2023 yang hanya 35,76 milyar kkal sementara yang dibutuhkan populasi penduduk sebesar 116,05 milyar kkal dalam setahun, maka kebutuhan pangan akan terus bertambah sampai tahun 2029. Oleh karena itu skenario yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol untuk mengurangi kekurangan kebutuhan pangan dengan cara membuka lahan pertanian untuk pangan dan diversifikasi konsumsi pangan.

5.3.2 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Kondisi existing ketersediaan air dalam *system grid* sebesar 2.663.122.321 m3/tahun yang kemudian dikurangi kebutuhan air untuk lahan

serta dengan jumlah populasi penduduk dalam *system grid* sebesar 140.887 jiwa maka ambang batas penduduk dalam penyedia air Kabupaten Buol sebesar 22.650.211 jiwa, terdapat selisih (surplus) jumlah penduduk sebesar 22.495.859 jiwa. Proyeksi daya dukung dan daya tampung air disajikan pada Gambar 5.18 sebagai berikut.

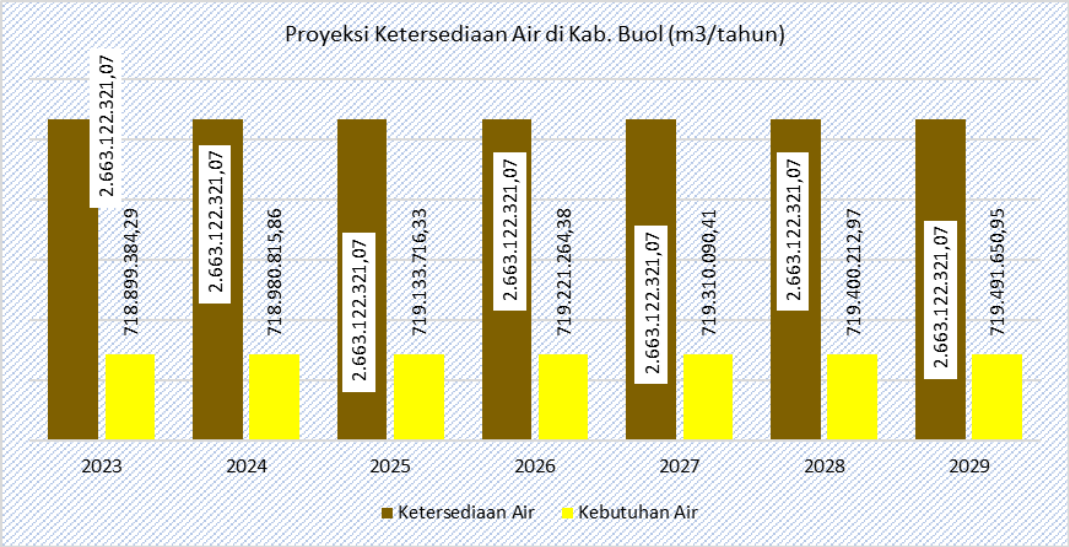

Sumber : Analisis Tim Ahli Penyusun

Gambar 5.18 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Berdasarkan gambar di atas, maka secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyedia Air sampai tahun 2029 kabupaten Buol Belum Terlampaui.

5.3.3 Proyeksi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup dapat diukur secara kuantitatif dengan menggunakan *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)* yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Yale University. Konsep Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), hanya mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. IKLH telah di jadikan Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Nasional sebagimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunana Jangka Menengah Nasional.

Perhitungan Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buol disajikan pada tabel berikut**.**

Indeks Kualitas Air

Nilai indeks kualitas air (IKA) di Kabupaten Buol berada di angka 54,29 pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 70,00 tahun 2023 dan mengalami penurunan menjadi 63,40 pada tahun 2024. Tren BAU IKA di Kabupaten Buol menunjukkan kecenderungan nilai yang dinamis, dari 54,29 di tahun 2017 menjadi 71,25 di tahun 2029, seperti terlihat pada Gambar ..... sebagai berikut.

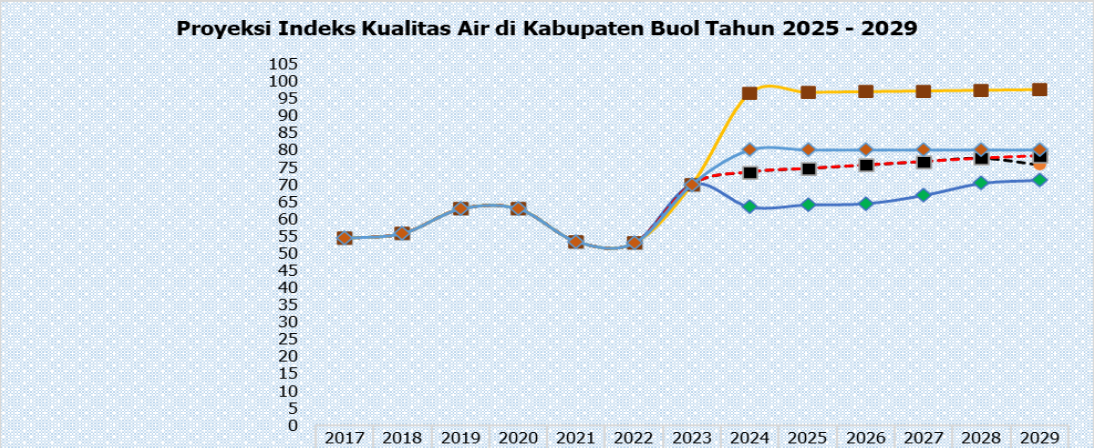

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Capaian BAU	54,29	55,71	62,86	62,86	53,33	52,86	70,00	63,40	64,05	64,39	66,78	70,32	71,25
Target Capaian Moderat	54,29	55,71	62,86	62,86	53,33	52,86	70,00	73,58	74,58	75,58	76,58	77,58	75,62
Target Capaian Optimis	54,29	55,71	62,86	62,86	53,33	52,86	70,00	73,58	74,58	75,58	76,58	77,58	78,25
Target Provinsi	54,29	55,71	62,86	62,86	53,33	52,86	70,00	96,51	96,71	96,91	97,10	97,30	97,50
Target Nasional	54,29	55,71	62,86	62,86	53,33	52,86	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Sumber : Diolah Tim Ahli KLHS,2024

Gambar 5.19 Tren Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Buol
Tahun 2025-2029

Gambar di atas menunjukkan jika dilakukan intervensi dengan "Upaya Tambahan Moderat" dan "Upaya Tambahan Optimis." skenario "Upaya Tambahan Moderat," IKA meningkat hingga mencapai 75,62 di tahun 2029, hal tersebut menunjukkan adanya potensi peningkatan kualitas air meskipun tidak signifikan. Dengan skenario "Upaya Tambahan Optimis," grafik menunjukkan peningkatan yang jauh lebih besar, mencapai nilai IKA sebesar 78,25 di tahun 2029. Nilai indeks kualitas air (IKA) berada masih dibawah target yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 97,50,

kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun dengan upaya tambahan yang optimis, capaian kualitas air di Kabupaten Buol belum sepenuhnya mampu mencapai target IKA, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis yang lebih intensif untuk memastikan kualitas air sesuai dengan target yang diharapkan.

Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara (IKU) di Kabupaten Buol berada dikisaran nilai 96,19 dan mengalami peningkatan menjadi 96,31 pada tahun 2023 serta terus meningkat hingga 97,20 pada tahun 2029 jika mengikuti skenario BAU. Tren ini menunjukkan bahwa jika tidak ada intervensi khusus, kualitas udara diperkirakan akan terus membaik. Kondisi ini mengindikasikan adanya kemungkinan faktor-faktor pencemaran udara yang semakin menurun, baik dari aktivitas industri, urbanisasi, atau pembukaan lahan, yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara.

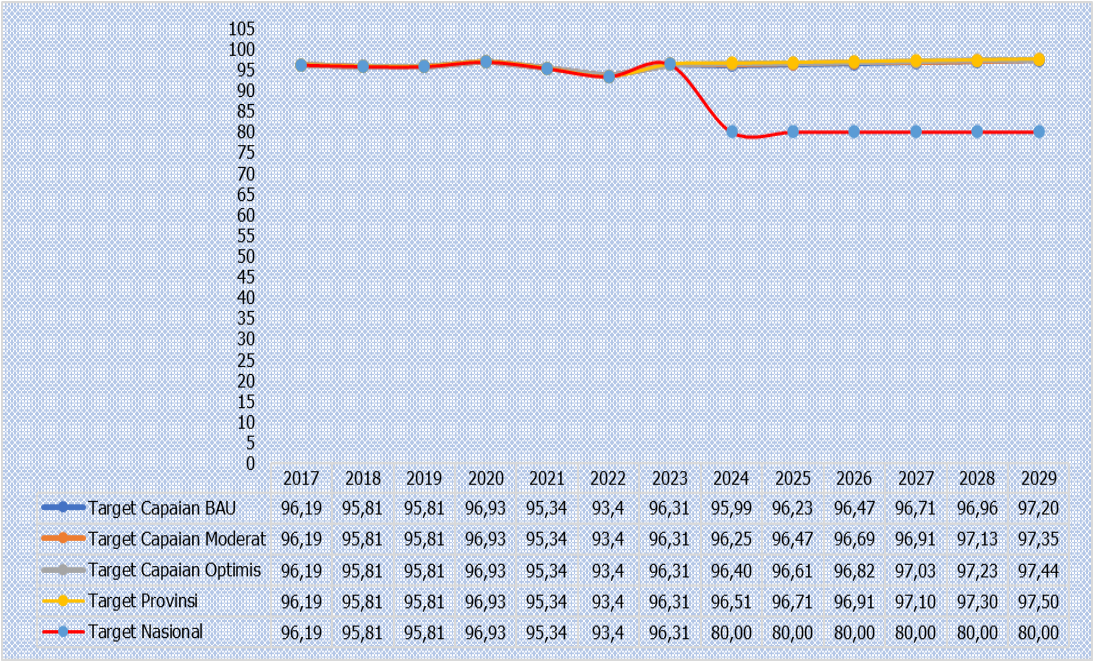

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Capaian BAU	96,19	95,81	95,81	96,93	95,34	93,4	96,31	95,99	96,23	96,47	96,71	96,96	97,20
Target Capaian Moderat	96,19	95,81	95,81	96,93	95,34	93,4	96,31	96,25	96,47	96,69	96,91	97,13	97,35
Target Capaian Optimis	96,19	95,81	95,81	96,93	95,34	93,4	96,31	96,40	96,61	96,82	97,03	97,23	97,44
Target Provinsi	96,19	95,81	95,81	96,93	95,34	93,4	96,31	96,51	96,71	96,91	97,10	97,30	97,50
Target Nasional	96,19	95,81	95,81	96,93	95,34	93,4	96,31	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Sumber : Diolah Tim Ahli KLHS,2024

Gambar 5.20 Tren Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

Upaya Tambahan Moderat," maka IKU diproyeksikan meningkat menjadi 97,35 pada tahun 2029, menunjukkan nilai IKU di atas target. Skenario "Upaya

Tambahan Optimis," yang merepresentasikan intervensi lebih kuat dan signifikan, memperlihatkan tren peningkatan yang lebih tinggi dengan upaya tambahan moderat yang mencapai 97,44 pada tahun 2029. nilai IKU tersebut berada diatas target yang ditetapkan.

Target IKU yang ditetapkan untuk Kabupaten Buol terus meningkat setiap tahun, dari 95,99 pada tahun 2024 hingga mencapai 97,20 pada tahun 2029. Hal ini menunjukkan komitmen kabupaten Buol untuk mencapai standar kualitas udara yang lebih tinggi, meskipun tantangan yang ada mengharuskan adanya upaya yang lebih intensif. Gambar grafik diatas menunjukkan meskipun skenario optimis memberikan hasil yang sangat baik, diperlukan strategi yang lebih kuat dan konsisten untuk mempertahankan indeks kualitas udara.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) pada tahun 2017 dengan nilai 94,38 dan mengalami penurunan dengan nilai menjadi 86,16 di tahun 2023. Tren BAU menunjukkan indeks yang terus menurun dimana nilai IKTL diangka 70,30 pada tahun 2029. Kondisi ini menandakan bahwa tanpa adanya intervensi, kualitas tutupan lahan di Kabupaten Buol diperkirakan akan mengalami penurunan dan cenderung terus turun. Skenario "Upaya Tambahan Moderat" memperlihatkan sedikit peningkatan dibandingkan tren BAU, di mana nilai IKTL menjadi 82,65 pada tahun 2029. Pencapaian nilai indeks tersebut masih lebih rendah dibandingkan target IKTL Provinsi Sulawesi Tengah (85,75). Di sisi lain, skenario "Upaya Tambahan Optimis" menunjukkan perbaikan yang lebih substansial, dengan nilai IKTL mencapai 90,06 pada tahun 2029 dan melampaui target Provinsi namun masih berada dibawah nilai target nasional.

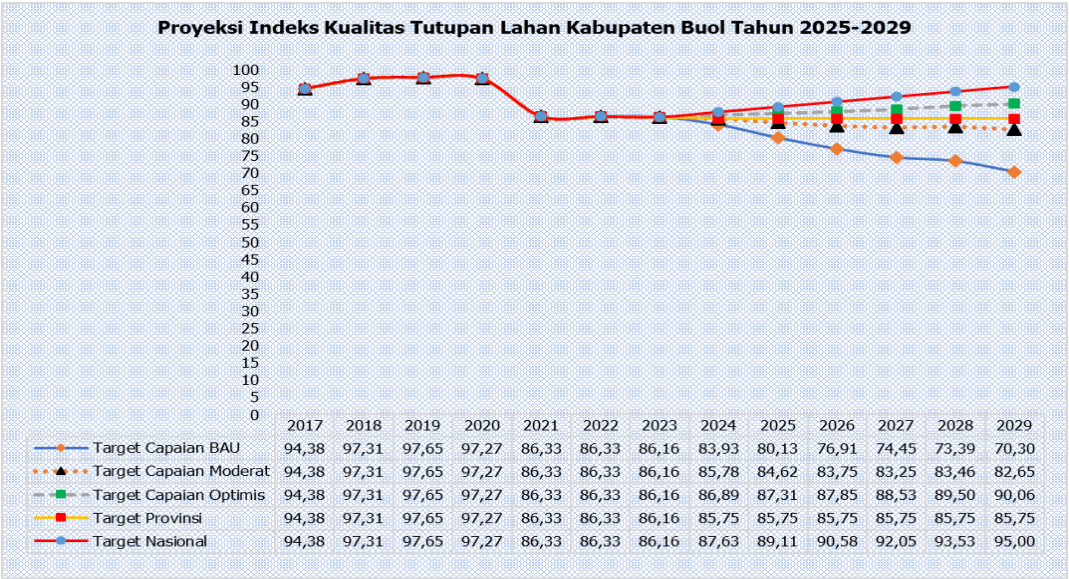

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Capaian BAU	94,38	97,31	97,65	97,27	86,33	86,33	86,16	83,93	80,13	76,91	74,45	73,39	70,30
Target Capaian Moderat	94,38	97,31	97,65	97,27	86,33	86,33	86,16	85,78	84,62	83,75	83,25	83,46	82,65
Target Capaian Optimis	94,38	97,31	97,65	97,27	86,33	86,33	86,16	86,89	87,31	87,85	88,53	89,50	90,06
Target Provinsi	94,38	97,31	97,65	97,27	86,33	86,33	86,16	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75
Target Nasional	94,38	97,31	97,65	97,27	86,33	86,33	86,16	87,63	89,11	90,58	92,05	93,53	95,00

Sumber : Diolah Tim Ahli KLHS,2024

Gambar 5.21 Tren Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Buol Tahun 2025-2029

Grafik tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan upaya tambahan, terutama dalam skenario optimis, dapat meningkatkan kualitas tutupan lahan, capaian tersebut masih memerlukan upaya lebih lanjut agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini mengisyaratkan pentingnya strategi pengelolaan lahan yang intensif dan berkelanjutan untuk mencapai kualitas tutupan lahan yang diharapkan di masa mendatang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol

Hasil perhitungan IKLH Kabupaten Buol Tahun 2023 dikategorikan pada rentang nilai **"Baik"**, dengan nilai **IKLH 84,19.** Jika dilihat dari proyeksi hingga Tahun 2029 nilai IKLH berada pada rentang nilai **"Baik"** namun dengan nilai yang terus menurun.

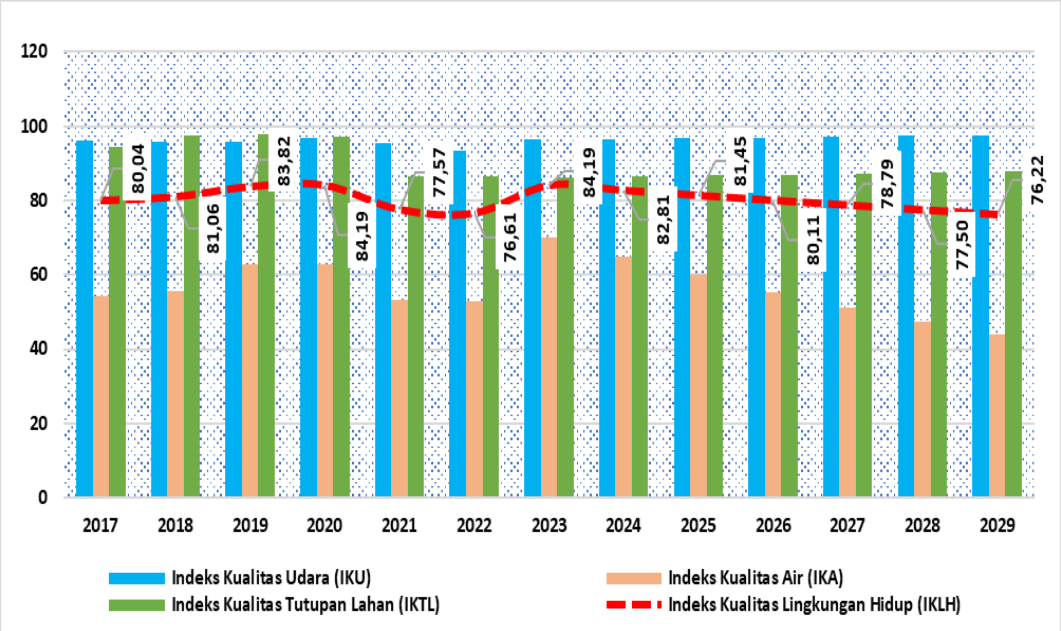

Sumber : Diolah Tim Ahli KLHS,2024

Gambar 5.22
Tren Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Buol Tahun 2025 - 2029

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2023 (70,00) masuk dalam kategori **"baik"**, jika di bandingkan dengan capaian IKA pada tahun 2022 (52,86) masuk dalam kategori **"sedang"**. Proyeksi hingga Tahun 2029 indeks kualitas air berada pada kategori **"kurang"**. Data kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di peroleh nilai Indeks Kualitas udara pada Tahun 2023 sebesar **96,31** dengan kategori **"Baik Sekali"** , jika di bandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2022 sebesar **93,40** sehingga pada Tahun 2023 nilai IKU mengalami peningkatan. Proyeksi hingga Tahun 2029 indeks kualitas udara berada pada kategori **"Baik Sekali".** Hasil perhitungan Indeks Kualitas lahan (IKTL) menunjukan angka 86,16 dengan kategori Baik, sedikit menurun dibandingkan Tahun 2022 berkisar di angka 86,33. Proyeksi hingga Tahun 2029 berada pada kategori **"Baik".**

BAB VI
ALTERNATIF PROYEKSI DAN REKOMENDASI KLHS RPJMD

6.1 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung Daya Tampung Daerah

6.1.1 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Tujuan	**Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (TPB 2)**
Arah Kebijakan	Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral seperti nikel dan bijih logam, serta peningkatan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya
	Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor pertanian, perkebunan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pariwisata).
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif
	Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan
	Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting
	Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim
Program	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemand

	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

6.1.2 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Tujuan	Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan Untuk Semua
	Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan
Arah Kebijakan	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif
	Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana
	Penerapan upaya konservasi air hujan untuk pemenuhan kebutuhan air domestik
	Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting
	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat
Program	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih/Minum
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

6.1.3 Alternatif Skenario dan Rekomendasi Peningkatan Dampak Risiko Lingkungan Hidup

Tujuan	Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan Untuk Semua
	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh,
	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
Arah Kebijakan	Pengembangan kawasan perkotaan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi
Program	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

6.2 Alternatif Skenario dan Rekomendasi dengan Upaya Tambahan Indikator yang belum mencapai Target Nasional

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Sasaran Strategis:

- Terwujudnya masyarakat yang hidup layak dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM
- Pemantapan nilai ekonomi unggulan daerah berbasis hilirisasi dan penguatan iklim investasi

Strategi atau Arah Kebijakan

- Optimalisasi pengentasan kemiskinan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- **Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat**
- Percepatan pengentasan kemiskinan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- Akselerasi Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat
- Penguatan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
- Penguatan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat
- Perwujudan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat
- Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian daerah

Misi

- Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing
- Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Berbasis Digital
- Misi 4 : Mengembangkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Target :

1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Nomor Indikator

1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. (Angka kemiskinan)

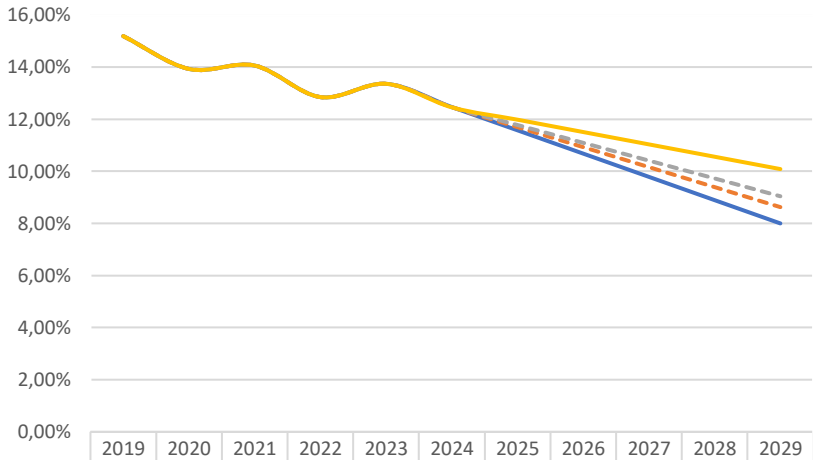

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	15,19%	13,93%	14,06%	12,85%	13,36%	12,47%	11,57%	10,68%	9,79%	8,89%	8,00%
Proyeksi Optimis	15,19%	13,93%	14,06%	12,85%	13,36%	12,46%	11,70%	10,93%	10,16%	9,39%	8,63%
Proyeksi Moderat	15,19%	13,93%	14,06%	12,85%	13,36%	12,46%	11,78%	11,09%	10,41%	9,73%	9,04%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	15,19%	13,93%	14,06%	12,85%	13,36%	12,46%	11,98%	11,51%	11,03%	10,56%	10,09%

Target :

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Nomor Indikator

1.3.1.(b). Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

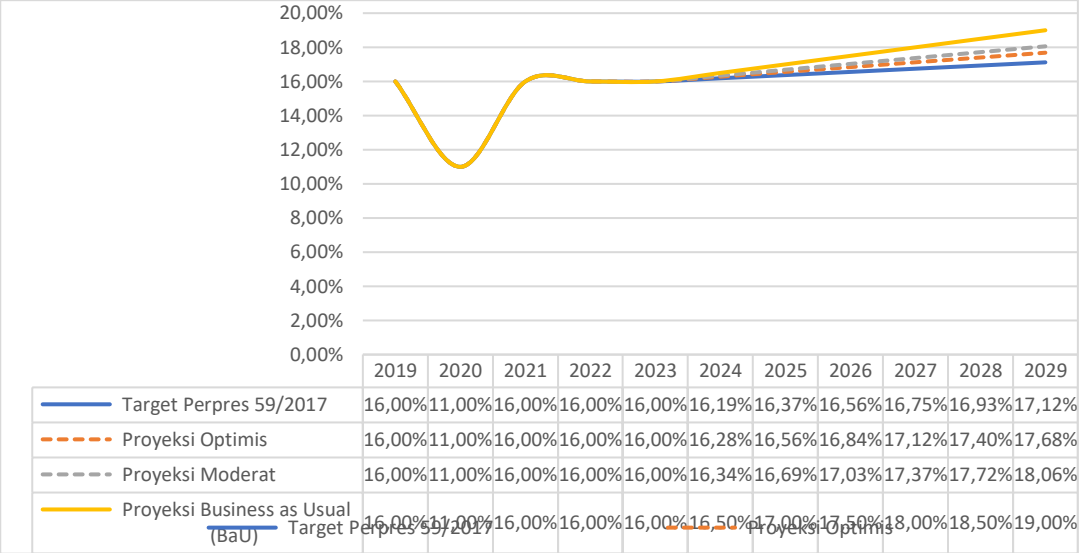

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	16,00%	11,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,19%	16,37%	16,56%	16,75%	16,93%	17,12%
Proyeksi Optimis	16,00%	11,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,28%	16,56%	16,84%	17,12%	17,40%	17,68%
Proyeksi Moderat	16,00%	11,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,34%	16,69%	17,03%	17,37%	17,72%	18,06%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	16,00%	11,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,50%	17,00%	17,50%	18,00%	18,50%	19,00%

Nomor Indikator

1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. (Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial)

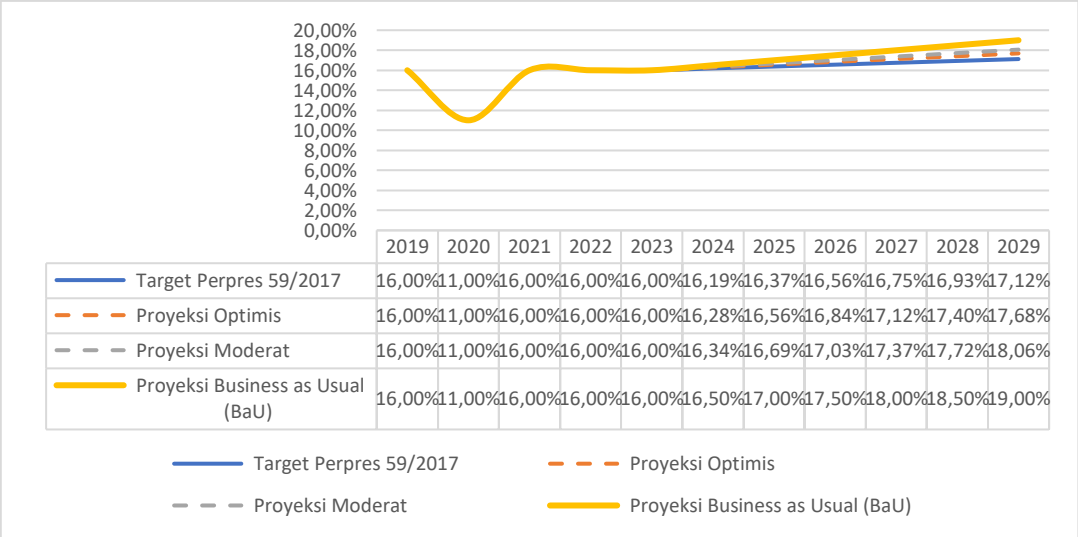

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	16,00%	11,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,19%	16,37%	16,56%	16,75%	16,93%	17,12%
Proyeksi Optimis	16,00%	11,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,28%	16,56%	16,84%	17,12%	17,40%	17,68%
Proyeksi Moderat	16,00%	11,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,34%	16,69%	17,03%	17,37%	17,72%	18,06%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	16,00%	11,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,50%	17,00%	17,50%	18,00%	18,50%	19,00%

Target :

1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses

Nomor Indikator

1.4.1.(c). Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.(Tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR))

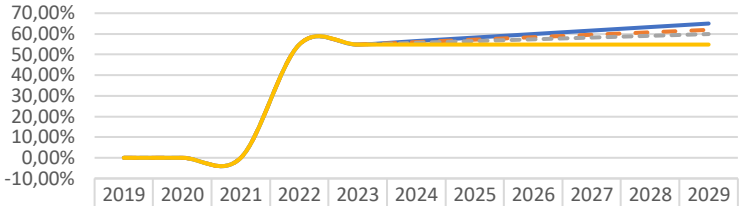

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	0,00%	0,00%	54,83%	54,83%	56,53%	58,22%	59,92%	61,61%	63,31%	65,00%
Proyeksi Optimis	0,00%	0,00%	0,00%	54,83%	54,83%	56,02%	57,20%	58,39%	59,58%	60,76%	61,95%
Proyeksi Moderat	0,00%	0,00%	0,00%	54,83%	54,83%	55,68%	56,53%	57,37%	58,22%	59,07%	59,92%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	0,00%	0,00%	54,83%	54,83%	54,83%	54,83%	54,83%	54,83%	54,83%	54,83%

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

1.4.1.(d). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. (Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan)

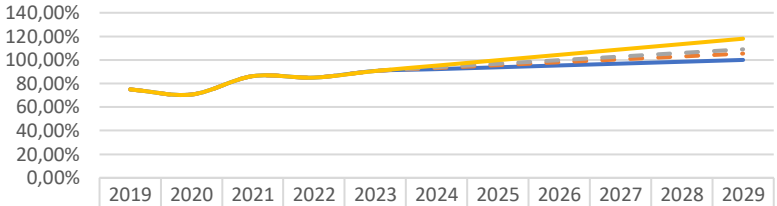

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	75,02%	70,67%	86,25%	85,03%	90,65%	92,20%	93,76%	95,32%	96,88%	98,44%	100,00%
Proyeksi Optimis	75,02%	70,67%	86,25%	85,03%	90,65%	93,10%	95,56%	98,02%	100,48%	102,94%	105,40%
Proyeksi Moderat	75,02%	70,67%	86,25%	85,03%	90,65%	93,71%	96,77%	99,83%	102,89%	105,95%	109,01%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	75,02%	70,67%	86,25%	85,03%	90,65%	95,21%	99,77%	104,33%	108,89%	113,45%	118,01%

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

1.4.1.(h). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.

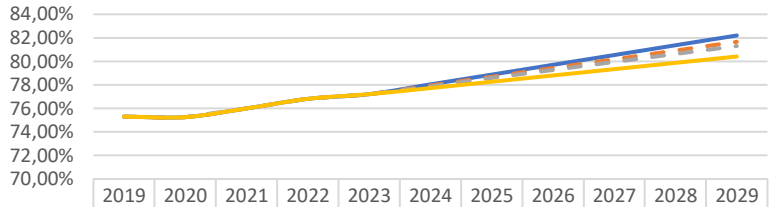

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	75,30%	75,26%	76,00%	76,81%	77,21%	78,04%	78,87%	79,71%	80,54%	81,37%	82,20%
Proyeksi Optimis	75,30%	75,26%	76,00%	76,81%	77,21%	77,95%	78,69%	79,43%	80,18%	80,92%	81,66%
Proyeksi Moderat	75,30%	75,26%	76,00%	76,81%	77,21%	77,88%	78,57%	79,25%	79,94%	80,62%	81,31%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	75,30%	75,26%	76,00%	76,81%	77,21%	77,73%	78,26%	78,80%	79,34%	79,88%	80,41%

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

1.4.1.(k). Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (Persentase rumah tangga pengguna listrik)

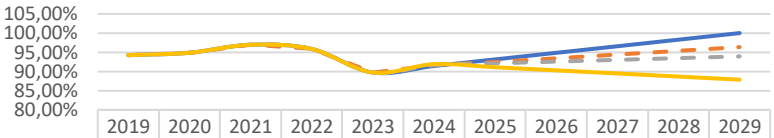

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	94,26%	94,88%	96,97%	95,87%	89,72%	91,43%	93,15%	94,86%	96,57%	98,29%	100,00%
Proyeksi Optimis	94,26%	94,88%	96,97%	95,87%	89,72%	91,58%	92,53%	93,49%	94,45%	95,40%	96,36%
Proyeksi Moderat	94,26%	94,88%	96,97%	95,87%	89,72%	91,67%	92,13%	92,58%	93,03%	93,48%	93,93%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	94,26%	94,88%	96,97%	95,87%	89,72%	91,91%	91,10%	90,30%	89,49%	88,68%	87,87%

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

Nomor Indikator

1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

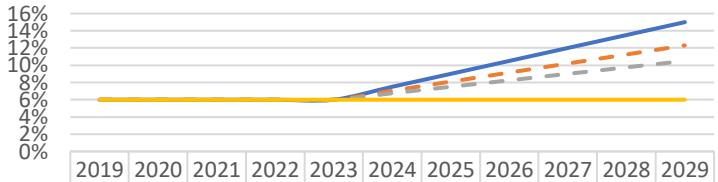

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	6%	6%	6%	6%	6%	8%	9%	11%	12%	14%	15%
Proyeksi Optimis	6%	6%	6%	6%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%
Proyeksi Moderat	6%	6%	6%	6%	6%	7%	8%	8%	9%	10%	11%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial
1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
1.0705 Program Hubungan Industrial
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana
1.03.07 Program Pengembangan Permukiman
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1.03.02 Program Pengelolaan Sumberdaya Air
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum
1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan

Sasaran Strategis:

- Terwujudnya masyarakat yang hidup layak dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM

Strategi atau Arah Kebijakan

- Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian daerah
- Percepatan transformasi ekonomi hijau
- Percepatan pembangunan perekonomian daerah
- Pemantapan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Penguatan leading sector pembangunan perekonomian daerah
- Perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis komoditas unggulan daerah
- Mewujudkan ekonomi daerah yang produktif dan kompetitif

Misi

- Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Berbasis Digital
- Misi 5 : Meningkatkan ketahan sosial, budaya dan ekologi
- Misi 6 : Mengembangkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Target :

2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Nomor Indikator

2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).

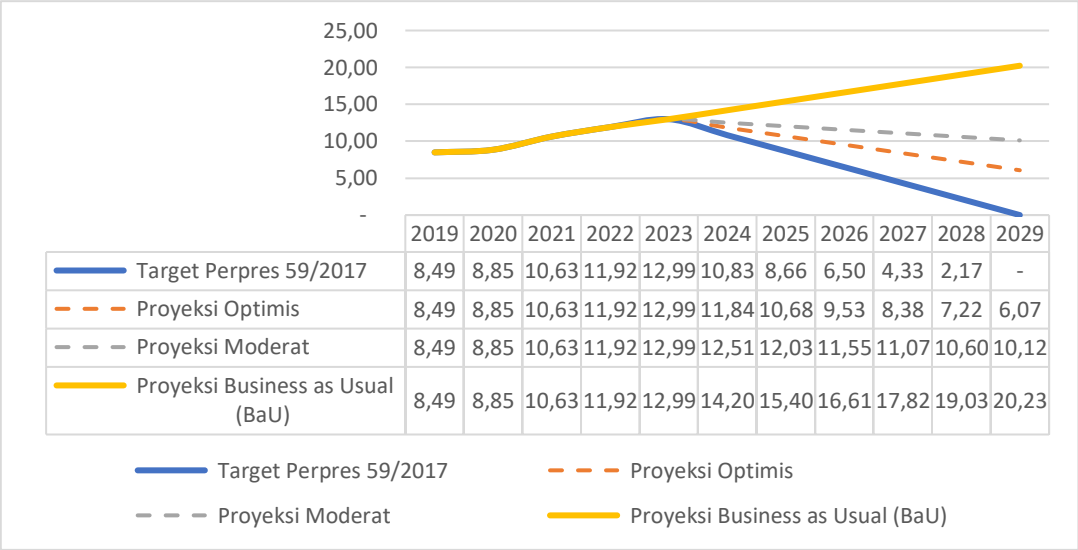

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	8,49	8,85	10,63	11,92	12,99	10,83	8,66	6,50	4,33	2,17	-
Proyeksi Optimis	8,49	8,85	10,63	11,92	12,99	11,84	10,68	9,53	8,38	7,22	6,07
Proyeksi Moderat	8,49	8,85	10,63	11,92	12,99	12,51	12,03	11,55	11,07	10,60	10,12
Proyeksi Business as Usual (BaU)	8,49	8,85	10,63	11,92	12,99	14,20	15,40	16,61	17,82	19,03	20,23

Nomor Indikator

2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

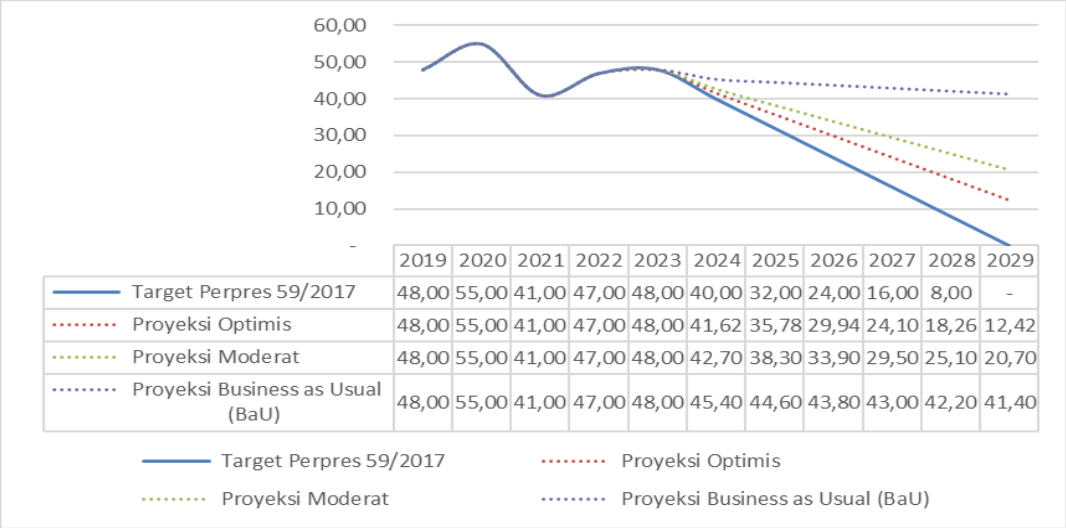

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	48,00	55,00	41,00	47,00	48,00	40,00	32,00	24,00	16,00	8,00	-
Proyeksi Optimis	48,00	55,00	41,00	47,00	48,00	41,62	35,78	29,94	24,10	18,26	12,42
Proyeksi Moderat	48,00	55,00	41,00	47,00	48,00	42,70	38,30	33,90	29,50	25,10	20,70
Proyeksi Business as Usual (BaU)	48,00	55,00	41,00	47,00	48,00	45,40	44,60	43,80	43,00	42,20	41,40

Target :

2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Nomor Indikator

2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.

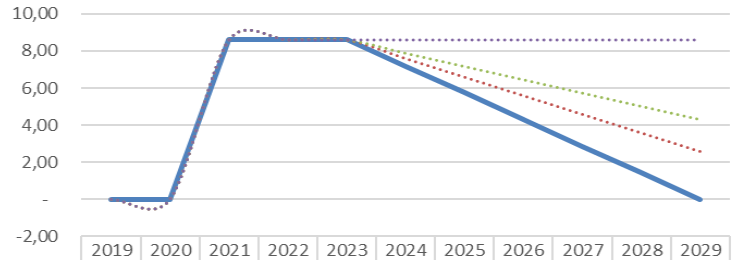

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	-	-	8,60	8,60	8,60	7,17	5,73	4,30	2,87	1,43	-
Proyeksi Optimis	-	-	8,60	8,60	8,60	7,60	6,59	5,59	4,59	3,58	2,58
Proyeksi Moderat	-	-	8,60	8,60	8,60	7,88	7,17	6,45	5,73	5,02	4,30
Proyeksi Business as Usual (BaU)	-	-	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.

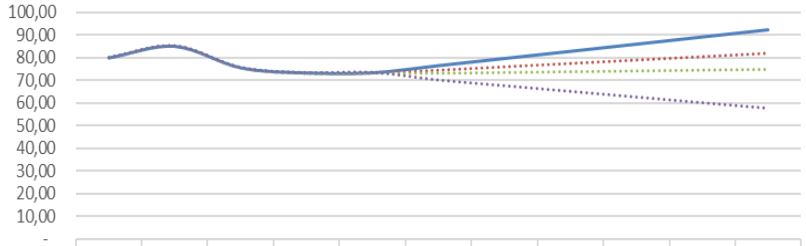

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	80,10	85,20	75,70	73,40	73,50	76,67	79,83	83,00	86,17	89,33	92,50
Proyeksi Optimis	80,10	85,20	75,70	73,40	73,50	74,69	76,16	77,62	79,09	80,56	82,02
Proyeksi Moderat	80,10	85,20	75,70	73,40	73,50	73,37	73,71	74,04	74,37	74,71	75,04
Proyeksi Business as Usual (BaU)	80,10	85,20	75,70	73,40	73,50	70,08	67,58	65,08	62,58	60,08	57,58

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

2.09.02 Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan
2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan
3.27.02 Program Pengembangan Sarana Pertanian
3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Sasaran Strategis:

- Terwujudnya masyarakat yang hidup layak dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan

Strategi atau Arah Kebijakan

- Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian daerah
- Percepatan transformasi ekonomi hijau
- Percepatan pembangunan perekonomian daerah
- Pemantapan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Penguatan leading sector pembangunan perekonomian daerah
- Perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis komoditas unggulan daerah
- Mewujudkan ekonomi daerah yang produktif dan kompetitif

Misi

- Misi 5 : Meningkatkan ketahan sosial, budaya dan ekologi
- Misi 6 : Mengembangkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Layanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Target :

3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Nomor Indikator

3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

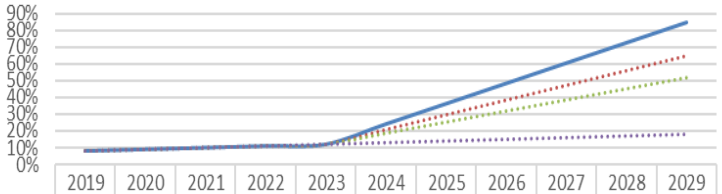

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	8%	9%	10%	11%	12%	24%	36%	49%	61%	73%	85%
Proyeksi Optimis	8%	9%	10%	11%	12%	21%	30%	38%	47%	56%	65%
Proyeksi Moderat	8%	9%	10%	11%	12%	19%	25%	32%	38%	45%	52%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

Nomor Indikator

3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	66,67	50,00	33,33	16,67	-
Proyeksi Optimis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,33	76,67	65,00	53,33	41,67	30,00
Proyeksi Moderat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	83,33	75,00	66,67	58,33	50,00
Proyeksi Business as Usual (BaU)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua..

Nomor Indikator

3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

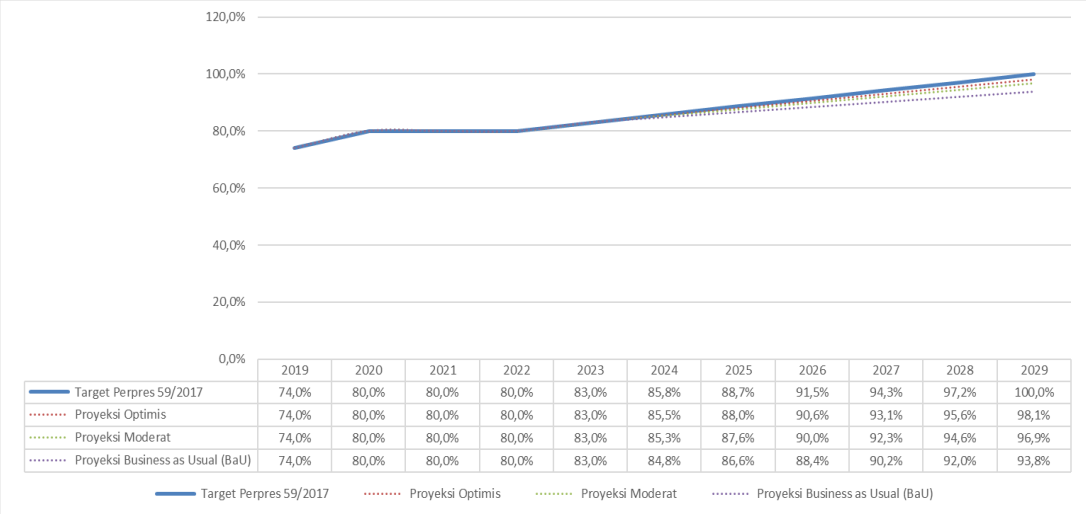

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	74,0%	80,0%	80,0%	80,0%	83,0%	85,8%	88,7%	91,5%	94,3%	97,2%	100,0%
Proyeksi Optimis	74,0%	80,0%	80,0%	80,0%	83,0%	85,5%	88,0%	90,6%	93,1%	95,6%	98,1%
Proyeksi Moderat	74,0%	80,0%	80,0%	80,0%	83,0%	85,3%	87,6%	90,0%	92,3%	94,6%	96,9%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	74,0%	80,0%	80,0%	80,0%	83,0%	84,8%	86,6%	88,4%	90,2%	92,0%	93,8%

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
1.02.07. Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Sasaran Strategis:

- Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM
- Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

Strategi atau Arah Kebijakan

- Optimalisasi pengentasan kemiskinan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat
- Percepatan pengentasan kemiskinan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- Akselerasi Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat
- Penguatan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
- Penguatan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat
- Perwujudan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat

Misi

- Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing
- Misi 5 : Meningkatkan ketahan sosial, budaya dan ekologi
- Misi 6 : Mengembangkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Target :

4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator

4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.

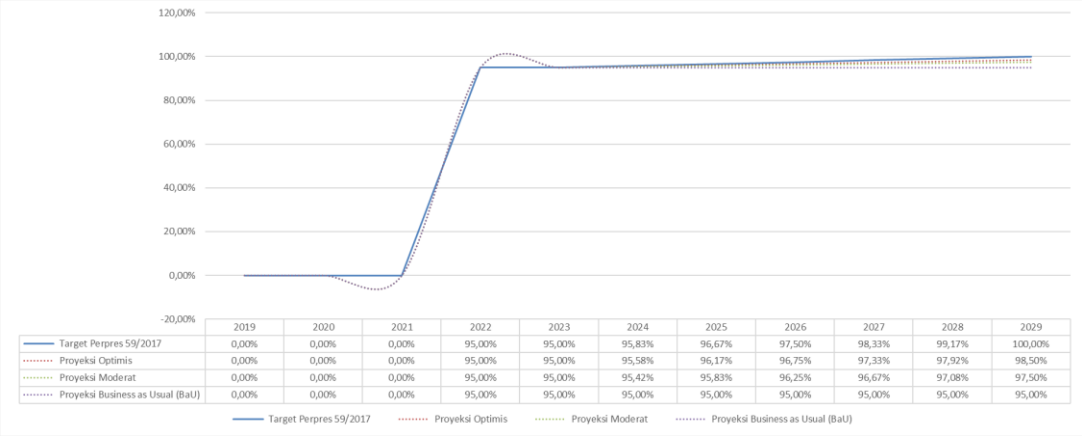

Nomor Indikator

4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.

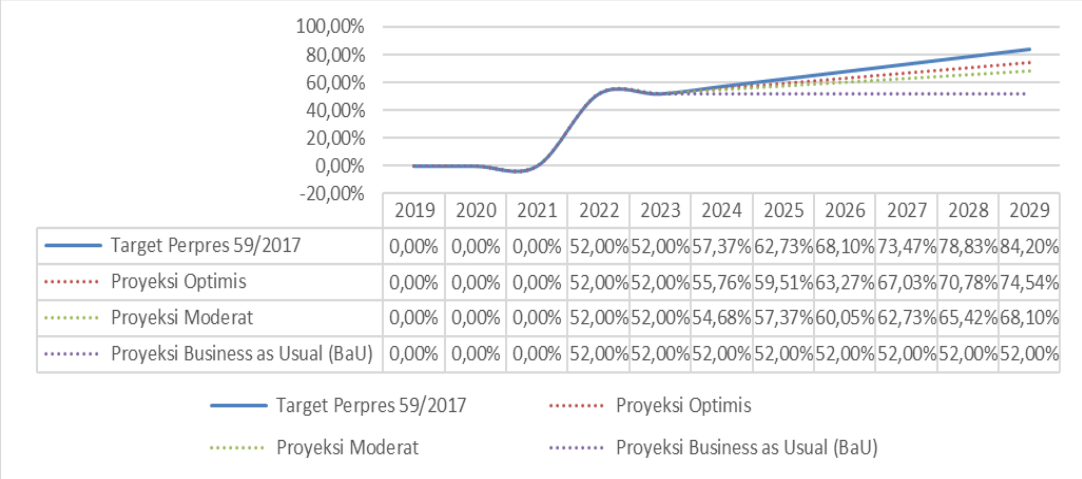

Nomor Indikator

4.1.1 (b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.

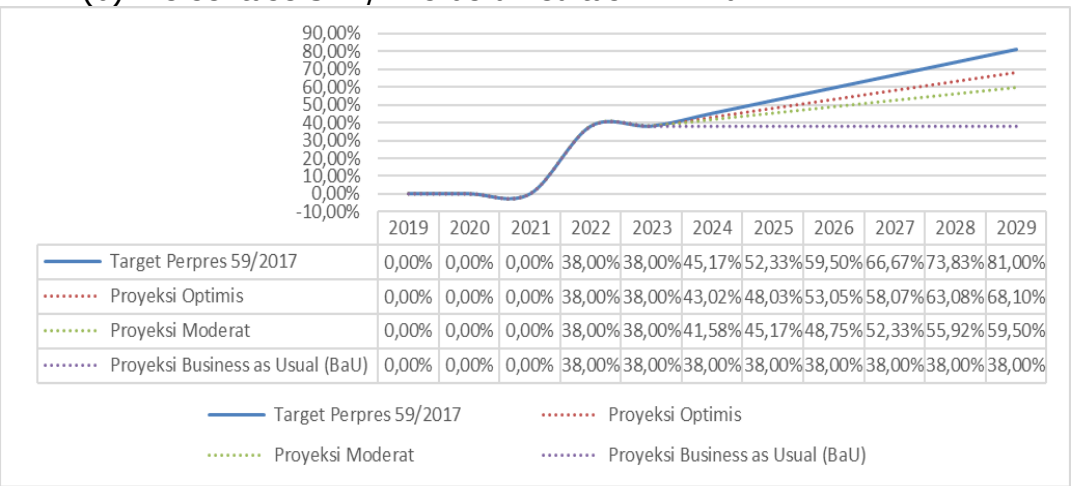

Nomor Indikator

4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.

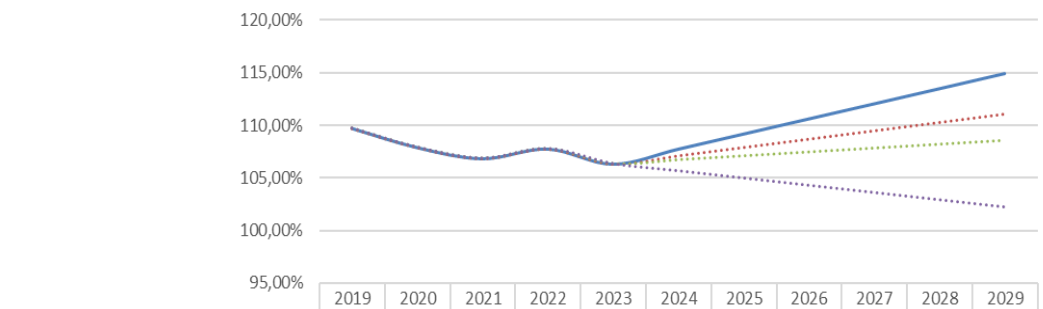

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	109,72%	107,91%	106,86%	107,77%	106,34%	107,77%	109,19%	110,62%	112,05%	113,47%	114,90%
Proyeksi Optimis	109,72%	107,91%	106,86%	107,77%	106,34%	107,13%	107,92%	108,72%	109,51%	110,30%	111,09%
Proyeksi Moderat	109,72%	107,91%	106,86%	107,77%	106,34%	106,71%	107,08%	107,45%	107,81%	108,18%	108,55%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	109,72%	107,91%	106,86%	107,77%	106,34%	105,65%	104,96%	104,27%	103,58%	102,89%	102,20%

Target Perpres 59/2017 Proyeksi Optimis Proyeksi Moderat Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.

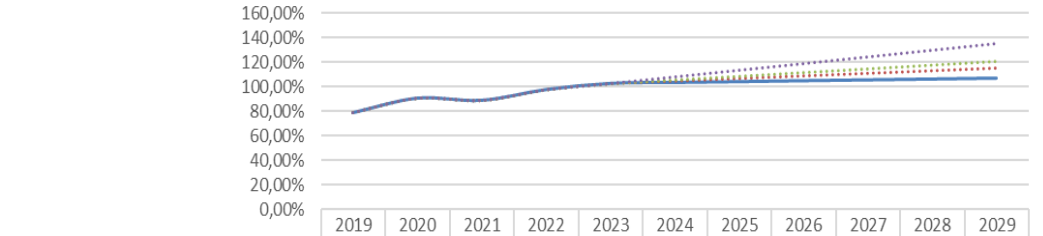

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	79,08%	90,84%	89,08%	97,78%	102,78%	103,47%	104,17%	104,86%	105,55%	106,25%	106,94%
Proyeksi Optimis	79,08%	90,84%	89,08%	97,78%	102,78%	104,90%	107,01%	109,13%	111,24%	113,36%	115,47%
Proyeksi Moderat	79,08%	90,84%	89,08%	97,78%	102,78%	105,84%	108,91%	111,97%	115,03%	118,10%	121,16%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	79,08%	90,84%	89,08%	97,78%	102,78%	108,21%	113,65%	119,08%	124,52%	129,95%	135,38%

Target Perpres 59/2017 Proyeksi Optimis Proyeksi Moderat Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Nomor Indikator

4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).

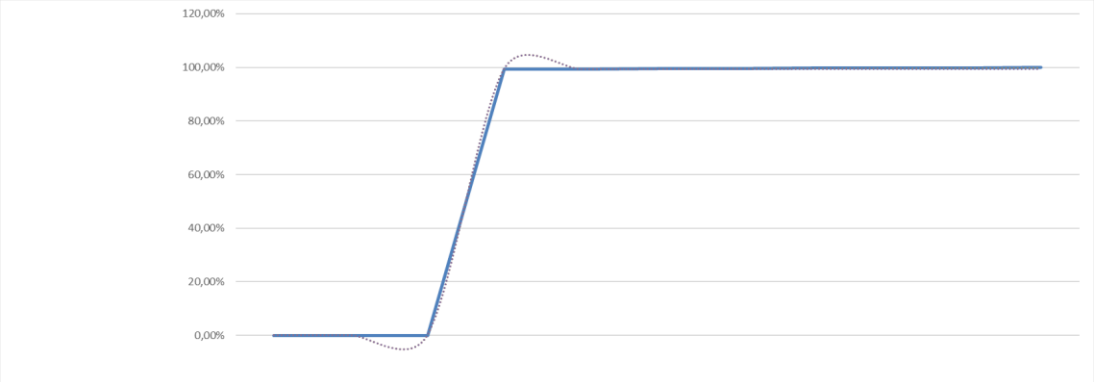

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	0,00%	0,00%	99,45%	99,45%	99,54%	99,63%	99,73%	99,82%	99,91%	100,00%
Proyeksi Optimis	0,00%	0,00%	0,00%	99,45%	99,45%	99,51%	99,58%	99,64%	99,71%	99,77%	99,84%
Proyeksi Moderat	0,00%	0,00%	0,00%	99,45%	99,45%	99,50%	99,54%	99,59%	99,63%	99,68%	99,73%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	0,00%	0,00%	99,45%	99,45%	99,45%	99,45%	99,45%	99,45%	99,45%	99,45%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Nomor Indikator

4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

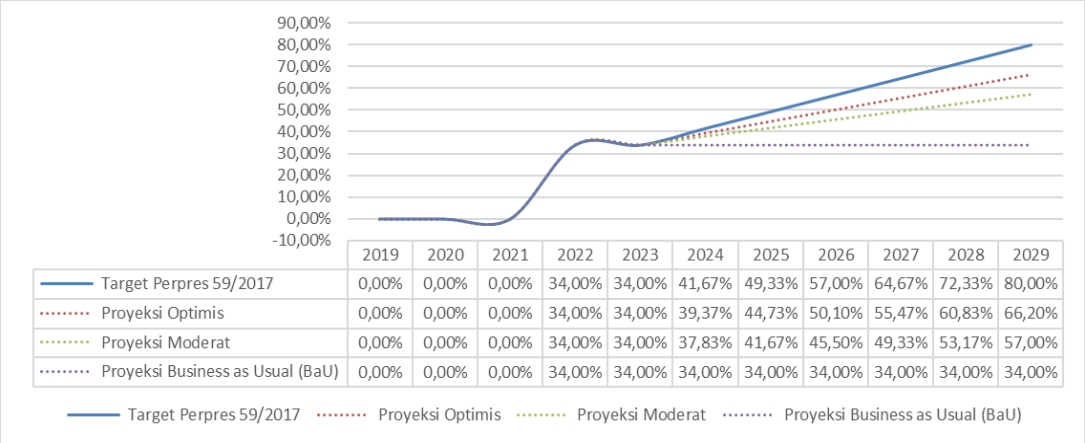

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	34,00%	41,67%	49,33%	57,00%	64,67%	72,33%	80,00%
Proyeksi Optimis	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	34,00%	39,37%	44,73%	50,10%	55,47%	60,83%	66,20%
Proyeksi Moderat	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	34,00%	37,83%	41,67%	45,50%	49,33%	53,17%	57,00%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	0,00%	0,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan
1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum
1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.05 Program Pengendalian Peizinan Pendidikan
1.01.06 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Sasaran Strategis:

- Terwujudnya masyarakat yang hidup layak dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM

Strategi atau Arah Kebijakan

- Optimalisasi pengentasan kemiskinan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat
- Percepatan pengentasan kemiskinan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- Akselerasi Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat
- Penguatan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
- Penguatan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan sehat
- Perwujudan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera
- Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan seha**t**

Misi

- Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing
- Misi 2 : Meninglkatkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Berbasis Digital
- Misi 5 : Meningkatkan ketahan sosial, budaya dan ekologi

Target :

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.

Nomor Indikator

5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

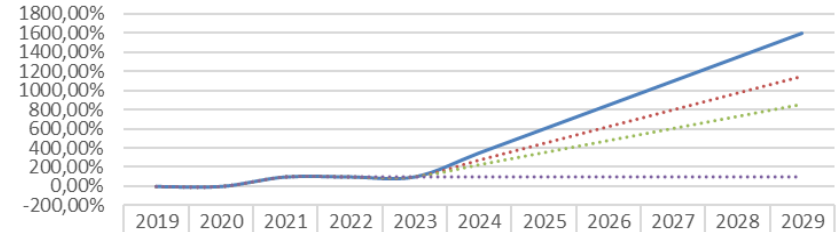

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	0,00%	1,00	1,00	1,00	3,50	6,00	8,50	11,00	13,50	16,00
Proyeksi Optimis	0,00%	0,00%	1,00	1,00	1,00	2,75	4,50	6,25	8,00	9,75	11,50
Proyeksi Moderat	0,00%	0,00%	1,00	1,00	1,00	2,25	3,50	4,75	6,00	7,25	8,50
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	0,00%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Nomor Indikator

5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.

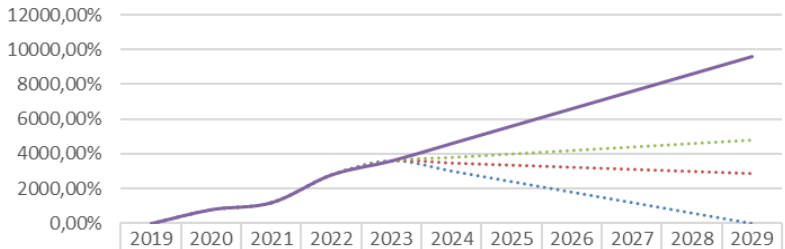

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	8,00	12,00	28,00	36,00	30,00	24,00	18,00	12,00	6,00	-
Proyeksi Optimis	0,00%	8,00	12,00	28,00	36,00	34,80	33,60	32,40	31,20	30,00	28,80
Proyeksi Moderat	0,00%	8,00	12,00	28,00	36,00	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	8,00	12,00	28,00	36,00	46,00	56,00	66,00	76,00	86,00	96,00

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

Nomor Indikator

5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. (Jumlah pernikahan dini sebelum usia ……tahun)

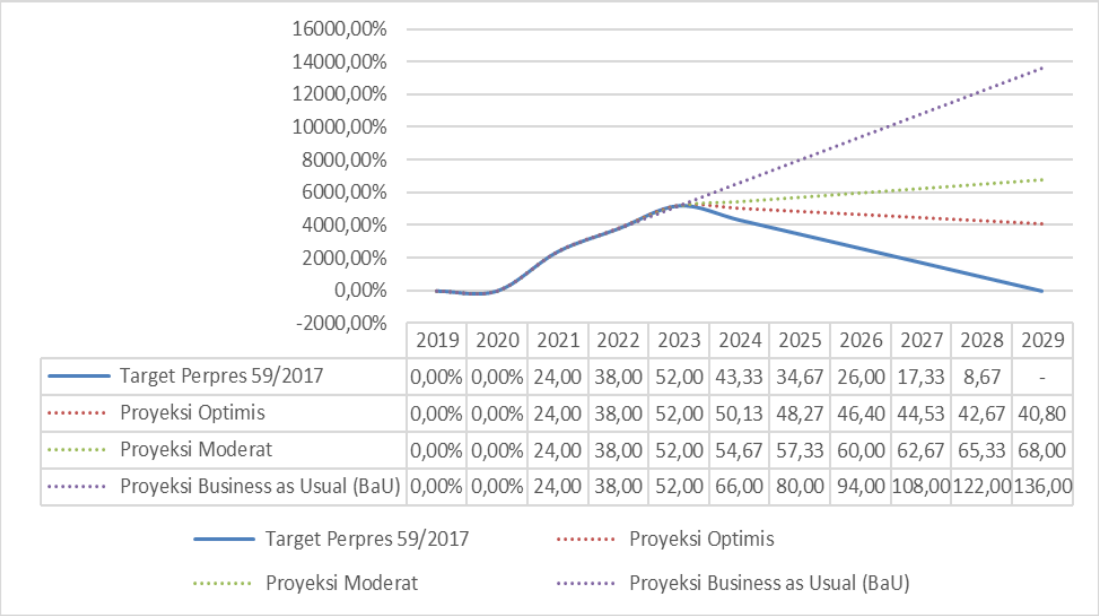

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	0,00%	24,00	38,00	52,00	43,33	34,67	26,00	17,33	8,67	-
Proyeksi Optimis	0,00%	0,00%	24,00	38,00	52,00	50,13	48,27	46,40	44,53	42,67	40,80
Proyeksi Moderat	0,00%	0,00%	24,00	38,00	52,00	54,67	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	0,00%	24,00	38,00	52,00	66,00	80,00	94,00	108,00	122,00	136,00

Target :

5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

Nomor Indikator

5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

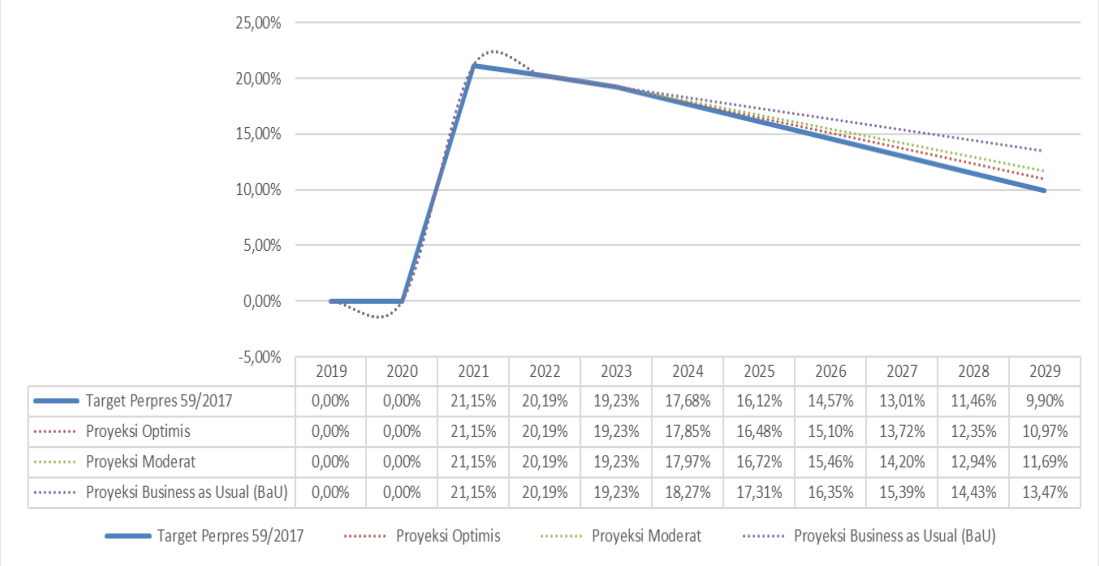

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	0,00%	21,15%	20,19%	19,23%	17,68%	16,12%	14,57%	13,01%	11,46%	9,90%
Proyeksi Optimis	0,00%	0,00%	21,15%	20,19%	19,23%	17,85%	16,48%	15,10%	13,72%	12,35%	10,97%
Proyeksi Moderat	0,00%	0,00%	21,15%	20,19%	19,23%	17,97%	16,72%	15,46%	14,20%	12,94%	11,69%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	0,00%	21,15%	20,19%	19,23%	18,27%	17,31%	16,35%	15,39%	14,43%	13,47%

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak

Tujuan 6. Air bersih dan Sanitasi Layak

Sasaran Strategis:

- Pemenuhan Prasarana, sarana dan utilitas umum, serta rumah layak huni yang terjangkau dan pengentasan Kawasan kumuh.
- Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah Terpadu

Strategi atau Arah Kebijakan

- Pemenuhan Prasarana, sarana dan utilitas umum, serta rumah layak huni yang terjangkau dan pengentasan Kawasan kumuh.
- Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah Terpadu
- Pemenuhan layanan irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perwujudan kemandirian pangan
- Pemenuhan dan pemerataan penyelenggaraan jalan dan simpul transportasi
- Pemenuhan dan pemerataan layanan ketenagalistrikan serta perluasan jangkauan dan keandalan konektivitas digital

Misi

- Misi 5 : Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur dan Sarana-Prasarana Layanan Dasar Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- Misi 8 : Meningkatkan Kesinambungan Pembangunan

Target :

6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Nomor Indikator

6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

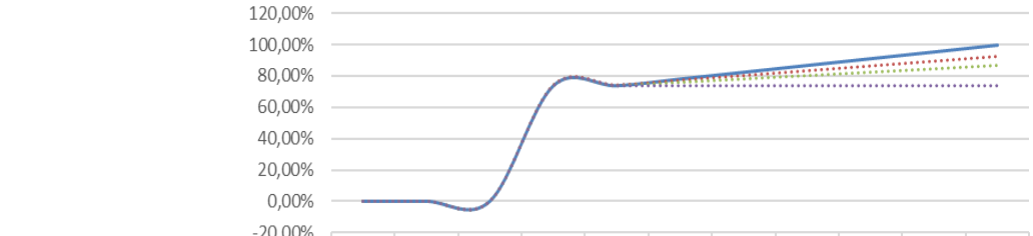

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	0,00%	0,00%	74,00%	74,00%	78,33%	82,67%	87,00%	91,33%	95,67%	100,00%
Proyeksi Optimis	0,00%	0,00%	0,00%	74,00%	74,00%	77,03%	80,07%	83,10%	86,13%	89,17%	92,20%
Proyeksi Moderat	0,00%	0,00%	0,00%	74,00%	74,00%	76,17%	78,33%	80,50%	82,67%	84,83%	87,00%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	0,00%	0,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%	74,00%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

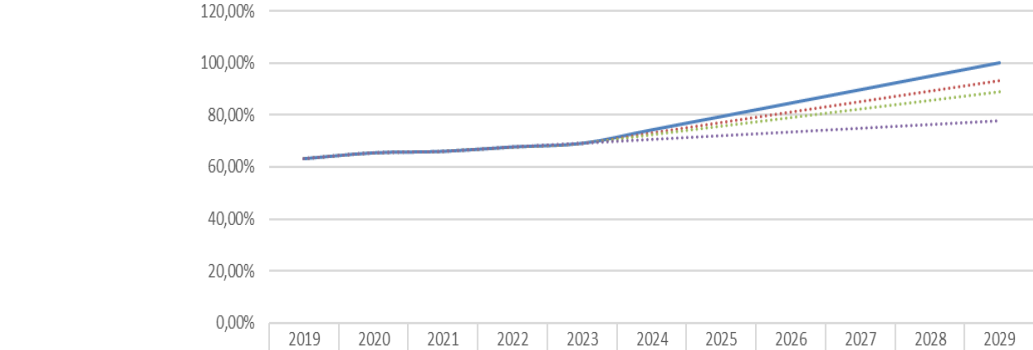

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	63,35%	65,58%	66,15%	67,83%	69,23%	74,36%	79,48%	84,61%	89,74%	94,87%	100,00%
Proyeksi Optimis	63,35%	65,58%	66,15%	67,83%	69,23%	73,24%	77,25%	81,26%	85,27%	89,28%	93,29%
Proyeksi Moderat	63,35%	65,58%	66,15%	67,83%	69,23%	72,49%	75,76%	79,02%	82,28%	85,55%	88,81%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	63,35%	65,58%	66,15%	67,83%	69,23%	70,63%	72,03%	73,43%	74,83%	76,23%	77,63%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial
1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.03.07 Program Pengembangan Permukiman
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
1.03.02 Program Pengelolaan Sumberdaya Air

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Strategis:

- Terwujudnya masyarakat yang hidup layak dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM

Strategi atau Arah Kebijakan

- Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian daerah
- Percepatan transformasi ekonomi hijau
- Percepatan pembangunan perekonomian daerah
- Pemantapan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Penguatan leading sector pembangunan perekonomian daerah
- Perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis komoditas unggulan daerah
- Mewujudkan ekonomi daerah yang produktif dan kompetitif
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
- Penguatan pengendalian inflasi daerah.
- Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumaha wilayah
- Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Misi

- Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Berbasis Digital
- Misi 4 : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- Misi 8 : Meningkatkan Kesinambungan Pembangunan

Target :

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Nomor Indikator

8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita.

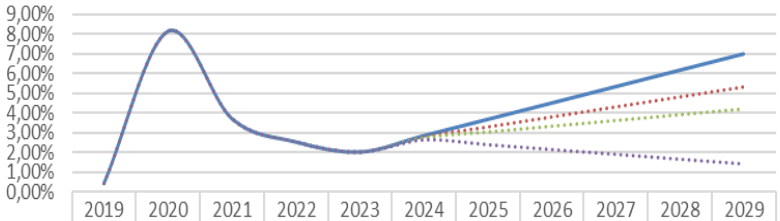

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,43%	8,15%	3,71%	2,53%	2,02%	2,85%	3,68%	4,51%	5,34%	6,17%	7,00%
Proyeksi Optimis	0,43%	8,15%	3,71%	2,53%	2,02%	2,79%	3,29%	3,80%	4,31%	4,82%	5,32%
Proyeksi Moderat	0,43%	8,15%	3,71%	2,53%	2,02%	2,74%	3,04%	3,33%	3,62%	3,92%	4,21%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,43%	8,15%	3,71%	2,53%	2,02%	2,64%	2,39%	2,15%	1,90%	1,66%	1,42%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB)

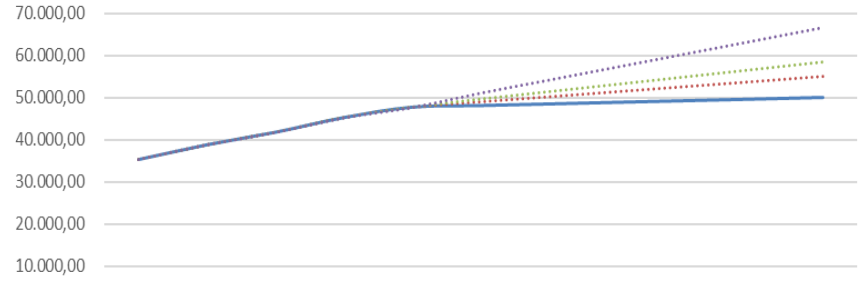

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	35.399,83	38.880,84	41.827,60	45.280,40	47.723,89	48.103,24	48.482,59	48.861,95	49.241,30	49.620,65	50.000,00
Proyeksi Optimis	35.399,83	38.880,84	41.827,60	45.280,40	47.723,89	49.013,31	50.210,29	51.407,27	52.604,24	53.801,22	54.998,20
Proyeksi Moderat	35.399,83	38.880,84	41.827,60	45.280,40	47.723,89	49.620,03	51.362,09	53.104,15	54.846,21	56.588,27	58.330,33
Proyeksi Business as Usual (BaU)	35.399,83	38.880,84	41.827,60	45.280,40	47.723,89	51.136,82	54.241,58	57.346,35	60.451,12	63.555,89	66.660,66

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Nomor Indikator

8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.

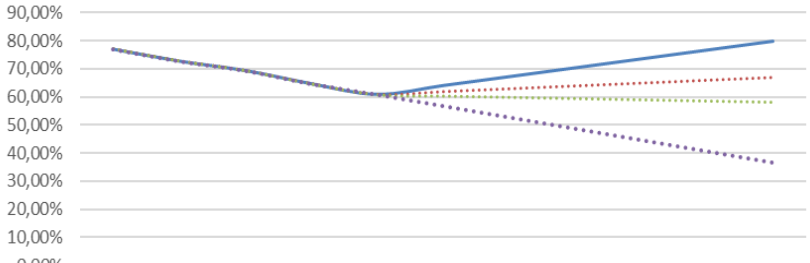

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	77,14%	72,85%	69,46%	64,72%	60,88%	64,07%	67,25%	70,44%	73,63%	76,81%	80,00%
Proyeksi Optimis	77,14%	72,85%	69,46%	64,72%	60,88%	61,89%	62,90%	63,91%	64,92%	65,94%	66,95%
Proyeksi Moderat	77,14%	72,85%	69,46%	64,72%	60,88%	60,44%	60,00%	59,56%	59,12%	58,68%	58,25%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	77,14%	72,85%	69,46%	64,72%	60,88%	56,82%	52,75%	48,69%	44,62%	40,56%	36,49%

Target Perpres 59/2017 Proyeksi Optimis Proyeksi Moderat Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.

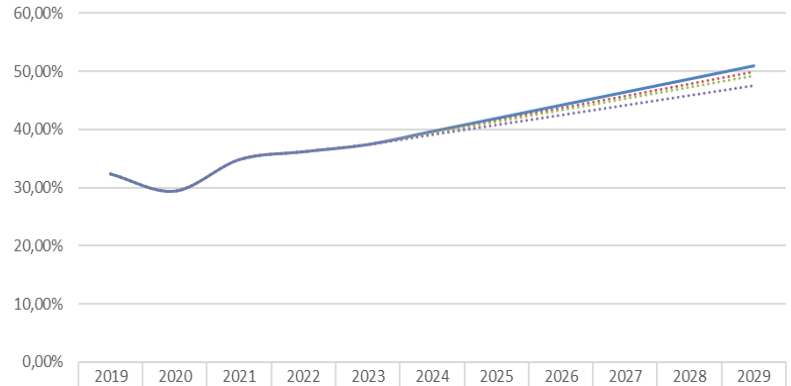

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	32,32%	29,35%	34,80%	36,16%	37,40%	39,67%	41,93%	44,20%	46,47%	48,73%	51,00%
Proyeksi Optimis	32,32%	29,35%	34,80%	36,16%	37,40%	39,50%	41,59%	43,69%	45,78%	47,88%	49,97%
Proyeksi Moderat	32,32%	29,35%	34,80%	36,16%	37,40%	39,38%	41,36%	43,35%	45,33%	47,31%	49,29%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	32,32%	29,35%	34,80%	36,16%	37,40%	39,10%	40,79%	42,49%	44,19%	45,89%	47,58%

Target Perpres 59/2017 Proyeksi Optimis Proyeksi Moderat Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.

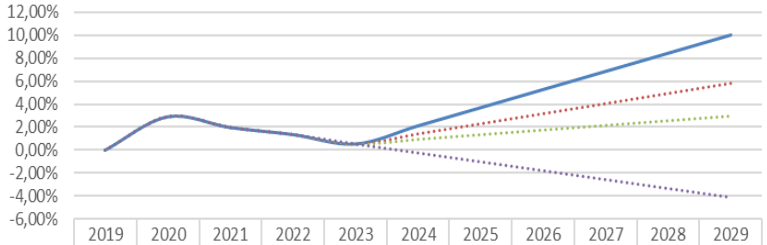

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	2,90%	1,97%	1,36%	0,54%	2,11%	3,69%	5,27%	6,85%	8,42%	10,00%
Proyeksi Optimis	0,00%	2,90%	1,97%	1,36%	0,54%	1,41%	2,28%	3,16%	4,03%	4,90%	5,78%
Proyeksi Moderat	0,00%	2,90%	1,97%	1,36%	0,54%	0,94%	1,34%	1,75%	2,15%	2,55%	2,96%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	2,90%	1,97%	1,36%	0,54%	-0,23%	-1,00%	-1,77%	-2,54%	-3,31%	-4,08%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.04.02 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
5.03.02 Program Kepegawaian Daerah
2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja
2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja

Tujuan 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Sasaran Strategis:

- Terwujudnya masyarakat yang hidup layak dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM

Strategi atau Arah Kebijakan

- Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian daerah
- Percepatan transformasi ekonomi hijau
- Percepatan pembangunan perekonomian daerah
- Pemantapan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Penguatan leading sector pembangunan perekonomian daerah
- Perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis komoditas unggulan daerah
- Mewujudkan ekonomi daerah yang produktif dan kompetitif
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan

alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
- Penguatan pengendalian inflasi daerah.
- Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumaha wilayah
- Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Misi

- Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Berbasis Digital
- Misi 4 : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- Misi 8 : Meningkatkan Kesinambungan Pembangunan

Target :

9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Nomor Indikator

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.

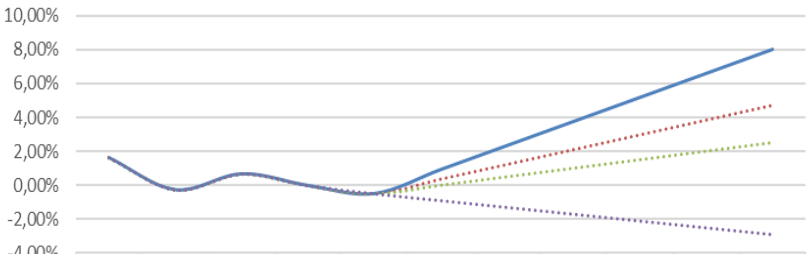

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	1,62%	-0,28%	0,66%	-0,03%	-0,51%	0,91%	2,33%	3,75%	5,16%	6,58%	8,00%
Proyeksi Optimis	1,62%	-0,28%	0,66%	-0,03%	-0,51%	0,36%	1,24%	2,11%	2,98%	3,85%	4,73%
Proyeksi Moderat	1,62%	-0,28%	0,66%	-0,03%	-0,51%	0,00%	0,51%	1,02%	1,52%	2,03%	2,54%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	1,62%	-0,28%	0,66%	-0,03%	-0,51%	-0,91%	-1,31%	-1,71%	-2,11%	-2,52%	-2,92%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

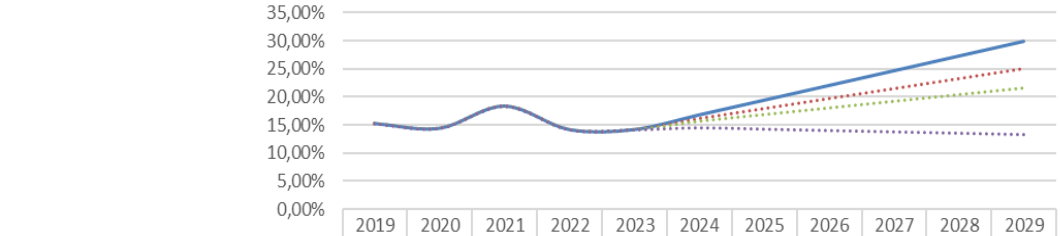

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	15,28%	14,42%	18,39%	14,18%	14,18%	16,82%	19,45%	22,09%	24,73%	27,36%	30,00%
Proyeksi Optimis	15,28%	14,42%	18,39%	14,18%	14,18%	16,14%	17,91%	19,68%	21,46%	23,23%	25,00%
Proyeksi Moderat	15,28%	14,42%	18,39%	14,18%	14,18%	15,69%	16,88%	18,08%	19,28%	20,47%	21,67%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	15,28%	14,42%	18,39%	14,18%	14,18%	14,56%	14,31%	14,07%	13,83%	13,58%	13,34%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.

Nomor Indikator

9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.

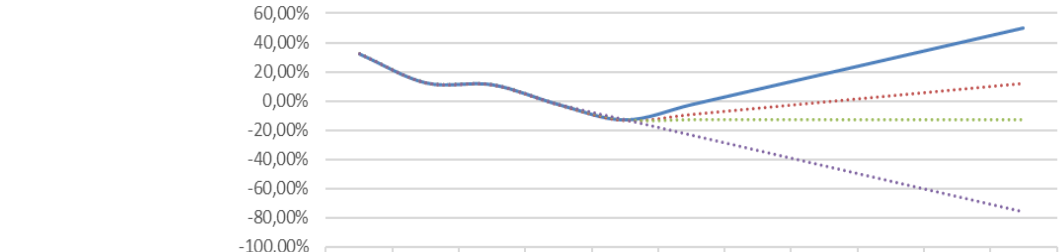

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	32,12%	12,31%	11,05%	-2,58%	-13,11%	-2,59%	7,93%	18,44%	28,96%	39,48%	50,00%
Proyeksi Optimis	32,12%	12,31%	11,05%	-2,58%	-13,11%	-8,91%	-4,71%	-0,50%	3,70%	7,90%	12,10%
Proyeksi Moderat	32,12%	12,31%	11,05%	-2,58%	-13,11%	-13,12%	-13,13%	-13,14%	-13,14%	-13,15%	-13,16%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	32,12%	12,31%	11,05%	-2,58%	-13,11%	-23,65%	-34,18%	-44,72%	-55,25%	-65,79%	-76,32%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

Nomor Indikator

9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. (proporsi anggaran litbang terhadap APBD)

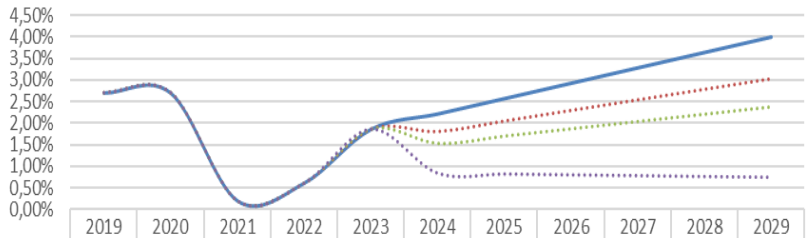

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	2,71%	2,71%	0,21%	0,62%	1,87%	2,22%	2,58%	2,93%	3,29%	3,64%	4,00%
Proyeksi Optimis	2,71%	2,71%	0,21%	0,62%	1,87%	1,81%	2,05%	2,30%	2,54%	2,78%	3,03%
Proyeksi Moderat	2,71%	2,71%	0,21%	0,62%	1,87%	1,54%	1,70%	1,87%	2,04%	2,21%	2,38%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	2,71%	2,71%	0,21%	0,62%	1,87%	0,85%	0,83%	0,81%	0,79%	0,77%	0,75%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.04.02 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja
2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja
2.07.05 Program Hubungan Industrial
2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

Tujuan 10. Mengurangi Ketimpangan

Sasaran Strategis:

- Terwujudnya masyarakat yang hidup layak dan berkualitas
- Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM

Strategi atau Arah Kebijakan

- Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Peningkatan kapasitas kinerja perekonomian daerah
- Percepatan transformasi ekonomi hijau
- Percepatan pembangunan perekonomian daerah

- Pemantapan ekonomi unggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA
- Penguatan leading sector pembangunan perekonomian daerah
- Perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis komoditas unggulan daerah
- Mewujudkan ekonomi daerah yang produktif dan kompetitif
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
- Penguatan pengendalian inflasi daerah.
- Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumaha wilayah
- Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Misi

- Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Berbasis Digital
- Misi 6 Mengembangkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- Misi 8 : Meningkatkan Kesinambungan Pembangunan

Target :

10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Nomor Indikator

10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. (Angka kemiskinan)

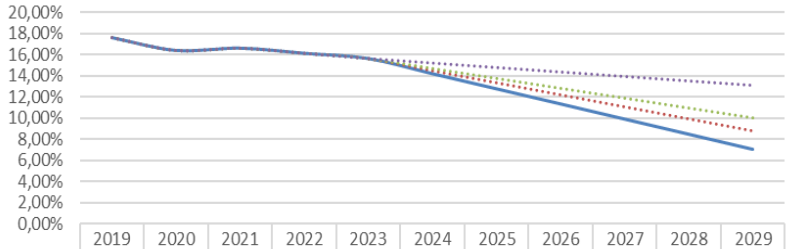

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	17,60%	16,39%	16,60%	16,12%	15,62%	14,18%	12,75%	11,31%	9,87%	8,44%	7,00%
Proyeksi Optimis	17,60%	16,39%	16,60%	16,12%	15,62%	14,49%	13,35%	12,22%	11,09%	9,96%	8,82%
Proyeksi Moderat	17,60%	16,39%	16,60%	16,12%	15,62%	14,69%	13,76%	12,83%	11,90%	10,97%	10,04%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	17,60%	16,39%	16,60%	16,12%	15,62%	15,20%	14,77%	14,35%	13,93%	13,51%	13,08%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

10.1.1 (d) Jumlah Desa Mandiri.

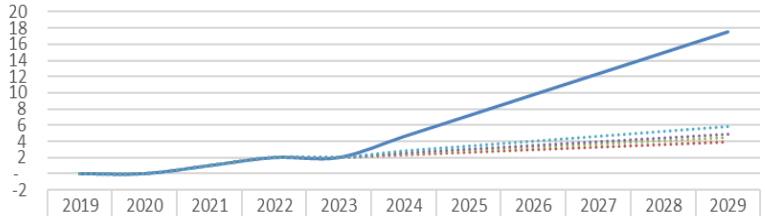

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target RPJPN 2045	-	-	1	2	2	5	7	10	12	15	18
Target Perpres 59/2017	-	-	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Proyeksi Optimis	-	-	1	2	2	2	3	3	4	4	4
Proyeksi Moderat	-	-	1	2	2	3	3	3	4	4	5
Proyeksi Business as Usual (BaU)	-	-	1	2	2	3	3	4	5	5	6

Target RPJPN 2045 · Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

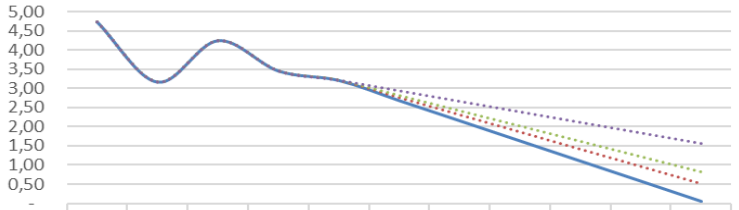

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	4,74	3,17	4,25	3,46	3,22	2,69	2,16	1,64	1,11	0,59	0,06
Proyeksi Optimis	4,74	3,17	4,25	3,46	3,22	2,76	2,31	1,86	1,41	0,96	0,51
Proyeksi Moderat	4,74	3,17	4,25	3,46	3,22	2,81	2,41	2,01	1,61	1,21	0,81
Proyeksi Business as Usual (BaU)	4,74	3,17	4,25	3,46	3,22	2,94	2,66	2,39	2,11	1,84	1,56

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. (persentase penduduk miskin di desa tertinggal)

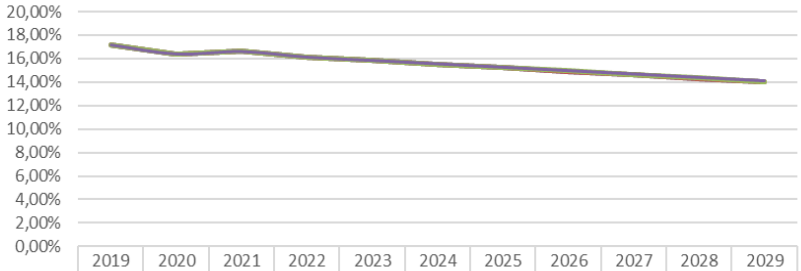

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	17,16%	16,39%	16,60%	16,12%	15,84%	15,53%	15,23%	14,92%	14,61%	14,31%	14,00%
Proyeksi Optimis	17,16%	16,39%	16,60%	16,12%	15,84%	15,54%	15,24%	14,93%	14,63%	14,33%	14,03%
Proyeksi Moderat	17,16%	16,39%	16,60%	16,12%	15,84%	15,54%	15,24%	14,94%	14,64%	14,35%	14,05%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	17,16%	16,39%	16,60%	16,12%	15,84%	15,55%	15,26%	14,97%	14,68%	14,39%	14,09%

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial
2.13.02 Program Penataan Desa
2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa
2.13.08 Program Pembangunan Kampung dan Perkampungan

Tujuan 16. Perdamaian keadilan dan Kelembagaan yang kuat

Sasaran Strategis:

- Terwujudnya Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
- Terwujudnya masyarakat yang hidup layak dan berkualitas
- Terwujudnya Kesinambungan Pembangunan

Strategi atau Arah Kebijakan

- Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih,dan berorientasi pelayanan
- Percepatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih,dan berorientasi pelayanan
- Penguatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih,dan berorientasi pelayanan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berorientasi pelayanan
- Penguatan dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme.

- Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal
- Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses
- perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
- Penguatan integritas partai politik.
- Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial

Misi

- Misi 3 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berbasis Teknologi
- Misi 4 : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- Misi 8 : Meningkatkan Kesinambungan Pembangunan

Target :

16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Nomor Indikator

16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

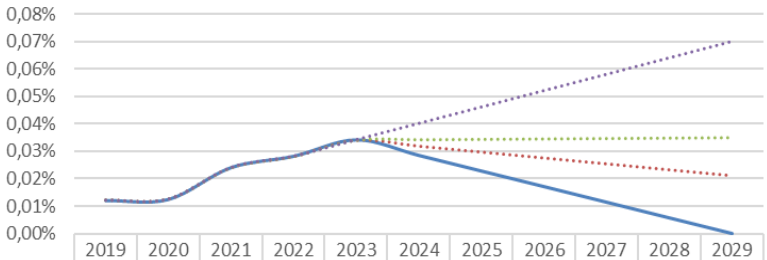

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%
Proyeksi Optimis	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%
Proyeksi Moderat	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,01%	0,01%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,07%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

Nomor Indikator

16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

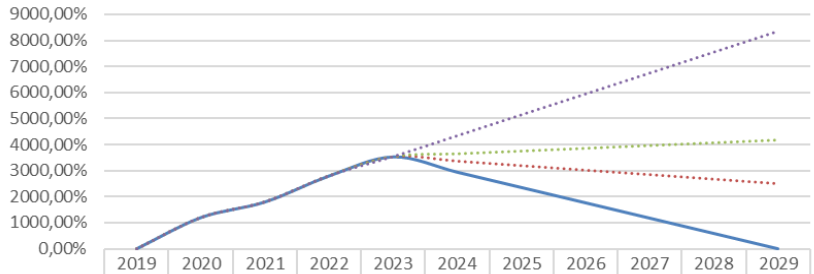

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	12,00	18,00	28,00	35,33	29,44	23,56	17,67	11,78	5,89	-
Proyeksi Optimis	0,00%	12,00	18,00	28,00	35,33	33,61	31,89	30,17	28,44	26,72	25,00
Proyeksi Moderat	0,00%	12,00	18,00	28,00	35,33	36,39	37,44	38,50	39,56	40,61	41,67
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	12,00	18,00	28,00	35,33	43,33	51,33	59,33	67,33	75,33	83,33

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

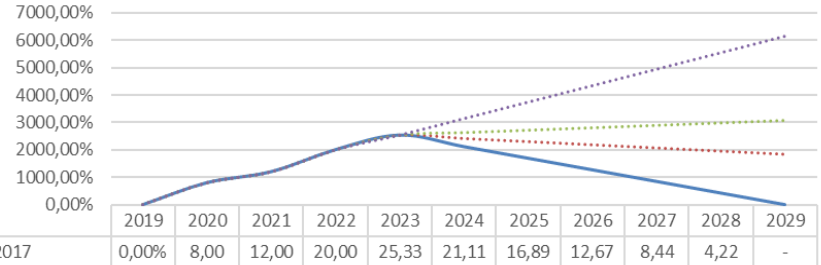

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	8,00	12,00	20,00	25,33	21,11	16,89	12,67	8,44	4,22	-
Proyeksi Optimis	0,00%	8,00	12,00	20,00	25,33	24,18	23,02	21,87	20,71	19,56	18,40
Proyeksi Moderat	0,00%	8,00	12,00	20,00	25,33	26,22	27,11	28,00	28,89	29,78	30,67
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	8,00	12,00	20,00	25,33	31,33	37,33	43,33	49,33	55,33	61,33

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Nomor Indikator

16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

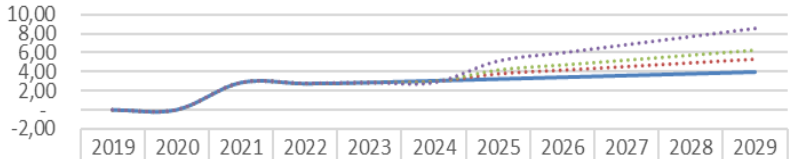

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	-	-	2,88	2,78	2,88	3,07	3,25	3,44	3,63	3,81	4,00
Proyeksi Optimis	-	-	2,88	2,78	2,88	3,00	3,81	4,20	4,59	4,97	5,36
Proyeksi Moderat	-	-	2,88	2,78	2,88	2,96	4,19	4,71	5,23	5,75	6,27
Proyeksi Business as Usual (BaU)	-	-	2,88	2,78	2,88	2,85	5,12	5,97	6,83	7,68	8,54

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Nomor Indikator

16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

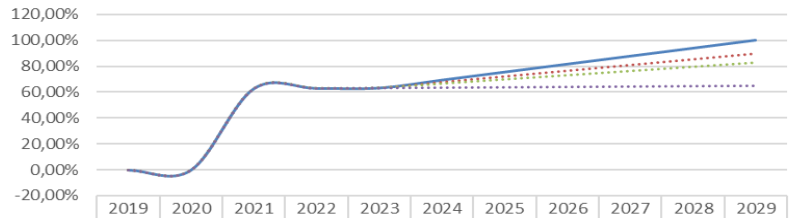

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	0,00%	62,61%	62,90%	63,19%	69,33%	75,46%	81,60%	87,73%	93,87%	100,00%
Proyeksi Optimis	0,00%	0,00%	62,61%	62,90%	63,19%	67,57%	71,95%	76,33%	80,72%	85,10%	89,48%
Proyeksi Moderat	0,00%	0,00%	62,61%	62,90%	63,19%	66,40%	69,62%	72,83%	76,04%	79,25%	82,47%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	0,00%	62,61%	62,90%	63,19%	63,48%	63,77%	64,06%	64,35%	64,64%	64,93%

Target Perpres 59/2017 — Proyeksi Optimis — Proyeksi Moderat — Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

Nomor Indikator

16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

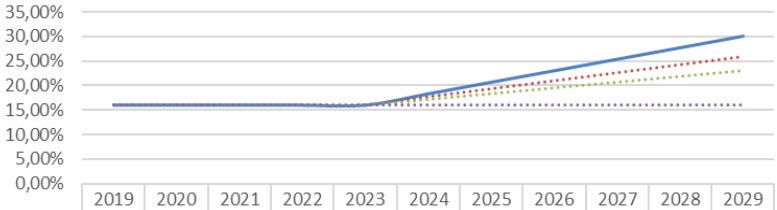

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	18,33%	20,67%	23,00%	25,33%	27,67%	30,00%
Proyeksi Optimis	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	17,63%	19,27%	20,90%	22,53%	24,17%	25,80%
Proyeksi Moderat	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	17,17%	18,33%	19,50%	20,67%	21,83%	23,00%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

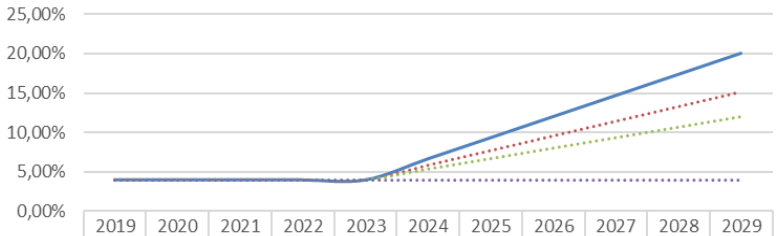

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	6,67%	9,33%	12,00%	14,67%	17,33%	20,00%
Proyeksi Optimis	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,87%	7,73%	9,60%	11,47%	13,33%	15,20%
Proyeksi Moderat	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,33%	6,67%	8,00%	9,33%	10,67%	12,00%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Nomor Indikator

16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.

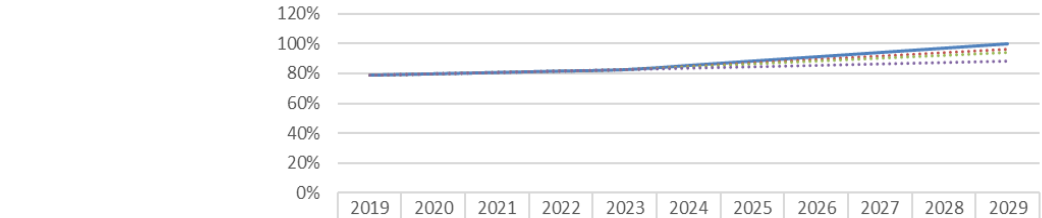

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	79%	80%	81%	82%	83%	86%	88%	91%	94%	97%	100%
Proyeksi Optimis	79%	80%	81%	82%	83%	85%	87%	90%	92%	94%	96%
Proyeksi Moderat	79%	80%	81%	82%	83%	85%	87%	88%	90%	92%	94%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	79%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%	86%	87%	88%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

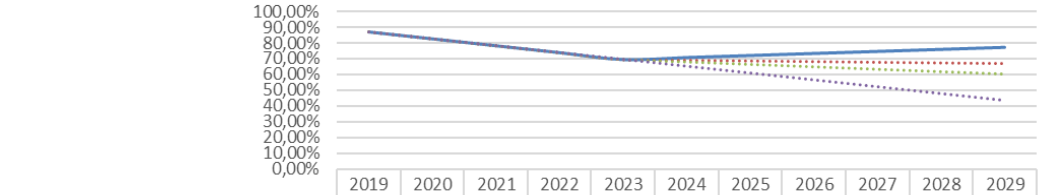

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	87,09%	82,74%	78,39%	74,04%	69,69%	70,98%	72,26%	73,55%	74,83%	76,12%	77,40%
Proyeksi Optimis	87,09%	82,74%	78,39%	74,04%	69,69%	69,28%	68,88%	68,47%	68,07%	67,66%	67,26%
Proyeksi Moderat	87,09%	82,74%	78,39%	74,04%	69,69%	68,16%	66,63%	65,09%	63,56%	62,03%	60,50%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	87,09%	82,74%	78,39%	74,04%	69,69%	65,34%	60,99%	56,64%	52,29%	47,94%	43,59%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Nomor Indikator

16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

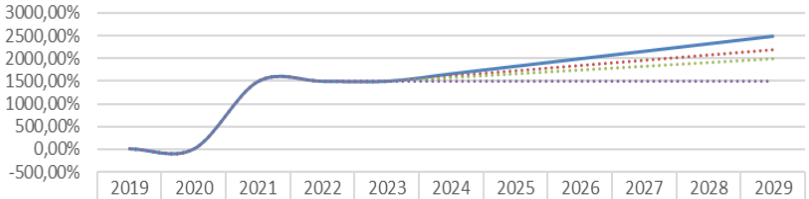

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	0,00%	0,00%	15,00	15,00	15,00	16,67	18,33	20,00	21,67	23,33	25,00
Proyeksi Optimis	0,00%	0,00%	15,00	15,00	15,00	16,17	17,33	18,50	19,67	20,83	22,00
Proyeksi Moderat	0,00%	0,00%	15,00	15,00	15,00	15,83	16,67	17,50	18,33	19,17	20,00
Proyeksi Business as Usual (BaU)	0,00%	0,00%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Target Perpres 59/2017 Proyeksi Optimis Proyeksi Moderat Proyeksi Business as Usual (BaU)

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

1.05.02 Program Peningkatan, ketentraman dan Ketertiban Umum
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan
2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana
7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk
2.12.03 Program Pencatatan Sipil
2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Sasaran Strategis:

- Meningkatnya kualitas dan daya saing SDM
- Terwujudnya kesinambungan Pembangunan
- Meningkatknya implementasi kearifan local dalam aktifitas Pembangunan
- Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik

Strategi atau Arah Kebijakan

- Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih,dan berorientasi pelayanan
- Percepatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih,dan berorientasi pelayanan
- Penguatan kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih,dan berorientasi pelayanan
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berorientasi pelayanan
- Penguatan dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme.
- Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal
- Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses
- perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
- Penguatan integritas partai politik.
- Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial

Misi

- Misi 3 : Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Berbasis Teknologi
- Misi 4 : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- Misi 8 : Meningkatkan Kesinambungan Pembangunan

Target :

17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Nomor Indikator

17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

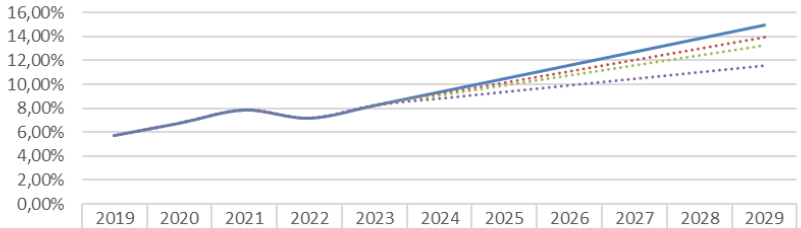

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	5,76%	6,79%	7,89%	7,21%	8,28%	9,40%	10,52%	11,64%	12,76%	13,88%	15,00%
Proyeksi Optimis	5,76%	6,79%	7,89%	7,21%	8,28%	9,22%	10,17%	11,12%	12,07%	13,02%	13,96%
Proyeksi Moderat	5,76%	6,79%	7,89%	7,21%	8,28%	9,11%	9,94%	10,77%	11,61%	12,44%	13,27%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	5,76%	6,79%	7,89%	7,21%	8,28%	8,82%	9,37%	9,91%	10,46%	11,00%	11,55%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Nomor Indikator

17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.(Pendapatan Asli Daerah)

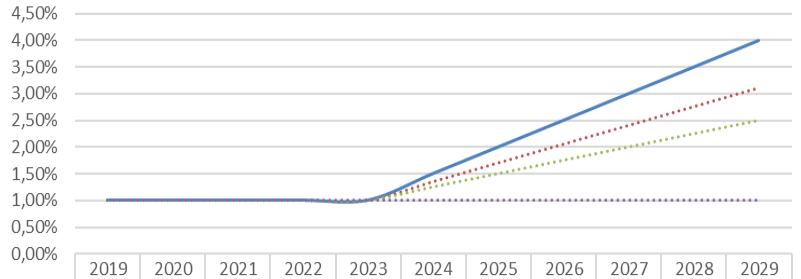

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%
Proyeksi Optimis	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,35%	1,70%	2,05%	2,40%	2,75%	3,10%
Proyeksi Moderat	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Target :

17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

Nomor Indikator

17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.

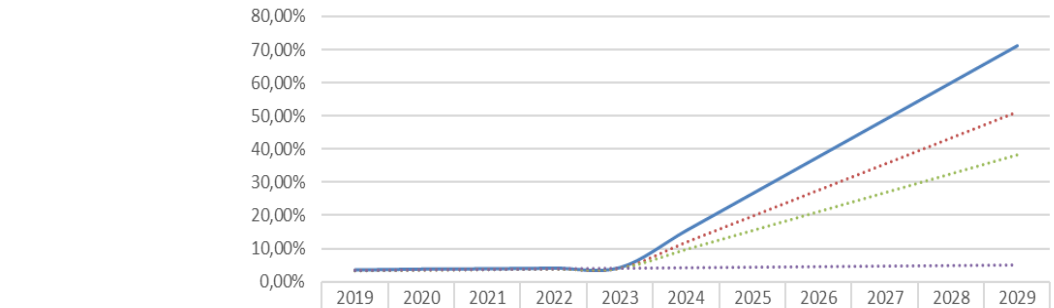

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Perpres 59/2017	3,46%	3,70%	3,80%	4,00%	4,17%	15,31%	26,45%	37,59%	48,72%	59,86%	71,00%
Proyeksi Optimis	3,46%	3,70%	3,80%	4,00%	4,17%	12,02%	19,87%	27,72%	35,56%	43,41%	51,26%
Proyeksi Moderat	3,46%	3,70%	3,80%	4,00%	4,17%	9,83%	15,48%	21,14%	26,79%	32,45%	38,10%
Proyeksi Business as Usual (BaU)	3,46%	3,70%	3,80%	4,00%	4,17%	4,34%	4,51%	4,69%	4,86%	5,03%	5,20%

Target Perpres 59/2017 · Proyeksi Optimis · Proyeksi Moderat · Proyeksi Business as Usual (BaU)

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Bidang Urusan Pelaksana Menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023)

5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

BAB VII
PENUTUP

7.1 Isu strategis

Merujuk pada hasil pembahasan yang telah disajikan pada beberapa bab terdahulu, maka isu strategis kabupaten buol adalah sebagai berikut :

a. Isu lingkungan.

Isu lingkungan Kabupaten Buol meliputi :

- Secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup indikatif penyediaan pangan kabupaten Buol sudah Terlampaui. Hanya Kecamatan Tiloan yang ketersediaan pangannya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan pangannya namun secara keseluruhan di Kabupaten Buol Status panganya sudah Terlampaui.
- Aspek daya dukung air masih kondisi surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun pengelolaannya belum optimal.
- Kinerja jasa lingkungan, terutama pada kinerja layanan pengatur pemurnian air di umumnya berada pada rentang rendah dan sedang.
- Kemampuan pengelolaan sampah masih belum mampu mengatasi timbulan sampah, terutama sampah diperkotaan.
- Proyeksi Indeks kualitas Lingkungan Hidup(IKLH) menunjukkan trend yang menurun, terutama disebabkan oleh potensi penurunan indeks kualitas air (IKA).

b. Isu TPB Kabupaten Buol mencakup :

- Masih tingginya angka kemiskinan, jaminan sosial yang belum seluruhnya tercover, indeks risiko bencana yang tinggi (TPB 1)
- Belum meratanya pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak; Kebutuhan kalori minimum yang belum terpenuhi. (TPB 2, TPB 6)
- Belum tercapainya mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan (TPB4)

- Belum optimalnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, kebutuhan untuk pasangan usia subur yang belum terpenuhi (TPB 5)
- Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan PAD (TPB 8,9,17)
- Masih terdapat desa tertinggal yang memerlukan penanganan yang komprehensif (10)
- Belum optimalnya kemitraan berbagai stakeholder untuk pembangunan (TPB 17)

7.2 Analisis Capaian Indikator TPB

Analisis TPB Kabupaten Buol atas 220 indikator yang digunakan merujuk pada permendagri 7 tahun 2018, tentang tatacara pembuatan KLHS, maka capaiannya adalah sebagai berikut:

- Terdapat 37 % indikator yang telah dikerjakan dan telah mencapai target nasional.
- Terdapat 28% indikator yang sudah dikerjakan namun belum mencapai target nasional
- Terdapat 7% indikator yang belum dikerjakan dan belum mencapai target nasional
- Dan terdapat 28 % indikator yang tidak tersedia datanya.

7.3 Rekomendasi dengan atau tanpa Upaya tambahan.

7.3.1 Rekomendasi tanpa upaya tambahan.

Upaya pembangunan telah menghasilkan capaian di Kabupaten Buol yang mana dari 220 indikator, sebanyak 37 % telah mencapat target nasional. Pencapaian target ini melekat pada berbagai Tujuan TPB yang dilaksanakan oleh berbagai OPD terkait. Rekomendasi untuk indikator ini adalah pemerintah daerah dan OPD harus tetap memerlukan pemantauan guna memastikan bahwa proses kerja pada tiap bidang yang relevan dengan indikator akan tetap berjalan dengan baik dan tidak mengalami penurunan kualitas proses.

Capaian terbaik harus tetap laksanakan dan dijadikan acuan sekaligus dilakukan perbaikan secara berkala guna penyesuaian dengan kebutuhan dan tantangan serta regulasi yang berlaku.

7.3.2 Rekomendasi Dengan upaya tambahan.

Upaya tambahan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja capaian indikator TPB, terutama indikator yang telah dikerjakan namun belum mencapai target nasional dan indikator yang tidak ada data. Rekomendasi tersebut adalah :

a. **Indikator tidak ada data**

Indikator	Rekomendasi
Seluruh indikator yang tidak ada data (62 indikator)	a. Perlunya membangun sistem data based di tiap OPD, yang diintegrasikan dengan sistem informasi yang ada di level kabupaten. b. Perlunya capacity building perencana di tiap OPD dalam hal perencanaan dan pengumpulan data teritegrasi terutama sesuai indikator TPB yang akan selalu menjadi dasar penyusunan RPJPD dan RPJMD kabupaten c. Perlunya pengembangan SDM fungsional pengolah data, sehingga data perencanaan dan evaluasi di tiap OPD akan tertangani dengan baik dengan standar keamanan data yang tinggi. Hal ini guna menhindari data yang selalu berpindah seiring dengan proses rotasi dan promosi ASN. d. Perlunya pengembangan kerjasama dengan SDGs Center Perguruan Tinggi dalam edukasi dan pendampingan upaya pencapaian target SGDs per indikator.

b. Indikator telah dikerjakan tetapi belum mencapai target nasional

Penurunan angka kemiskinan	- Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahaan dalam upaya peningatan nilai tambah komoditas lokal - Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas baik melalui koperasi maupun badan usaha desa.

	- Peningkatan Akses terhadap Layanan Keuangan Inklusif, termasuk pendampingan pengelolaan UMKM - Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan secara keseluruhan - Perbaikan Infrastruktur Dasar, terutama pada aspek sanitasi dasar. - Bantuan Sosial Berbasis Data Terpadu, baik dalam konteks pemberian landasan kebutuhan pokok pengembangan usaha. - Pengembangan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan - Pemanfaatan kemitraan dengan berbagai lembaga seperti baznas, filantropi, perusahaan, untuk secara kolaboratif berbagi peran dalam pengentasan kemiskinan.
Peningkatan cakupan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	– Perbaikan databased calon penerima program pada semua sektor ekonomi – Perlunya desain kerjasama antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah melalui PMD dan pemerintah desa dalam mengalokasikan sebagian dana desa untuk perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Peningkatan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. (Persentase rumah tinggal bersanitasi)	– Pemetaan kawasan yang relatif rawan terhadap sanitasi layak. – Inisiasi program jamban keluarga terutama di daerah pedesaan. – Peningkatan kapasitas penyediaan air bersih melalui pipanisasi dari sumber air baku. – Edukasi perilaku hidup sehat melalui kelompok Masyarakat.
Angka Partisipasi Murni (APM) dan APK	– Membangun lebih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. – Menyediakan fasilitas transportasi gratis atau subsidi untuk siswa yang tinggal jauh dari sekolah. – Mengadakan sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan dan APM. – Mendeteksi siswa yang berisiko putus sekolah dan memberikan intervensi dini. – Menyediakan program remedial bagi siswa yang tertinggal dalam pelajaran yang berpotensi tinggal kelas.

	– Pengembangan program kolaborasi dengan instansi terkait (polri, babinsa, tokoh agama) untuk mengatasi angka putus sekolah.
Penurunan Indeks risiko bencana.	– Mengintegrasikan pendidikan tentang bencana ke dalam kurikulum sekolah dan program komunitas. – Melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana secara rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. – Sistem Informasi melalui penggunaan sistem informasi geografis (GIS) untuk analisis risiko dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Penurunan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dan gizi	– **Diversifikasi Pertanian** untuk memastikan ketersediaan berbagai jenis pangan yang kaya akan nutrisi. – Mengadopsi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. – Memberikan subsidi atau bantuan pangan bagi kelompok masyarakat rentan seperti rumah tangga miskin, ibu hamil, dan anak-anak. – Mengembangkan pasar lokal dan pasar tradisional untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pangan segar dan bergizi. – Meningkatkan infrastruktur transportasi untuk memudahkan distribusi pangan ke daerah terpencil. – Mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam kurikulum sekolah dan program pendidikan anak usia dini. – Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan tentang cara memasak dan menyimpan makanan yang benar untuk mempertahankan nilai gizinya. – Memberikan suplementasi zat gizi mikro seperti zat besi, vitamin A, dan yodium kepada kelompok rentan. – Melaksanakan program PMT bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. – Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam program pengendalian stunting melalui program Merdeka belajar mahasiswa.
Penurunan Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	– Pencegahan secara kolaboratif antar aparat dan seluruh stakeholder, termasuk melalui lembaga pendidikan. – Penguatan Penegakan Hukum secara kolaboratof antar semua aparat hukum dan masyarakat terutama penegakan hukum terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba – Diversifikasi Ekonomi terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap perdagangan narkoba

	dengan memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. – Penguatan Penyuluhan dan Intervensi Komunitas melalui pelibatan berbagai komunitas dalam pencegahan narkoba serta pemberdayaan remaja dan pemuda dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari bahaya narkoba melalui program pendidikan dan kegiatan produktif.
Proporsi perempuan dalam parlemen dan pemerintah daerah	– Perlunya Edukasi dan kesadaran perempuan dalam politik melalui diskusi publik, peningkatan kesadaran dan pendidikan politik tentang pentingnya peran perempuan secara luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam politik. – Perlunya peningkatan Pengembangan Kapasitas melalui pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada peran wanita. – Perluasan akses, jaringan dan penggunaan **Teknologi guna** memperkuat advokasi dan kampanye politik perempuan.
Pemenuhan Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	– Peningkatan Akses terhadap Layanan Keluarga Berencana melalui sistem distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), pengembangan sistem mobile untuk menjangkau area yang terpencil. – Pemberdayaan komunitas melalui penguatan kader kesehatan, posyandu, dan organisasi masyarakat lainnya. – Pengembangan dukungan finansial yang cukup dan membangun kemitraan organisasi non pemerintah untuk memperluas akses dan efektivitas program KB.
Peningkatan PDRB per kapita	– Perbaikan iklim investasi dan promosi investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Kabupaten. – Perbaikan infrastruktur dasar, digital dan transportasi guna meningkatkan aksesibiltas dari sumber sumber produktif. – Peningkatan teknologi untuk mendukung pengembangan sektor sektor dasar (pertanian, perikanan, kehutanan) secara intensif. – Pengembangan sektor pariwisata dan pengembangan SDM dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru, dan investasi yang berkelanjutan.

	– Fasilitasi pengembangan UMKM dan start up melalui pendampingan, pengembangan teknologi dan bisnis matching dalam pengembangan potensi bisnis lokal. – Mendorong pengembangan industri pengolahan dalam rangka peningkatan nilai tambah komoditas ungggulan pada semua sektor.
Peningkataan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD	– Peningkatan Efisiensi Pajak dan Retribusi, melalui pengembangan sistem pungutan pajak, memanfaatkan media online dalam perpajakan. – Inisiasi pengembangan ekonomi lokal yang mampu menjadi obyek pungutan pajak seperti pariwisata, industri kreatif, termasuk pengenaan pajak untuk sarang burung walet. – Promosi Investasi dan Pariwisata dalam peningkatan investasi dan pariwisata sehingga menjadi obyek pajak. – Optimalisasi potensi pajak yang ada saat ini dengan menghitung kembali potensi pajak, pemetaan persil lahan dan penyesuaian harga Bumi dan bangunan. – Optimalisasi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk kebijakan bebas bea balik nama untuk kendaraan dari luar daerah sehingga menjadi obyek pajak daerah.
Peningkatan penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	– Perlunya peningkatan Infrastruktur Fisik dengan cara pengembangan jaringan dan peningkatan kapasitas jaringan eksisting guna peningkatan akses dan kapasitas broadband yang sudah ada. – Pengembangan kebijakan Inklusif yakni Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengembangan broadband di daerah pedesaan dan terpencil, termasuk pengaturan untuk memberikan insentif kepada operator untuk membangun infrastruktur di daerah yang kurang terlayani. – Penguatan kemitraan Publik-Privat terutama Kemitraan dengan Operator Swasta untuk membangun dan mengelola infrastruktur broadband secara bersama-sama – Pengembangan skema subsidi oleh pemerintah guna penyediaan jaringan internet terutama di daerah terpencil yang secara ekonomis kurang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 1997. "Ekonomi Pembangunan Edisi Ketiga". Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.

----------, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol, 2020. Kabupaten Buol Dalam Angka. BPS Kabupaten Buol.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol, 2022. Kabupaten Buol Dalam Angka. BPS Kabupaten Buol.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol, 2023. Kabupaten Buol Dalam Angka. BPS Kabupaten Buol.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol, 2024. Kabupaten Buol Dalam Angka. BPS Kabupaten Buol.

Biermann, F., C. Stevens, S. Bernstein, A. Gupta, N. Kabiri, N. Kanie, M. Levy, M. Nilsson, 910 L. Pintér, M. Scobie, and O. R. Young. 2014. Integrating Governance into the 911 Sustainable Development Goals (Earth Systems Governance 912 Project/POST2015/UNU-IAS Policy Brief #3). United Nations University Institute for 913 the Advanced Study of Sustainability, Tokyo.

Darhamsyah, 2023. Peran P3E Terkait Dengan Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananSekretariat Jenderal Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku.

Daud Anwar, 2023. Best Practice dan Diskusi Penyusunan KLHS Daerah. Disampaikan pada Bimbingan Teknis Penyusunan KLHS Kementerian LingkunganHidupdi Kantor P3E Sulawesi Maluku Makassar,

Daud Restuardy, 2023. Arahan Asistensi dan Supervisi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD 2025-2045 dan KLHS RPJMD 2025-2030. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Davis B Gordon ,1993, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.

Friedman. J and Alonso. W, 1978, Regional Development Planning; A Reader M.I.T Press, Cambridge

Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Tentang : Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.69 /Menlhk / Setjen / Kum.1 / 12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2019 Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

Robinson Tarigan, 2005. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Sadono Sukirno, 2013. Makroekonomi Teori Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11.2/8754/Bangda 7 Agustus 2023 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD

Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika serta Pendekatan, Jakarta: Salemba Empat.

Tambunan. (2001). Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Erlangga, Jakarta.

---------- (2006). Pembangunan Ekonomi (Edisi ke 9). Erlangga, Jakarta.

Tri Utomo, Sugeng. 1999. "Pengembangan Wilayah Melalui Pembukaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu". Dalam Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, Teknologi. BPPT, Jakarta.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

KLHS RPJMD

2025-2029 Pemerintah Daerah Kab. Buol